

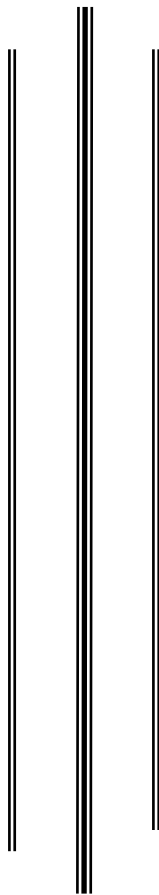
**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KOTA CIMAHI
TAHUN 2012-2017**



**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2012 - 2017**



**PEMERINTAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2013**



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
Nomor : 161 Tahun 2013

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
Nomor : 5 Tahun 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2012 – 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang kreatif, inovatif, responsif, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan berkelanjutan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Cimahi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 80 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 114 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 148 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 91 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 117 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 142 Seri D);

29. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 143 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
dan
WALIKOTA CIMAHI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2012 – 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Cimahi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah.

8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Cimahi adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Cimahi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kota Cimahi.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Cimahi adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kota Cimahi.
15. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja SKPD.
16. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah rencana pembangunan tahunan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

20. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD merupakan:

- a. penjabaran visi, misi dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Walikota, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan RPJPD;
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam :
 - a. Penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - b. Penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk :
 - a. Menetapkan visi, misi dan program Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan Perencanaan Penganggaran;
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, Kota Cimahi dan kabupaten/kota yang berbatasan.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD meliputi :

- a. BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, pola pikir dan sistematika penulisan serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program.
- c. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Menguraikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan keuangan daerah untuk masa 5 (lima) tahun ke depan.
- d. BAB IV : ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

Memuat permasalahan daerah dan isu-isu strategis daerah hasil analisis lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal.
- e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat rumusan visi dan misi Pemerintah Kota Cimahi yang merupakan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2012 – 2017, serta tujuan dan sasaran dari prioritas pembangunan yang akan dicapai.

- f. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- Menguraikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan serta arah kebijakan dari setiap strategi berdasarkan tahapan pembangunan.
- g. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- Menggambarkan arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah dari setiap urusan.
- h. BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
- Memuat hubungan antara urusan pemerintah dengan SKPD, program yang menjadi tanggung jawab SKPD, pencapaian indikator kinerja beserta dengan indikasi pendanaan pada awal sampai dengan akhir periode perencanaan.
- i. BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- Memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa jabatan.
- j. BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- Memuat prinsip – prinsip pedoman masa transisi pada saat pergantian masa jabatan serta kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD.
- k. BAB XI : PENUTUP
- Merupakan penutup dari keseluruhan dokumen RPJMD Kota Cimahi.

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi yang dirumuskan tidak sesuai dengan mekanisme dan perubahan peraturan perundang-undangan, serta terjadi perubahan yang mendasar seperti terjadinya bencana alam, krisis ekonomi atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
 - b. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan kepada Pimpinan DPRD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJMD lama sebelum RPJMD baru tersusun;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.

- (3) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017.
- (4) Dokumen perencanaan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya dokumen perencanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 19 April 2013

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd.

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 23 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

BAMBANG ARIE NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2013 NOMOR 161

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... I-4

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-7

1.3.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-7

1.3.2 Hubungan RPJMD dengan RTRW..... I-9

1.3.3 Hubungan RPJMD dengan KLHS Kota Cimahi..... I-10

1.4 Sistematika Penulisan I-11

1.5 Maksud Dan Tujuan I-12

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi Dan Demografi..... II-1

2.1.1 Kondisi Geografis dan Letak Wilayah II-1

2.1.2 Kondisi Klimatologi II-2

2.1.3 Kondisi Topografi dan Geohidrologi..... II-3

2.1.4 Kondisi Penggunaan lahan..... II-5

2.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah..... II-6

2.1.6 Kawasan Rawan bencana II-7

2.1.7 Kondisi Demografi II-8

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-9

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-11

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II-18

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga..... II-23

2.3 Aspek Pelayanan Umum II-24

2.3.1 Urusan Layanan Wajib II-24

2.3.2 Urusan Layanan Pilihan II-52

2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-58

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah..... II-59

2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur..... II-61

2.4.3 Iklim Berinvestasi II-64

2.4.4 Sumber Daya Manusia II-66

BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	
3.1	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Periode 2007 – 2012	III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD Kota Cimahi.....	III-1
3.1.2	Neraca Daerah	III-7
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Periode 2007 – 2012	III-12
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-12
3.2.2	Analisa Pembiayaan.....	III-15
3.3	Kerangka Pendanaan.....	III-17
3.2.1	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat	III-17
3.2.2	Proyeksi Keuangan Daerah Periode 2012 – 2017	III-18
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	
4.1	Analisis Lingkungan Internal Dan Eksternal	IV-1
4.1.1	Analisis Lingkungan Internal.....	IV-1
4.1.2	Analisis Lingkungan Eksternal.....	IV-3
4.2	Permasalahan Pembangunan	IV-3
4.3	Isu Strategis	IV-7
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	
5.1	Visi Dan Misi Kota Cimahi	V-1
5.2	Tujuan Dan Sasaran Kota Cimahi	V-5
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
6.1	Strategi.....	VI-1
6.2	Arah Kebijakan.....	VI-4
6.2.1	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2013).....	VI-5
6.2.2	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2014).....	VI-6
6.2.3	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2015).....	VI-6
6.2.4	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2016).....	VI-7
6.2.5	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2017).....	VI-8
6.3	Kebijakan Kewilayahan	VI-19
6.4	Arah Kebijakan Sistem Inovasi Kota Cimahi.....	VI-24

BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
7.1	Kebijakan Umum Pembangunan Daerah	VII-1
7.2	Program Pembangunan Daerah.....	VII- 10
7.3	Program Prioritas	VII-69
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN	
8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Dan Kebutuhan Pendanaan.....	VIII-1
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	
9.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah.....	IX-1
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	
10.1	Pedoman Transisi	X-1
10.2	Prinsip-Prinsip Kaidah Pelaksanaan	X-1
BAB XI	PENUTUP	
	Penutup.....	XI-1

DAFTAR TABEL

		HAL
1.	Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan	II-1
2.	Tabel 2.2 Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kota Cimahi	II-3
3.	Tabel 2.3 Inventarisasi Sungai Kota Cimahi	II-3
4.	Tabel 2.4 Penggunaan Lahan di Kota Cimahi	II-5
5.	Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011	II-8
6.	Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011.....	II-9
7.	Tabel 2.7 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011.....	II-11
8.	Tabel 2.8 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011.....	II-11
9.	Tabel 2.9 Pertumbuhan PDRB Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011 Adh Berlaku (Hb) dan Adh Konstan (Hk)	II-12
10.	Tabel 2.10 Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Barang dan Jasa	II-13
11.	Tabel 2.11 Pendapatan Perkapita Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011 Adh Berlaku dan Adh Konstan	II-14
12.	Tabel 2.12 Status Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran Kota Cimahi Tahun 2011	II-15
13.	Tabel 2.13 Persentase Penduduk Miskin dan Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011.....	II-17
14.	Tabel 2.14 Angka Melek Huruf Tahun 2011 Per Kecamatan Kota Cimahi	II-17
15.	Tabel 2.15 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2011 Per Kecamatan Kota Cimahi	II-18
16.	Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar (APK) Per Kecamatan Kota Cimahi Tahun 2011.....	II-19
17.	Tabel 2.17 Perkembangan APK Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011	II-20
18.	Tabel 2.18 Angka Partisipasi Murni (APM) Per Kecamatan Kota Cimahi Tahun 2011	II-20
19.	Tabel 2.19 Perkembangan APM Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011	II-20
20.	Tabel 2.20 Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Per Kecamatan Kota Cimahi Tahun 2011	II-21
21.	Tabel 2.21 Perkembangan Angka Harapan Hidup Wilayah Bandung Raya Tahun 2007 – 2011.....	II-21
22.	Tabel 2.22 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2007 – 2011 Kota Cimahi	II-22
23.	Tabel 2.23 Status Gizi Balita di Kota Cimahi Tahun 2007-2011.....	II-22
24.	Tabel 2.24 Perkembangan Grup Kesenian Kota Cimahi Tahun 2006 – 2010	II-23
25.	Tabel 2.25 Jumlah Gedung dan Lapangan Olahraga Kota Cimahi	II-23
26.	Tabel 2.26 Jumlah Kematian Ibu dan Bayi di Kota Cimahi Tahun 2007 Sampai dengan 2011	II-27
27.	Tabel 2.27 Status Gizi Balita di Kota Cimahi Tahun 2007-2011	II-27
28.	Tabel 2.28 Kasus DBD Tahun 2007-2011	II-28
29.	Tabel 2.29 Kualitas Air Bersih dari PDAM di Kota Cimahi	II-30
30.	Tabel 2.30 Dokumen Perencanaan Pembangunan 2008-2012	II-36

31.	Tabel 2.31	Indikator Kependudukan Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011	II-39
32.	Tabel 2.32	Data PSKS Kota Cimahi	II-42
33.	Tabel 2.33	Statistik Ketenagakerjaan Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011	II-43
34.	Tabel 2.34	Rekapitulasi Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah Per Mei 2011	II-44
35.	Tabel 2.35	Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi	II-46
36.	Tabel 2.36	Jumlah PNS Daerah Kota Cimahi Berdasarkan Golongan Tahun 2007 - 2011	II-47
37.	Tabel 2.37	Fraksi DPRD Kota Cimahi Periode 2009-2014	II-48
38.	Tabel 2.38	Jumlah Anggota DPRD Menurut Bidang Kerja dan Komisi-Komisi DPRD Kota Cimahi Periode 2009-2014	II-48
39.	Tabel 2.39	Jumlah Lembaga dan Kader Pembangunan di Kota Cimahi	II-50
40.	Tabel 2.40	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Cimahi Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008 – 2010 (Persen)	II-59
41.	Tabel 2.41	Angka Konsumsi RT Kota Cimahi Tahun 2007 – 2010	II-60
42.	Tabel 2.42	Posisi Kredit Menurut Jenis Penggunaan di Kota Cimahi Tahun 2008 – 2010 (Juta Rp)	II-63
43.	Tabel 2.43	Perkembangan Investasi di Kota Cimahi dan Beberapa Wilayah Pembandingnya Tahun 2006-2011	II-64
44.	Tabel 2.44	Perkembangan, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Cimahi dan Beberapa Wilayah Pembandingnya, 2007-2011.....	II-66
45.	Tabel 2.45	Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Cimahi dan Beberapa Wilayah Pembandingnya, Tahun 2010-2011	II-66
46.	Tabel 3.1	Kinerja Pencapaian Pendapatan Daerah	III-2
47.	Tabel 3.2	Proporsi Sumber Pendapatan Daerah	III-3
48.	Tabel 3.3	Realisasi Belanja Daerah	III-5
49.	Tabel 3.4	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah.....	III-5
50.	Tabel 3.5.	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran.....	III-6
51.	Tabel 3.6	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah	III-8
52.	Tabel 3.7	Rasio Keuangan Daerah	III-11
53.	Tabel 3.8	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III-12
54.	Tabel 3.9	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III-13
55.	Tabel 3.10	Proporsi Belanja Pendidikan	III-14
56.	Tabel 3.11	Penutup Defisit Riil Anggaran	III-15
57.	Tabel 3.12	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran	III-15
58.	Tabel 3.13	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	III-16
59.	Tabel 3.14	Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	III-17
60.	Tabel 3.15	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	III-18
61.	Tabel 3.16	Proyeksi Pendapatan Daerah	III-19
62.	Tabel 3.17	Proyeksi Belanja Daerah	III-22
63.	Tabel 3.18	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	III-23
64.	Tabel 3.19	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah...	III-24
65.	Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012-2017..	V-9
66.	Tabel 6.1	Keterkaitan antara Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan	VI-9

67.	Tabel 6.2	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Cimahi.....	VI-25
68.	Tabel 7.1	Program Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017	VII-11
69.	Tabel 7.2	Program Prioritas Periode 2012 – 2017.....	VII-71
70.	Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Kota Cimahi Tahun 2012-2017.....	VIII-2
71.	Tabel 9.1	Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2007 – 2012	IX-1
72.	Tabel 9.2	Pencapaian MDGs Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2012	IX-3
73.	Tabel 9.3	Indikator Pembangunan Kota Cimahi Berdasarkan RPJMN 2010 – 2014 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013	IX-6
74.	Tabel 9.4	Target Indikator Makro Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017	IX-7
75.	Tabel 9.5	Target Indikator Kinerja Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 Berdasarkan Misi	IX-8
76.	Tabel 9.6	Target Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017	IX-10
77.	Tabel 10.1	Pencapaian dan Target Sasaran Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2007 – 2012	X-1

DAFTAR GAMBAR

		Hal
1.	Gambar 1.1 Diagram Alir Penyusunan RPJMD	I-3
2.	Gambar 1.2 Bagan Hubungan RPJMD Kota Cimahi dengan Dokumen Perencanaan lainnya	I-8
3.	Gambar 1.3 Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	I-10
4.	Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Cimahi	II-2
5.	Gambar 2.2 Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011	II-9
6.	Gambar 2.3 Perbandingan Capaian IPM Kota Cimahi, BMA, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2011	II-10
7.	Gambar 2.4 Grafik Laju Inflasi Kota Cimahi (Pendekatan Kota Bandung)	II-13
8.	Gambar 2.5 Sebaran Penduduk Berpendapatan Rendah Per Kelurahan	II-16
9.	Gambar 2.6 Perbandingan AMH Kota Cimahi, Kab. Bandung, Wilayah Bandung Raya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 – 2011	II-18
10.	Gambar 2.7 Perbandingan RLS Kota Cimahi Kab. Bandung, Wilayah Bandung Raya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 – 2011	II-19
11.	Gambar 2.8 Jenis Rumah yang Menggunakan Septictank Individual dan Komunal ...	II-31
12.	Gambar 2.9 Pengelolaan Air Limbah Domestik (Black Water & Grey Water) di Kota Cimahi	II-32
13.	Gambar 2.10 Saluran Pembuangan dari WC/jamban Disalurkan/Terhubungkan	II-32
14.	Gambar 2.11 Alur Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi	II-33
15.	Gambar 2.12 Jumlah Penduduk dan Jumlah Wajib KTP Kota Cimahi Tahun 2011.....	II-40
16.	Gambar 2.13 Kepala Keluarga di Kota Cimahi Yang Belum dan Sudah Memiliki Kartu Keluarga Siak Tahun 2011	II-40
17.	Gambar 2.14 Plot Perizinan Perusahaan Dengan Menggunakan GIS Tahun 2010.....	II-55
18.	Gambar 6.1 Tahapan Pencapaian Pembangunan Jangka Menengah	VI-9

TABEL 8.1

Indikasi Rencana Program Prioritas Kota Cimahi Tahun 2012-2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
01. PENDIDIKAN																	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD dan TK/RA	Pendidikan	57.00%	60.00%	1,134,362,525	63.00%	1,929,000,000	66.00%	2,016,000,000	69.00%	2,112,000,000	75.00%	2,263,000,000	75%	9,454,362,525	DISDIKPORA
		Fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan PAUD	Pembinaan PAUD		Fasilitasi PAUD		Fasilitasi PAUD		Fasilitasi PAUD		Fasilitasi PAUD		Fasilitasi PAUD		Fasilitasi PAUD		DISDIKPORA
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	Pendidikan	100.14%	100.00%	24,621,842,470	100.00%	26,045,000,000	100.00%	27,937,000,000	100.00%	29,963,000,000	100.00%	33,959,000,000	100.00%	142,525,842,470	DISDIKPORA
		Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs		87.79%	88%		89%		90%		91%		92%		92%		DISDIKPORA
		Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI		92.01%	93%		94%		95%		96%		97%		97%		DISDIKPORA
		Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs		69.84%	70%		71%		72%		73%		74%		74%		DISDIKPORA
		angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs		84%	90%		95%		100%		100%		100%		100%		DISDIKPORA
		rasio rombel : siswa SD/MI		1:29	1:30		1:30		1:30		1:30		1:30		1:30		DISDIKPORA
		rasio ruang kelas : rombel SD/MI		1:2	1 : 1.8		1 : 1.7		1 : 1.5		1 : 1.5		1 : 1.5		1 : 1.5		DISDIKPORA
		ruang kelas SD/MI layak pakai		95.49%	96.00%		97.00%		98.00%		99.00%		100.00%		100.00%		DISDIKPORA
		Angka mengulang kelas SD/MI		1.37%	1%		0%		0%		0%		0%		0%		DISDIKPORA
		jumlah siswa SD/MI yang DO		0.13%	0%		0%		0%		0%		0%		0%		DISDIKPORA
		rasio rombel : siswa SMP/MTs		1:28.5	1:30		1:30		1:30		1:30		1:30		1:30		DISDIKPORA
		rasio ruang kelas : rombel SMP/MTs		1:1,3	1 : 1.2		1 : 1.1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		DISDIKPORA
		ruang kelas SMP/MTs layak pakai		93.55%	99.75%		100%		100%		100%		100%		100%		DISDIKPORA
		Angka mengulang kelas SMP/MTs		0.10%	0.05%		0%		0%		0%		0%		0%		DISDIKPORA
		jumlah siswa SMP/MTs yang DO		0.23%	0.00%		0%		0%		0%		0%		0%		DISDIKPORA
		Fasilitasi pembinaan dan pengembangan siswa pendidikan dasar	Pembinaan pendidikan dasar		Fasilitasi pengembangan siswa pendidikan dasar		Fasilitasi pengembangan siswa pendidikan dasar		Fasilitasi pengembangan siswa pendidikan dasar		Fasilitasi pengembangan siswa pendidikan dasar		Fasilitasi pengembangan siswa pendidikan dasar		Fasilitasi pengembangan siswa pendidikan dasar		DISDIKPORA
		Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana	98 perpustakaan SD, 45 perpustakaan SMP; Lab SMP Negeri 10 buah		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar		DISDIKPORA
		kelulusan UN siswa kelas 6 SD		99.00%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DISDIKPORA
		kelulusan UN siswa kelas 6 MI		100.00%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DISDIKPORA
		kelulusan UN siswa kelas 3 SMP		82.00%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DISDIKPORA
		kelulusan UN siswa kelas 3 MTs		97.00%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DISDIKPORA
		Rata-rata nilai UN SD/MI		7.84	7.50		7.70		7.80		7.90		8.00		8.00		DISDIKPORA
		Rata-rata nilai UN SMP/MTs		7.74	7.10		7.20		7.30		7.40		7.50		7.50		DISDIKPORA
		Jumlah bantuan Siswa yang berkebutuhan khusus		1 paket kegiatan pendidikan inklusi	fasilitasi pendidikan inklusi	50,000,000	fasilitasi pendidikan inklusi	144,000,000	fasilitasi pendidikan inklusi	154,000,000	fasilitasi pendidikan inklusi	165,000,000	fasilitasi pendidikan inklusi	181,000,000	fasilitasi pendidikan inklusi	694,000,000	DISDIKPORA
	Program Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf	Pendidikan	99.74%	99.75%	981,657,350	99.75%	982,000,000	99.75%	982,000,000	99.75%	1,037,000,000	99.75%	1,137,000,000	99.75%	5,119,657,350	DISDIKPORA
		Fasilitasi penyelenggaraan paket A, B dan C		penyelenggara n paket A, B dan C	Fasilitasi penyelenggaraa n paket A, B dan C		Fasilitasi penyelenggara an paket A, B dan C		Fasilitasi penyelenggara an paket A, B dan C		Fasilitasi penyelenggara an paket A, B dan C		Fasilitasi penyelenggara an paket A, B dan C		Fasilitasi penyelenggaraan paket A, B dan C		
		Akreditasi lembaga kursus dan keterampilan		44 Lembaga kursus dan keterampilan	terakreditasiny a 1 lembaga kursus dan keterampilan		terakreditasiny a 1 lembaga kursus dan keterampilan		terakreditasiny a 1 lembaga kursus dan keterampilan		terakreditasiny a 1 lembaga kursus dan keterampilan		terakreditasiny a 1 lembaga kursus dan keterampilan		terakreditasinya 5 lembaga kursus dan keterampilan		
		Fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan Non formal		1 kali dalam se tahun	Fasilitasi pendidikan non formal		Fasilitasi pendidikan non formal		Fasilitasi pendidikan non formal		Fasilitasi pendidikan non formal		Fasilitasi pendidikan non formal		Fasilitasi pendidikan non formal		DISDIKPORA
	Program Pendidikan Menengah	Angka partisipasi kasar (APK) SMA/MA/SMK	Pendidikan	81.33%	83%	14,378,965,320	85%	16,423,000,000	88%	16,771,000,000	90%	17,679,000,000	90%	20,142,000,000	90%	85,393,965,320	DISDIKPORA

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					2013		2014		2015		2016		2017					
					target	Rp.	target	Rp	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.				
		Angka partisipasi Murni (APM)		55.79%	60%		62%		65%		68%		70%		70%		DISDIKPORA	
		SMA/MA/SMK															DISDIKPORA	
		angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK		120%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DISDIKPORA	
		rasio rombel : siswa SMA		1 : 34	1 : 34		1 : 34		1 : 33		1 : 32		1 : 32		1 : 32		DISDIKPORA	
		rasio ruang kelas : rombel SMA		1:1	1:1		1:1		1:1		1:1		1:1		1:1		DISDIKPORA	
		ruang kelas SMA layak pakai		97.07%	98.00%		99.00%		100%		100%		100%		100%		DISDIKPORA	
		Angka mengulang kelas SMA		0.22%	0.01%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		DISDIKPORA	
		jumlah siswa SMA yang DO		0.47%	0.25%		0.15%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		DISDIKPORA	
		rasio rombel : siswa MA		1 : 34	1 : 34		1 : 34		1 : 33		1 : 32		1 : 32		1 : 32		DISDIKPORA	
		rasio ruang kelas : rombel MA		1:1.01	1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		DISDIKPORA	
		ruang kelas MA layak pakai		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DISDIKPORA	
		Angka mengulang kelas MA		4.13%	0.02%		0.01%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		DISDIKPORA	
		jumlah siswa MA yang DO		1.79%	0.01%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		DISDIKPORA	
		rasio rombel : siswa SMK		01.36	1 : 34		1 : 34		1 : 33		1 : 32		1 : 32		1 : 32		DISDIKPORA	
		rasio ruang kelas : rombel SMK		1:1.39	1 : 1.30		1 : 1.20		1 : 1.10		1 : 1		1 : 1		1 : 1		DISDIKPORA	
		ruang kelas SMK layak pakai		100.00%	97.31%		98.00%		99%		100%		100%		100%		DISDIKPORA	
		Angka mengulang kelas SMK		0.22%	0.10%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		DISDIKPORA	
		jumlah siswa SMK yang DO		0.47%	0.30%		0.20%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		DISDIKPORA	
		Pemahaman penyelenggaraan pendidikan tentang manajemen berbasis sekolah		1 kali dalam se tahun	Fasilitasi pemahaman MBS		Fasilitasi pemahaman MBS		Fasilitasi pemahaman MBS		Fasilitasi pemahaman MBS		Fasilitasi pemahaman MBS		Fasilitasi pemahaman MBS		DISDIKPORA	
		Fasilitasi pembinaan dan pengembangan siswa pendidikan menengah		1 kali dalam setahun	Fasilitasi pengembangan siswa pendidikan menengah		Fasilitasi pengembangan siswa pendidikan menengah		Fasilitasi pengembangan siswa pendidikan menengah		Fasilitasi pengembangan siswa pendidikan menengah		Fasilitasi pengembangan siswa pendidikan menengah		Fasilitasi pengembangan siswa pendidikan menengah		DISDIKPORA	
		Perekrutan, pelatihan dan pelibatan Relawan Indonesia Berinovasi																
		Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah			Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan mnengah		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan mnengah		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan mnengah		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan mnengah		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan mnengah		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan mnengah		DISDIKPORA	
		10. Perkuatan Sekolah Kejuruan berkualitas setara dengan standar internasional (minimal ASEAN)																
		Pengembangan Kurikulum inovasi dan Teknopreneur																
		kelulusan UN siswa kelas 3 SMA		98.50%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		DISDIKPORA	
		kelulusan UN siswa kelas 3 MA		99.20%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		DISDIKPORA	
		kelulusan UN siswa kelas 3 SMK		83.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		DISDIKPORA	
		Rata-rata UN SMA/MA/SMK		7.35	7.40		7.50		7.60		7.70		7.80		7.80		DISDIKPORA	
		relevansi dan daya saing lulusan siswa pendidikan menengah		4 Mou	2 Mou	46,250,000	2 Mou	48,000,000	2 Mou	48,000,000	2 Mou	48,000,000	2 Mou	49,000,000	10 Mou kerjasama dengan DU/ DI	239,250,000	DISDIKPORA	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru berkualifikasi S1 di tingkan pendidikan dasar dan menengah	Pendidikan			4,236,452,350		237,000,000		240,000,000		240,000,000		246,000,000		5,199,452,350	DISDIKPORA	
		persentase guru SD/MI berpendidikan S1		76.00%	76.00%		77.00%		78.00%		79.00%		80.00%		80.00%		DISDIKPORA	
		persentase guru SMP/MTs berpendidikan S1		89.00%	91.00%		92.00%		93.00%		94.00%		95.00%		95.00%		DISDIKPORA	
		persentase guru SMA/MA/SMK berpendidikan S1		95.74%	96.00%		97.00%		98.00%		99.00%		100.00%		100.00%		DISDIKPORA	
		kompetensi sumberdaya manusia (pendidik)		uji kompetensi bagi guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK	Uji kompetensi bagi tenaga pendidik		Uji kompetensi bagi tenaga pendidik		Uji kompetensi bagi tenaga pendidik		Uji kompetensi bagi tenaga pendidik		Uji kompetensi bagi tenaga pendidik		5 kali uji kompetensi bagi tenaga pendidik		DISDIKPORA	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan	Pendidikan	1 kali dalam setahun (profil)	1	438,200,245	1	538,000,000	1	538,000,000	1	538,000,000	1	551,000,000	5 kali	2,603,200,245	DISDIKPORA	
		Jumlah guru yang bersertifikasi guru SD yang tersertifikasi		1085	kuota		kuota		kuota		kuota		kuota		5 kali sertifikasi guru		DISDIKPORA	
		guru SMP yang tersertifikasi		590	kuota		kuota		kuota		kuota		kuota		5 kali sertifikasi guru		DISDIKPORA	
		guru SMA yang tersertifikasi		477	kuota		kuota		kuota		kuota		kuota		5 kali sertifikasi guru		DISDIKPORA	
		guru SMK yang tersertifikasi		942	kuota		kuota		kuota		kuota		kuota		5 kali sertifikasi guru		DISDIKPORA	
		meningkatkan kapasitas komite sekolah		peningkatan kapasitas komite sekolah	1		1		1		1		1		5 kali		DISDIKPORA	

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
		meningkatnya penyelenggaraan pendidikan yang efisien dan efektif		pembinaan MBS	1		1		1		1		1		5 kali pelaksanaan Manejemen berbasis sekolah		DISDIKPORA
		kerjasama kelembagaan bidang pendidikan		NA	1		1		1		1		1		5 kali kerjasama kelembagaan		DISDIKPORA
02. KESEHATAN																	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	rasio puskesmas/Pustu/ kelurahan	Kesehatan	1 : 46.253	1 : 46.253	4,850,000,000	1 : 45.000	4,320,000,000	1 : 45.000	2,880,000,000	1 : 45.000	1,920,000,000	1 : 45.000	1,968,000,000	1 : 45.000	15,938,000,000	Dinas Kesehatan
									37%		38%		39%		39%		Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kunjungan gakin	Kesehatan	9.22	11%	270,000,000	12%	283,000,000	13%	311,000,000	14%	342,000,000	15%	386,000,000	15%	1,592,000,000	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB)		29,80/1000 KH	29,70 - 29,30	1,510,000,000	29,70 - 29,30	1,489,000,000	29,70 - 29,30	1,747,000,000	29,30 - 29,00	1,922,000,000	29,30 - 29,00	2,167,000,000	29,30 - 29,00	8,835,000,000	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu (AKI)		84,65/100.000 KH	84,57/100.000 KH		84,49/100.000 KH		84,33/100.000 KH		84,25/100.000 KH		84,25/100.000 KH		84,25/100.000 KH		Dinas Kesehatan
		Kunjungan ibu hamil keempat kali telah mendapat pelayanan sesuai standar kebidanan (K4) (SPM)		87.10%	93%		94%		95%		95%		95%		95%		Dinas Kesehatan
		Persalinan oleh tenaga kesehatan (SPM)		88.64%	88%		89%		90%		90.25%		90.50%		90.50%		Dinas Kesehatan
		Kunjungan neonatus (bayi baru lahir umur 0 - 28 hari)		87.95%	88%		89%		90%		91%		92%		92%		Dinas Kesehatan
		Kunjungan bayi (umur 29 hari - 11 bulan) (SPM)		84.74%	93%		94%		95%		96%		97%		97%		Dinas Kesehatan
		Komplikasi Kebidanan yang ditangani		81.77%	70%		75%		80%		81%		82%		82%		Dinas Kesehatan
		Neonatus dengan komplikasi yang ditangani		28.58%	70%		75%		80%		81%		82%		82%		Dinas Kesehatan
		Pelayanan Nifas		80.31%	88%		89%		90%		91%		92%		92%		Dinas Kesehatan
		Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) Kab/Kota		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Cakupan peserta aktif KB (SPM)		76.12%	73%		74%		75%		76%		77%		77%		Dinas Kesehatan
		Sekolah UKS		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/ dokter kecil (SPM)		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
			Puskesmas menjalankan deteksi dini pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular	Persentase posbindu yang menjalankan deteksi dini pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular		100%	100%	720,000,000	100%	858,000,000	100%	834,000,000	100%	918,000,000	100%	1,035,000,000	100%
				17,95%	20%		25%		30%		32.5%		35%		35%		Dinas Kesehatan
Jumlah Kelurahan yang melaksanakan sanitasi Total Berbasis masyarakat				2	4		6		9		12		15		15		Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	Kesehatan	100.00	100%	6,340,289,900	100%	9,527,000,000	100%	10,692,000,000	100%	13,549,000,000	100%	15,153,000,000	100%	55,261,289,900	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin		100.00	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terstandarisasinya pelayanan kesehatan di puskesmas	Kesehatan	-	1 PKM	802,000,000	1 PKM	1,102,000,000	1 PKM	1,000,000,000	1 PKM	1,211,000,000	1 PKM	1,350,000,000	5 PKM	5,465,000,000	Dinas Kesehatan
		kepuasan pengunjung puskesmas		75%	75%		76%		77%		78%		80%		80%		
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan obat	Kesehatan	100%	100%	4,800,000,000	100%	4,800,000,000	100%	5,000,000,000	100%	5,500,000,000	100%	7,380,000,000	100%	27,480,000,000	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Pengawasan terhadap obat tradisional	Kesehatan	30%	45%	89,000,000	50%	96,000,000	55%	106,000,000	60%	115,000,000	65%	128,000,000	65%	534,000,000	Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	industri rumah tangga yang memiliki sertifikat Pangan industri rumah tangga (PIRT)	Kesehatan	79%	80%	67,200,000	85%	145,000,000	90%	158,000,000	95%	175,000,000	100%	195,000,000	100%	740,200,000	Dinas Kesehatan

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia	Kesehatan	30.25%	40%	326,750,000	43%	346,000,000	46%	380,000,000	48%	418,000,000	50%	471,000,000	50%	1,941,750,000	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi kasus HIV	Kesehatan	0.03%	<0.5%	1,056,850,000	<0.5%	1,204,000,000	<0.5%	1,228,000,000	<0.5%	1,350,000,000	<0.5%	1,523,000,000	<0.5%	6,361,850,000	Dinas Kesehatan
		Persentase RS pemerintah menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Penderita DBD yang ditangani (SPM)		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Case Fatality Rate (CFR) < 1 %		0.61%	<1%		< 1%		<1%		<1%		<1%		<1%		Dinas Kesehatan
		Penemuan kasus BTA + (SPM)		68.32%	75%		80%		80%		80%		80%		80%		Dinas Kesehatan
		Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani (SPM)		73.6	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Balita dengan diare yang ditangani (SPM)		73.05	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Kelurahan UCI (SPM)		100%	100%	606,000,000	100%	552,000,000	100%	704,000,000	100%	774,000,000	100%	873,000,000	100%	3,509,000,000	Dinas Kesehatan
		Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun (SPM)		3.29/100.000	≥ 2/ 100.000		≥ 2/ 100.000		≥ 2/ 100.000		≥ 2/ 100.000		≥ 2/ 100.000		≥ 2/ 100.000		Dinas Kesehatan
		Kelurahan yang mengalami KLB ditangani < 24 jam (SPM)		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Balita gizi buruk mendapat perawatan	Kesehatan	100%	100%	985,000,000	100%	929,000,000	100%	1,011,000,000	100%	1,102,000,000	100%	1,230,000,000	100%	5,257,000,000	Dinas Kesehatan
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi USIA 6-24 bln dari keluarga miskin (SPM)		SPM Kemenkes : 21.35% SPM Kota Cimahi : 100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Cakupan Pemberian Vitamin A		≥ 90%	≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%		Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	1. Pelayanan Gawat Darurat	Kesehatan	≥ 90%	≥ 90%	54,000,000,000	≥ 90%	59,535,000,000	≥ 90%	62,512,000,000	≥ 90%	65,637,000,000	≥ 90%	68,919,000,000	≥ 90%	310,603,000,000	Dinas Kesehatan
		Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		RSUD Cibabat
		Jam buka Pelayanan Gawat Darurat		24 jam	24 Jam		24 Jam		24 Jam		24 Jam		24 Jam		24 Jam		RSUD Cibabat
		Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku :		100%	70%		75%		80%		85%		90%		90%		RSUD Cibabat
		ATLS/BTLS/ACLS/PPGD															RSUD Cibabat
		Ketersediaan tim penanggulangan bencana		Satu Tim	Satu tim		Satu tim		Satu tim		Satu tim		Satu tim		Satu tim		RSUD Cibabat
		Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat		≤ 5 menit	≤ 5 menit		≤ 5 menit		≤ 5 menit		≤ 5 menit		≤ 5 menit		≤ 5 menit		RSUD Cibabat
		Kepuasan pelanggan		80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%		RSUD Cibabat
		Kematian pasien < 24 Jam < 2 perseribu (pindah ke palayanan rawat inap setelah 8 jam)		2‰	2‰		2‰		2‰		2‰		2‰		2‰		RSUD Cibabat
		Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		RSUD Cibabat
		2. Pelayanan Rawat Jalan															RSUD Cibabat
		Dokter spesialis pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		RSUD Cibabat
		Jam buka pelayanan (08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja, kecuali Jum'at, Sabtu 08.00 – 11.00)		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		RSUD Cibabat
		Waktu tunggu rawat jalan		60 menit	60 menit		60 menit		60 menit		60 menit		60 menit		60 menit		RSUD Cibabat
		Kepuasan Pelanggan		90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		RSUD Cibabat
		Rawat Jalan TB															RSUD Cibabat
		Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB.		60%	60%		60%		60%		60%		60%		60%		RSUD Cibabat
		Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS		60%	60%		60%		60%		60%		60%		60%		RSUD Cibabat
		3. Pelayanan Rawat Inap															RSUD Cibabat
		Pemberi pelayanan di Rawat Inap															RSUD Cibabat
		- dr. Spesialis		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		RSUD Cibabat
		- Perawat minimal pendidikan D3		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		RSUD Cibabat

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
		Dokter penanggung jawab Pasien Rawat Inap		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		RSUD Cibabat	
		Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap														RSUD Cibabat	
		- Anak		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		RSUD Cibabat	
		- Penyakit Dalam		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		RSUD Cibabat	
		- Kebidanan		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		RSUD Cibabat	
		- Bedah		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		RSUD Cibabat	
		Jam Visite Dokter Spesialis		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		RSUD Cibabat	
		Kejadian Infeksi Pasca Operasi		≤ 0.93%	≤ 0.93%		≤ 0.93%		≤ 0.93%		≤ 0.93%		≤ 0.93%	≤ 0.93%		RSUD Cibabat	
		Kejadian Infeksi Nosokomial		1.04%	1.04%		1.03%		1.02%		1.01%		1.00%	1.00%		RSUD Cibabat	
		Tidak adanya kejadian Pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		RSUD Cibabat	
		Kematian pasien > 48 jam		≤ 0,24%	≤ 0,24%		≤ 0,24%		≤ 0,24%		≤ 0,24%		≤ 0,24%	≤ 0,24%		RSUD Cibabat	
		Kejadian pulang paksa		≤ 5%	≤ 5%		≤ 5%		≤ 5%		≤ 5%		≤ 5%	≤ 5%		RSUD Cibabat	
		Kepuasan Pelanggan		90%	90%		90%		90%		90%		90%	90%		RSUD Cibabat	
		Rawat Inap TB														RSUD Cibabat	
		- Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopolis TB		≥ 90%	≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%	≥ 90%		RSUD Cibabat	
		- Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS		≥ 90%	≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%	≥ 90%		RSUD Cibabat	
		4. Pelayanan Bedah Sentral														RSUD Cibabat	
		Waktu tunggu operasi elektif		2 hari	2 hari		2 hari		2 hari		2 hari		2 hari	2 hari		RSUD Cibabat	
		Kejadian kematian di meja operasi		≤ 1%	≤ 1%		≤ 1%		≤ 1%		≤ 1%		≤ 1%	≤ 1%		RSUD Cibabat	
		Tidak adanya kejadian Operasi Salah Sisi		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		RSUD Cibabat	
		Tidak adanya kejadian Operasi Salah Orang		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		RSUD Cibabat	
		Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		RSUD Cibabat	
		Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/ lain pada tubuh pasien setelah operasi		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		RSUD Cibabat	
		Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube		≤ 4%	≤ 4%		≤ 4%		≤ 4%		≤ 4%		≤ 4%	≤ 4%		RSUD Cibabat	
		5. Pelayanan Persalinan dan perinotologi (kecuali rumah sakit khusus di luar rumah sakit ibu dan anak)														RSUD Cibabat	
		Kejadian kematian ibu karena persalinan														RSUD Cibabat	
		- Perdarahan ≤ 1 %		≤ 1%	≤ 1%		≤ 1%		≤ 1%		≤ 1%		≤ 1%	≤ 1%		RSUD Cibabat	
		- Pre-eklampsia ≤ 30 %		≤ 30%	≤ 30%		≤ 30%		≤ 30%		≤ 30%		≤ 30%	≤ 30%		RSUD Cibabat	
		- Sepsis ≤ 0.2 %		≤ 0.2%	≤ 0.2%		≤ 0.2%		≤ 0.2%		≤ 0.2%		≤ 0.2%	≤ 0.2%		RSUD Cibabat	
		Pemberi pelayanan persalinan normal														RSUD Cibabat	
		- Dokter Sp. OG		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		RSUD Cibabat	
		- Dokter umum terlatih (Asuhan persalinan normal)		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		RSUD Cibabat	
		- Bidan		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		RSUD Cibabat	
		Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit (Tim PONEK yang terlatih)		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		RSUD Cibabat	
		Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi														RSUD Cibabat	
		- Dokter Sp. OG		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		RSUD Cibabat	
		- Dokter Sp. A		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		RSUD Cibabat	
		- Dokter Sp. An		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		RSUD Cibabat	
		Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr		≥ 75%	≥ 75%		≥ 75%		≥ 75%		≥ 75%		≥ 75%	≥ 75%		RSUD Cibabat	
		Pertolongan Persalinan melalui seksio cesaria		≤ 17%	≤ 17%		≤ 17%		≤ 17%		≤ 17%		≤ 17%	≤ 17%		RSUD Cibabat	
		Keluarga Berencana														RSUD Cibabat	
		- Presentase KB (Vasektomi & Tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr. Sp. OG, dr. Sp. B, dr. Sp. Uro, dr. Umum terlatih		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		RSUD Cibabat	

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
		- Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih.		100%	100%			100%		100%		100%		100%		RSUD Cibabat	
		Kepuasan Pelanggan		80%	80%			80%		80%		80%		80%		RSUD Cibabat	
		6. Pelayanan Intensif														RSUD Cibabat	
		Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam		≤ 2%	≤ 2%			≤ 2%		≤ 2%		≤ 2%		≤ 2%		RSUD Cibabat	
		Pemberi pelayanan Unit Intensif														RSUD Cibabat	
		- Dokter Sp.Anestesi dan Dokter Spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani		100%	100%			100%		100%		100%		100%		RSUD Cibabat	
		- 100% Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / Setara (D4)		100%	100%			100%		100%		100%		100%		RSUD Cibabat	
		7. Pelayanan Radiologi														RSUD Cibabat	
		Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto		2 jam	2 jam			2 jam		2 jam		2 jam		2 jam		RSUD Cibabat	
		Pelaksana ekspertisi (Dokter Sp.Rad)		100%	100%			100%		100%		100%		100%		RSUD Cibabat	
		Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen (Max Kerusakan foto ≤ 2 %).		2%	2%			2%		2%		2%		2%		RSUD Cibabat	
		Kepuasan pelanggan		85%	85%			85%		85%		85%		85%		RSUD Cibabat	
		8. Pelayanan Lab. Patologi Klinik														RSUD Cibabat	
		Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium (≤ 140 menit kimia darah dan darah rutin)		120 menit	120 menit			120 menit		120 menit		120 menit		120 menit		RSUD Cibabat	
		Pelaksanaan ekspertisi (Dokter Sp.PK)		100%	100%			100%		100%		100%		100%		RSUD Cibabat	
		Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium		100%	100%			100%		100%		100%		100%		RSUD Cibabat	
		Kepuasan Pelanggan		90%	90%			90%		90%		90%		90%		RSUD Cibabat	
		9. Pelayanan Rehabilitasi Medik														RSUD Cibabat	
		Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan		27.48%	27%			26%		26%		25%		25%		RSUD Cibabat	
		Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik		100%	100%			100%		100%		100%		100%		RSUD Cibabat	
		Kepuasan pelanggan		90%	90%			90%		90%		90%		90%		RSUD Cibabat	
		10. Pelayanan Farmasi														RSUD Cibabat	
		Waktu tunggu pelayanan														RSUD Cibabat	
		- Obat jadi		30 menit	30 menit			30 menit		30 menit		30 menit		30 menit		RSUD Cibabat	
		- Obat racikan		60 menit	60 menit			60 menit		60 menit		60 menit		60 menit		RSUD Cibabat	
		Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat		100%	100%			100%		100%		100%		100%		RSUD Cibabat	
		Kepuasan Pelanggan		80%	80%			80%		80%		80%		80%		RSUD Cibabat	
		Penulisan resep sesuai dengan formularium		96%	96%			96%		96%		96%		96%		RSUD Cibabat	
		11. Pelayanan Gizi														RSUD Cibabat	
		Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien		100%	100%			100%		100%		100%		100%		RSUD Cibabat	
		Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien		≤ 20%	≤ 20%			≤ 20%		≤ 20%		≤ 20%		≤ 20%		RSUD Cibabat	
		Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet		100%	100%			100%		100%		100%		100%		RSUD Cibabat	
		12. Pelayanan Tranfusi Darah														RSUD Cibabat	
		Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi		100%	100%			100%		100%		100%		100%		RSUD Cibabat	
		Kejadian Reaksi Transfusi		≤ 0.01%	≤ 0.01%			≤ 0.01%		≤ 0.01%		≤ 0.01%		≤ 0.01%		RSUD Cibabat	
		13. Pelayanan GAKIN														RSUD Cibabat	
		Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan		100%	100%			100%		100%		100%		100%		RSUD Cibabat	
		14. Pelayanan Rekam Medik														RSUD Cibabat	
		Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan		100%	100%			100%		100%		100%		100%		RSUD Cibabat	

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
		Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi jelas		100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%	RSUD Cibabat
		Waktu penyelesaian dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan		10 menit	10 menit			10 menit		10 menit		10 menit		10 menit		10 menit	RSUD Cibabat
		Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap		15 menit	15 menit			15 menit		15 menit		15 menit		15 menit		15 menit	RSUD Cibabat
		15. Pengelolaan Limbah															RSUD Cibabat
		Baku mutu limbah cair		100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%	RSUD Cibabat
		Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan		100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%	RSUD Cibabat
		16. Administrasi dan manajemen															RSUD Cibabat
		Tidak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi		100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%	RSUD Cibabat
		Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja		100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%	RSUD Cibabat
		Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat		100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%	RSUD Cibabat
		Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala		100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%	RSUD Cibabat
		Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun		65%	65%			65%		65%		70%		70%		70%	RSUD Cibabat
		Cost recovery			45%			55%		60%		60%		80%			RSUD Cibabat
		Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan		100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%	RSUD Cibabat
		Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap		≤ 10 menit	≤ 10 menit			≤ 10 menit		≤ 10 menit		≤ 10 menit		≤ 10 menit		≤ 10 menit	RSUD Cibabat
		Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu		100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%	RSUD Cibabat
		17. Pelayanan Ambulance / Kereta Jenazah															RSUD Cibabat
		Waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah		24 jam	24 jam			24 jam		24 jam		24 jam		24 jam		24 jam	RSUD Cibabat
		Kecepatan memberikan pelayanan ambulance / kereta jenazah di Rumah Sakit		15 menit	15 menit			15 menit		15 menit		15 menit		15 menit		15 menit	RSUD Cibabat
		Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan		20 menit	20 menit			20 menit		20 menit		20 menit		20 menit		20 menit	RSUD Cibabat
		18. Pemulasaran Jenazah															RSUD Cibabat
		Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulazaran jenazah		30 menit	30 menit			30 menit		30 menit		30 menit		30 menit		30 menit	RSUD Cibabat
		19. Pelayanan pemeliharaan sarana Rumah Sakit															RSUD Cibabat
		Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat		≥ 80%	≥ 80%			≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%	RSUD Cibabat
		Ketepatan waktu pemeliharaan alat		100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%	RSUD Cibabat
		Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi		100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%	RSUD Cibabat
		20. Pelayanan Laundry															RSUD Cibabat
		Tidak adanya kejadian linen yang hilang		91%	95%			95%		95%		96%		96%		96%	RSUD Cibabat
		Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap			75%			75%		80%		80%		80%		80%	RSUD Cibabat
		21. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)															RSUD Cibabat
		Ada anggota TIM PPI yang terlatih		75%	75%			75%		75%		80%		80%		80%	RSUD Cibabat
		Tersedia APD di setiap Instalasi/Departemen		75%	75%			75%		75%		75%		75%		75%	RSUD Cibabat

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
		Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (Health Care Associated Infection) di RS (Min 1 parameter)		75%	75%		75%		75%		75%		75%	75%		RSUD Cibabat	
	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Rasio Posyandu persatuan Balita	Kesehatan	1 : 110	1 : 109	816,115,000	1 : 108	862,000,000	1 : 107	948,000,000	1 : 106	1,043,000,000	1 : 105	1,176,000,000	1 : 105	4,845,115,000	Dinas Kesehatan
		Cakupan desa / RW siaga aktif (SPM)		99.68%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
03. PEKERJAAN UMUM																	
	Program Pembangunan jalan dan jembatan	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	Pekerjaan Umum	100%	100%	1,650,000,000	100%	1,584,000,000	100%	4,118,000,000	100%	18,941,000,000	100%	18,941,000,000	100%	45,234,000,000	DINAS PU
		Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan		95%	96%	750,000,000	96%		97%	720,000,000	97%	720,000,000	98%	738,000,000	98%	2,928,000,000	
	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	Pekerjaan Umum	53%	57%	28,700,000,000	60%	33,965,000,000	62%	31,540,000,000	64%	34,387,000,000	65%	38,211,000,000	65%	166,803,000,000	DINAS PU
		meningkatkan kinerja drainase jalan kota		10%	12%	4,600,000,000	15%		17%	5,184,000,000	20%	5,568,000,000	25%	6,101,000,000	25%	21,453,000,000	DINAS PU
	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dan Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan	Pekerjaan Umum	56%	58%	150,000,000	60%	192,000,000	61%	192,000,000	62%	192,000,000	63%	197,000,000	63%	923,000,000	DINAS PU
	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa	Meningkatnya cakupan layanan air bersih	Pekerjaan Umum	62.49%	62.92%	4,509,375,100	64.07%	4,849,000,000	65.03%	5,527,000,000	66.61%	6,467,000,000	69.70%	7,954,000,000	69.70%	29,306,375,100	DKP
		Menurunnya area genangan				4,135,000,000		3,563,000,000		4,067,000,000		4,644,000,000		5,440,000,000		21,849,000,000	DINAS PU
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	Terselenggaranya Sistem Pengelolaan air limbah domestik yang aman	Pekerjaan Umum	2.50%	3.48%		3.40%	192,000,000	2.43%	7,680,000,000	2.54%	7,680,000,000	2.64%	7,872,000,000	2.64%	23,424,000,000	DKP
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Menurunnya area genangan	Pekerjaan Umum	1.32%	1.09%	6,180,000,000	0.96%	6,269,000,000	0.85%	6,617,000,000	0.76%	6,977,000,000	0.67%	7,535,000,000	0.67%	33,578,000,000	DINAS PU
	Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya		Pekerjaan Umum			200,000,000		1,728,000,000		3,800,000,000		12,735,000,000		713,000,000	70%	19,176,000,000	DINAS PU
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Menurunnya area kawasan permukiman kumuh	Pekerjaan Umum	Dokumen RPKPP			Dokumen RPKPP dan Fasilitasi	240,000,000	Dokumen RPKPP dan Fasilitasi	264,000,000			Dokumen RPKPP dan Fasilitasi	271,000,000		775,000,000	DINAS PU
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran di tiap kecamatan	Pekerjaan Umum	33%	33%	1,168,093,000	33%	1,479,000,000	33%	1,478,000,000	67%	1,478,000,000	67%	1,614,000,000	67%	7,217,093,000	DINAS PU
		Terwujudnya masyarakat yang siaga dan tanggap terhadap bahaya kebakaran		30%	40%	509,585,000	50%	442,000,000	60%	442,000,000	70%	432,000,000	80%	443,000,000	80%	2,268,585,000	
04. PERUMAHAN																	
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terlayannya kebutuhan pengelolaan air limbah masyarakat	Perumahan	64.65%	65.78%	14,920,600,000	65.85%	15,851,000,000	65.03%	10,609,000,000	65.28%	13,718,000,000	65.54%	18,447,000,000	65.54%	73,545,600,000	DKP
	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya kebutuhan dan keterjangkauan rumah layak huni	Perumahan	96.4%	96.6%	4,144,390,000	96.8%	4,150,500,000	97.0%	5,285,000,000	97.1%	5,562,000,000	97.3%	6,278,000,000	97.3%	25,419,890,000	DINAS PU
		Terselenggaranya mekanisme perijinan bangunan (IMB) yang cepat, mudah dan pasti		100%	100%	1,163,781,100	100%	1,243,500,000	100%	1,392,000,000	100%	1,531,000,000	100%	1,727,000,000	100%	7,057,281,100	DINAS PU

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Terpenuhinya kebutuhan dan keterjangkauan rumah layak huni	Perumahan	Ketersediaan Rutilahu	Ketersediaan Rutilahu	1,500,000,000	Ketersediaan Rutilahu	8,360,000,000	Ketersediaan Rutilahu	1,440,000,000	Ketersediaan Rutilahu	1,440,000,000	Ketersediaan Rutilahu	1,476,000,000	Ketersediaan Rutilahu	14,216,000,000	DINAS PU
		Menurunnya area kawasan permukiman kumuh		4.02%	3.53%	2,423,000,000	3.03%		2.53%	8,170,000,000	2.04%	10,170,000,000	1.54%	10,991,000,000	1.54%	31,754,000,000	DINAS PU
	Program Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Terpenuhinya perbaikan perumahan untuk korban bencana alam/sosial	Perumahan	Perbaikan rumah korban bencana alam/sosial			60%	480,000,000	60%	480,000,000	60%	480,000,000	60%	492,000,000	60%	1,932,000,000	DINAS PU
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terselenggaranya pengelolaan TPU yang efektif dan efisien	Perumahan	80%	85%	204,911,500	90%	207,000,000	95%	217,000,000	100%	294,000,000	100%	361,000,000	100%	1,283,911,500	DKP
05 PENATAAN RUANG																	
	Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	Penataan Ruang	61%	64%	3,085,100,000	66.64%	2,880,000,000	68.93%	2,890,000,000	71.21%	2,592,000,000	73.5%	3,444,000,000	73.5%	14,891,100,000	DKP
		Terpeliharanya PJU yang sudah terpasang		100%	100%	612,200,000	100%	636,000,000	100%	708,000,000	100%	804,000,000	100%	947,000,000	100%	3,707,200,000	DKP
		Terbangun Dekorasi Kota		60%	62%	1,560,000,000	65%	480,000,000	68%	576,000,000	71%	624,000,000	74%	689,000,000	74%	3,929,000,000	DKP
		Terselenggaranya pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang		50%	55%	260,819,400	60%	260,000,000	65%	288,000,000	70%	317,000,000	80%	359,000,000	80%	1,484,819,400	DINAS PU, BAPPEDA
	Program Perencanaan Tata Ruang	Terselenggaranya Proses Perencanaan Ruang Kota Yang Berkelanjutan dan informatif	Penataan Ruang	GIS, Peta RTRW, Peta Teknis Pemanfaatan Ruang	Dokumen Kajian Pemanfaatan Ruang, Fasilitasi perijinan pemanfaatan ruang	2,209,926,900	Dokumen Kajian Pemanfaatan Ruang, Fasilitasi perijinan pemanfaatan ruang	1,976,000,000	Dokumen Kajian Pemanfaatan Ruang, Fasilitasi perijinan pemanfaatan ruang	2,760,000,000	Dokumen Kajian Pemanfaatan Ruang, Fasilitasi perijinan pemanfaatan ruang	2,784,000,000	Dokumen Kajian Pemanfaatan Ruang, Fasilitasi perijinan pemanfaatan ruang	2,977,000,000	Dokumen Kajian Pemanfaatan Ruang, Fasilitasi perijinan pemanfaatan ruang	12,706,926,900	DINAS PU, BAPPEDA
		Meningkatnya peran masyarakat dalam proses penataan ruang		Tersosialisasinya perencanaan tata ruang	50%		50%		50%		50%		Terfasilitasinya peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang	246,000,000	80%	246,000,000	BAPPEDA
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terselenggaranya pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	Penataan Ruang	RTRW	Dokumen pengawasan pemanfaatan ruang	173,114,000	Dokumen pengawasan pemanfaatan ruang	192,000,000	Dokumen pengawasan pemanfaatan ruang	211,000,000	Dokumen pengawasan pemanfaatan ruang	235,000,000	Dokumen pengawasan pemnfaatan ruang	221,000,000	Dokumen pengawasan pemanfaatan ruang	1,032,114,000	DINAS PU
		Terselenggaranya proses pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundangan yang terkait		RTRW	Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang		Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	144,000,000	Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	168,000,000	Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	192,000,000	Dokumen pengendalian pemnfaatan ruang	221,000,000	Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	725,000,000	DINAS PU
06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN																	
	Program Pengembangan data/informasi	terwujudnya perencanaan pembangunan yang berdasarkan data dan informasi yang berkualitas	Perencanaan Pembangunan	-	1 dok. Analisa Data dan Informasi Kebutuhan Perencanaan	100,000,000	1 dok. Analisa Data dan Informasi Kebutuhan Perencanaan	96,000,000	1 dok. Analisa Data dan Informasi Kebutuhan Perencanaan	144,000,000	1 dok. Analisa Data dan Informasi Kebutuhan Perencanaan	120,000,000	1 dok. Analisa Data dan Informasi Kebutuhan Perencanaan	123,000,000	5 dok. Analisa Data dan Informasi Kebutuhan Perencanaan	583,000,000	BAPPEDA
		Fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan sekretariat daerah		Fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan sekretariat daerah selama 5 tahun	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan sekretariat daerah selama 1 tahun		Fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan sekretariat daerah selama 1 tahun		Fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan sekretariat daerah selama 1 tahun		Fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan sekretariat daerah selama 1 tahun		Fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan sekretariat daerah selama 1 tahun		Fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan sekretariat daerah selama 5 tahun		SETDA (ADBANG)
		Tersedianya Profil/ Data Pembangunan Di Kota Cimahi		5 Set Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kota Cimahi	1 Set Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kota Cimahi	166,094,000	1 Set Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kota Cimahi	168,000,000	1 Set Dokumen Profil Pembanguna n Daerah Kota Cimahi	175,000,000	1 Set Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kota Cimahi	183,000,000	1 Set Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kota Cimahi	197,000,000	5 Set Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kota Cimahi	889,094,000	SETDA (ADBANG)

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
		Tersedianya analisis indikator perekonomian dan Keuangan Daerah Kota Cimahi		Analisis Makro Ekonomi	dokumen analisis indikator perekonomian dan keuangan daerah	50,000,000	dokumen analisis indikator perekonomian dan keuangan daerah	48,000,000	dokumen analisis indikator perekonomian dan keuangan daerah	122,000,000	dokumen analisis indikator perekonomian dan keuangan daerah	72,000,000	dokumen analisis indikator perekonomian dan keuangan daerah	74,000,000	dokumen analisis indikator perekonomian dan keuangan daerah	366,000,000	BAPPEDA
		0		pembangunan Blue Print Sistem Informasi Perencanaan Daerah	150,000,000	Pembangunan data base dan Sistem Informasi Perencanaan Daerah tahap I	480,000,000	Pembanguna n Sistem Informasi Perencanaan Daerah tahap II	432,000,000	Pemeliharaan dan upgrading sistem informasi perencanaan daerah	384,000,000	Pemeliharaan dan upgrading sistem informasi perencanaan daerah	394,000,000	Terbangun dan Terpeliharanya Sistem Informasi Perencanaan daerah yang tersinergikan	1,840,000,000	BAPPEDA	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah baik tahunan dan jangka menengah yang aplikatif serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kota	Perencanaan Pembangunan	tersedianya dokumen RPJMD, dan RKPD	Perda RPJMD 2012-2017, RKPD 2014	859,800,000	5 Dokumen Perencanaan Tahunan	404,000,000	Review RPJMD, RKPD 2016	643,000,000	RKPD 2017 dan Evaluasi RPJPD	562,000,000	RKPD 2018, Rancangan Awal RPJMD 2017-2022	871,000,000	tersedianya dokumen RPJMD, dan RKPD	3,339,800,000	BAPPEDA
		Musrenbang RPJMD, Musrenbang RKPD, Evaluasi		Musrenbang RPJMD, Musrenbang RKPD	524,133,900	Musrenbang RKPD	1,044,000,000	Musrenbang RKPD	1,192,000,000	Musrenbang RKPD	1,200,000,000	Musrenbang RKPD	1,200,000,000	Musrenbang RPJMD, Musrenbang RKPD	5,160,133,900	BAPPEDA/ KECAMATAN/ KELURAHAN	
		Tingkat pelaksanaan Monitoring dan evaluasi		laporan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan SKPD	2 dokumen monitoring pelaksanaan program dan kegiatan SKPD bersumber dana APBD , dan DAK/TP		2 dokumen monitoring pelaksanaan program dan kegiatan SKPD bersumber dana APBD , dan Dana Perimbangan/ TP	434,000,000	3 dokumen monitoring pelaksanaan program dan kegiatan SKPD bersumber dana APBD , dan DAK/TP , monev midter RPJMD	480,000,000	2 dokumen monitoring pelaksanaan program dan kegiatan SKPD bersumber dana APBD , dan DAK/TP	384,000,000	3 dokumen monitoring pelaksanaan program dan kegiatan SKPD bersumber dana APBD , dan DAK/TP , 1 Dokumen Monev RPJMD	590,000,000	12 dokumen monitoring pelaksanaan program dan kegiatan SKPD bersumber dana APBD , dan DAK/TP , 1 Dokumen Monev midterm RPJMD, 1 dokumen monev RPJMD	1,888,000,000	BAPPEDA
		Fasilitasi dan koordinasi kegiatan di bidang penelitian dan Pengembangan bidang fisik, ekonomi dan sosbudpem				4 Kajian	576,000,000	4 Kajian	576,000,000	4 Kajian	576,000,000	4 Kajian	787,000,000	20 kajian / penelitian	2,515,000,000	BAPPEDA	
		Tersusunnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang aplikatif serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kota				1 Naskah akademis untuk raperda sistem perencanaan pembangunan daerah	250,000,000								1 perda, 1 perwal tentang Penyusunan Sistem Perencanaan pembangunan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, dan Musrenbang, masterplan, kajian, penelitian, perencanaan sektoral)	250,000,000	BAPPEDA
		Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah baik tahunan dan jangka menengah yang aplikatif serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kota		Dokumen perencanaan bidang pemerintahan, koordinasi, fasilitasi dan monev	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, dokumen perencanaan, koordinasi, fasilitasi dan monev	395,000,000	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, dokumen perencanaan, koordinasi, fasilitasi dan monev	384,000,000	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, dokumen perencanaan, koordinasi, fasilitasi dan monev	384,000,000	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, dokumen perencanaan, koordinasi, fasilitasi dan monev	384,000,000	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, dokumen perencanaan, koordinasi, fasilitasi dan monev	394,000,000	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, dokumen perencanaan, koordinasi, fasilitasi dan monev	1,941,000,000	BAPPEDA

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja	pada akhir periode RPJMD	
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
					dokumen pagu indikatif kecamatan dan kelurahan	118,000,000	Dokumen indeks pembangunan kecamatan dan kelurahan	96,000,000	dokumen indeks pembangunan kecamatan dan kelurahan	96,000,000	dokumen rencana pengembang an dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	96,000,000	dokumen indeks pembangunan kecamatan dan kelurahan	98,000,000		504,000,000	
						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan sektor fisik, koordinasi penelaahan rencana sektoral bidang fisik dan fasitiasi FGD Forum SKPD	250,000,000							250,000,000			
		Terciptanya sinergitas perencanaan pembangunan antara Kota , Provinsi , dan Pusat.		N/A	6 Dokumen		2 kali rakor pengelola perencana SKPD, koordinasi dgn Bappeda Provinsi dan Pusat	50,000,000	6 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen dan 1 Dokumen Persiapan			50,000,000	BAPPEDA
		tersediannya TAPKIN, LAKIP, LKPJ, LPPD dan ILPPD		dokumen TAPKIN dan LAKIP tahunan	dokumen TAPKIN dan dokumen LAKIP	150,000,000	dokumen TAPKIN dan dokumen LAKIP	152,000,000	dokumen TAPKIN dan dokumen LAKIP	158,000,000	dokumen TAPKIN dan dokumen LAKIP	166,000,000	dokumen TAPKIN dan dokumen LAKIP	177,000,000	dokumen TAPKIN dan dokumen LAKIP	803,000,000	SETDA (ORGANISASI)
				dokumen LKPJ, LPPD, ILPPD tahunan dan LKPJ lima tahunan	dokumen LKPJ, LPPD, ILPPD	534,000,000	dokumen LKPJ, LPPD, ILPPD	516,000,000	dokumen LKPJ, LPPD, ILPPD	518,000,000	dokumen LKPJ, LPPD, ILPPD	520,000,000	dokumen LKPJ, LPPD, ILPPD	536,000,000	dokumen LKPJ, LPPD, ILPPD	2,624,000,000	SETDA (PEMERINTAHAN)
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terselenggaranya perencanaan pembangunan ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Renstra PEL 2012-2017, SID, RPJM Pronangkis, SPKD, Data PPLS, Evaluasi	dokumen perencanaan pembangunan ekonomi, fasilitasi, koordinasi dan monev	950,000,000	dokumen masterplan pembangunan ekonomi Kota Cimahi	2,430,000,000	dokumen perencanaan pembangunan ekonomi, fasilitasi, koordinasi dan monev	929,000,000	dokumen perencanaan pembangunan ekonomi, fasilitasi, koordinasi dan monev	744,000,000	dokumen perencanaan pembangunan ekonomi, fasilitasi, koordinasi dan monev	1,782,000,000	dokumen perencanaan pembangunan ekonomi, fasilitasi, koordinasi dan monev	6,835,000,000	BAPPEDA

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					2013		2014		2015		2016		2017					
					target	Rp.	target	Rp	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
							Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan sektor ekonomi, koordinasi ,penelaahan rencana sektoral bidang ekonomi, dan fasitiitasi FGD Forum SKPD											
							Laporan koordinasi program PNPM Mandiri Perkotaan Cimahi, dan dokumen review PJM Pronangkis											
							dokumenSocia l Accounting Matrix (SAM)											
							Dokumen asterplan penanggulang an kemiskinan											
							1. Kajian pengembanga n klaster industri unggulan daerah 2. Penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah 3. Kajian potensi usaha baru yang inovatif dalam rantai nilai klaster Industri unggulan 4. Landasan pengembanga n kelembagaan Pusat Inovasi (Inkubator dan BDSP).											
							Komunitas- komunitas 4 klaster unggulan (TPT, Mamin, Rajinan, Telematika) dan 2 komunitas kampung inovasi pertanian terpadu											

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
	Program Perencanaan Sosial Budaya	Terselenggaranya perencanaan pembangunan sosial budaya	Perencanaan Pembangunan	dokumen perencanaan bidang sosial budaya, koordinasi, fasilitasi dan monev	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, dokumen perencanaan sosial budaya, dan monev	512,000,000	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, dokumen perencanaan sosial budaya, dan monev	624,000,000	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, dokumen perencanaan sosial budaya, dan monev	485,000,000	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, dokumen perencanaan sosial budaya, dan monev	485,000,000	1 kali Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, 5 dokumen perencanaan, dan 4 kali monev	497,000,000	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, dokumen perencanaan sosial budaya, dan monev	2,603,000,000	BAPPEDA
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terselenggaranya penataan dan pengembangan kawasan strategis kota untuk memacu pengembangan wilayah sekitarnya	Perencanaan Pembangunan	Masterplan Pengembangan Kawasan Baros, Dokumen RPIJM	Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, koordinasi, fasilitasi dan monev	435,900,000	Penyusunan Kawasan Strategis dari aspek fungsi dan daya dukung lingkungan dan Tersedianya dokumen RPIJM dan infrastruktur lainnya	450,000,000	Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, koordinasi, fasilitasi dan monev	816,000,000	Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, koordinasi, fasilitasi dan monev	336,000,000	Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, koordinasi, fasilitasi dan monev	98,000,000	Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, koordinasi, fasilitasi dan monev	2,135,900,000	BAPPEDA
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Terselenggaranya proses perencanaan ruang kota yang berkelanjutan	Perencanaan Pembangunan	Buku putih sanitasi, SSK, MPSS, Masterplan air limbah domestik, SPPIP, RPKPP, RTRW	dokumen masterplan, kajian, fasilitasi, Capacity building	815,968,700	dokumen kajian, fasilitasi PPSP	784,000,000	fasilitasi sanitasi dan perumahan	288,000,000	fasilitasi sanitasi dan perumahan	288,000,000	fasilitasi sanitasi dan perumahan	295,000,000	dokumen masterplan, kajian, fasilitasi, Capacity building	2,470,968,700	BAPPEDA
		Rencana Induk Green Innovation Development															
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Terselenggaranya proses perencanaan ruang kota yang berkelanjutan	Perencanaan Pembangunan	Kajian transportasi, Peta rawan bencana	dokumen masterplan transportasi	421,222,500	dokumen Materplan Rawan Bencana Kota Cimahi	480,000,000	0							901,222,500	BAPPEDA
	Program Kerjasama Pembangunan	Terselenggaranya koordinasi antar wilayah perbatasan	Perencanaan Pembangunan	RTRW			Fasilitasi kerjasama antar kabupaten / kota sekitar Cimahi	50,000,000	Fasilitasi kerjasama antar kabupaten / kota sekitar Cimahi	240,000,000	Fasilitasi kerjasama antar kabupaten / kota sekitar Cimahi	240,000,000	Fasilitasi kerjasama antar kabupaten / kota sekitar Cimahi	246,000,000	Fasilitasi kerjasama antar kabupaten / kota sekitar Cimahi	776,000,000	BAPPEDA
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Meningkatnya Kapasitas aparatur, kader pembangunan, dan institusi perencana dalam Pengembangan di Bidang Perencanaan 2. Meningkatnya Kualitas produk dan pelayanan perencanaan	Perencanaan Pembangunan	90 orang aparat perencana dan 150 orang kader perencanaan pembangunan	Meningkatnya kapasitas aparatur dan kader perencanaan pembangunan, dan kajian keberadaan bidang monev , litbang, data dan statistik	275,000,000	Meningkatnya kapasitas aparatur dan kader perencanaan pembangunan serta Terbentuknya forum kader perencanaan pembanguna, terbentuknya standar pelayanan perencanaan, sosialisasi kebijakan bidang perencanaan, pelatihan dan bintek perencanaan	631,000,000	Meningkatnya kapasitas aparatur dan kader perencanaan pembangunan , surveillance ISO RKPD	456,000,000	Meningkatnya kapasitas aparatur dan kader perencanaan pembangunan	408,000,000	Meningkatnya kapasitas aparatur dan kader perencanaan pembangunan serta adanya kader perencanaan pembangunan di setiap RW	467,000,000	Meningkatnya kapasitas aparatur, terbentuknya forum dan adanya kader perencanaan pembangunan di setiap RW	2,237,000,000	BAPPEDA

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan	Perencanaan Pembangunan	Peningkatan Kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selama 5 tahun	Peningkatan Kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selama 1 tahun	364,000,000	Peningkatan Kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selama 1 tahun	368,000,000	Peningkatan Kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selama 1 tahun	387,000,000	Peningkatan Kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selama 1 tahun	407,000,000	Peningkatan Kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selama 1 tahun	439,000,000	Peningkatan Kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selama 5 tahun	1,965,000,000	SETDA (ADBANG)
		Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara terintegrasi dan bebantuan elektronik		Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara terintegrasi dan bebantuan elektronik selama 5 tahun	Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara terintegrasi dan bebantuan elektronik selama 1 tahun	902,906,000	Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara terintegrasi dan bebantuan elektronik selama 1 tahun	911,000,000	Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara terintegrasi dan bebantuan elektronik selama 1 tahun	955,000,000	Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara terintegrasi dan bebantuan elektronik selama 1 tahun	1,003,000,000	Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara terintegrasi dan bebantuan elektronik selama 1 tahun	1,079,000,000	Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara terintegrasi dan bebantuan elektronik selama 5 tahun	4,850,906,000	SETDA (ADBANG)
07 PERHUBUNGAN																	
	Program Pengendalian dan Pengembangan Lalu Lintas	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten/Kota.	Perhubungan	20%	28%	1,841,261,950	35%	1,853,000,000	43%	2,390,000,000	50%	2,755,000,000	55%	3,041,000,000	55%	11,880,261,950	DISHUB
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Perhubungan	75%	75%	243,127,400	75%	634,000,000	75%	298,000,000	75%	350,000,000	75%	413,000,000	75%	1,938,127,400	DISHUB
		Terselenggaranya transportasi kota yang sinergis dengan wilayah sekitar		75%	78%	89,550,000	80%	215,000,000	83%	101,000,000	85%	115,000,000	90%	128,000,000	90%	648,550,000	DISHUB
	Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	Perhubungan	3%	4%	111,178,100	6%	135,000,000	7%	144,000,000	9%	154,000,000	11%	167,000,000	11%	711,178,100	DISHUB
		Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.		50%	50%	504,543,000	50%		60%	10,550,000,000	60%	10,547,000,000	60%	581,000,000	60%	22,182,543,000	DISHUB
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor yang handal	Perhubungan	67%	78%	484,290,000	80%	247,000,000	82%	252,000,000	84%	274,000,000	85%	423,000,000	85%	1,680,290,000	DISHUB
		Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang perhubungan		30%	35%	227,000,000	40%	264,000,000	45%	312,000,000	50%	384,000,000	55%	467,000,000	55%	1,654,000,000	DISHUB
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di bidang terminal, bidang pengujian kendaraan bermotor, di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir dan pengawas kelaikan kendaraan untuk pengawasan perusahaan angkutan umum.		32%	35%	286,465,000	35%	336,000,000	35%	355,000,000	40%	365,000,000	45%	384,000,000	45%	1,726,465,000	DISHUB
	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ	Perhubungan	10%	15%	985,116,800	20%	869,000,000	25%	653,000,000	30%	672,000,000	35%	708,000,000	35%	3,887,116,800	DISHUB
		Terselenggaranya pengendalian dan evaluasi bidang Lalulintas		50%	60%		60%		70%		70%		75%		75%		DISHUB
		Terpetakannya lokasi parkir on street dan off street disertai pengelolaannya		72%	76%	212,200,000	81%		86%	250,000,000	92%	254,000,000	97%	266,000,000	97%	982,200,000	DISHUB
08 LINGKUNGAN HIDUP																	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Persampahan	Lingkungan Hidup	67%	70%	125,714,850	73%	136,000,000	75%	154,000,000	78%	180,000,000	80%	222,000,000	80%	817,714,850	DKP

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
	Persampahan	Terlayannya pengangkutan sampah di seluruh Kota Cimahi		58%	60%	1,462,709,900	0.63	1,573,000,000	65%	1,793,000,000	68%	2,098,000,000	70%	2,580,000,000	70%	9,506,709,900	DKP
		Terselenggaranya kegiatan komposting dan 3R		41%	44%	664,223,700	48%	715,000,000	51%	814,000,000	55%	953,000,000	60%	1,172,000,000	60%	4,318,223,700	DKP
		Terbangun dan terselenggaranya kegiatan intermediate treatment facilities (ITF)		10%	15%	1,760,751,550	50%	1,894,000,000	70%	2,158,000,000	100%	2,525,000,000	100%	3,106,000,000	100%	11,443,751,550	DKP
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Tersedianya luasan RTH publik seluas 20% dari luas wilayah kota dan tercipta keindahan kota	Lingkungan Hidup	18.31%	18.32%	2,952,725,000	18.33%	3,325,000,000	18.35%	3,669,000,000	18.38%	4,285,000,000	18.40%	5,258,000,000	18.40%	19,489,725,000	DKP
		Pengembangan technopark/ technopolitan, Pengembangan Ruang Publik kreatif (creative-cultural centres															
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya upaya pencegahan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan pencemaran udara , tanah dan air	Lingkungan Hidup	70%	73%	2,167,902,500	75%	2,450,000,000	77%	2,258,000,000	80%	2,258,000,000	85%	2,313,000,000	85%	11,446,902,500	KLH
		Meningkatnya pelaksanaan audit teknologi berbasis green innovation															
		Tertanganinya pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		100%	100%	711,895,596	100%	1,000,000,000	100%	1,896,000,000	100%	1,728,000,000	100%	1,501,000,000	100%	6,836,895,596	KLH
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air dan udara	Lingkungan Hidup	Upaya Pemulihan dan konservasi Sumber Daya Alam	24.80%	2,952,957,097	27.30%	3,091,000,000	29.80%	3,114,000,000	32.30%	3,138,000,000	34.8%	3,266,000,000	34.8%	15,561,957,097	KLH
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Meningkatnya upaya pengendalian polusi air dan udara	Lingkungan Hidup	Upaya Pemulihan dan konservasi Sumber Daya Alam	24.80%	216,875,000	27.30%	485,000,000	29.80%	605,000,000	32.30%	749,000,000	34.8%	915,000,000	34.8%	2,970,875,000	KLH
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya informasi tentang lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	KLHS Kota Cimahi, SLHD Tahunan,	957,528,514	KLHS Kota Cimahi, SLHD Tahunan,	1,320,000,000	SLHD Tahunan dan Fasilitasi Edukasi dan Komunikasi Masyarakat	980,000,000	KLHS Kota Cimahi, SLHD Tahunan,	1,364,000,000	SLHD Tahunan dan Fasilitasi Edukasi dan Komunikasi Masyarakat	1,003,000,000	KLHS Kota Cimahi, SLHD Tahunan,	5,624,528,514	KLH	
		Membangun forum komunikasi green innovation dan alih pengetahuan tentang audit teknologi															
09 KETAHANAN PANGAN																	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Tersedianya ketahanan pangan yang berbasis komunitas dengan menggunakan 2 sumber pangan alternatif setiap tahunnya	Ketahanan Pangan	2 komoditas (singkong dan pisang)	2 komoditas		2 komoditas	521,000,000	2 komoditas	581,000,000	2 komoditas	639,000,000	2 komoditas	720,000,000	10 komoditas	2,461,000,000	DISKOPINDAGTAN
		Tersedianya pengembangan model distribusi pangan yang efisien		0	model/ kebijakan	500,000,000	model/ kebijakan	144,000,000	model/ kebijakan	158,000,000	model/ kebijakan	174,000,000	model/ kebijakan	196,000,000	model/ kebijakan	1,172,000,000	DISKOPINDAGTAN
	Program Pengendalian Kebijakan Perberasan	Tersedianya akses dan terjaganya kualitas pangan untuk masyarakat miskin	Ketahanan Pangan	100%	100%	1,375,000,000	100%	1,386,000,000	100%	1,455,000,000	100%	1,557,000,000	100%	1,724,000,000	1	7,497,000,000	SETDA
10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat Pelayanan Administrasi kependudukan	Kependudukan	Pelayanan e-KTP dan kartu keluarga 70%	Pelayanan e-KTP dan kartu keluarga 75%	6,600,430,000	Pelayanan e-KTP dan kartu keluarga 80%	7,000,000,000	Pelayanan e-KTP dan kartu keluarga 85%	8,500,000,000	Pelayanan e-KTP dan kartu keluarga 90%	7,500,000,000	Pelayanan e-KTP dan kartu keluarga 95%	7,724,000,000	Pelayanan e-KTP dan kartu keluarga 95%	37,324,430,000	DISDUKCAPIL/ KELURAHAN
		Tingkat pelayanan administrasi catatan sipil		60%	65%		70%		75%		80%		85%		85%		

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
		Pendataan dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang valid dan akurat		Pengembangan pendataan dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang valid dan akurat	Peningkatan kualitas pendataan dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang valid dan akurat		Peningkatan kualitas pendataan dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang valid dan akurat		Peningkatan kualitas pendataan dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang valid dan akurat		Peningkatan kualitas pendataan dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang valid dan akurat		Peningkatan kualitas pendataan dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang valid dan akurat	Peningkatan kualitas pendataan dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang valid dan akurat			
		Kualitas kelembagaan kependudukan dan catatan sipil		Pengembangan kelembagaan kependudukan dan catatan sipil	Peningkatan kualitas kelembagaan kependudukan dan catatan sipil		Peningkatan kualitas kelembagaan kependudukan dan catatan sipil		Peningkatan kualitas kelembagaan kependudukan dan catatan sipil		Peningkatan kualitas kelembagaan kependudukan dan catatan sipil		Peningkatan kualitas kelembagaan kependudukan dan catatan sipil	Peningkatan kualitas kelembagaan kependudukan dan catatan sipil			
11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Peningkatan kapasitas usaha bagi 45 - 145 komunitas perempuan kepala keluarga (PEKKA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	20% komunitas perempuan kepala keluarga (PEKKA) Perempuan	650,000,000	20% komunitas perempuan kepala keluarga (PEKKA) Perempuan	646,000,000	20% komunitas perempuan kepala keluarga (PEKKA) Perempuan	670,000,000	20% komunitas perempuan kepala keluarga (PEKKA) Perempuan	697,000,000	20% komunitas perempuan kepala keluarga (PEKKA) Perempuan	746,000,000	20% komunitas perempuan kepala keluarga (PEKKA) Perempuan	3,409,000,000	BPMPPKB
		cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPMPPKB
		cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPMPPKB
		cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan rehabilitasi sosial		75%	75%		75%		75%		75%		75%		75%		BPMPPKB
		cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bimbingan rohani		75%	75%		75%		75%		75%		75%		75%		BPMPPKB
		cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum		30%	30%		30%		30%		30%		30%		30%		BPMPPKB
		cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan pemulangan		50%	50%		50%		50%		50%		50%		50%		BPMPPKB
		cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan reintegrasi		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPMPPKB
		Perlindungan dan KIE tenaga kerja perempuan		2700 orang	500		500		500		500		500		2500 orang		BPMPPKB
		Peningkatan P2TP2A		3 kali TOT	1		1		1		1		1		5 kali		BPMPPKB
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	pembinaan dan pendampingan kepada perempuan dari KK miskin	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1000 orang	200 orang	270,164,000	200 orang	291,000,000	200 orang	325,000,000	200 orang	364,000,000	200 orang	419,000,000	1000 orang	1,669,164,000	BPMPPKB
		Peningkatan kapasitas perempuan dalam organisasi perempuan		2100 org	150 org		150 org		150 org		150 org		150 org		750 org		BPMPPKB
		Partisipasi di lembaga pemerintah		58,48%	58,48%		58,48%		58,48%		58,48%		58,48%		58,48%		BPMPPKB
		Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas		99,70%	99,71%		99,72%		99,73%		99,74%		99,75%		99,75%		BPMPPKB
		Partisipasi angkatan kerja perempuan		42,41%	42,43%		42,44%		42,45%		42,46%		42,47%		42,47%		BPMPPKB
	Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Peningkatan kapasitas perempuan melalui forum PEKKA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	750 org	1,576,596,500	750 org	1,871,000,000	750 org	2,190,000,000	750 org	2,571,000,000	750 org	3,099,000,000	3.750 org	11,307,596,500	BPMPPKB
		Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarasutamaan anak		1 FA tk Kota	16 FA tk Kota dan Kelurahan		16 FA tk Kota dan Kelurahan		16 FA tk Kota dan Kelurahan		16 FA tk Kota dan Kelurahan		16 FA tk Kota dan Kelurahan		80 FA tk Kota dan Kelurahan		BPMPPKB

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
		Pengembangan jaringan menuju kota layak anak		0 Kelurahan layak anak	3 kelurahan layak anak		3 kelurahan layak anak		3 kelurahan layak anak		3 kelurahan layak anak		3 kelurahan layak anak	15 kelurahan layak anak		BPMPPKB	
		Pengembangan kebijaka PUG dan anak		2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali	10 kali		BPMPPKB	
12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA																	
	Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0.85%	0.84%	1,035,496,000	0.83%	1,057,000,000	0.82%	1,123,000,000	0.81%	1,194,000,000	0.80%	1,302,000,000	0.80%	5,711,496,000	BPMPPKB
		Cakupan PUS peserta KB aktif		80.69%	80%		79%		79%		79%		79%		79%		BPMPPKB
		Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi		10.17%	10%		9%		9%		9%		9%		9%		BPMPPKB
		Cakupan anggota BKB ber KB		92.72%	93%		94%		95%		96%		96%		96%		BPMPPKB
		Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS ber KB		100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		BPMPPKB
		ratio petugas lapangan KB 1/2 kelurahan		100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		BPMPPKB
		ratio pembantu pembina KB 1/1 kelurahan		100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		BPMPPKB
		cakupan penyediaan data mikro keluarga setiap tahunnya		100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		BPMPPKB
		cakupan ketersediaan alat dan obat KB		100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		BPMPPKB
		cakupan kader POKTAN mendapatkan pembinaan		100 kader poktan	100%	1,095,509,500	100%	1,176,000,000	100%	1,314,000,000	100%	1,472,000,000	100%	1,692,000,000	100%	6,749,509,500	BPMPPKB
		cakupan BKB terbina		155 BKB	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPMPPKB
		cakupan BKR terbina		72 BKR	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPMPPKB
		cakupan BKL terbina		123 BKL	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPMPPKB
		cakupan kader PPKBD terbina		392 orang	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPMPPKB
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Jumlah layanan pemasangan alat kontrasepsi	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	13.049 akseptor	750 akseptor	589,170,500	750 akseptor	679,000,000	750 akseptor	814,000,000	750 akseptor	977,000,000	750 akseptor	1,202,000,000	3750 orang	4,261,170,500	BPMPPKB
		jumlah layanan medis operasi		796 akseptor	360 akseptor		360 akseptor		360 akseptor		360 akseptor		360 akseptor		1800 orang		BPMPPKB
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	cakupan PIK Remaja yg mendapatkan pembinaan ttg pemahaman, sikap, dan perilaku remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	15 PIK kelurahan	100%	189,383,000	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	242,000,000	100%	273,000,000	100%	1,124,383,000	BPMPPKB
13. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pengembangan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia di bidang IT	Komunikasi dan Informatika	pelatihan perangkat lunak 50 orang,	Pelatihan, pengelolaan e-gov, LPSE, data Center	1,178,892,175	Pelatihan, pengelolaan e-gov, LPSE, data Center	2,000,000,000	Pelatihan, pengelolaan e-gov, LPSE, data Center	2,000,000,000	Pelatihan, pengelolaan e-gov, LPSE, data Center	2,000,000,000	Pelatihan, pengelolaan e-gov, LPSE, data Center	2,525,000,000	Pelatihan, pengelolaan e-gov, LPSE, data Center	9,703,892,175	KAPDE
		Perekrutn, pelatihan dan pelibatan Relawan Indonesia Berinovasi															
		Penyediaan dan penguatan SDM Pengelola Pusat Inovasi						100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		400,000,000	
		Pengembangan Ruang publik kreatif (creative-cultural centres) terintegrasi						100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		400,000,000	
		Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur Akademisi, Bisnis dan Jajaran pemerintah daerah						100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		400,000,000	
		tingkat pengelolaan e- gov. dan pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik		1 Portal Sistem Informasi Terintegrasi													KAPDE
		pemantapan LPSE dan pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa melalui media online		1 Unit LPSE													KAPDE
		Tersusunnya Kebijakan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Teknologi Informasi		Rencana Induk Pengembangan E-Development, SOP pengembangan E-Gov	Dokumen SOP TIK		Dokumen Blue Print E-GOV		Dokumen SOP TIK		Review Dokumen Blue Print E-Gov				Dokumen SOP TIK, Blue Print E-Gov		KAPDE

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
		Mengkaji potensi jaringan inovasi dan dan keberadaan telecenter di daerah dan inventarisasi dan pemanfaatan inovasi (teknologi masyarakat) di daerah						100,000,000						100,000,000		200,000,000	
		Mengkaji implementasi E-Development Daerah (E-Society)															
		Terselenggaranya sistem informasi lalu lintas angkutan jalan		25%	75%	250,000,000	100%	288,000,000	100%	346,000,000	100%	415,000,000	100%	443,000,000	100%	1,742,000,000	DISHUB
	Program Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi	Pengkajian/ analisis berita maupun respon masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya proses pengkajian bidang informasi dan komunikasi melalui pengkajian/analisis isu pemberitaan di media	Kajian/ analisis berita penyelenggaraa n pemerintahan dan pembangunan daerah	42,190,000	Kajian/analisis berita penyelenggara an pemerintahan dan pembangunan daerah	124,000,000	Kajian/analisis berita penyelenggara an pemerintahan dan pembangunan daerah	45,000,000	Kajian/analisis berita penyelenggara an pemerintahan dan pembangunan daerah	47,000,000	Kajian/analisis berita penyelenggara an pemerintahan dan pembangunan daerah	50,000,000	Kajian/analisis berita penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	308,190,000	SETDA BAGIAN HUMAS PROTOKOL/ KAPDE
	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Tersebarluaskannya informasi Pembangunan Daerah melalui Pemerintahan daerah melalui mass media	Komunikasi dan Informatika	Tersebarluaskan nya informasi Pembangunan Daerah melalui mass media	Tersebarluaskan nya informasi Pembangunan Daerah melalui Pemerintahan daerah melalui mass media cetak dan elektronik	2,067,200,000	Tersebarluaskan nya informasi Pembangunan Daerah melalui Pemerintahan daerah melalui mass media cetak dan elektronik	2,050,000,000	Tersebarluaskan nya informasi Pembangunan Daerah melalui Pemerintahan daerah melalui mass media cetak dan elektronik	2,123,000,000	Tersebarluaskan nya informasi Pembangunan Daerah melalui Pemerintahan daerah melalui mass media cetak dan elektronik	2,199,000,000	Tersebarluaskan nya informasi Pembangunan Daerah melalui Pemerintahan daerah melalui mass media cetak dan elektronik	2,335,000,000	Tersebarluaskan nya informasi Pembangunan Daerah melalui mass media cetak dan elektronik	10,774,200,000	Sekretariat DPRD/ SETDA BAGIAN HUMAS PROTOKOL
14. KETENAGAKERJAAN																	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	tingkat pengangguran terbuka	Tenaga Kerja	10.30%	10,30% - 9,00%	635,869,500	10,30% - 9,00%	641,000,000	10,30% - 9,00%	673,000,000	9,00% - 8,00%	707,000,000	9,00% - 8,00%	761,000,000	9,00% - 8,00%	3,417,869,500	DISNAKERTRANSOS
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		63.46%	63,50% – 65,00%		63,55% – 65,10%		63,60%-65,20%		63,65% – 65,10%		63,70% – 65,40%		63,70% – 65,40%		DISNAKERTRANSOS
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Fasilitasi Perlindungan Tenaga Kerja melalui terbentuknya sarana-sarana hubungan industrial meliputi : - Perjanjian Kerja - Peraturan Perusahaan - Perjanjian Kerja Bersama	Tenaga Kerja	70%	75%	1,151,100,000	80%	1,010,000,000	85%	1,210,000,000	90%	1,113,000,000	95%	1,348,000,000	95%	5,832,100,000	DISNAKERTRANSOS
		perlindungan tenaga kerja melalui penyelesaian kasus hubungan industrial		80%	85%		88%		90%		93%		95%		95%		DISNAKERTRANSOS
		Kepesertaan Pekerja/Buruh dalam Program Jamsostek		82%	84%		86%		88%		90%		92%		92%		DISNAKERTRANSOS
		Pengembangan sistem pengupahan		5 Kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 Kali		DISNAKERTRANSOS
		Pengawasan Ketenagakerjaan melalui pemeriksaan dan pengujian peralatan K3 di Perusahaan		80% dari 129 perusahaan	84%		85.5%		87%		88.5%		90%		90%		DISNAKERTRANSOS
15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH																	
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Penguatan modal sosial, terlaksananya komunikasi, pertukaran informasi, pengetahuan, inovasi setra pengutan kelembagaan koordinasi pada klaster industri terpilih dalam kerangka pengembangan produk lokal	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	NA	Penguatan modal sosial	183,000,000	Penguatan modal sosial	288,000,000	komunikasi, pertukaran informasi, pengetahuan	240,000,000	komunikasi, pertukaran informasi, pengetahuan	216,000,000	inovasi pada klaster industri terpilih	197,000,000	inovasi pada klaster industri terpilih	1,124,000,000	DISKOPINDAGTAN / SETDA

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
		Terlaksananya pengembangan model berbasis potensi lokal melalui peningkatan kapasitas SDM untuk pemberdayaan komunitas dan Industri Rumah Tangga bagi 5 - 20% komunitas UMKM setiap tahunnya		NA	50%		20%	240,000,000	15%	259,000,000	10%	272,000,000	5%	286,000,000	5%	1,057,000,000	DISKOPINDAGTAN
		Teridentifikasinya segmentasi pasar bagi setiap kluster industri		NA	8 kali		10%	192,000,000	15%	240,000,000	18%	252,000,000	15%	197,000,000	15%	881,000,000	DISKOPINDAGTAN
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Tersedianya Tenaga Kerja per tahun yang siap pakai sesuai kebutuhan 4 klaster industri unggulan (klaster industri; makanan minuman; tekstil dan produk tekstil; kerajinan; dan telematika)	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	NA	100	677,929,000	300 tenaga kerja	336,000,000	250 tenaga kerja	240,000,000	200 tenaga kerja	216,000,000	200 tenaga kerja	197,000,000	200 tenaga kerja	1,666,929,000	DISKOPINDAGTAN
		Lahirnya teknopreneur baru berdasarkan potensi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan Industri rumah tangga sebanyak 5 - 25% komunitas wirausahawan baru tiap tahunnya		4500 pengusaha UMKM (sekitar 300 pelaku usaha perkelurahan atau 30 komunitas @ 10 pelaku usaha)	10%		15%	96,000,000	25%	240,000,000	25%	216,000,000	25%	197,000,000	25%	749,000,000	DISKOPINDAGTAN
		Terciptanya penguatan pasar produk usaha-usaha berbasis komunitas dan Industri Rumah Tangga melalui penciptaan produk baru UMKM		NA	1 produk		10 produk	144,000,000	15 produk	240,000,000	20 produk	211,000,000	15 produk	197,000,000	15 produk	792,000,000	DISKOPINDAGTAN
		Terlaksananya pendampingan pelaku UMKM/IKM Kota Cimahi		NA	0		20%	120,000,000	30%	192,000,000	30%	192,000,000	20%	148,000,000	20%	652,000,000	DISKOPINDAGTAN
		Terwujudnya penguatan HKI produk-produk usaha lokal melalui peningkatan standar mutu produk bagi pelaku usaha tiap tahunnya		NA	0		20%	192,000,000	30%	240,000,000	30%	240,000,000	20%	197,000,000	20%	869,000,000	DISKOPINDAGTAN
		Terciptanya peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan bagi 15 - 30 kominitas pelaku usaha setiap tahunnya		NA	50 pelaku usaha		20%	192,000,000	30%	240,000,000	30%	264,000,000	20%	298,000,000	20%	994,000,000	DISKOPINDAGTAN
		Terfasilitasinya penduduk berpendapatan rendah dalam komunitas usaha untuk mendapatkan pembinaan dan pendampingan		NA			1%	192,000,000	2%	211,000,000	2%	222,000,000	3%	239,000,000	3%	864,000,000	DISKOPINDAGTAN
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terfasilitasinya kemudahan akses permodalan dan insentif untuk inovasi bisnis bagi pelaku usaha klaster industri potensial sebanyak 2 - 5% dari jumlah pelaku usaha setiap tahunnya	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	NA	2%	171,043,000	5%	384,000,000	5%	403,000,000	5%	423,000,000	5%	456,000,000	5%	1,837,043,000	SETDA
		Tersedianya kemudahan - kemudahan usaha bagi pelaku usaha melalui peningkatan mutu produk dan bantuan prasarana proses produksi dengan target nasional ekspor		NA	1%		5%	96,000,000	4%	144,000,000	3%	148,000,000	2%	159,000,000	2%	547,000,000	DISKOPINDAGTAN
		Tersedianya minimal 3 lokasi publik space yang berfasilitas hotspot		NA					1 lokasi	192,000,000	1 lokasi	216,000,000	1 lokasi	246,000,000	1 lokasi	654,000,000	DISKOPINDAGTAN
		Terfasilitasinya peningkatan kemampuan UMKM dalam memanfaatkan internet sebagai media bisnis sebanyak 20 - 35% setiap tahunnya		NA	50 pelaku usaha		20%	192,000,000	25%	240,000,000	30%	216,000,000	25%	197,000,000	25%	845,000,000	DISKOPINDAGTAN

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
		Terbangunnya kerjasama antar pelaku usaha berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga melalui kemitraan dan program Bapak Asuh		NA			20%	288,000,000	30%	384,000,000	25%	288,000,000	25%	246,000,000	25%	1,206,000,000	DISKOPINDAGTAN
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Penyehatan dan peningkatan peran sub sektor keuangan koperasi di Kota Cimahi Pengembangan inovasi Koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	NA	5%	486,678,000	5%	192,000,000	5%	240,000,000	5%	216,000,000	5%	197,000,000	5%	1,331,678,000	DISKOPINDAGTAN
16. PENANAMAN MODAL																	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian dalam Penanaman modal	Penanaman Modal	NA	4 kali	222,000,000	Mingkatnya Penanaman modal sebesar 4% pertahun	264,000,000	Mingkatnya Penanaman modal sebesar 4% pertahun	240,000,000	Mingkatnya Penanaman modal sebesar 5% pertahun	216,000,000	Mingkatnya Penanaman modal sebesar 5% pertahun	197,000,000	Mingkatnya Penanaman modal sebesar 5% pertahun	1,139,000,000	KANTOR PENMO
		Terlaksanakanya promosi klaster industri unggulan, lahirnya produk-produk unggulan dan terlaksananya Pengembangan Ekonomi Lokal Award untuk mendukung Apresiasi Inovasi		NA	1%	1,531,000,000	5%	1,536,000,000	10%	1,632,000,000	8%	1,536,000,000	5%	1,476,000,000	0.05	7,711,000,000	KANTOR PENMO
		Terfasilitasi kerjasama investasi dengan dunia usaha, kemitraan klaster industri, kemitraan antar daerah, dan kemitraan daerah-daerah		NA	4 kali dengan dunia usaha		Kerjasama investasi dengan dunia usaha	96,000,000	Kerjasama investasi antar daerah dan dunia usaha	192,000,000	Kerjasama investasi antar daerah dan dunia usaha	288,000,000	Kerjasama investasi antar daerah dan dunia usaha	123,000,000	Kerjasama investasi antar daerah dan dunia usaha	699,000,000	KANTOR PENMO
		Peningkatan alih pengetahuan, inovasi, dan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SID) kepada pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur akademisi, lembaga riset, bisnis dan jajaran Pemerintah daerah					Alih pengetahuan	100,000,000	Alih pengetahuan	144,000,000	Alih pengetahuan	144,000,000	Alih pengetahuan	172,000,000	Alih pengetahuan	560,000,000	KANTOR PENMO
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Pembangunan Sistem dan terlaksananya kemudahan perizinan usaha bagi klaster industri terpilih sebanyak 5 - 10% dari jumlah pelaku usaha inovatif tiap tahunnya	Penanaman Modal	NA	3%	49,500,000	5%	72,000,000	10%	96,000,000	8%	72,000,000	3%	49,000,000	0.03	338,500,000	KPPT
		Tersedianya informasi kearsipan perizinan (19 titik dan 100 lbr brosur) dan terlaksananya proses perizinan (66 izin) secara cepat, mudah dan transparan sesuai prosedur standar pelayanan Minimum		2000 izin	2500 izin	440,000,000	2500 izin	696,000,000	2500 izin	752,000,000	2500 izin	789,000,000	2500 izin	849,000,000	12.500 ijin	3,526,000,000	KPPT
		Inovasi pelayanan informasi perijinan elektronik dan non elektronik terhadap publik						150,000,000		158,000,000		165,000,000		174,000,000		647,000,000	
		Terwujudnya database izin dalam bentuk data spasial (GIS) dan analisis data		1 dokumen	1 jenis ijin	175,000,000	1 jenis ijin	168,000,000	1 jenis ijin	176,000,000	1 jenis ijin	185,000,000	1 jenis ijin	199,000,000	1 jenis ijin	903,000,000	KPPT
		Terwujudnya rekapitulasi data tahunan perizinan dan arsip perizinan digital		NA	1 dokumen rekap	190,000,000	1 dokumen rekap dan 500 dokumen izin digital	192,000,000	1 dokumen rekap dan 500 dokumen izin digital	202,000,000	1 dokumen rekap dan 500 dokumen izin digital	212,000,000	1 dokumen rekap dan 500 dokumen izin digital	228,000,000	1 dokumen rekap dan 500 dokumen izin digital	1,024,000,000	KPPT
		Terwujudnya dan terpeliharanya aplikasi sistem informasi pelayanan perizinan berbasis web		NA	0%	-	1 SIM	144,000,000	1 SIM	151,000,000	1 SIM	159,000,000	1 SIM	171,000,000	1 SIM	625,000,000	KPPT
17. KEBUDAYAAN																	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah (cakupan fasilitasi seni (30%)	Kebudayaan	Keikutsertaan alimpaido	Fasilitasi gelar seni budaya	778,671,100	Fasilitasi gelar seni budaya	823,000,000	Fasilitasi gelar seni budaya	905,000,000	Fasilitasi gelar seni budaya	995,000,000	Fasilitasi gelar seni budaya	1,122,000,000	Fasilitasi gelar seni budaya	4,623,671,100	DISKOPINDAGTAN

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
		terselenggaranya gelar karya dan kreatifitas seni budaya daerah (cakupan gelar seni (75%))					Fasilitasi pengembangan cluster budaya yang bersifat tradisional dan modern		Fasilitasi pengembangan cluster budaya yang bersifat tradisional dan modern		Fasilitasi pengembangan cluster budaya yang bersifat tradisional dan modern		Fasilitasi pengembangan cluster budaya yang bersifat tradisional dan modern		Fasilitasi pengembangan cluster budaya yang bersifat tradisional dan modern		
18. KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA																	
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Fasilitasi dan pembinaan organisasi kepemudaan dan apresiasi inovasi	Kepemudaan dan Olah Raga	5 kali	Fasilitasi dan pembinaan organisasi kepemudaan dan lomba	538,000,000	Fasilitasi dan pembinaan organisasi kepemudaan, lomba, dan pemuda pelopor	584,000,000	Fasilitasi dan pembinaan organisasi kepemudaan, lomba, dan pemuda pelopor	502,000,000	Fasilitasi dan pembinaan organisasi kepemudaan, lomba, dan pemuda pelopor	516,000,000	Fasilitasi dan pembinaan organisasi kepemudaan, lomba, dan pemuda pelopor	543,000,000	Fasilitasi organisasi kepemudaan	2,683,000,000	DISDIKPORA
		meningkatnya manejemem ormas,LSM dan LNL			Peningkatan manajemen Ormas, LSM dan LNL	103,002,500	Peningkatan manajemen Ormas, LSM dan LNL	124,000,000	Peningkatan manajemen Ormas, LSM dan LNL	155,000,000	Peningkatan manajemen Ormas, LSM dan LNL	193,000,000	Peningkatan manajemen Ormas, LSM dan LNL	247,000,000	Peningkatan manajemen Ormas, LSM dan LNL	822,002,500	KESBANG
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Peningkatan keterampilan dan Kecakapan Pemuda	Kepemudaan dan Olah Raga	500 orang diklatsar	Meningkatnya keterampilan pemuda	105,000,000	Meningkatnya keterampilan pemuda	106,000,000	Meningkatnya keterampilan pemuda	110,000,000	Meningkatnya keterampilan pemuda	115,000,000	Meningkatnya keterampilan pemuda	123,000,000	Meningkatnya keterampilan pemuda	559,000,000	DISDIKPORA
		Pengembangan Teknoprener terutama kepada para pemuda				100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		400,000,000			
	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	pengetahunan, pemahaman, dan kesadaran pemuda tentang bahaya penyalahgunaan narkoba	Kepemudaan dan Olah Raga	5 kali di 15 kelurahan			Meningkatnya kesadaran pemuda akan bahaya narkoba	72,000,000	Meningkatnya kesadaran pemuda akan bahaya narkoba	77,000,000	Meningkatnya kesadaran pemuda akan bahaya narkoba	82,000,000	Meningkatnya kesadaran pemuda akan bahaya narkoba	89,000,000	Meningkatnya kesadaran pemuda akan bahaya narkoba	320,000,000	DISDIKPORA
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	Gedung Olahraga 11, Stadion 4, Lapangan Olahraga 10			Pengembang n Lapangan Krida		Rehabilitasi Stadion Sangkuriang dan Pengembang an Sarana Kepemudaan	3,840,000,000	Pengembang n Lapangan Krida dan Stadion dan GOR Sangkuriang	3,840,000,000	Pengembang n Lapangan Krida dan Stadion dan GOR Sangkuriang	3,936,000,000		11,616,000,000	PU
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	kuantitas dan kualitas atlet berbakat dan berprestasi	Kepemudaan dan Olah Raga	176 atlet pelajar berbakat dari 7 cabang olah raga (atletik, basket, volly, tenis meja, panahan, renang dan pencaksilat), kompetisi popwilda tahun 2011 ikut 6 cabor dari 8 cabor (juara 2), Kompetisi Popda tahun 2012 ikut 15 cabor dai 17 cabor (peringkat 10 se jabar)	Pembinaan atlet berbakat, mengikuti kompetisi Popwilda dengan target peringkat 2, pemasyarakat-an olah raga, serta POR Pemda	685,573,900	Pembinaan atlet berbakat, mengikuti Popda dengan target 10 besar, pemasyarakat an olah raga, serta POR Pemda	950,000,000	Pembinaan atlet berbakat, mengikuti kompetisi Popwilda dengan target peringkat 2, mengikuti Kompetisi Pontren tingkat jawa Barat dengan target 10 besar, pemasyarakat an olah raga, serta POR Pemda	1,202,000,000	Pembinaan atlet berbakat, mengikuti kompetisi Popda dengan target peringkat 8, Penyelenggara an Kompetisi Pontren tingkat Kota Cimahi, pemasyarakat an olah raga, serta POR Pemda	1,425,000,000	Pembinaan atlet berbakat, mengikuti kompetisi Popwilda dengan target peringkat 1, mengikuti Kompetisi Pontren tingkat jawa Barat dengan target 10 besar, pemasyarakat an olah raga, serta POR Pemda	1,459,000,000	Pembinaan atlet berbakat mengikuti popwilda, popda dan pontren, pemasyarakatan olah raga , serta POR Pemda	5,721,573,900	DISDIKPORA/ KESRA /KORPRI
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	kuantitas dan kualitas tenaga keolahragaan	Kepemudaan dan Olah Raga	150 orang tenaga keolahragaan masyarakat (pelatih)	Peningkatan kapasitas 40 org tenaga keolahragaan masyarakat	39,426,100	Peningkatan kapasitas 45 org tenaga keolahragaan masyarakat	44,000,000	Peningkatan kapasitas 50 org tenaga keolahragaan masyarakat	48,000,000	Peningkatan kapasitas 50 org tenaga keolahragaan masyarakat	48,000,000	Peningkatan kapasitas 50 org tenaga keolahragaan masyarakat	49,000,000	Peningkatan kapasitas 235 org tenaga keolahragaan masyarakat	228,426,100	DISDIKPORA
19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI																	
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	meningkatnya pengetahuan, pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik dan demokrasi	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	5 kali pendidikan politik masyarakat	Fasilitasi pendidikan politik masyarakat	227,570,712	Fasilitasi pendidikan politik masyarakat	274,000,000	Fasilitasi pendidikan politik masyarakat	341,000,000	Fasilitasi pendidikan politik masyarakat	427,000,000	Fasilitasi pendidikan politik masyarakat	547,000,000	Fasilitasi pendidikan politik masyarakat	1,816,570,712	KESBANG

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial	Fasilitasi pemilu	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		fasilitas penyelenggaraa n PILGUB	78,800,000	fasilitas penyelenggara an PILPRES DAN PILEG	5,028,000,000					fasilitas penyelenggara an PILKADA	5,100,000,000	fasilitas penyelenggaraan Pemilu	10,206,800,000	KESBANG/ BAG. PEMERINTAHAN/ KECAMATAN/ KELURAHAN
	Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	memantapkan pelaksanaan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 1945, dan NKRI)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi unsur organisasi pemuda, organisasi politik, remaja dan pelajar dan fasilitasi FPK	Peningkatan wawasan kebangsaan	1,333,690,125	Peningkatan wawasan kebangsaan	1,281,000,000	Peningkatan wawasan kebangsaan	2,001,000,000	Peningkatan wawasan kebangsaan	2,501,000,000	Peningkatan wawasan kebangsaan	3,204,000,000	Peningkatan wawasan kebangsaan	10,320,690,125	KESBANG
		Pembauran dan Pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara		Terpeliharanya seni dan budaya Indonesia, forum keagamaan	Terfasilitasinya hilaqoh berbagai forum keagamaan, dan pentas seni budaya		Terfasilitasinya a hilaqoh berbagai forum keagamaan, dan pentas seni budaya		Terfasilitasinya hilaqoh berbagai forum keagamaan, dan pentas seni budaya		Terfasilitasinya hilaqoh berbagai forum keagamaan, dan pentas seni budaya		Terfasilitasinya hilaqoh berbagai forum keagamaan, dan pentas seni budaya		KESBANG		
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	meningkatkan wawasan kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Pelaksanaan PHBA dan PHBN 5 kali	Peningkatan wawasan kebangsaan	85,870,000	Peningkatan wawasan kebangsaan	927,000,000	Peningkatan wawasan kebangsaan	941,000,000	Peningkatan wawasan kebangsaan	955,000,000	Peningkatan wawasan kebangsaan	1,004,000,000	Peningkatan wawasan kebangsaan	3,912,870,000	Kecamatan/ kelurahan
		meningkatkan peran lembaga- lembaga sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan FKUB dalam penyelesaian konflik antar dan inter umat beragama		Fasiltasi koordinasi tokoh agama dan tokoh masyarakat	72,657,000	Fasiltasi koordinasi tokoh agama dan tokoh masyarakat	88,000,000	Fasiltasi koordinasi tokoh agama dan tokoh masyarakat	109,000,000	Fasiltasi koordinasi tokoh agama dan tokoh masyarakat	136,000,000	Fasiltasi koordinasi tokoh agama dan tokoh masyarakat	175,000,000	Fasiltasi koordinasi tokoh agama dan tokoh masyarakat	580,657,000	KESBANG	
	Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pendataan gangguan tramtibum dan pelanggaran perda serta pembinaan kelembagaan tramtibum	Meningkatnya kualitas pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pendataan gangguan tramtibum dan pelanggaran perda serta pembinaan kelembagaan tramtibum	120,000,000	Meningkatnya kualitas pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pendataan gangguan tramtibum dan pelanggaran perda serta pembinaan kelembagaan tramtibum	240,000,000	Meningkatnya kualitas pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pendataan gangguan tramtibum dan pelanggaran perda serta pembinaan kelembagaan tramtibum	240,000,000	Meningkatnya kualitas pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pendataan gangguan tramtibum dan pelanggaran perda serta pembinaan kelembagaan tramtibum	240,000,000	Meningkatnya kualitas pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pendataan gangguan tramtibum dan pelanggaran perda serta pembinaan kelembagaan tramtibum	246,000,000	Meningkatnya kualitas pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pendataan gangguan tramtibum dan pelanggaran perda serta pembinaan kelembagaan tramtibum	1,086,000,000	SATPOL PP
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui berbagai upaya penegakan peraturan, pengamanan dan penertiban serta peningkatan kapasitas SDM keamanan	,	1,450,000,000	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui berbagai upaya penegakan peraturan, pengamanan dan penertiban serta peningkatan kapasitas SDM keamanan	2,317,000,000	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui berbagai upaya penegakan peraturan, pengamanan dan penertiban serta peningkatan kapasitas SDM keamanan	2,357,000,000	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui berbagai upaya penegakan peraturan, pengamanan dan penertiban serta peningkatan kapasitas SDM keamanan	2,384,000,000	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui berbagai upaya penegakan peraturan, pengamanan dan penertiban serta peningkatan kapasitas SDM keamanan	2,255,000,000	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui berbagai upaya penegakan peraturan, pengamanan dan penertiban serta peningkatan kapasitas SDM keamanan	10,763,000,000	SATPOL PP/ KECAMATAN/ KELURAHAN
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Peningkatan tanggap bencana	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Pengembangan koordinasi dan kesiagaan dalam tanggap bencana	Pengembangan koordinasi dan kesiagaan dalam tanggap bencana	696,000,000	Peningkatan koordinasi dan kesiagaan dalam tanggap bencana	143,000,000	Peningkatan koordinasi dan kesiagaan dalam tanggap bencana	150,000,000	Pemantapan koordinasi dan kesiagaan dalam tanggap bencana	158,000,000	Pemantapan koordinasi dan kesiagaan dalam tanggap bencana	162,000,000	Pemantapan koordinasi dan kesiagaan dalam tanggap bencana	1,309,000,000	SETDA (KESRA)
					mitigasi bencana	1,500,000,000	mitigasi bencana	1,500,000,000	mitigasi bencana	1,500,000,000	mitigasi bencana	1,500,000,000	mitigasi bencana	7,500,000,000	SETDA (KESRA)		

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
20. OTDA,	PEMERINTAHAN UMUM,	ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,	KEPEGAWAIAN,														
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Meningkatnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	1 pedoman SOP SKPD	dokumen SOP SKPD, SPM, Indek Kepuasan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, Dokumen Anjab dan ABK dan Sertifikasi ISO	1,110,250,000	dokumen SOP SKPD, SPM, Indek Kepuasan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, Dokumen Anjab dan ABK , Sertifikasi ISO serta pelaksanaan audit eksternal/ surveillance	1,212,000,000	dokumen SOP SKPD, SPM, Indek Kepuasan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, Dokumen Anjab dan ABK , Sertifikasi ISO serta pelaksanaan audit eksternal/ surveillance	1,575,000,000	dokumen SOP SKPD, SPM, Indek Kepuasan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, Dokumen Anjab dan , Sertifikasi ISO serta pelaksanaan audit eksternal/ surveillance	1,228,000,000	dokumen SOP SKPD, SPM, Indek Kepuasan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, Dokumen Anjab dan ABK, Sertifikasi ISO serta pelaksanaan audit eksternal/ surveillance	1,654,000,000	dokumen SOP SKPD, SPM, Indek Kepuasan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, Dokumen Anjab dan ABK , Sertifikasi ISO serta pelaksanaan audit eksternal/ surveillance	6,779,250,000	SETDA (BAG. ORGANISASI); KPPT
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah aparatur pemerintah	Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandiaan	5.913 Orang PNS	Penambahan jumlah pegawai dari Formasi Honorer, dan Formasi Umum)	5,283,835,000	Penambahan jumlah pegawai dari Formasi Umum	5,995,000,000	Penambahan jumlah pegawai dari Formasi Umum	7,022,000,000	Penambahan jumlah pegawai dari Formasi Umum	8,236,000,000	Penambahan jumlah pegawai dari Formasi Umum	9,911,000,000	Penambahan pegawai dari Formasi Honorer dan 1.000 Formasi Umum	36,447,835,000	BKD; KORPRI
		pelayanan administrasi kepegawaian internal dan eksternal		KGB 10.161, Kenaikan Pangkat 3.338, 5.913 PNS Pemkot Cimahi, 87%	Pelayanan administrasi kepegawaian, Produktivitas PNS Pemkot Cimahi, 88%		Pelayanan administrasi kepegawaian, Produktivitas PNS Pemkot Cimahi, 88%		Pelayanan administrasi kepegawaian, Produktivitas PNS Pemkot Cimahi, 89%		Pelayanan administrasi kepegawaian, Produktivitas PNS Pemkot Cimahi, 89%		Pelayanan administrasi kepegawaian, Produktivitas PNS Pemkot Cimahi, 90%		Pelayanan administrasi kepegawaian, Produktivitas PNS Pemkot Cimahi, 90%		
		tingkat produktifitas aparatur															
		Meningkatnya pengembangan aparatur			S2DN = 26 orang, S2LN = 2 orang, Udin KPI = 2 Periode	Pengembangan aparatur		Pengembangan n aparatur		Pengembang an aparatur		Pengembanga n aparatur		Pengembanga n aparatur		Pengembangan aparatur	
		Meningkatnya motivasi , pengetahuan dan Kemampuan aparatur dalam Pengembangan di Bidang Perencana					3 org pegawai bappeda yang mengikuti Pendidikan & Pelatihan fungsional perencana serta fasilitasi tugas belajar dan ijin belajar bagi pegawai bappeda										BAPPEDA
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	tingkat keterampilan dan profesionalisme aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	2.207 Pegawai	Meningkatkan Ketermpilan dan profesionalisme aparatur	1,314,190,000	Meningkatkan Ketermpilan dan profesionalism e aparatur	3,040,000,000	Meningkatkan Ketermpilan dan profesionalism e aparatur	4,287,000,000	Meningkatkan Ketermpilan dan profesionalism e aparatur	4,664,000,000	Meningkatkan Ketermpilan dan profesionalism e aparatur	5,230,000,000	Meningkatkan Ketermpilan dan profesionalisme aparatur	18,535,190,000	BKD; KORPRI

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					2013		2014		2015		2016		2017					
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.				
	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	jumlah aparatur yang purna tugas	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	PNS Purna Tugas Sebanyak 677 Orang	PNS yang purna tugas	80,530,000	PNS yang purna tugas	89,000,000	PNS yang purna tugas	102,000,000	PNS yang purna tugas	118,000,000	PNS yang purna tugas	139,000,000	PNS yang purna tugas	528,530,000	BKD	
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga DPRD	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	Penetapan Raperda, peningkatan kapasitas DPRD, pemahaman masyarakat akan perda, dan menjaring aspirasi masyarakat	Penetapan Raperda, peningkatan kapasitas DPRD, pemahaman masyarakat akan perda, dan menjaring aspirasi masyarakat	24,776,650,100	Penetapan Raperda, peningkatan kapasitas DPRD, pemahaman masyarakat akan perda, dan menjaring aspirasi masyarakat	24,777,000,000	Penetapan Raperda, peningkatan kapasitas DPRD, pemahaman masyarakat akan perda, dan menjaring aspirasi masyarakat	24,777,000,000	Penetapan Raperda, peningkatan kapasitas DPRD, pemahaman masyarakat akan perda, dan menjaring aspirasi masyarakat	24,777,000,000	Penetapan Raperda, peningkatan kapasitas DPRD, pemahaman masyarakat akan perda, dan menjaring aspirasi masyarakat	24,777,000,000	Penetapan Raperda, peningkatan kapasitas DPRD, pemahaman masyarakat akan perda, dan menjaring aspirasi masyarakat	123,884,650,100	SETWAN	
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tertatnya peraturan perundang-undangan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	157 Perda, Perwal, SK Walikota, MOU dan Penyuluhan hukum kepada masyarakat (15 kelurahan) sebanyak 6304 orang	Produk hukum daerah dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan Perda	1,985,450,000	Produk hukum daerah dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan Perda	1,978,000,000	Produk hukum daerah dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan Perda	2,049,000,000	Produk hukum daerah dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan Perda	2,120,000,000	Produk hukum daerah dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan Perda	2,246,000,000	Produk hukum daerah dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan Perda	10,378,450,000	SETDA BAGIAN HUKUM/ SATPOL	
	Program Penguatan Hak Asasi Manusia	Penguatan RANHAM	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	Terbentuknya panitia RANHAM dan sosialisasi RANHAM kepada 400 orang	Penguatan RANHAM	243,968,500	Penguatan RANHAM	246,000,000	Penguatan RANHAM	258,000,000	Penguatan RANHAM	269,000,000	Penguatan RANHAM	288,000,000	Penguatan RANHAM	1,304,968,500	SETDA BAGIAN HUKUM	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	41 penanganan kasus	Penanganan kasus	1,445,000,000	Penanganan kasus	1,457,000,000	Penanganan kasus	1,526,000,000	Penanganan kasus	1,595,000,000	Penanganan kasus	1,706,000,000	Penanganan kasus	7,729,000,000	SETDA BAGIAN HUKUM	
						Bantuan hukum bagi anggota KORPRI yang bermasalah	33,000,000	Bantuan hukum bagi anggota KORPRI yang bermasalah	42,000,000	Bantuan hukum bagi anggota KORPRI yang bermasalah	55,000,000	Bantuan hukum bagi anggota KORPRI yang bermasalah	71,000,000	Bantuan hukum bagi anggota KORPRI yang bermasalah	201,000,000	KORPRI		
					Pemeriksaan reguler sebanyak 290 obyek pemeriksaan (obrik) dan Pemeriksaan tertentu sebanyak 20 obyek pemeriksaan (obrik)	pemriksaan reguler dan tertentu , khusus dan tindak lanjut hasil temuan	1,521,098,200	pemeriksaan reguler dan tertentu	1,677,000,000	pemriksaan reguler dan tertentu	1,768,000,000	pemriksaan reguler dan tertentu	1,851,000,000	pemriksaan reguler dan tertentu	1,983,000,000	pemriksaan reguler dan tertentu	8,800,098,200	INSPEKTORAT
					meningkatnya pelayanan di kecamatan dan kelurahan	Peningkatan pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	854,790,000	Peningkatan pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	821,000,000	Peningkatan pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	821,000,000	Peningkatan pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	821,000,000	Peningkatan pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	841,000,000	Peningkatan pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	4,158,790,000	SETDA (PEMERINTAHAN)

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan	kuantitas dan kualitas aparatur pengawas	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) sebanyak 120 orang, Pelatihan substantif, diklat fungsional	Meningkatnya kapasitas aparatur pengawas	60,000,000	Meningkatnya kapasitas aparatur pengawas	392,000,000	Meningkatnya kapasitas aparatur pengawas	395,000,000	Meningkatnya kapasitas aparatur pengawas	400,000,000	Meningkatnya kapasitas aparatur pengawas	414,000,000	Meningkatnya kapasitas aparatur pengawas	1,661,000,000	INSPEKTORAT
	Program Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	Koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan selama 2 tahun, pemberdayaan masyarakat 3 tahun	Koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	275,000,000	Koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	378,000,000	Koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	397,000,000	Koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	417,000,000	Koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	449,000,000	Koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan selama 4 tahun, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1,916,000,000	SETDA (KESRA)
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	Koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan selama 2 tahun	Koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan selama 1 tahun	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan selama 1 tahun	100,000,000	SETDA (KESRA)
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	penetapan batas wilayah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	penetapan batas wilayah dalam kota cimahi	penetapan batas wilayah dengan kota/kabupaten sekitar	838,530,000	penetapan batas wilayah dengan kota/kabupaten sekitar	808,000,000	penetapan batas wilayah dengan kota/kabupaten sekitar	810,000,000	penetapan batas wilayah dengan kota/kabupaten sekitar	812,000,000	penetapan batas wilayah dengan kota/kabupaten sekitar	835,000,000	penetapan batas wilayah dengan kota bandung, kabupaten bandung dan kabupaten bandung barat	4,103,530,000	SETDA (PEMERINTAHAN)
		Meningkatnya kapasitas lembaga pemerintah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	sosialisasi tentang manajemen lingkungan terhadap pengurus RT se kota Cimahi	meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur kecamatan & kelurahan, RW & RT		meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur kecamatan & kelurahan, RW & RT		meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur kecamatan & kelurahan, RW & RT		meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur kecamatan & kelurahan, RW & RT		meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur kecamatan & kelurahan, RW & RT		meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur kecamatan & kelurahan, RW & RT		SETDA (PEMERINTAHAN)
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatkan layanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	Terlaksananya dialog/audiensi KDH/WKDH dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Terselenggaranya dialog/audensi, inspeksi, kunjungan kerja dan koordinasi horizontal dan vertikal	2,166,300,200	Terselenggaranya dialog/audensi, inspeksi, kunjungan kerja dan koordinasi horizontal dan vertikal	2,255,000,000	Terselenggaranya dialog/audensi, inspeksi, kunjungan kerja dan koordinasi horizontal dan vertikal	2,293,000,000	Terselenggaranya dialog/audensi, inspeksi, kunjungan kerja dan koordinasi horizontal dan vertikal	2,407,000,000	Terselenggaranya dialog/audensi, inspeksi, kunjungan kerja dan koordinasi horizontal dan vertikal	2,591,000,000	Terselenggaranya dialog/audensi, inspeksi, kunjungan kerja dan koordinasi horizontal dan vertikal	11,712,300,200	SETDA (HUMAS PROTOKOL)
					Operasional KDH dan WKDH	350,000,000	Operasional KDH dan WKDH	350,000,000	Operasional KDH dan WKDH	350,000,000	Operasional KDH dan WKDH	350,000,000	Operasional KDH dan WKDH	350,000,000		1,750,000,000	BAG. UMUM
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		SEMUA SKPD

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
		tingkat pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat	Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		SEMUA SKPD	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		SEMUA SKPD	
		Tersedianya bangunan gedung fasilitas sosial dan pemerintahan	Mesjid Agung, Rumah Dinas, Kantor Pemerintahan	70%	5,640,000,000	75%	13,056,000,000	85%	11,040,000,000	95%	5,088,000,000	100%	492,000,000	100%	35,316,000,000	DINAS PU	
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Pusat Inovasi												PU			
		Terjaminnya kualitas bangunan gedung fasilitas sosial dan pemerintahan		Mesjid Agung, Rumah Dinas, Kantor Pemerintahan	35%	4,240,000,000	40%	5,700,000,000	45%	5,328,000,000	55%	1,248,000,000	60%	492,000,000	60%	17,008,000,000	DINAS PU
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		SEMUA SKPD	
		tingkat kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		SEMUA SKPD	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		SEMUA SKPD	
		tingkat ketersediaan dokumen operasional		100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		SEMUA SKPD	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	tingkat peningkatan kapasitas aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian														

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		SEMUA SKPD
	Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Tercapainya target pendapatan pajak daerah 5 - 10% per tahun	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminsirtrasi Keuangan Daerah	Pajak Daerah sebesar 63.753.989.389	21.2%	5,653,717,700	7.0%	3,372,000,000	7.0%	3,625,000,000	7.0%	3,896,000,000	7.0%	4,189,000,000	9.85%	20,735,717,700	DISPENDA
	Progam Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	peningkatan manajemen aset, dokumen standar harga barang, peta aset potensial yang terintegrasi, pengamanan fisik aset pemkot	Meningkatnya manajemen aset daerah	1,633,719,000	Meningkatnya manajemen aset daerah	1,726,000,000	Meningkatnya manajemen aset daerah	1,898,000,000	Meningkatnya manajemen aset daerah	1,632,000,000	Meningkatnya manajemen aset daerah	1,673,000,000	Meningkatnya manajemen aset daerah	8,562,719,000	SETDA (PERLENGKAPAN)
	Progam Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	akuntabilitas penggunaan anggaran	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	5 dokumen : perda APBD, Peraturan KDH Penjabaran APBD, perubahan	pengeloaan dan pengembangan keuangan daerah yang akuntabel	1,335,000,000	pengeloaan dan pengembangan keuangan daerah yang akuntabel	1,349,000,000	pengeloaan dan pengembangan keuangan daerah yang akuntabel	1,373,000,000	pengeloaan dan pengembangan keuangan daerah yang akuntabel	1,373,000,000	pengeloaan dan pengembangan keuangan daerah yang akuntabel	1,314,000,000	pengeloaan dan pengembangan keuangan daerah yang akuntabel	6,744,000,000	SETDA (KEUANGAN)
				Fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan analisa standar biaya dan standar belanja	Fasilitasi , koordinasi dan penyusunan analisa standar biaya dan standar belanja	233,120,000	Fasilitasi , koordinasi dan penyusunan analisa standar biaya dan standar	236,000,000	Fasilitasi , koordinasi dan penyusunan analisa standar biaya dan standar	248,000,000	Fasilitasi , koordinasi dan penyusunan analisa standar biaya dan standar	260,000,000	Fasilitasi , koordinasi dan penyusunan analisa standar biaya dan standar	280,000,000	Fasilitasi , koordinasi dan penyusunan analisa standar biaya dan standar belanja	1,257,120,000	SETDA (ADBANG)
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Akuntabilitas keuangan daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	100% (laporan keuangan semesteran dan akhir tahun, prognosis realisasi anggaran, dan capaian kinerja dan ikhisar kinerja SKPKD	Laporan keuangan pemerintah yang akuntabel	275,000,000	Laporan keuangan pemerintah yang akuntabel	264,000,000	Laporan keuangan pemerintah yang akuntabel	264,000,000	Laporan keuangan pemerintah yang akuntabel	264,000,000	Laporan keuangan pemerintah yang akuntabel	271,000,000	Laporan keuangan pemerintah yang akuntabel	1,338,000,000	SETDA (KEUANGAN)
				100% (laporan keuangan semesteran dan akhir tahun, prognosis realisasi anggaran, dan capaian kinerja dan ikhisar kinerja SKPKD												SETDA BAGIAN KEUANGAN	
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	kerjasama antar pemerintah Kota Cimahi dengan daerah atau pihak lain dalam berbagai bidang	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,	24 kali kerjasama	terjalinnnya kerjasama antar daerah	600,000,000	terjalinnnya kerjasama antar daerah	576,000,000	terjalinnnya kerjasama antar daerah	576,000,000	terjalinnnya kerjasama antar daerah	576,000,000	terjalinnnya kerjasama antar daerah	590,000,000	terjalinnnya kerjasama antar daerah	2,918,000,000	SETDA (PEMERINTAHAN)

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2013		2014		2015		2016		2017		target	Rp.	
		Pengkajian 'sister region atau city dengan luar negeri	Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian				250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		1,000,000,000		
		Pengembangan kerjasama antar daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bersama															
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	tingkat pelayanan pengaduan masyarakat	Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandiaan	100% Pengaduan Terlayani	Tertanganinya pengaduan masyarakat	103,300,000	Tertanganinya pengaduan masyarakat	181,000,000	Tertanganinya pengaduan masyarakat	146,000,000	Tertanganinya pengaduan masyarakat	155,000,000	Tertanganinya pengaduan masyarakat	169,000,000	Tertanganinya pengaduan masyarakat	754,300,000	Humas protokol /KAPDE
	Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama	pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	Pemahaman dan pengamalan agama masyarakat	meningatnya pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat	3,508,830,000	meningatnya pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat	3,537,000,000	meningatnya pengamalan agama dalam kehidupan bermasyaraka t	3,714,000,000	meningatnya pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat	3,899,000,000	meningatnya pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat	4,197,000,000	meningatnya pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat	18,855,830,000	SETDA (KESRA)/KORPRI
21. PERTANAHAN																	
	Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	pengadaan tanah	Pertanahan	pengadaan tanah untuk kepentingan umum	tersediaanya tanah untuk kepentingan umum	41,375,797,493	tersediaanya tanah untuk kepentingan umum, sertifikasi tanah wakaf, penataan tanah	36,000,000,000	tersediaanya tanah untuk kepentingan umum	30,640,000,000	tersediaanya tanah untuk kepentingan umum	39,059,000,000	tersediaanya tanah untuk kepentingan umum	47,059,000,000	tersediaanya tanah untuk kepentingan umum	194,133,797,493	Setda bagian Pemerintahan
		persentase bidang lahan milik pemerintah yang bersertifikat		52.90 % aset milik pemerintah tersertifikat	60%				80%		90%	100%	100%			Setda bagian Pemerintahan	
		Jumlah penyelesaian sengketa pertanahan			penyelesaian sengketa tanah		penyelesaian sengketa tanah		penyelesaian sengketa tanah		penyelesaian sengketa tanah	penyelesaian sengketa tanah	penyelesaian sengketa tanah		penyelesaian sengketa tanah	Setda bagian Pemerintahan	
22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi	meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2 kali fasilitasi UP2K	fasilitasi kemandirian ekonomi masyarakat	57,047,000	fasilitasi kemandirian ekonomi masyarakat	61,000,000	fasilitasi kemandirian ekonomi masyarakat	66,000,000	fasilitasi kemandirian ekonomi masyarakat	73,000,000	fasilitasi kemandirian ekonomi masyarakat	82,000,000	fasilitasi kemandirian ekonomi masyarakat	339,047,000	BPMPPKB
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	tingkat keterlibatan dan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	pembinaan kelembagaan masyarkat tk. Kelurahan dan kecamatan	fasilitasi kelembagaan kemasyarakatan, TMSS, BBGR dan kader	3,990,000,000	fasilitasi kelembagaan kemasyarakatan, TMSS, BBGR dan kader	3,260,000,000	fasilitasi kelembagaan kemasyarakatan, TMSS, BBGR dan kader	3,350,000,000	fasilitasi kelembagaan kemasyarakatan, TMSS, BBGR dan kader	3,450,000,000	fasilitasi kelembagaan kemasyarakatan, TMSS, BBGR dan kader	3,500,000,000	fasilitasi kelembagaan kemasyarakatan, TMSS, BBGR dan kader	17,550,000,000	BPMPPKB/ KECAMATAN/ KELURAHAN
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	pembinaan kelembagaan sanitasi, posyantekdes dan TTG	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Fasilitasi lembaga sanitasi, posyantek kecamatan, kelompok masyarakat peduli TTG, Kader Lingkungan	317,729,000	Fasilitasi lembaga sanitasi, posyantek kecamatan, kelompok masyarakat peduli TTG, Kader Lingkungan	336,000,000	Fasilitasi lembaga sanitasi, posyantek kecamatan, kelompok masyarakat peduli TTG, Kader Lingkungan	369,000,000	Fasilitasi lembaga sanitasi, posyantek kecamatan, kelompok masyarakat peduli TTG, Kader Lingkungan	406,000,000	Fasilitasi lembaga sanitasi, posyantek kecamatan, kelompok masyarakat peduli TTG, Kader Lingkungan	458,000,000	Fasilitasi lembaga sanitasi, posyantek kecamatan, kelompok masyarakat peduli TTG, Kader Lingkungan	1,886,729,000	BPMPPKB

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
					Pemberdayaan posyandu	150,000,000	Pemberdayaan posyandu	150,000,000	Pemberdayaa n Posyandu	150,000,000	pemberdayaan posyandu	150,000,000	Pemberdayaa n posyandu	150,000,000	target	750,000,000	BPMPPKB
		Rumusan apresiasi inovasi (teknologi masyarakat) di daerah															
		partisipasi masyarakat dalam pembangunan		pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	meningkatnya partisipasu masyarakat dalam pembangunan	237,788,860									meningkatnya partisipasu masyarakat dalam pembangunan	237,788,860	KECAMATAN/ KELURAHAN
	Program Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		peningkatan lingkungan kelurahan	1,500,000,000	peningkatan lingkungan kelurahan	1,500,000,000	peningkatan lingkungan kelurahan	1,500,000,000	peningkatan lingkungan kelurahan	1,500,000,000	peningkatan lingkungan kelurahan	1,500,000,000	peningkatan lingkungan kelurahan	7,500,000,000	KELURAHAN
23. STATISTIK																	
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya Dokumen Statistik Daerah	Statistik	-	4 Tersedianya Statistik Daerah	750,000,000	5 Tersedianya Statistik Daerah	1,060,000,000	4 Tersedianya Statistik Daerah	768,000,000	4 Tersedianya Statistik Daerah	816,000,000	4 Tersedianya Statistik Daerah	935,000,000	Tersedianya 21 dokumen Statistik Daerah	4,329,000,000	BAPPEDA
24. KEARSIPAN																	
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	pengembangan Sistem Informasi Kearsipan	Kearsipan	1 paket		-	meningkatnya sistem layanan kearsipan	144,000,000	meningkatnya sistem layanan kearsipan	192,000,000	meningkatnya sistem layanan kearsipan	144,000,000	meningkatnya sistem layanan kearsipan	148,000,000	meningkatnya sistem layanan kearsipan	628,000,000	KAPDE
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	tingkat pengelolaan dan pelestarian arsip/dokumen daerah	Kearsipan	Pembinaan, pendataan dan penataan arsip di SKPD, penyediaan sarana dan prasarana kearsipan), 23 SKPD dan 1 KRL	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian arsip daerah	183,490,000	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian arsip daerah	240,000,000	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian arsip daerah	288,000,000	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian arsip daerah	336,000,000	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian arsip daerah	295,000,000	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian arsip daerah	1,342,490,000	KAPDE
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	tingkat penataan dan pengelolaan arsip dalam administrasi kearsipan	Kearsipan	Terpeliharanya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	100%	-	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	123,000,000	Terpeliharanya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 100%	483,000,000	KAPDE
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kearsipan	tingkat pelayanan informasi kearsipan daerah	Kearsipan	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip dan pelayanan informasi kearsipan	Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan	16,501,875	Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan	96,000,000	Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan	192,000,000	Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan	144,000,000	Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan	148,000,000	Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan	596,501,875	KAPDE
25. SOSIAL																	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adata Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	Sosial	Terlaksananya pelatihan ketrampilan berusaha bagi warga miskin, pengembangan KUBE dan pemberdayaan PMKS	Fasilitasi keterampilan berusaha warga miskin dan pemberdayaan PMKS	313,149,600	Fasilitasi keterampilan berusaha warga miskin dan pemberdayaa n PMKS	316,000,000	Fasilitasi keterampilan berusaha warga miskin dan pemberdayaa n PMKS	331,000,000	Fasilitasi keterampilan berusaha warga miskin dan pemberdayaan PMKS	348,000,000	Fasilitasi keterampilan berusaha warga miskin dan pemberdayaa n PMKS	375,000,000	Fasilitasi keterampilan berusaha warga miskin dan pemberdayaan PMKS	1,683,149,600	DISNAKERTRANSOS
		Ketersediaan bantuan tunai bersyarat			fasilitasi pelaksaasn PKH	143,000,000	fasilitasi pelaksaasn PKH	144,000,000	fasilitasi pelaksaasn PKH	151,000,000	fasilitasi pelaksaasn PKH	159,000,000	fasilitasi pelaksaasn PKH	171,000,000	fasilitasi pelaksaasn PKH	768,000,000	DISNAKERTRANSOS
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kualitas penanganan PMKS	Sosial	Terlaksananya identifikasi dan penanganan darurat PMKS, Dokumen SPKD	Penanganan PMKS	106,556,000	Penanganan PMKS	207,000,000	Penanganan PMKS	113,000,000	Penanganan PMKS	118,000,000	Penanganan PMKS	127,000,000	Penanganan PMKS	671,556,000	DISNAKERTRANSOS
		Terfasilitasinya TKPK Kota Cimahi, Rakor TKPK, Penyusunan SPKD, dan LP2KD			2 Rakor TKPK, 1 dokumen SPKD, 2 dokumen LP2KD	125,000,000	2 Rakor TKPK, 1 dokumen SPKD, 2 dokumen LP2KD	144,000,000	2 Rakor TKPK, 1 dokumen SPKD, 2 dokumen LP2KD	144,000,000	2 Rakor TKPK, 1 dokumen SPKD, 2 dokumen LP2KD	144,000,000	2 Rakor TKPK, 1 dokumen SPKD, 2 dokumen LP2KD	148,000,000	Rakor TKPK,SPKD, dokumen LP2KD	705,000,000	BAPPEDA

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

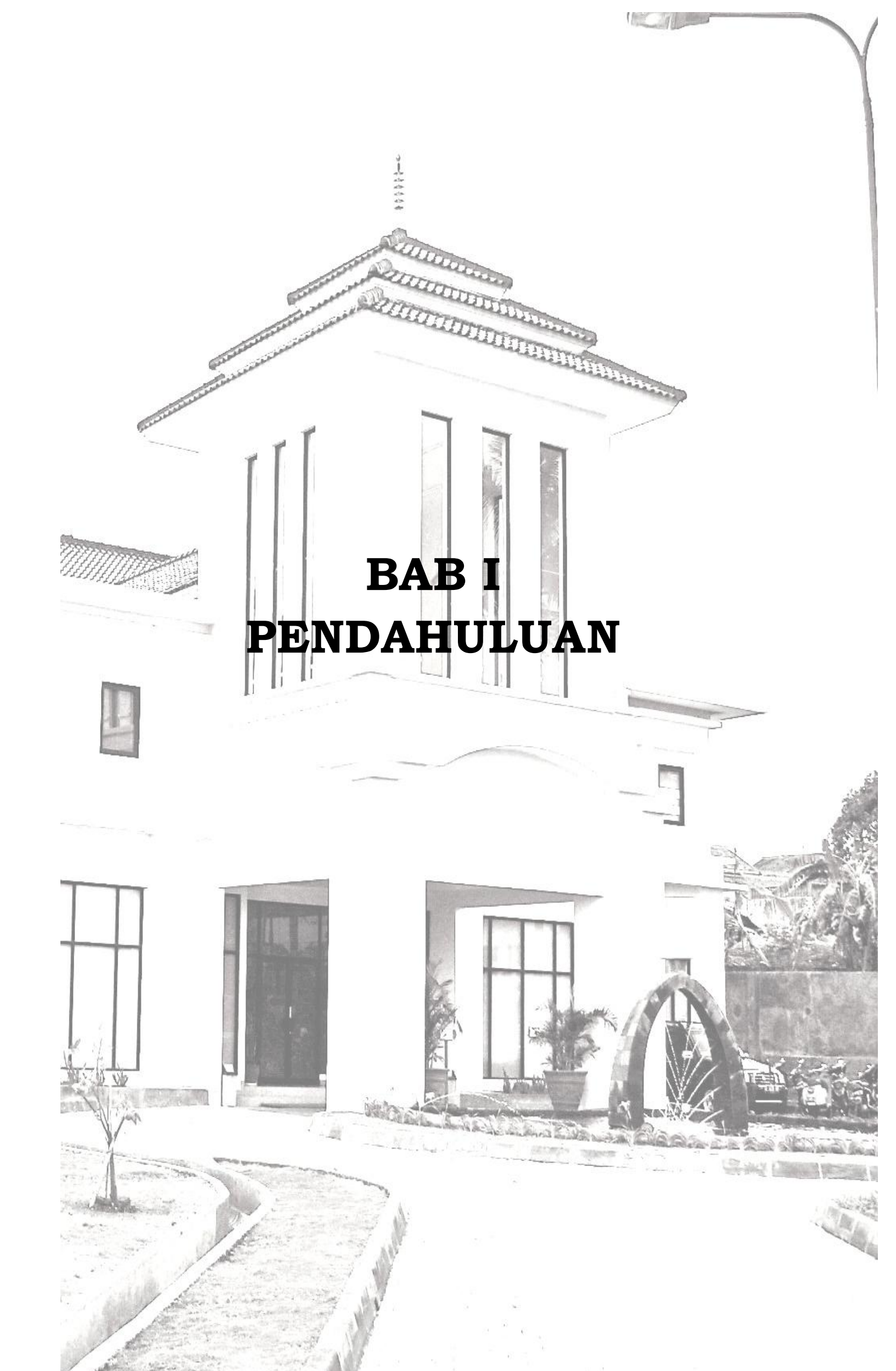
NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
	Program Pembinaan Anak Terlantar	Peningkatan kualitas pembinaan anak jalanan	Sosial	Pelaksanaan pembinaan anak jalanan dan peningkatan kapasitas pendukung pembinaan	Pelaksanaan pembinaan anak jalanan dan peningkatan kapasitas pendukung pembinaan	99,000,900	Meningkatnya kualitas pembinaan anak jalanan dan kapasitas pendukung pembinaan	100,000,000	Meningkatnya kualitas pembinaan anak jalanan dan kapasitas pendukung pembinaan	105,000,000	Meningkatnya kualitas pembinaan anak jalanan dan kapasitas pendukung pembinaan	110,000,000	Meningkatnya kualitas pembinaan anak jalanan dan kapasitas pendukung pembinaan	118,000,000	Meningkatnya kualitas pembinaan anak jalanan dan kapasitas pendukung pembinaan	532,000,900	DISNAKERTRANSOS
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Pembinaan dan penyediaan alat bantu bagi penyandang cacat dan eks trauma	Sosial	Terlaksannya Pembinaan dan penyediaan alat bantu bagi penyandang cacat dan eks trauma	Terlaksananya Pembinaan dan penyediaan alat bantu bagi penyandang cacat dan eks trauma	80,906,500	Terlaksananya Pembinaan dan penyediaan alat bantu bagi penyandang cacat dan eks trauma	82,000,000	Meningkatnya kualitas Pembinaan dan penyediaan alat bantu bagi penyandang cacat dan eks trauma	86,000,000	Meningkatnya kualitas Pembinaan dan penyediaan alat bantu bagi penyandang cacat dan eks trauma	90,000,000	Meningkatnya kualitas Pembinaan dan penyediaan alat bantu bagi penyandang cacat dan eks trauma	97,000,000	Meningkatnya kualitas Pembinaan dan penyediaan alat bantu bagi penyandang cacat dan eks trauma	435,906,500	DISNAKERTRANSOS
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kualitas SDM lembaga kesejahteraan sosial	Sosial	100 orang SDM dari karang taruna, PSM dan organisasi sosial	meningkatnya kualitas SDM lembaga kesejahteraan sosial	120,411,600	meningkatnya kualitas SDM lembaga kesejahteraan sosial	122,000,000	meningkatnya kualitas SDM lembaga kesejahteraan sosial	127,000,000	meningkatnya kualitas SDM lembaga kesejahteraan sosial	134,000,000	meningkatnya kualitas SDM lembaga kesejahteraan sosial	144,000,000	meningkatnya kualitas SDM lembaga kesejahteraan sosial	647,411,600	DISNAKERTRANSOS
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	meningkatnya manajemen panti sosial	Sosial	pelatihan manajemen bagi 100 orang pengurus panti sosial	meningkatnya kualitas manajemen pengurus Panti sosial	19,843,200	meningkatnya kualitas manajemen pengurus Panti sosial	21,000,000	meningkatnya kualitas manajemen pengurus Panti sosial	21,000,000	meningkatnya kualitas manajemen pengurus Panti sosial	22,000,000	meningkatnya kualitas manajemen pengurus Panti sosial	24,000,000	meningkatnya kualitas manajemen pengurus Panti sosial	107,843,200	DISNAKERTRANSOS
26. PERPUSTAKAAN																	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	meningkatnya koleksi bahan perpustakaan meningkatnya pelayanan perpustakaan	Perpustakaan	bahan pustaka 2 unit mobil perpustakaan keliling	Meningkatnya pelayanan perpustakaan umum daerah dan keliling	584,000,000	Meningkatnya pelayanan perpustakaan umum daerah dan keliling	509,000,000	Meningkatnya pelayanan perpustakaan umum daerah dan keliling	590,000,000	Meningkatnya pelayanan perpustakaan umum daerah dan keliling	682,000,000	Meningkatnya pelayanan perpustakaan umum daerah dan keliling	807,000,000	Meningkatnya pelayanan perpustakaan umum daerah dan keliling	3,172,000,000	KAPDE dan Disdikpora
27 PERTANIAN																	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya nilai tukar pertanian Kota Cimahi	Pertanian	100 petani	100 petani	455,600,000	3%	480,000,000	3%	528,000,000	3%	563,000,000	3%	620,000,000	3%	2,646,600,000	DISKOPINDAGTAN
	Program peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Terbangunnya kampung inovasi pertanian terpadu berbasis potensi lokal dan komunitas	Pertanian	7 kelompok	5 kelompok	-	10%	144,000,000	15%	158,000,000	20%	182,000,000	25%	224,000,000	25%	708,000,000	DISKOPINDAGTAN
		Sarana dan prasarana kampung inovasi pertanian terpadu berbasis potensi lokal dan komunitas						200,000,000		300,000,000						500,000,000	DISKOPINDAGTAN
		Sarana gerai produk inovasi pertanian terpadu						1 paket		100,000,000	1 paket	70,000,000					170,000,000
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Meningkatnya penerapan teknologi peternakan	Pertanian	2 kelompok			5%	48,000,000	7%	53,000,000	8%	61,000,000	10%	75,000,000	10%	237,000,000	DISKOPINDAGTAN
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Terjaganya kemampuan sektor pertanian dalam mendukung pengembangan klaster industri unggulan berbasisan industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga	Pertanian	padi = 0,5 ton/ hektar	0.5 ton / hektar		0.5 ton / hektar	192,000,000	0.5 ton / hektar	211,000,000	0.5 ton / hektar	222,000,000	0.5 ton / hektar	239,000,000	0.5 ton / hektar	864,000,000	DISKOPINDAGTAN
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan mendukung berkembangnya klaster industri unggulan di Kota Cimahi	Pertanian	1%	2%	156,850,000	3%	336,000,000	4%	336,000,000	5%	336,000,000	5%	344,000,000	5%	1,508,850,000	DISKOPINDAGTAN
		Peningkatan inovasi dan teknologi hasil peternakan						1 paket		234,000,000						234,000,000	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan	Pertanian	0%				1 model		48,000,000	1 model	48,000,000	1 model	49,000,000	1 model	193,000,000	DISKOPINDAGTAN
		Sarana gerai produk inovasi peternakan						1 Paket		70,000,000						70,000,000	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya ternak yang tidak terkena penyakit	Pertanian	100%	100%	325,590,000	100%	336,000,000	100%	336,000,000	100%	336,000,000	100%	344,000,000	100%	1,677,590,000	DISKOPINDAGTAN
28. PARIWISATA																	

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2013		2014		2015		2016		2017				
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
	Program Pengembangan Kemitraan	Tersedianya strategi pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan produk lokal yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata pada klaster industri unggulan di Kota Cimahi dan terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal (lokal wisdom)	Pariwisata	NA	20%	195,100,200	30%	207,000,000	50%	227,000,000	70%	249,000,000	100%	281,000,000	100%	1,159,100,200	DISKOPINDAGTAN
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Berkembangnya organisasi dan komunitas wisata budaya dan produk lokal	Pariwisata	NA	10%		30%	960,000,000	50%	1,056,000,000	70%	1,162,000,000	100%	1,310,000,000	100%	4,488,000,000	DISKOPINDAGTAN
		Tersedianya informasi kalender tahunan kegiatan kegiata kreatif dan apresiasi inovasi pada klaster industri tekstil dan produk tekstil (TPT) lokal berbasis komunitas					195,000,000	200,000,000		210,000,000		220,000,000		825,000,000			
		Aprisiasi inovasi budaya lokal (lokal wisdom) berbasis komunitas					150,000,000	165,000,000		182,000,000		200,000,000		697,000,000			
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Berkembangnya strategi pemasaran sektor pariwisata berbasis budaya lokal yang terintegrasi dengan usaha pengembangan klaster industri unggulan di Kota Cimahi	Pariwisata	NA	20%		30%	72,000,000	50%	79,000,000	70%	91,000,000	100%	107,000,000	100%	349,000,000	DISKOPINDAGTAN
29. KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya kemampuan sektor perikanan dalam mendukung pengembangan klaster industri unggulan berbasisan industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga	Kelautan dan Perikanan	1 komoditas setiap tahunnya	3 komoditas	506,060,000	3 komoditas	437,000,000	4 komoditas	459,000,000	5 komoditas	482,000,000	4 komoditas	518,000,000	4 komoditas	2,402,060,000	DISKOPINDAGTAN
30. PERDAGANGAN																	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Terlaksananya efisiensi perdagangan dalam negeri melalui pembangunan showcase dan ruang pameran	Perdagangan	NA			Peningkatan perdagangan produk-produk unggulan klaster potensial	144,000,000	Peningkatan perdagangan produk-produk unggulan klaster potensial	166,000,000	Peningkatan perdagangan produk-produk unggulan klaster potensial	192,000,000	Peningkatan perdagangan produk-produk unggulan klaster potensial	207,000,000	Peningkatan perdagangan produk-produk unggulan klaster potensial	709,000,000	DISKOPINDAGTAN
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan peredaran barang	Perdagangan	NA	100%	150,000,000	100%	192,000,000	100%	202,000,000	100%	212,000,000	100%	227,000,000	100%	983,000,000	DISKOPINDAGTAN
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Tersedianya pasar yang layak Terkendalnya pertumbuhan pasar modern dan pengawasan persaingan usaha yang sehat di Kota Cimahi	Perdagangan	NA	100%	976,761,100	100%	1,080,000,000	100%	1,296,000,000	100%	1,490,000,000	100%	1,680,000,000	100%	6,522,761,100	DISKOPINDAGTAN
					5%	146,013,141	5%	155,000,000	3%	170,000,000	2%	195,000,000	1%	240,000,000	1%	906,013,141	DISKOPINDAGTAN
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tertatanya pedagang kaki lima dan asongan (PKL) di Kota Cimahi	Perdagangan	NA	50%	200,000,000	60%	240,000,000	70%	264,000,000	75%	304,000,000	80%	373,000,000	80%	1,381,000,000	DISKOPINDAGTAN
31. PERINDUSTRIAN																	
	Program Penataan Struktur Industri	Berkembangnya industri unggulan daerah	Perindustrian	NA			100%	336,000,000	100%	353,000,000	100%	370,000,000	100%	399,000,000	100%	1,458,000,000	DISKOPINDAGTAN
	Program Pengembangan Industri kecil dan Mengengah	Terjalinya keterkaitan antara sektor ekonomi (hulu - hilir) dan kluster industri unggulan sebanyak 10 - 30% IKM setiap tahun dalam rangka pengembangan rantai nilai (value chain development).	Perindustrian	NA	10%	1,000,197,000	10%	1,009,000,000	15%	1,069,000,000	15%	1,143,000,000	10%	1,231,000,000	10%	5,452,197,000	DISKOPINDAGTAN
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Berkembangnya sentra industri dengan target 4%-6% pelaku IKM	Perindustrian	NA			4%	336,000,000	5%	370,000,000	5%	388,000,000	6%	418,000,000	6%	1,512,000,000	DISKOPINDAGTAN

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	URUSAN	KONDISI AWAL (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPD PENANGGUNG JAWAB
					2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya kemampuan absorpsi IPTEK dalam sistem produksi dan bisnis dengan target 4%-6% pelaku IKM dan UKM	Perindustrian	NA			4%	288,000,000	5%	317,000,000	5%	333,000,000	6%	358,000,000	6%	1,296,000,000	DISKOPINDAGTAN	
		Tersedianya sarana dan prasarana, infrastruktur IT, kelembagaan pusat inovasi dan SDM Pengelola Pusat Inovasi						1,920,000,000		1,440,000,000		960,000,000		984,000,000		5,304,000,000		
		Teknologi pengolahan hasil produksi pertanian dan peternakan pada kampung pertanian terpadu						300,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		900,000,000		
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Meningkatnya kemampuan teknologi industri	Perindustrian	NA	Berkembangnya sentra industri	500,000,000	Berkembangnya sentra industri	960,000,000	Berkembangnya sentra industri	960,000,000						2,420,000,000	DISKOPINDAGTAN	
		Berkembangnya kampung inovasi pertanian terpadu					1 paket	200,000,000								200,000,000		
32. TRANSMIGRASI																		
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	penyaluran dan pengerahan jumlah transmigran	Transmigrasi	14 KK	penempatan transmigran	209,500,000	penempatan transmigran	212,000,000	penempatan transmigran	222,000,000	penempatan transmigran	233,000,000	penempatan transmigran	251,000,000	penempatan transmigran	1,127,500,000	DISNAKERTRANSOS	
		JUMLAH				386,386,456,998		430,770,000,000		461,247,000,000		506,915,000,000		536,888,000,000		2,322,206,456,998		



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan daerah harus berlandaskan pada rencana pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi, potensi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki daerah serta cita-cita di masa depan, yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi 2005-2025, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan melalui pentahapan yang dirumuskan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 yang merupakan Tahap Pemantapan. Pada tahapan ini, akan dilakukan pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan, yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar.

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 disusun sebagai perwujudan dari amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota sekaligus merupakan pedoman yuridis utama bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2012 – 2017.

Dalam menyusun RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 yang menjadi acuan utama adalah rumusan visi, misi Walikota dan Wakil Walikota untuk masa bakti 2012 – 2017, yang telah disampaikan melalui Sidang Paripurna DPRD dan semasa pelaksanaan kampanye pemilihan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota secara langsung. Disamping itu, penyusunan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 ini juga mengacu pada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RPJPD Kota Cimahi, RTRW Kota Cimahi dan berbagai kebijakan serta prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Semua dokumen perencanaan tersebut adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Dalam melaksanakan pembangunan tahun 2012-2017, sistem inovasi merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh Kota Cimahi. Sebagai suatu pendekatan pembangunan, sistem inovasi yang dimaksud disini pada dasarnya adalah suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan, kebijakan, hubungan interaksi dan proses produktif yang

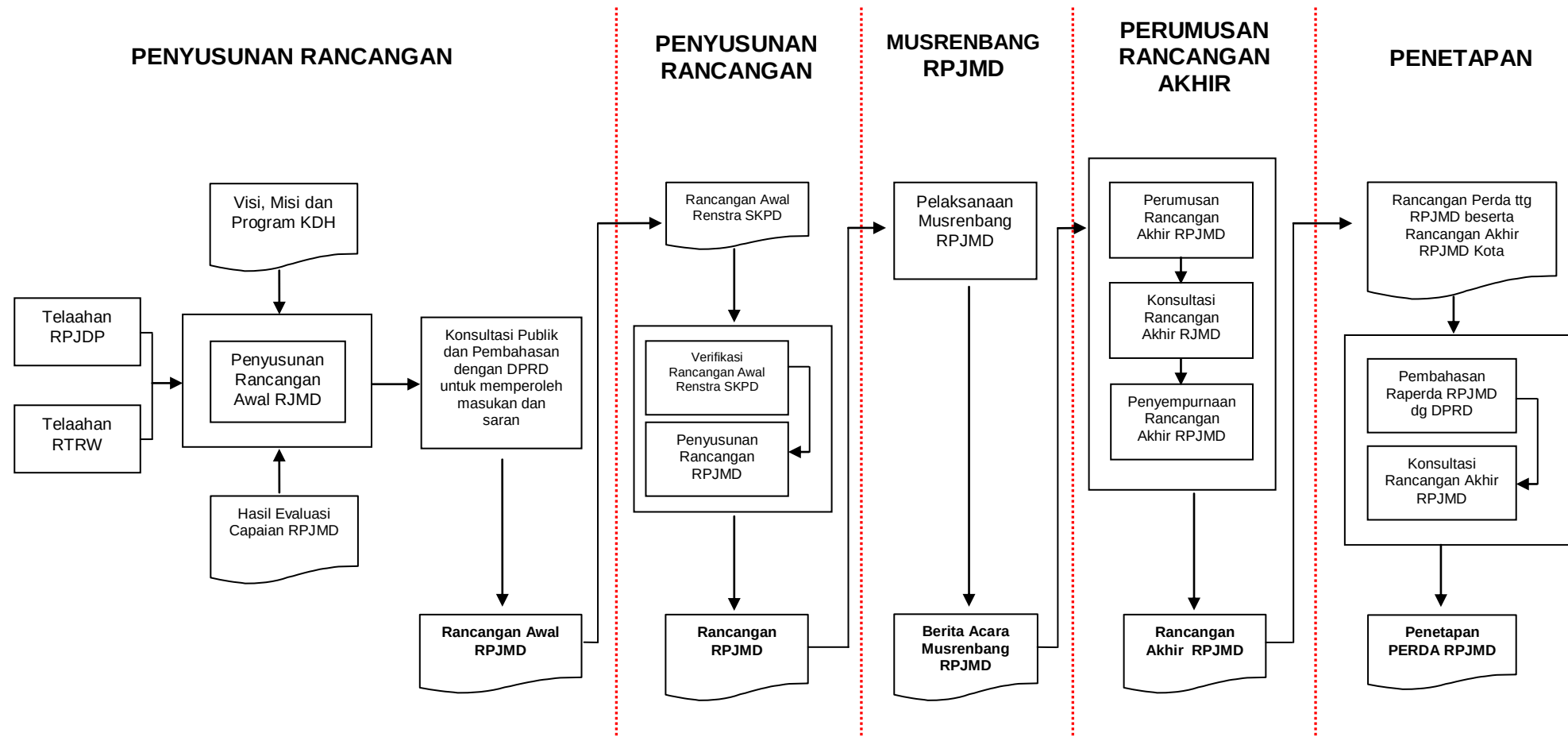
mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya.

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 ini disusun sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 disusun melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

- Pendekatan Politik, yaitu pendekatan yang melihat bahwa rencana pembangunan yang ada dalam RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi Walikota dan Wakil Walikota.
- Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini berdasarkan pada metode ilmiah berdasarkan data dan informasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan kerangka manajemen strategis dan berbasis kinerja terhadap berbagai program pembangunan.
- Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mendapatkan berbagai aspirasi sebagai masukan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan pengambilan keputusan.
- Pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up*. Hasil dari pendekatan *bottom up* melalui penjangkaran aspirasi masyarakat bersama *stakeholders* melalui konsultasi publik, dan musrenbang RPJMD serta pendekatan *top down* dengan penyelarasan pada dokumen perencanaan provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran.

Gambar 1.1
Diagram Alir Penyusunan RPJMD



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 berdasarkan pada sejumlah peraturan perundang–undangan, antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
 23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 80 Seri E);
 24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
 25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 114 Seri D);
 26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
 27. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 148 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 91 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 117 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 142 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 143 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

1.3.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

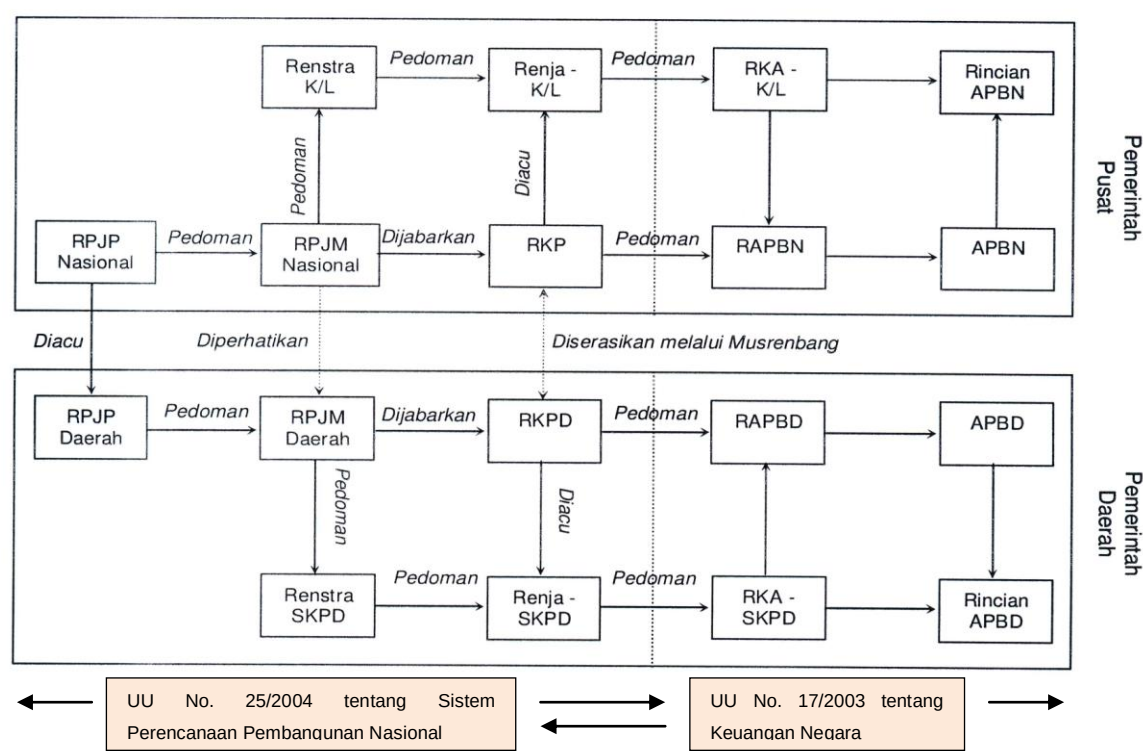
Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 ini merupakan satu bagian yang utuh dalam sistem perencanaan pembangunan dan merupakan bagian dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025. RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 telah memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Barat dalam penyusunannya, yang mana hal ini dilakukan

dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan strategi serta program pembangunan.

Selanjutnya, RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2012 – 2017. Secara bersamaan, baik RPJMD Kota Cimahi maupun Renstra SKPD akan digunakan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang terinci ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Secara ringkas, keterkaitan antara RPJMD dengan rangkaian dokumen lainnya, mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan APBD dapat digambarkan secara sistematis dalam bentuk diagram alir seperti diagram dibawah ini:

Gambar 1.2
Bagan Hubungan RPJMD Kota Cimahi dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka penjabaran RPJMD Kota Cimahi ke dalam RKPD Kota Cimahi untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cimahi.

Dalam penyusunan RPJMD ini telah mencoba menerapkan kerangka Sistem Inovasi Daerah (SID) sesuai amanat Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, sehingga perencanaan yang tertuang dalam RPJMD disisi lain merupakan perencanaan yang dapat berfungsi untuk meningkatkan daya saing kota.

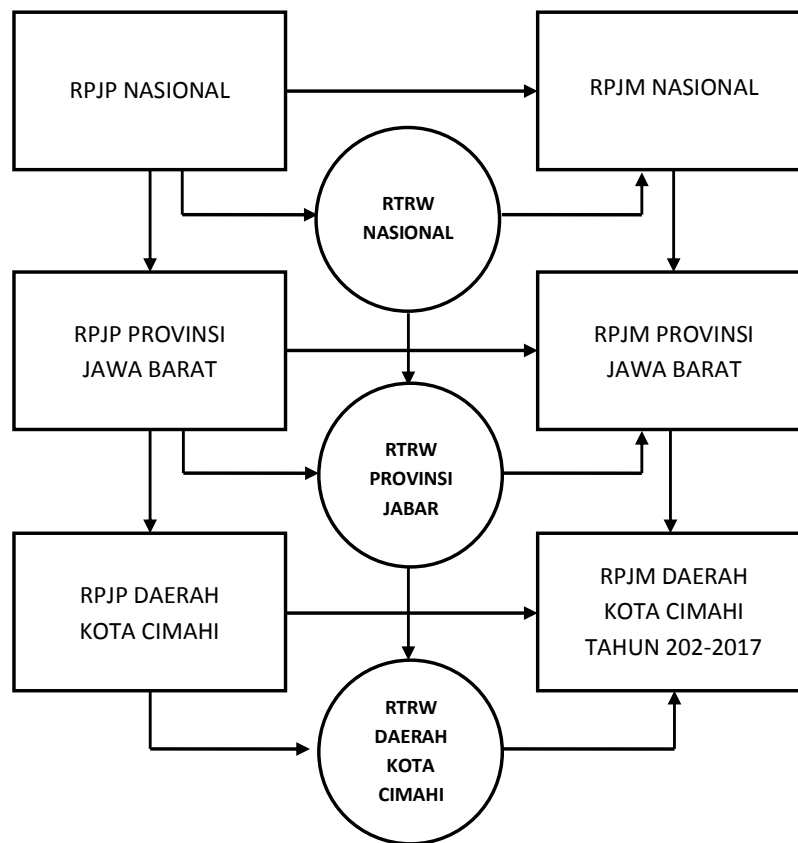
1.3.2 Hubungan RPJMD Dengan RTRW

Sesuai ketentuan Pasal 54 Permendagri Nomor 54 tahun 2010 , penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan aspek tata ruang. Tata ruang merupakan instrumen untuk mengarahkan aspek kewilayahan dalam bentuk alokasi kegiatan – kegiatan sosial – ekonomi, pusat pelayanan, infrastruktur, serta permukiman yang akan saling memperkuat satu dengan lainnya dalam konteks pengembangan kota yang berkelanjutan.

RTRW Kota Cimahi yang sudah disesuaikan dengan RTRW Provinsi Jawa Barat diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah Kota Cimahi sebagai kota inti dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) cekungan bandung yang aman, nyaman, efisien dan berkelanjutan dengan meningkatkan fungsi kota sebagai pusat jasa dan perdagangan serta pusat industri kreatif. Oleh karenanya, RTRW berfungsi sebagai acuan lokasi dan investasi pembangunan serta menjadi pedoman dalam merumuskan program-program kewilayahan dan lintas kewilayahan dalam dokumen RPJMD maupun Renstra SKPD.

Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD telah diupayakan untuk dapat mengisi, mengembangkan dan memelihara ruang beserta sumber daya yang ada di atasnya/di dalamnya, sehingga pencapaian target RTRW dapat didukung secara nyata oleh RPJMD. Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 ini merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD maupun RTRW Kota Cimahi. Pada setiap tingkatan perencanaan pembangunan, mulai dari RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kota Cimahi, dilakukan sinkronisasi dan penyelarasan dengan RTRWN, RTRWP Jawa Barat dan RTRW Kota Cimahi, serta dengan RTRW kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kota Cimahi, sebagaimana bagan berikut:

Gambar 1.3
Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



1.3.3 Hubungan RPJMD Dengan KLHS Kota Cimahi

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya Pasal 15, disebutkan bahwa instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS yang telah disusun Pemerintah Kota Cimahi adalah suatu dokumen telaah (*assessment document*) yang disertai dengan rekomendasi terhadap isu – isu lingkungan hidup dari kebijakan, rencana atau program yang telah tersusun/terlaksana salah satunya adalah RPJMD Kota Cimahi. Rekomendasi tersebut umumnya berupa kegiatan-kegiatan yang sebaiknya dilakukan Pemerintah Kota Cimahi untuk meminimalisir dampak lingkungan yang mungkin terjadi, antara lain:

1. Peningkatan fungsi resapan dan keanekaragaman hayati melalui pembangunan sumur resapan dan embung, penanaman pohon dan pengembangan Green House.

2. Peningkatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau di seluruh wilayah Kota Cimahi serta peningkatan penguasaan lahan oleh Pemerintah Kota sebagai usaha pengendalian alih fungsi lahan.
3. Pengendalian dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak pencemaran lingkungan termasuk pemanfaatan air tanah dalam.
4. Pengelolaan air limbah domestik melalui pembangunan IPAL skala komunal dan skala kota dalam rangka memperbaiki kualitas tanah dan air sehingga mampu meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, pola pikir dan sistematika penulisan serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Cimahi.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program.

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Menguraikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan keuangan daerah untuk masa 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV. ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

Memuat permasalahan daerah dan isu-isu strategis daerah hasil analisis lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat rumusan visi dan misi Pemerintah Kota Cimahi yang merupakan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode tahun 2012 – 2017, serta tujuan dan sasaran dari prioritas pembangunan yang akan dicapai.

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan serta arah kebijakan dari setiap strategi berdasarkan tahapan pembangunan.

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menggambarkan arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah dari setiap urusan.

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat hubungan antara urusan pemerintah dengan SKPD, program yang menjadi tanggung jawab SKPD, pencapaian indikator kinerja beserta dengan indikasi pendanaan pada awal sampai dengan akhir periode perencanaan.

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa jabatan.

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Memuat prinsip – prinsip pedoman masa transisi pada saat pergantian masa jabatan serta kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD.

BAB XI. PENUTUP

Merupakan penutup dari keseluruhan dokumen RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012-2017.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 disusun dengan maksud untuk memberikan arah pembangunan lima tahun ke depan dan untuk dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah kota, masyarakat dan swasta dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017.

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Cimahi 2012 – 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
- 2) Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan perencanaan penganggaran Kota Cimahi;
- 3) Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah;
- 4) Mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Cimahi yang sinergi dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi;

- 5) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dengan tujuan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan serta tahunan;
- 6) Menyediakan tolok ukur sebagai standar dalam mengevaluasi kinerja tahunan setiap SKPD.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kota Cimahi memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kota Cimahi secara umum. Gambaran umum menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan 5 (lima) tahun ke depan melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi, aspek demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Kondisi Geografis dan Letak Wilayah

Secara geografis Kota Cimahi terletak antara 107° 30' 30" - 107° 34' 30" BT dan 6° 50' 00" - 6° 56' 00" LS. Wilayah ini secara topografis merupakan bagian dari kawasan Lembah Cekungan Bandung dengan ketinggian tertinggi di wilayah utara ± 1.050 M dpl dan di bagian selatan ± 920 M dpl, sedangkan di bagian tengah tepatnya di wilayah sekitar stasiun kereta api ± 737 M dpl. Kota Cimahi juga dilintasi oleh jalan nasional yang berfungsi menghubungkan Kota Bandung dan Kota Jakarta, jalan tol Cileunyi–Padalarang–Purwakarta, serta jalur kereta api Bandung – Jakarta. Berdasarkan letak geografis tersebut, Kota Cimahi sangat strategis karena terletak di jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti Bandung Raya yang berdampingan dengan ibu kota Jawa Barat yang sangat dinamis. Kota Cimahi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra kegiatan pelayanan jasa yang berbasis pada sumber daya manusia.

Secara administrasi, luas wilayah Kota Cimahi adalah 40,2 km² yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 15 kelurahan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan

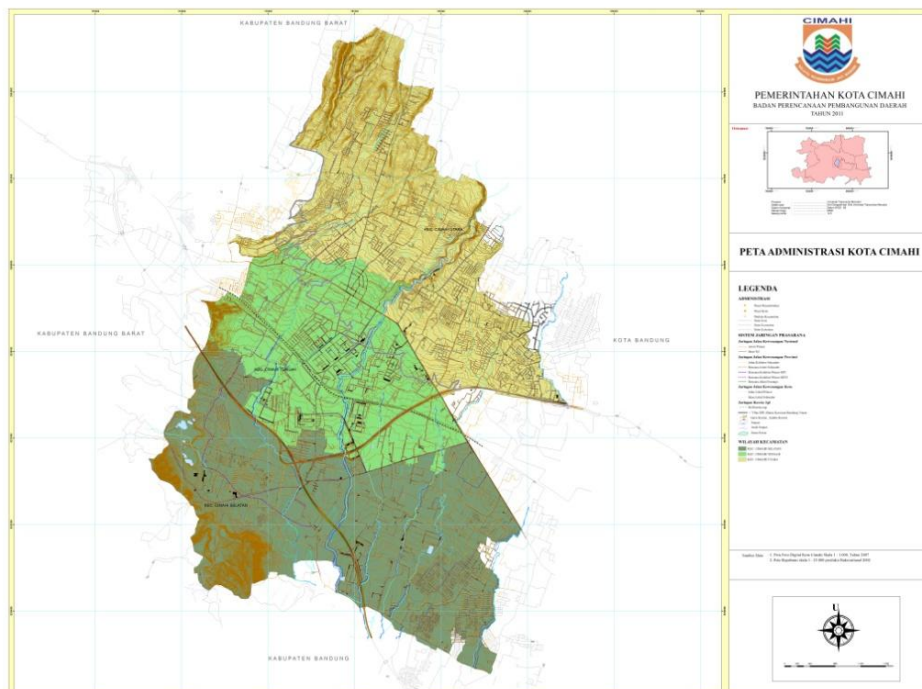
No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Kecamatan Cimahi Selatan	16,9
2	Kecamatan Cimahi Tengah	10
3	Kecamatan Cimahi Utara	13,3
	TOTAL (Km²)	40,2

Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2011

Adapun batas-batas wilayah administrasi Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Parongpong; Cisarua dan Ngamprah – Kabupaten Bandung Barat.
- Sebelah Timur : Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo dan Andir – Kota Bandung.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Margaasih – Kabupaten Bandung dan Kecamatan Bandung Kulon – Kota Bandung.
- Sebelah Barat : Kecamatan Padalarang dan Batujajar – Kabupaten Bandung Barat

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Cimahi



2.1.2 Kondisi Klimatologi

Kota Cimahi dan sekitarnya beriklim tropis, dicirikan dengan adanya musim kemarau selama bulan Juni – September serta musim penghujan berlangsung pada periode Oktober – Mei. Rata-rata curah hujan tahunan pada setiap wilayah disekitar daerah studi bervariasi tergantung dari elevasi permukaan tanah. Pada elevasi +700 -850 meter, curah hujan bervariasi antara 1700- 3000 mm/tahun, sedangkan pada elevasi > 850 hingga puncak pegunungan (+3000 m) curah hujan mencapai 3000-4000 mm/tahun.

Kelembaban udara relatif konstan dengan variasi kecil . Pada dataran Bandung dan Cimahi kelembaban udara minimum sebesar 73% pada bulan September , dan maksimum 83 % pada bulan April. Rata – rata temperatur

udara berkisar 22,7⁰ C -23.2⁰ C. Temperatur udara cenderung turun sejalan dengan kenaikan elevasi, besarnya penurunan temperatur sekitar 0.6 C setiap kenaikan elevasi 100 m. *Evapotranspirasi* bulanan berkisar 114 hingga 166 mm/bulan atau rata rata 1572 mm pertahun.

2.1.3 Kondisi Topografi dan Geohidrologi

Secara topografi Kota Cimahi terletak pada elevasi +600 m hingga +1.000 m di atas permukaan laut. Secara rinci, luasan wilayah Kota Cimahi per kecamatan berdasarkan kemiringan lereng dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kota Cimahi

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng (%)					Total (km2)
		0-8	8-15	15-25	25-40	>40	
1	Cimahi Selatan	14,58	0,63	0,81	0,67	0,20	16,9
2	Cimahi Tengah	9,85	0,06	0,049	0,03	0,002	10,0
3	Cimahi Utara	11,76	0,71	0,47	0,29	0,07	13,3
	TOTAL (Km ²)	36,20	1,40	1,33	0,99	0,28	40,2

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2011 diolah Bappeda

Kondisi geohidrologi Kota Cimahi secara umum dibagi kedalam 2 (dua) jenis yaitu air permukaan dan air tanah. Kondisi air permukaan/sungai yang melalui Kota Cimahi yaitu Sungai Cimahi, Sungai Cisangkan, Sungai Cibaligo, dan Sungai Cibeureum seperti diuraikan pada Tabel 2.3. di bawah ini:

Tabel 2.3
Inventarisasi Sungai Kota Cimahi

Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar (m)		Kedalaman (m)	Debit (m3/dtk)	
		Permukaan	Dasar		Maks	Min
Sungai Cimahi	7	10	5	1,5 - 2,5	2	0.5
Sungai Cisangkan	4.5	7	3	1,5 - 2	1.5	0.3
Sungai Cibaligo	7	10	5	1 - 2	6	0.5
Sungai Cibeureum	2	5	3	1 - 2	4	0.3

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2010

Sungai Cimahi berhulu di puncak lereng barat Gunung Tangkuban Perahu tepatnya Situ Lembang, melintasi Kelurahan Citeureup, Cibabat, Baros, Utama dan Karang Mekar. Sungai Cisangkan melintasi Kelurahan Citeureup, Padasuka, Baros, Leuwigajah/Utama. Sungai melintasi Kelurahan Cibabat, Cibeureum, dan Melong. Sungai Cibeureum berasal dari bagian barat Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung melintasi perbatasan Kota Cimahi dan Kota Bandung. Sungai ini melintasi Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong.

Menurut perhitungan Metode Storet terhadap data pemantauan kualitas air (2009) menunjukkan bahwa hampir seluruh anak sungai di Kota Cimahi terindikasi sebagai sungai dengan kategori cemar berat. Hanya satu, dari 10 lokasi titik pemantauan yang masuk ke dalam kategori cemar sedang (Cimahi Hulu). Beberapa parameter yang melebihi baku mutu dari kelas air berdasarkan PP No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dan Keputusan Gubernur Jawa Barat No.39 Tahun 2000 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sungai Citarum dan anak-anak sungainya di Jawa Barat adalah: Residu Terlarut, pH, BOD5, COD, DO, Total Fosfat sebagai P, Crom (IV), H₂S, Fecal dan Total Coliform.

Kota Cimahi terletak di sebelah selatan Sesar Lembang. Sesar Lembang memiliki pergerakan menurun (sesar normal), dimana bagian utara lebih rendah daripada bagian selatan. Hal ini menyebabkan air tanah di bagian utara Sesar Lembang tidak mengalir ke sebelah selatan. Oleh karena itu, air tanah di Kota Cimahi berasal dari air tanah di sebelah selatan Sesar Lembang. Berdasarkan pembagian Cekungan Air Tanah (CAT) Jawa Barat oleh DGTL (1983), wilayah Kota Cimahi termasuk ke dalam CAT wilayah Bandung-Soreang. CAT Bandung-Soreang ini berbatasan dengan CAT Lembang di sebelah utara dan CAT Batujajar disebelah barat. Menurut Kantor Lingkungan Hidup (2010), aliran air tanah Kota Cimahi dikontrol oleh topografi yang sebagian besar semakin rendah ke arah selatan sehingga secara morfologi Kecamatan Cimahi Utara berperan sebagai daerah resapan Kota Cimahi. Oleh karena itu, perlu dilakukan konservasi di daerah Cimahi Utara untuk menjaga kuantitas dan kualitas air tanah Kota Cimahi.

Kondisi geohidrologi air tanah Kota Cimahi ditandai dengan adanya daerah aliran langka. Potensi mata air langka ini tersebar di Kecamatan Cimahi Selatan seluas 553,02 ha dan di sebagian kecil wilayah Kecamatan Cimahi Tengah seluas 3,73 ha. Disamping itu terdapat akuifer produktif di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan seluas 855,12 ha. Potensi air tanah di Kota Cimahi secara geohidrologis dapat dibagi menjadi 3 wilayah air tanah:

1. Wilayah akuifer produktif tinggi dengan penyebaran luas

Penyebaran wilayah air tanah ini meliputi bagian timur Kecamatan Cimahi selatan serta sebagian besar wilayah Kecamatan Cimahi Tengah. Pada awalnya sumur bor di daerah ini merupakan sumur bor artesis positif, namun seiring peningkatan jumlah penggunaan air tanah maka pada saat ini sumur bor di daerah ini bukan lagi merupakan sumur artesis positif,

2. Wilayah akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas

Wilayah dengan akuifer produktif sedang meliputi Kecamatan Cimahi selatan serta sebagian besar wilayah Kecamatan Cimahi Utara. Air tanah dangkal dijumpai pada kedalaman lebih 10 m.

3. Wilayah akuifer setempat berarti

Wilayah ini dijumpai terutama dibagian barat kecamatan Cimahi Selatan yang berbatasan dengan Batu Jajar.

2.1.4 Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Cimahi terdiri dari 2 (dua) jenis penggunaan lahan, yaitu: penggunaan lahan terbangun dan penggunaan lahan tidak terbangun. Penggunaan lahan terbangun di Kota Cimahi pada tahun 2010 didominasi oleh penggunaan lahan sebagai perumahan tidak teratur (797,25ha) dan industri (504,25 ha). Sedangkan luas penggunaan lahan tidak terbangun di Kota Cimahi pada tahun 2010 didominasi oleh penggunaan lahan sebagai pertanian lahan kering seluas 1.094,40 ha.

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan di Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011 (ha)

Jenis Penggunaan Tanah	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
Perumahan Teratur	451.4	451.4	460.6	460	474.63
Perumahan Tidak Teratur	781.25	781.25	790.25	790.25	797.25
Kuburan	20.11	20.11	20.11	20.11	20.11
Pasar	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98
Toko, Warung, Kios	19.6	19.6	19.6	19.6	19.60
Rumah Makan	2.65	2.65	2.65	2.65	2.67
Bank	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94
Stasiun KA.	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
Industri	501.25	501.25	501.25	501.25	504.25
Kantor/Pemerintah	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15
Bangunan Militer	153.4	153.4	153.4	153.4	153.40
Jasa Pendidikan	76.75	76.75	76.75	76.75	76.75
Jasa Kesehatan	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25
Jasa Peribadatan	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
Jasa Pelayanan Um.	4.8	4.8	4.8	4.8	4.80
Tanah Kosong	117.4	117.4	116.3	116.3	99.03
Pertanian Tanah Basah (sawah)	463.25	463.25	458.62	458	458.00
Pertanian Tanah Kering (tegalan)	1,110.50	1,110.50	1,099.40	1,100	1,094.40
Perikanan/Kolam	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13
Kebun Campur	154.22	154.22	152.68	153	150.67
Taman Kota	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25
Rawa	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78
Jalan Tol	27.47	27.47	27.47	27.47	27.47
Sungai	15.34	15.34	15.34	15.34	15.34
Lain-lain	45.14	45.14	45.14	45.14	45.14

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2012

Penggunaan lahan kota Cimahi diirinci menurut kawasan-kawasan fungsional yang meliputi kawasan lindung atau berfungsi lindung dan kawasan budidaya, yang dalam hal ini adalah kawasan budidaya perkotaan. Dengan demikian, pola penggunaan lahan ini merupakan penggunaan lahan sebagai kawasan lindung (Kuburan, Taman Kota, Kebun Campuran, Rawa, Sungai, dsb) dan kawasan budidaya (Perumahan, Pasar, Toko, Perkantoran Barang dan Jasa, Perkantoran Pemerintahan, Militer, Industri, dan Fasilitas umum lainnya) dalam wilayah Kota Cimahi.

2.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Cimahi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya kota adalah kawasan wilayah kota yang diperuntukkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Hal ini tertuang dalam rencana tata ruang wilayah Kota Cimahi 2012 - 2032 meliputi:

- a. Kawasan Peruntukan Perumahan;
Merupakan pengembangan perumahan diarahkan pada intensitas pemanfaatan lahan berdasarkan kepadatannya dengan pengembangan hunian vertikal dan penataan dan peremajaan kawasan perumahan padat tidak teratur.
- b. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa;
Merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, toko dan ritel modern; dan perdagangan dan jasa lainnya.
- c. Kawasan Peruntukkan Industri;
Merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan industri menengah dan besar, kawasan industri kreatif, dan industri kecil dan rumah tangga.
- d. Kawasan Peruntukkan Pariwisata;
pengembangan kawasan peruntukkan pariwisata meliputi Wisata Budaya, Wisata Alam Situ Ciseupan dan Wisata Buatan di Kecamatan Cimahi.
- e. Kawasan Peruntukkan Perkantoran dan fasilitas sosial;
Pengembangan Kawasan Perkantoran dan fasilitas sosial meliputi kawasan perkantoran pemerintah dan swasta termasuk di dalamnya peningkatan kawasan pusat pengembangan teknologi informasi, Baros Information Technology Center (BITC).

- f. Kawasan Peruntukkan Pertahanan dan Keamanan;
Merupakan kawasan yang peruntukkannya di fungsikan sebagai kawasan pertahanan dan keamanan.
- g. Kawasan peruntukan bagi Ruang Terbuka Non Hijau;
Merupakan kawasan yang meliputi kawasan komersial dan perkantoran yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi masyarakat dan layak anak.
- h. Kawasan peruntukan Ruang Untuk Sektor Informal;
Merupakan sektor yang direncanakan untuk kegiatan sektor informal dengan anfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan sektor informal dengan pembatasan area dan pengaturan waktu berdagang, mengoptimalkan fungsi pasar, dan mengintegrasikan kegiatan sektor informal dengan sektor formal.
- i. Kawasan Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana;
pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana gunung berapi diarahkan di bagian utara Kota serta di bagian selatan kota untuk mengantisipasi bahaya banjir dan gunung berapi;
- j. Kawasan Peruntukkan Perikanan.
Merupakan perikanan budidaya air tawar; dan pemasaran hasil perikanan.

2.1.6 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Kota Cimahi, meliputi rawan tanah longsor; rawan banjir; dan rawan aliran lahar gunung berapi. Kawasan rawan tanah longsor mencakup kawasan di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan, terutama wilayah dengan kelerengan diatas 15% (lima belas persen). Kawasan rawan banjir adalah wilayah yang berpotensi banjir. Sedangkan Kawasan rawan aliran lahar gunung berapi mencakup daerah aliran sungai-sungai yang hulunya berasal dari Gunung Tangkuban Perahu.

2.1.7 Kondisi Demografi

Perkembangan jumlah penduduk Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011

URAIAN		2007	2008	2009	2010	2011
CIMAHI SELATAN	L	117.300	120.380	123.519	116.468	118.613
	P	112.337	115.029	117.816	114.155	118.165
	TOTAL	229.637	235.409	241.335	230.623	236.778
	SEX-R	104,42	104,65	104,84	102,03	100,38
CIMAHI TENGAH	L	88.461	90.273	92.161	82.824	84.693
	P	81.023	82.517	84.064	80.246	80.960
	TOTAL	169.484	172.790	176.225	163.070	165.653
	SEX-R	109,18	109,40	109,63	103,21	104,61
CIMAHI UTARA	L	72.084	74.958	77.988	74.832	76.660
	P	65.538	68.059	70.672	72.652	74.501
	TOTAL	137.622	143.017	148.660	147.484	151.161
	SEX-R	109,99	110,14	110,35	103,00	102,90
KOTA CIMAHI	L	277.845	285.611	293.668	274.124	279.966
	P	258.898	265.605	272.552	267.053	273.626
	TOTAL	536.743	551.216	566.220	541.177	553.592
	SEX-R	107,32	107,53	107,75	102,65	102,32

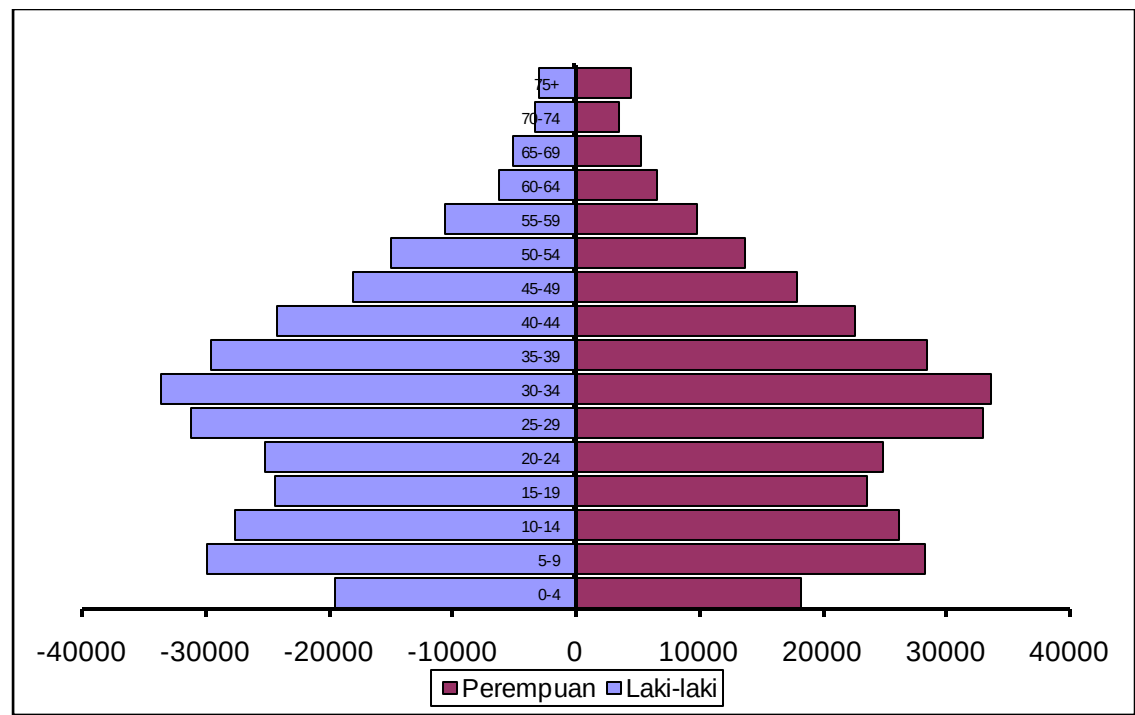
Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2008 – 2011 dan Hasil Survey IPM 2011

Laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi Tahun 2010 – 2011 sebesar 2,29%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi selama 10 tahun terakhir yang sebesar 2,06%. Angka ini juga diatas laju pertumbuhan penduduk secara umum di kawasan Cekungan Bandung yang mencapai 1.74%.

Tingkat kepadatan Kota Cimahi Tahun 2011 adalah 13.771 jiwa/km², dimana kecamatan Cimahi Tengah memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi dibandingkan dua kecamatan lainnya yaitu mencapai 16.565 jiwa/km². Hal ini terjadi disebabkan oleh sistem transportasi dan infrastruktur yang lebih baik. Walaupun demikian, daerah pusat kota bukan merupakan daerah terpadat.

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan sebesar 102,32. Adapun komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat dalam Piramida Penduduk berikut ini:

Gambar 2.2
Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2011



Sumber: BPS Kota Cimahi

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek yang diukur dalam keberhasilan pembangunan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Salah satu indikator dalam mengukur peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan IPM Kota Cimahi selama kurun waktu tahun 2007 – 2011 selalu mengalami peningkatan, seperti yang tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011

NO	INDIKATOR	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ^{*)}
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74.42	74.7	75.17	75.51	76.01	76.12
2	Indeks Pendidikan	89.22	89.22	89.58	89.77	90.07	90.38
3	Indeks Kesehatan	73.28	73.4	73.52	73.63	73.75	99.8
4	Indeks Daya Beli	60.77	61.75	62.41	63.14	63.91	64.24

Sumber: BPS Kota Cimahi
*) Angka Sementara BPS

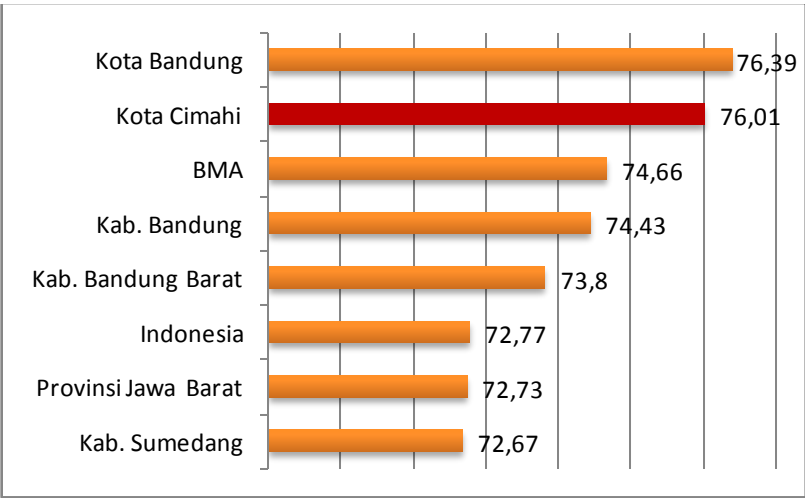
Secara umum, capaian pembangunan manusia di Kota Cimahi lebih baik sejak pemekaran. Seluruh dimensi pembangunan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini dapat terlihat pada capaian IPM selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu selama

periode 2007 – 2011. Dari tabel di atas, terlihat bahwa bila dibandingkan dengan IPM tahun 2007, Kota Cimahi telah menunjukkan capaian yang signifikan, yaitu kenaikan IPM hampir 1,59 poin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Secara rata – rata pencapaian IPM Kota Cimahi Tahun 2007 - 2011 naik sebesar 0,40 poin. Pada tahun 2011, berdasarkan hasil Survey IPM Tahun 2011, capaian IPM Kota Cimahi meningkat 0,5 poin dibandingkan tahun 2010 . Meningkatnya IPM Kota Cimahi merupakan dampak dari meningkatnya komponen-komponen pembentuk IPM.

Komponen IPM yang pertama yaitu Indeks Pendidikan meningkat 0,30 poin dari 89,77 poin di tahun 2010 menjadi 90.07 pada tahun 2011.Sedangkan Indeks Kesehatan penduduk Kota Cimahi meningkat 0,12 poin dari 73,63 menjadi 73,75. Komponen IPM yang ketiga yaitu Indeks Daya Beli, mengalami peningkatan yang paling besar yaitu mencapai 63,91 poin pada tahun 2011 atau meningkat 0,77 poin dari tahun 2010 yang mencapai 63,14 poin.Pencapaian indeks daya beli merupakan komponen yang paling tinggi peningkatannya dibandingkan dengan indeks pendidikan maupun indeks kesehatan.

Kenaikan IPM ini menarik untuk dicermati, mengingat saat memekarkan diri ada keraguan dari kabupaten induknya, Kabupaten Bandung. Bila dibandingkan antar wilayah dalam *Bandung Metropolita Area* (BMA), capaian IPM Kota Cimahi Tahun 2011 berada pada urutan kedua. Bahkan capaian IPM Kota Cimahi selalu berada di atas capaian IPM Provinsi Jawa Barat (Gambar 2.3).

Gambar 2.3
Perbandingan Capaian IPM Kota Cimahi, BMA, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2011



2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB

Kinerja perekonomian Kota Cimahi Tahun 2011 secara makro ditunjukkan oleh pencapaian nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau total Nilai Tambah Bruto pada tahun 2011. Nilai PDRB dan kontribusi masing – masing sektor dapat dilihat dalam Tabel 2.7 dan Tabel 2.8.

Tabel 2.7
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011

NO	SEKTOR	2007		2008		2009		2010		2011	
		(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%
1	Pertanian	14,34	0,15	16,35	0,15	17,82	0,15	20,70	0,16	22,61	0,16
2	Pertambangan & Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	5.632,79	60,54	6.406,37	59,78	6.948,74	59,47	7.454,35	58,03	8.194,56	57,85
4	Listrik, Gas & Air Bersih	330,61	3,55	357,25	3,33	382,30	3,27	415,80	3,24	451,74	3,19
5	Konstruksi	669,11	7,19	764,12	7,13	855,81	7,32	923,24	7,19	995,40	7,03
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.721,23	18,50	2.048,13	19,11	2.252,05	19,28	2.659,32	20,70	2.945,16	20,79
7	Pengangkutan & Komunikasi	161,78	1,74	189,60	1,77	205,77	1,76	233,60	1,82	270,84	1,91
8	Kuangan, sewa & Jasa Perusahaan	199,45	2,14	236,81	2,21	267,34	2,29	303,72	2,36	345,63	2,44
9	Jasa-jasa	575,48	6,18	697,67	6,51	753,88	6,45	834,88	6,50	938,88	6,63
	PDRB	9.304,79	100	10.716,29	100	11.683,71	100	12.845,60	100	14.164,83	100

Sumber: BPS Kota Cimahi-PDRB Tahun 2010 -2012

*) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

Tabel 2.8
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011

NO	SEKTOR	2007		2008		2009		2010		2011	
		(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%
1	Pertanian	8,87	0,16	9,24	0,16	9,64	0,16	10,10	0,16	10,07	0,15
2	Pertambangan & Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	3.462,99	61,41	3.597,31	60,89	3.729,34	60,33	3.832,25	58,87	4.019,59	58,50
4	Listrik, Gas & Air Bersih	210,00	3,72	213,90	3,62	225,42	3,65	240,01	3,69	251,64	3,66
5	Konstruksi	348,60	6,18	365,17	6,18	385,89	6,24	406,54	6,25	423,94	6,17
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.083,34	19,21	1.164,51	19,71	1.243,90	20,12	1.397,54	21,47	1.502,10	21,86
7	Pengangkutan & Komunikasi	86,60	1,54	91,08	1,54	95,78	1,55	107,98	1,66	120,54	1,75

NO	SEKTOR	2007		2008		2009		2010		2011	
		(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%
8	Keuangan, sewa & Js. Perusahaan	108,35	1,92	119,42	2,02	128,69	2,08	141,66	2,18	149,97	2,18
9	Jasa-jasa	330,16	5,86	347,44	5,88	362,74	5,87	373,24	5,73	386,55	5,63
	PDRB	5.638,91	100	5.908,07	100	6.181,40	100	6.509,31	100	6.871,22	100

Sumber: BPS Kota Cimahi-PDRB Tahun 2010 -2012

*) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sampai dengan Tahun 2011 kelompok sektor sekunder, terutama sektor Industri Pengolahan masih mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kota Cimahi. Dari perkembangan nilai PDRB di atas dapat diketahui Pertumbuhan PDRB Kota Cimahi selama periode Tahun 2007 – 2011 seperti dalam Tabel 2.9 berikut ini:

Tabel 2.9
Pertumbuhan PDRB Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011
AdhBerlaku (Hb) dan Adh Konstan (Hk)

NO	SEKTOR	2007		2008		2009		2010		2011		Rata-Rata Pertumbuhan	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	9,31	1,02	14,00	4,17	8,98	4,29	16,17	4,80	9,27	(0,26)	11,55	2,80
2	Pertambangan & Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	7,90	4,19	13,73	3,88	8,47	3,67	7,28	2,76	9,93	4,89	9,46	3,88
4	Listrik, Gas & Air Bersih	12,69	5,48	8,06	1,86	7,01	5,38	8,76	6,47	8,64	4,85	9,03	4,81
5	Konstruksi	17,72	5,46	14,20	4,75	12,00	5,67	7,88	5,35	7,82	4,28	11,92	5,10
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	13,09	7,06	18,99	7,49	9,96	6,82	18,08	12,35	10,75	7,48	14,18	8,24
7	Pengangkutan & Komunikasi	4,61	4,13	17,20	5,18	8,53	5,16	13,52	12,74	15,94	11,63	11,96	7,77
8	Keuangan, sewa & Js. Perusahaan	22,89	9,84	18,73	10,21	12,89	7,77	13,61	10,07	13,80	5,87	16,38	8,75
9	Jasa-jasa	22,93	5,60	21,23	5,23	8,06	4,40	10,74	2,90	12,46	3,57	15,08	4,34
	PDRB	10,74	5,03	15,17	4,77	9,03	4,63	9,94	5,30	10,27	5,56	11,03	5,06

Sumber: BPS Kota Cimahi-PDRB Tahun 2010 -2012

*) Angka Perbaikan

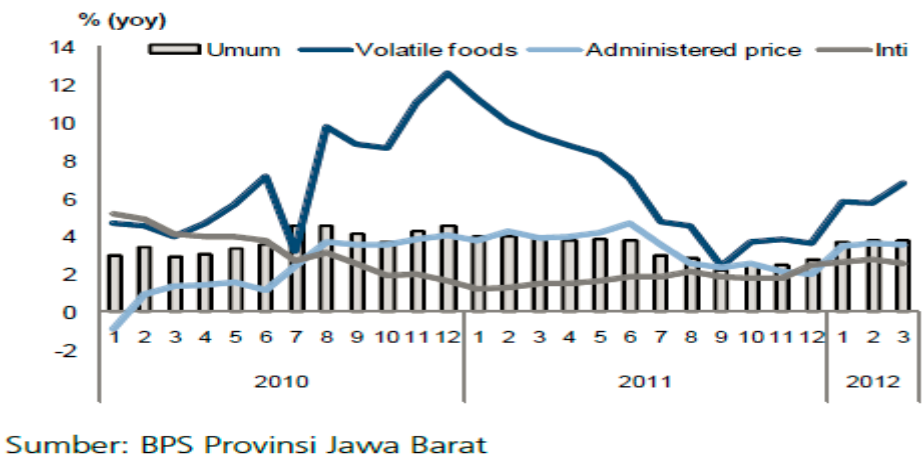
**) Angka Sementara

Laju Inflasi

Laju Inflasi sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian. Kota Cimahi belum memiliki data inflasi, namun dengan berasumsi bahwa tingkat perkembangan

harga konsumen di Kota Cimahi relatif sama dengan kondisi di Kota Bandung maka tingkat inflasi Kota Cimahi sama dengan Kota Bandung. Di Kota Bandung pada periode I-2012 kembali mengalami peningkatan inflasi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Seluruh komponen penyumbang inflasi mengalami peningkatan. Sumber utama peningkatan inflasi terutama adalah *Volatile Food* (VF), sedangkan inflasi *Administered Price* (AP) dan *Inti* meski meningkat pada awal tahun cenderung menurun di akhir periode (Gambar 2.4).

Gambar 2.4
Grafik Laju Inflasi Kota Cimahi (Pendekatan Kota Bandung)



Berdasarkan kelompok barang dan jasa (Tabel 2.10), tekanan inflasi disebabkan oleh kelompok bahan makanan, makanan jadi, perumahan, dan kesehatan. Pada kelompok bahan makanan, kenaikan inflasi lebih disebabkan oleh akibat pergeseran puncak panen padi di sekitar Bandung dari Februari - Maret menjadi Maret – April 2012. Selain itu, para pedagang bumbu dan buah menaikkan harga untuk mengantisipasi kenaikan biaya transportasi akibat naiknya harga BBM bersubsidi sehingga membuat inflasi pada kelompok bahan makanan meningkat tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sementara itu, inflasi pada kelompok sandang, pendidikan dan transpor mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tabel 2.10
Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Barang dan Jasa

No.	Kelompok	2010				2011				2012
		Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	
1	Bahan makanan	3,96	7,18	8,87	12,61	9,31	7,10	2,42	3,60	6,81
2	Makanan jadi	5,39	4,75	3,49	2,57	1,81	2,35	1,89	2,16	4,64
3	Perumahan	1,97	2,34	3,71	2,20	2,18	1,93	0,63	2,69	2,97
4	Sandang	-1,74	0,12	2,49	3,44	3,36	4,00	3,67	1,95	0,95
5	Kesehatan	2,20	1,33	1,50	0,97	0,98	3,70	3,13	3,21	3,35
6	Pendidikan	3,71	3,55	1,14	2,13	4,00	4,07	6,07	4,60	3,39
7	Transpor	1,09	0,63	1,51	2,40	2,98	3,52	2,17	1,58	0,75
Umum		2,86	3,50	4,08	4,53	3,92	3,71	2,17	2,75	3,76

Keterangan : *) nama kelompok disingkat; Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

PDRB Per Kapita

Indikator lain yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita atau *Percapita Income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk (*transfer in*) maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini digunakan karena sulitnya memperoleh data pendapatan faktor produksi yang masuk dan keluar wilayah kota. Angka pendapatan per kapita dengan asumsi tersebut di atas diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Perkembangan Pendapatan Perkapita Penduduk Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.11
Pendapatan Perkapita Kota Cimahi Tahun 2007 - 2011
Adh Berlaku dan Adh Konstan

Tahun	Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	PDRB Perkapita ADHB (Rp)	PDRB Perkapita ADHK (Rp)
2007	529.970	17.557.210,16	10.640.054,64
2008	521.508	20.548.660,88	11.328.815,94
2009	531.737	22.043.521,05	11.662.389,92
2010*)	541.177	23.736.415,96	12.028.066,14
2011**)	553.267	25.602.161,65	12.419.359,98
Rata-Rata Pertumbuhan (%)		9,96	3,95

Sumber: BPS Kota Cimahi-PDRB Tahun 2010 -2012

*) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

Pertumbuhan penduduk turut mempengaruhi pendapatan per kapita karena semakin tinggi pertumbuhan penduduk (mendekati pertumbuhan ekonomi) maka akan semakin kecil peningkatan pendapatan perkapita.

Bila dihubungkan dengan Indeks Daya Beli Kota Cimahi, pertumbuhan pendapatan perkapita rill rata-rata pada tahun berjalan yaitu sebesar 2.76% lebih besar dari rata – rata Indeks Daya Beli Tahun 2002 – 2011. Sementara itu jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rill terlihat bahwa, baik pertumbuhan pendapatan perkapita maupun Indeks Daya Beli masih masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi yang telah mencapai 5.56%. Tampak bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak diikuti dengan naiknya kemampuan daya beli. Tetapi dengan memperhatikan kecendrungan atau ternd, peningkatan Indeks daya beli (IDB) memiliki korelasi positif dengan peningkatan pendapatan perkapita secara signifikan.

Tidak signifikannya pertumbuhan ekonomi dalam mempengaruhi peningkatan IPM dalam hal ini Indeks Daya Beli, kemungkinan besar disebabkan karena struktur perekonomian kota yang didominasi oleh sektor manufaktur belum memberikan dampak yang lebih luas terhadap seluruh penduduk kota. Maka dengan melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan daya beli yang tidak berkorelasi, strategi untuk mendorong kemampuan daya beli adalah dengan meningkatkan kegiatan perekonomian yang mampu meningkatkan pendapatan penduduk secara lebih merata atau dengan kata lain mampu memperbaiki distribusi pendapatan (pendapatan perkapita penduduk).

Indeks Gini

Tingkat pemerataan pendapatan atau distribusi pendapatan dapat di lihat dari besarnya angka koefisien Gini. Diketahui bahwa besarnya koefisien Gini untuk Kota Cimahi pada tahun 2003, 2010 dan 2011 berturut-turut adalah sebesar 0.3798, 0.2932 dan 0.344. Angka koefisien Gini yang berada di kisaran 0.3 hingga 0,5 mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan ketika sebelum berdirinya Kota Cimahi sudah cukup baik (moderat)..

Status Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran

Untuk Kota Cimahi, berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 teridentifikasi sebanyak 35.280 rumah tangga atau 142.317 jiwa. Dari jumlah tersebut, Data yang telah diserahkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kepada Pemerintah Kota Cimahi sebanyak 24.119KK atau 103.966 Jiwa. Jumlah tersebut merupakan jumlah penduduk yang termasuk kategori dengan status kesejahteraan 1,2 dan 3. Dari data PPLS 2011 yang diterima, secara umum dapat dianalisis sebaran penduduk berkategori status kesejahteraan 1,2,dan 3 di Cimahi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Status Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran Kota Cimahi Tahun 2011

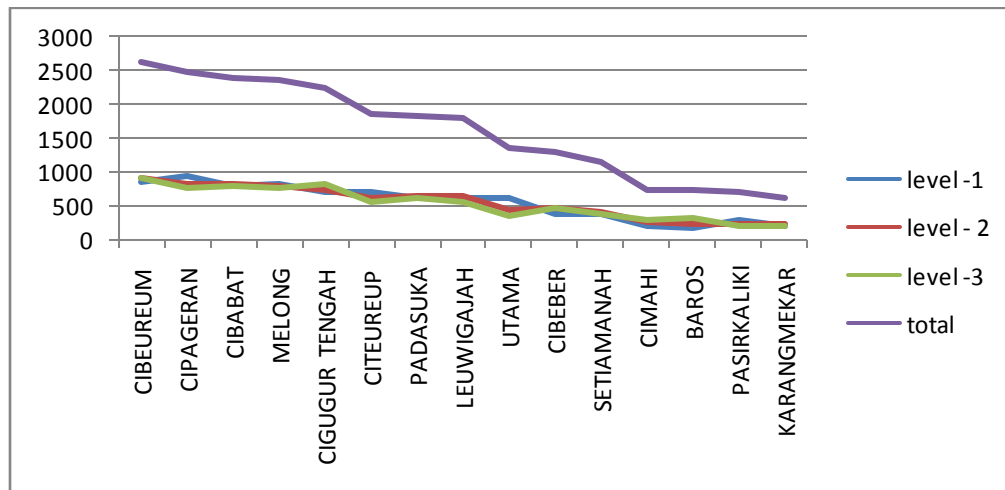
Wilayah		Status Kesejahteraan			Total
		1	2	3	
Kecamatan	Selatan	3,188	3,152	3,094	9,434
	Tengah	2,149	2,479	2,646	7,274
	Utara	2,651	2,435	2,325	7,411
Total		7,988	8,066	8,065	24,119
Wilayah		% Status Kesejahteraan			Total
		1	2	3	
Kecamatan	Selatan	13,2	13,1	12,8	39,1
	Tengah	8,9	10,3	11,0	30,2
	Utara	11,0	10,1	9,6	30,7
Total		33,1	33,4	33,4	100,0

Sumber : Bappeda Kota Cimahi

- o 1 = Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia)
- o 2= Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia)
- o 3 = Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah di Indonesia)

Dari pengolahan data di atas dapat disimpulkan analisis awal sebaran penduduk berpendapatan terendah di Kota Cimahi. Sebaran tertinggi ada di Kecamatan Cimahi Selatan dan Cimahi Utara. Dengan sebaran per kelurahan sebagaimana tertera dalam grafik di bawah ini:

Gambar 2.5
Sebaran Penduduk Berpendapatan Rendah Per Kelurahan



Sumber : Data PPLS2011, data diolah

Pada tingkat kelurahan, pola sebaran penduduk berpendapatan rendah relatif sama. Tertinggi berada di Kelurahan Cibeureum, diikuti Cipageran, Cibabat dan Melong. Berikut analisis profil sebaran penduduk berpendapatan rendah per kecamatan di Kota Cimahi:

- Jumlah penduduk berpendapatan rendah paling banyak berada di Kecamatan Cimahi Selatan (39 %)
- Jumlah penduduk berpendapatan rendah tertinggi kedua berada di Kecamatan Cimahi Utara, khususnya Kelurahan Cipageran (10,26%)
- Jumlah penduduk berpendapatan rendah paling sedikit ada di Cimahi Tengah, khususnya Kelurahan Karang Mekar, Cimahi dan Setiamanah

Dari analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pola sebaran penduduk berpendapatan rendah di Kota Cimahi tidak merata, artinya tidak terkonsentrasi di tengah (pusat kota) tetapi menyebar di daerah pinggiran (*peripheral areas*). Konsentrasi penduduk berpendapatan rendah di kelurahan-kelurahan tertentu sangat tinggi misalnya di Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Cipageran.

Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Pada tahun 2011, jumlah penduduk miskin di Kota Cimahi berkurang 0,25% dari tahun 2010 menjadi 39.539 jiwa, sehingga persentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan tahun 2011 meningkat menjadi 92,85%.

Tabel 2.13
Persentase Penduduk Miskin dan Penduduk di Atas Garis Kemiskinan
Kota Cimahi Tahun 2007 - 2011

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
Jml Penduduk Miskin	43.700	52.340	46.440	40.100	39.539
% Penduduk Miskin	7,33	8,35	7,10	7,40	7,15
% Penduduk di atas garis kemiskinan	92,67	91,65	92,90	92,60	92,85

Sumber : BPS (Statistik Daerah Kota Cimahi, Data Basis IPM Jawa Barat)

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (AMH) merupakan salah satu indikator dalam mengukur pencapaian pembangunan manusia dalam dimensi pengetahuan. Capaian AMH Tahun 2011 pada tingkat kecamatan menunjukkan nilai yang hampir merata di setiap kecamatan dengan capaian tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Cimahi Tengah dan capaian terendah diraih oleh Kecamatan Cimahi Utara. Berdasarkan jenis kelamin, capaian AMH kelompok laki-laki lebih tinggi daripada kelompok perempuan. Namun secara umum perbedaan ini tidak terlalu signifikan.

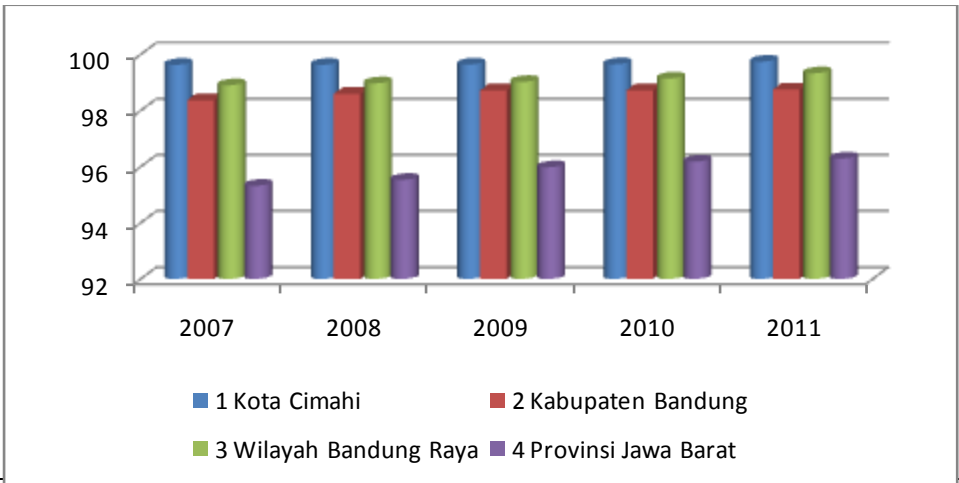
Tabel 2.14
Angka Melek Huruf Tahun 2011 Per Kecamatan
Kota Cimahi

NO	KECAMATAN	Angka Melek Huruf (AMH)		
		L	P	Total
1	Cimahi Selatan	99.44	99.62	99.54
2	Cimahi Tengah	99.84	99.99	99.92
3	Cimahi Utara	99.78	99.19	99.47
	Kota Cimahi	99.67	99.63	99.74

Sumber: BPS Kota Cimahi

Perkembangan AMH Kota Cimahi selama periode 2007 – 2011 relatif cukup bagus, karena capaian AMH Kota Cimahi selalu lebih tinggi bila dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota di wilayah Bandung Raya. Bahkan untuk Tahun 2011, capaian AMH Kota Cimahi sebesar 99,74% berada pada peringkat satu di Provinsi Jawa Barat, naik dua peringkat dari tahun sebelumnya.

Gambar 2.6
Perbandingan AMH Kota Cimahi, Kab. Bandung, Wilayah Bandung Raya
dan Provnsi Jawa Barat Tahun 2007 – 2011



Sumber:BPS Kota Cimahi

Meskipun demikian, capaian AMH yang belum mencapai maksimal seratus persen menunjukkan bahwa masih ada penduduk usia sekolah di Kota Cimahi yang tidak/belum pernah sekolah.

Rata-rata lama sekolah

Rata – rata Lama Sekolah (RLS) merupakan komponen lainnya dalam mengukur pencapaian pembangunan dalam dimensi pengetahuan. Capaian RLS Kota Cimahi pada tingkat kecamatan relatif homogen, dimana sebagian besar wilayah Kota Cimahi memiliki RLS pada tingkat sekolah menengah atas ($9 < RLS \leq 11$). Capaian tertinggi diperoleh Kecamatan Cimahi Tengah yang memiliki RLS 10,82 tahun setara dengan kelas 3 SMA. Sementara capaian terendah adalah Kecamatan Cimahi Selatan yang memiliki RLS 10,19 tahun setara dengan kelas 2 SMA.

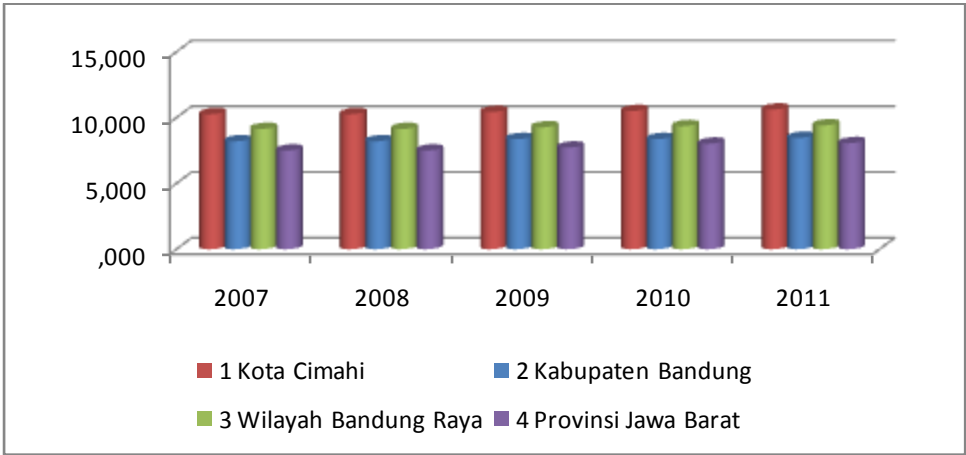
Tabel 2.15
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2011 Per Kecamatan
Kota Cimahi

NO	KECAMAT AN	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)		
		L	P	Total
1	Cimahi Selatan	10.45	9.93	10.19
2	Cimahi Tengah	11.07	10.55	10.82
3	Cimahi Utara	10.76	10.18	10.47
	Kota Cimahi	10.88	10.33	10.61

Sumber:BPS Kota Cimahi

Bila dibandingkan dengan Wilayah Bandung Raya dan Provinsi Jawa Barat, capaian RLS Kota Cimahi selama periode 2007 – 2011 selalu lebih tinggi.

Gambar 2.7
Perbandingan RLS Kota Cimahi Kab. Bandung, Wilayah Bandung Raya dan Provnsi Jawa Barat Tahun 2007 – 2011



Sumber: BPS Kota Cimahi

Angka Partisipasi Kasar

Pada tahun 2011, Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Cimahi untuk jenjang SD/ sederajat dan jenjang SLTA/ sederajat mengalami penurunan, sedangkan untuk jenjang SLTP mengalami peningkatan. Capaian APK tahun 2011 untuk setiap kecamatan dana perkembangan APK Kota Cimahi selama periode tahun 2007 – 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.16 dan Tabel 2.17 berikut ini:

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Kasar (APK) Per Kecamatan Kota Cimahi Tahun 2011

NO	KECAMATAN	Kel. Umur Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar		Total
			L	P	
1	Cimahi Selatan	SD/MI/ Sederajat	102.19	96.24	99.13
		SLTP/MTs/ Sederajat	83.04	78.35	80.77
		SLTA/MA/SMK/ Sederajat	71.93	86.00	78.62
2	Cimahi Tengah	SD/MI/ Sederajat	98.52	106.32	102.16
		SLTP/MTs/ Sederajat	93.81	80.15	86.89
		SLTA/MA/SMK/ Sederajat	88.21	97.37	93.04
3	Cimahi Utara	SD/MI/ Sederajat	96.30	103.53	99.72
		SLTP/MTs/ Sederajat	96.02	97.74	96.81
		SLTA/MA/SMK/ Sederajat	88.42	61.65	74.23
	Kota Cimahi	SD/MI/ Sederajat	99.47	100.85	100.14
		SLTP/MTs/ Sederajat	90.55	84.84	87.79
		SLTA/MA/SMK/ Sederajat	80.58	82.06	81.33

Sumber: BPS Kota Cimahi

Tabel 2.17
Perkembangan APK Kota Cimahi
Tahun 2007 – 2011

NO	Kelompok Umur Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI/Sederajat	90.29	86.23	84.61	128.33	100.14
2	SLTP/MTs/Sederajat	85.89	83.16	78.43	75.54	87.79
3	SLTA/MA/SMK/Sederajat	78.88	80.54	84.88	109.07	81.33

Sumber:BPS Kota Cimahi

Angka Partisipasi Murni

Sama halnya dengan APK, Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Cimahi Tahun 2011 untuk jenjang SD / sederajat dan jenjang SLTA / sederajat mengalami penurunan, sedangkan untuk jenjang SLTP mengalami peningkatan. Capaian APM tahun 2011 untuk setiap kecamatan dan perkembangan APM Kota Cimahi selama periode tahun 2007 – 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.18 dan Tabel 2.19 berikut ini:

Tabel 2.18
Angka Partisipasi Murni (APM) Per Kecamatan
Kota Cimahi Tahun 2011

NO	KECAMATAN	Kel. Umur Pendidikan	Angka Partisipasi Murni		Total
			L	P	
1	Cimahi Selatan	7-12	93.29	91.49	92.37
		13-15	61.37	58.23	59.85
		16-18	54.39	57.89	56.06
2	Cimahi Tengah	7-12	89.41	92.83	91.01
		13-15	74.74	65.42	70.02
		16-18	52.38	55.26	53.90
3	Cimahi Utara	7-12	90.77	94.35	92.46
		13-15	76.03	87.45	81.27
		16-18	60.98	53.85	57.20
	Kota Cimahi	7-12	91.45	92.60	92.01
		13-15	70.20	69.45	69.84
		16-18	55.62	55.95	55.79

Sumber:BPS Kota Cimahi

Tabel 2.19
Perkembangan APM Kota Cimahi
Tahun 2007 – 2011

NO	Kelompok Umur Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	7-12	90.76	78.94	75.39	74.33	86.68	92.01
2	13-15	92.04	62.11	60.14	55.60	88.12	69.84
3	16-18	55.16	53.75	54.88	57.83	81.39	55.79

Sumber:BPS Kota Cimahi

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Pengelompokan penduduk usia 10 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan menghasilkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) pada setiap kecamatan yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.20
Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Per Kecamatan Kota Cimahi
Tahun 2011

Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan	Cimahi Selatan		Cimahi Tengah		Cimahi Utara		Kota Cimahi	
	N	APT	N	APT	N	APT	N	APT
< SD	19,936	8.42	10,104	6.10	14,748	9.76	44,788	8.09
SD / Sederajat	39,588	16.72	23,451	14.16	30,263	20.02	93,302	16.85
Paket A	-	-	-	-	182	0.12	182	0.03
SLTP / Sederajat	48,620	20.53	30,901	18.65	24,836	16.43	104,357	18.85
Paket B	110	0.05	-	-	-	-	110	0.02
SLTA / Sederajat	64,054	27.05	53,499	32.30	30,562	20.22	148,115	26.76
Paket C	409	0.17	176	0.11	92	0.06	677	0.12
D1/D2/D3	9,149	3.86	7,133	4.31	6,873	4.55	23,155	4.18
S1 ≤	10,781	4.55	10,011	6.04	15,284	10.11	36,076	6.52

Sumber : Survey IPM 2011-BPS Kota Cimahi

Angka Harapan Hidup

Peningkatan kualitas kesehatan diukur melalui angka harapan hidup (AHH). Pada tahun 2011 AHH Kota Cimahi mencapai 69,25 tahun meningkat 0,07 poin dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 69,18 tahun. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cimahi dibandingkan dengan Wilayah di Sekitarnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21
Perkembangan Angka Harapan Hidup Wilayah Bandung Raya
Tahun 2007 - 2011

Wilayah	2007	2008	2009	2010	2011
Kota Cimahi	68.97	69.04	69.11	69.18	69.25
Kota Bandung	69.55	69.61	69.66	69.72	69.78
Kab. Bandung	68.78	68.86	68.94	69.02	69.10
Kab. Bandung Barat	68.53	68.58	68.61	68.65	68.68

Sumber: BPS Kota Cimahi

Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator yang paling peka untuk menilai derajat kesehatan masyarakat dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam rangka mewujudkan Cimahi Sehat 2012, salah satu indikator yang ingin dicapai adalah

AKB 25/1.000 Kelahiran Hidup melalui program Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan Reproduksi dengan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta percepatan penurunan angka kesakitan. Program/kegiatan tersebut dilakukan dengan pendekatan partisipasi aktif masyarakat dengan kegiatan pokok yaitu mengatasi penyebab langsung, penyebab tidak langsung dan penyebab mendasar kematian ibu, bayi dan balita serta melakukan upaya terobosan untuk percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi. Perkembangan jumlah kasus kematian bayi di Kota Cimahi berdasarkan data dari Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22
Perkembangan Angka Kematian Bayi Kota Cimahi
Tahun 2007 – 2011

Uraian	Sumber	2007	2008	2009	2010	2011
Jml kematian bayi usia di bawah 1 tahun	Dinas	60	82	80	73	82
Jml kelahiran hidup	Kesehatan	9.729	11.375	10.734	10.908	10.629
Angka Kematian Bayi (AKB) (/1.000KH)	Kota Cimahi	6,17	7,21	7,45	6,69	7,71

Keterangan:

**) Angka Sementara Olahan Bappeda

Dari tabel di atas terlihat bahwa menurut data Dinas Kesehatan Kota Cimahi AKB Tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2010. Penyebab langsung kematian bayi paling banyak terjadi di Tahun 2011 adalah komplikasi Asphyxia dan BBLR.

Persentase Balita Gizi Buruk

Dalam 5 tahun terakhir status kondisi gizi masyarakat Kota Cimahi, khususnya status gizi balita umumnya cukup baik dimana untuk balita gizi baik selalu di atas 85% dan di tahun 2011 mencapai 90,02%, sementara pada tahun 2007 hanya 87,98%. Walaupun kondisi gizi balita sudah cukup baik tapi masih terdapat sebagian kecil balita gizi kurang dan balita gizi buruk yang harus ditangani, yaitu pada tahun 2011 balita gizi buruk mencapai 0,69% sementara balita gizi kurang mencapai 3,80%.

Tabel 2.23
Status Gizi Balita di Kota Cimahi Tahun 2007-2011

STATUS GIZI	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
Gizi lebih	2,31	2,32	3,19	3.44	5.50
Gizi baik	86,14	88,43	86,07	86.71	90.02
Gizi kurang	0,90	0,51	0,80	10.61	3.80
Gizi buruk	10,64	8,75	10,02	0.92	0.69

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pencapaian pembangunan dalam bidang seni budaya dan olahraga dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.24
Perkembangan Grup Kesenian Kota Cimahi Tahun 2006 – 2010

NO	URAIAN	2006	2007	2008	2009	2010
1	Wayang golek	3	4	5	5	3
2	Seni Calung	79	47	34	34	38
3	Singa Depok	20	3	5	5	5
4	Degung/Jaipong	83	153	47	47	36
5	Dangdut	81	60	56	56	46
6	Band	112	60	78	78	100

Sumber: BPS Kota Cimahi (Profil Pemerintahan Kota Cimahi 2007 – 2011)

Tabel 2.25
Jumlah Gedung dan Lapangan Olahraga Kota Cimahi

No.	Kecamatan	Jumlah Gelanggang / Balai Remaja	Jumlah Lapangan Sepak Bola & Futsal	Jumlah Lapangan & Gedung Bulutangkis	Jumlah Lapangan & Gedung Tenis	Jumlah Lapangan & Gedung Bola Volley
1	Cimahi Utara	16	9	10	3	17
2	Cimahi Tengah	20	18	17	11	25
3	Cimahi Selatan	13	9	6	2	10
	Kota Cimahi	49	36	33	16	52

Sumber: BPS Kota Cimahi (Profil Pemerintahan Kota Cimahi 2007 – 2011)

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting bagi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan menjadi media utama dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai sarana pembebasan manusia dari keterbelakangan dan kebodohan. Pendidikan juga menjadi faktor penting dalam proses transformasi suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Pembangunan pendidikan adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern. Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Dalam konteks demikian, pembangunan pendidikan itu mencakup berbagai dimensi yang sangat luas yaitu sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Cimahi pada dasarnya merupakan upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional relevan dengan visi dan misi Kemendiknas (2010-2014), yaitu:

1. Ketersediaan layanan pendidikan;
2. Keterjangkauan layanan pendidikan;
3. Kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan;
4. Kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan;
5. Kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan.

Pembangunan pendidikan selama kurun waktu (2007-2012) sudah mendapat prioritas tertinggi dalam pembangunan di Kota Cimahi. Hal ini ditunjukkan oleh penyediaan anggaran pembangunan bidang pendidikan tahun 2011 yang mencapai lebih dari 30% dari keseluruhan belanja daerah. Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam alokasi anggaran pendidikan dari APBN/APBD, dan penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya secara bertahap mulai diwujudkan.

Ketersediaan layanan pendidikan ditunjukkan dengan rasio ketersediaan gedung sekolah bagi penduduk Kota Cimahi. Pada tahun 2011, jumlah sekolah SD berjumlah 122 sekolah, MI 16 sekolah, SMP 37 sekolah, MTs 11 sekolah dan SMA 17 sekolah, MA 7 sekolah, dan SMK 20 sekolah. Adapun layanan pendidikan yang ditujukan dengan rasio siswa : rombel untuk jenjang pendidikan SD/MI 1:29, SMP/MTs 1:29 dan SMA/MA/SMK 1:34.

Pada tahun 2011, partisipasi pendidikan anak usia dini melalui jalur formal (TK/RA) dan non formal (KOBER/TPA/POS PAUD) usia 4-6 tahun mencapai 57.00%. Tenaga pendidik pada jenjang TK/RA berjumlah 733 orang dan tutor PAUD berjumlah 629 orang. Pada tahun 2011, jumlah peserta didik pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal; Jumlah siswa SD/MI adalah 58.207 siswa dari 59.845 AUS (7-12 tahun) SD/MI, sehingga diperoleh Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kota Cimahi sebesar 100.14%. Jumlah siswa SMP/MTs adalah 23.203 siswa dari 29.149 AUS (13 – 15 tahun) SMP/MTs, sehingga diperoleh APK SMP/MTs Kota Cimahi sebesar 87.89%.

Untuk jenjang pendidikan dasar, data pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: APM SD/MI mencapai 92.01% dan APM SMP/MTs mencapai 69.84%. Penyebab kurang optimalnya APK SD/MI dan SMP/MTs Kota Cimahi seperti pada data di atas banyak AUS (7-12 dan 13 -15 tahun) yang bersekolah di luar wilayah Kota Cimahi, sedangkan untuk APM dikarenakan

selain AUS yang bersekolah di luar Kota Cimahi juga ada sebagian AUS siswa SD/MI yang sudah bersekolah di SMP/MTS dan AUS SMP/MTS yang sudah bersekolah di SMA/MA/SMK. Untuk Angka Putus Sekolah (APtS) tahun 2011, pada jenjang SD/MI APtS sebesar 0,13%, AptS SMP/MTs sebesar 0,23%.

Pada jenjang pendidikan menengah atas, tahun 2011 jumlah siswa SMA/MA/SMK adalah 25.764 siswa dari 25.303 AUS (16-18 tahun) SMA/MA/SMK, sehingga diperoleh APK SMA/MA/SMK Kota Cimahi sebesar 81.33%. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMA/MA/SMK tahun 2011 sebesar 55.79% dan APtS SMA/MA/SMK sebesar 0,47%.

Perluasan dan pemerataan pendidikan juga memberi tuntutan pada peningkatan pemerataan memperoleh pendidikan bagi siswa lulusan SD/MI yang karena kendala tertentu tidak dapat mengikuti pendidikan SMP/MTs reguler, disediakan pendidikan alternatif antara lain melalui 2 SMP Terbuka. Di samping itu, peningkatan pemerataan dan perluasan pendidikan dapat ditempuh dengan memberikan pelayanan pendidikan pada pendidikan non formal.

Untuk mengatasi persoalan keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, dan kesempatan, serta tidak dapat bersekolah pada usia sekolah, disediakan jalur pendidikan non formal melalui Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C, yang berada di PKBM dan pada tahun 2011 berjumlah 23 PKBM. Program Pendidikan Kesetaraan ini dapat dilaksanakan di berbagai tempat yang sudah ada, baik milik pemerintah, masyarakat maupun pribadi, seperti gedung sekolah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), rumah ibadah, pusat-pusat majlis taklim, kantor organisasi-organisasi kemasyarakatan, rumah penduduk dan tempat-tempat lain yang layak.

Untuk tingkat partisipasi sekolah berdasarkan data terpilah (laki-laki dan perempuan) ratio SD/MI 98,45% SMP/MTS 98,01% dan SMA/SMK/MA 80,57%. Dari data tersebut dapat dikatakan angka partisipasi sekolah anak laki-laki dan perempuan di Kota Cimahi relatif sama sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada kesenjangan gender yang signifikan, baik pada satuan pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses pendidikan bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Kondisi ini bisa tercapai karena ketersediaan dan pemerataan fasilitas pendidikan relatif tersebar merata di seluruh Kota Cimahi. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat berpandangan pendidikan itu penting baik itu untuk anak laki-laki maupun perempuan.

Faktor lain yang penting dalam mempengaruhi kualitas pendidikan adalah ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan. Pada tahun 2011, rasio guru : siswa untuk tingkat SD/MI adalah 1: 23, tingkat SLTP 1:15, dan untuk tingkat SLTA 1:14.

Semakin tinggi jenjang pendidikan sekolah, rasio guru terhadap murid semakin besar, dan pada tingkatan yang lebih tinggi guru mempunyai spesifikasi bidang studi.

Untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik salah satunya adalah dengan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Pada tahun 2011, kualifikasi Pendidik yang telah lulus S1 pada satuan pendidikan SD/MI mencapai 76.00%, sedangkan untuk satuan pendidikan SMP/MTs 89,57%, satuan pendidikan menengah SMA/MA/SMK 95,74%.

Dalam mendukung Kota Cimahi menuju Cyber Creative City, bidang pendidikan memprogramkan optimalisasi penggunaan fasilitas teknologi pendidikan yaitu komputer dengan jaringan internetnya (*Information Communication Technology*), laboratorium bahasa asing, baik melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal.

Dalam memfasilitasi Tutor / Pendidik / Pamong Belajar dan Penilik dalam meningkatkan kompetensinya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan non formal yang setara dengan pendidikan formal dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Dirjen PNFI Kemendikbud, P2-PNFI Regional 1 Bandung.

Tahun 2011 angka kelulusan SD/MI mencapai 99,92%, SMP/MTs. 99,84% dan angka kelulusan SMA/MA/SMK mencapai 99,85%. Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs mencapai 101,07%, dan angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA, SMK mencapai 111,00%. Hal tersebut merupakan prestasi yang membanggakan bagi Kota Cimahi karena sekolah di Kota Cimahi menjadi daya tarik bagi siswa di luar Kota Cimahi.

2. Kesehatan

Kondisi kesehatan di Kota Cimahi dapat direpresentasikan melalui Indeks Kesehatan, dimana angka tersebut mencerminkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode waktu tertentu, yang diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH). Berdasarkan data BPS, AHH Kota Cimahi pada tahun 2011 mencapai 69,25 atau mengalami kenaikan sebesar 0,07 poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 69,18.

Nilai AHH dipengaruhi pula oleh kondisi Kesehatan Ibu dan anak khususnya oleh jumlah kematian Ibu dan anak yang direpresentasikan melalui AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi), dimana pada tahun 2007 AKI mencapai 102,79 /100000 KH, sedangkan tahun 2011 menurun menjadi 84,67/100.000 Kelahiran Hidup (KH). Sedangkan untuk AKB, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Cimahi pada tahun 2007 adalah sebesar 6,17/1000KH dan di tahun 2011 mencapai 7,71/1000KH.

Tabel 2.26
Jumlah Kematian Ibu dan Bayi di Kota Cimahi Tahun 2007 s.d 2011

TAHUN	A K B		A K I	
	Σ kematian	Konversi (/ 1000KH)	Σ kematian	Konversi (/ 100.000KH)
2007	60/9729 KH	6,17	10/9729 KH	102,79
2008	82/ 11375 KH	7,20	9/11375 KH	79,12
2009	80/10734 KH	7,45	16/10734 KH	149,06
2010	68/10908 KH	6,23	9/10908 KH	85.20
2011	82/10629 KH	7,71	9/10629 KH	84,67

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Untuk AKB, perlu ada catatan tersendiri bahwa terdapat perbedaan data dengan angka yang dikeluarkan oleh BPS. BPS mengeluarkan AKB setiap tiga tahun sekali dan menurut angka yang dikeluarkan oleh BPS, AKB Kota Cimahi pada tahun 2008 adalah sebesar 30,54/1000KH lalu turun menjadi 29,80/1000KH pada tahun 2011. Perbedaan angka ini disebabkan adanya perbedaan cara perhitungan yang dilakukan oleh BPD dengan Dinas Kesehatan Kota Cimahi dimana Dinas Kesehatan menghitung setiap tahun berdasarkan data yang tersedia di puskesmas-puskesmas.

Sementara itu perkembangan dalam 5 tahun terakhir status kondisi gizi masyarakat Kota Cimahi, khususnya status gizi balita umumnya cukup baik dimana untuk balita gizi baik selalu di atas 85% dan di tahun 2011 mencapai 90,02%, sementara pada tahun 2007 hanya 87,98%. Walaupun kondisi gizi balita sudah cukup baik tapi masih terdapat sebagian kecil balita gizi kurang dan balita gizi buruk yang harus ditangani, yaitu pada tahun 2011 balita gizi buruk mencapai 0,69% sementara balita gizi kurang mencapai 3,80%.

Tabel 2.27
Status Gizi Balita di Kota Cimahi Tahun 2007-2011

STATUS GIZI	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
Gizi lebih	2,31	2,32	3,19	3.44	5.50
Gizi baik	86,14	88,43	86,07	86.71	90.02
Gizi kurang	0,90	0,51	0,80	10.61	3.80
Gizi buruk	10,64	8,75	10,02	0.92	0.69

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Kota yang padat dengan pengawasan kesehatan yang tidak mudah membawa Cimahi juga merupakan daerah endemis DBD hal ini terlihat dari jumlah kasus DBD yang cukup tinggi. Perkembangan Jumlah kasus demam berdarah di Kota Cimahi dari tahun 2007 sampai dengan 2011 diperlihatkan pada tabel berikut. Terlihat bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2011 menjadi 450 kasus dari tahun 2010 sebesar 1807 kasus.

Tabel 2.28

Kasus DBD Tahun 2007-2011

Tahun	Jumlah Kasus
2007	2376
2008	1250
2009	1906
2010	1807
2011	450

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Kondisi kesehatan penduduk Kota Cimahi juga dipengaruhi oleh kualitas layanan kesehatan yang ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain faktor aksesibilitas sarana kesehatan dan tenaga kesehatan. Faktor aksesibilitas sarana kesehatan meliputi ketersediaan tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan poliklinik.

Bila dilihat dari sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kota Cimahi maka terdapat beragam sarana pelayanan yang terdiri dari 1 (satu) rumah sakit pemerintah, 1 (satu) rumah sakit AD, 2 (dua) rumah sakit swasta, dan 5 (lima) rumah bersalin. Jumlah puskesmas ada sebanyak 13 unit dan 3 diantaranya adalah puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), puskesmas pembantu 3 unit, puskesmas keliling 12 unit dan balai pengobatan/klinik sebanyak 57 unit. Walaupun pada saat ini Kota Cimahi telah memiliki sarana pelayanan kesehatan yang relatif banyak tetapi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat perlu adanya peningkatan baik kualitas maupun kuantitas.

Jumlah tenaga kesehatan sebagai pemberi layanan kesehatan ada sebanyak 176 tenaga medis, 909 perawat dan bidan, 75 tenaga farmasi, 33 tenaga gizi, 47 teknisi medis, 1 tenaga sanitasi, dan 11 tenaga kesmas. Jumlah dokter 252 orang terdiri dari 114 dokter spesialis, 108 dokter umum dan 30 dokter gigi. Rasio jumlah penduduk Kota Cimahi terhadap jumlah dokter adalah 2.147, artinya 1 (satu) orang dokter melayani 2.147 orang penduduk. Kondisi ini sangat baik karena idealnya 1 (satu) orang dokter melayani 2.500 orang. Akan tetapi, ketersediaan dokter yang sudah ideal harus dibarengi dengan kualitas dan pemerataan pelayanan.

Berkaitan dengan pelayanan kesehatan keluarga miskin (Gakin), pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas pada tahun 2011 yang memanfaatkan dana Jamkesmas ada sebanyak 94.248 kunjungan dengan total dana yang terealisasi sebesar Rp.823.855.050, sedangkan jaminan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Cimahi atau Jamkesda adalah untuk 33.279 jiwa sebesar Rp.2.300.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.1.788.690.211.

Pemberdayaan masyarakat dan kader kesehatan melalui kegiatan posyandu dilakukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Tahun 2012 jumlah posyandu di Kota Cimahi sebanyak 388 dengan jumlah balita 52.284, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio posyandu di Kota Cimahi adalah 1 : 135, idealnya 1 posyandu melayani 100 balita. Kebutuhan posyandu untuk saat ini belum terpenuhi, tetapi dari tahun ke tahun jumlahnya semakin bertambah. Untuk menunjang upaya peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi dan balita telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu kelas ibu hamil dan kelompok pendukung Air Susu Ibu (KP ASI). Kelas ibu hamil bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu dalam menjalani kehamilan, persiapan persalinan agar selamat, aman sehingga ibu dan bayi sehat. KP ASI adalah kelompok ibu yang terdiri dari kader kesehatan, ibu hamil, ibu menyusui, masyarakat (ibu, remaja putri) dan tenaga kesehatan. Kegiatannya berupa diskusi/saling berbagi pengalaman tentang pengalaman dalam memberikan ASI. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah ibu yang memberikan ASI saja tanpa diberikan minuman/susu formula ataupun makanan lainnya sampai bayi berusia 6 bulan.

Selain prasarana dan sarana pelayanan kesehatan, derajat kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh daya dukung dan kualitas lingkungan. Tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi berpengaruh terhadap daya dukung dan kualitas lingkungan yang pada akhirnya berakibat pada derajat kesehatan masyarakat. Tingkat pelaksanaan PHBS oleh masyarakat masih relatif rendah, hal ini dapat dilihat dari persentase rumah tangga yang sudah melaksanakan PHBS di Kota Cimahi yang masih berkisar di angka 39,4%.

3. Pekerjaan Umum

Dalam bidang Pekerjaan Umum, sampai dengan tahun 2011 telah dilakukan berbagai perencanaan dan pembangunan prasarana kota yang meliputi jalan dan jembatan, drainase dan irigasi, air minum, air limbah dan persampahan.

Salah satu indikator keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah tingkat kemantapan jalan. Jaringan jalan di Kota Cimahi sepanjang 139,636 km, terdiri dari jalan tol 17 km, jalan nasional/provinsi 13,68 km, jalan kota 118,956 km. Adapun yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi adalah jalan kota sepanjang 118,956 km yang terdiri dari jalan kolektor primer, kolektor sekunder dan lokal. Tingkat kemantapan jalan sampai akhir tahun 2011 adalah sebesar 90,33% (kondisi baik dan sedang), sisanya sebesar 9,67% berada pada kondisi rusak dan rusak berat.

Infrastruktur lainnya yang memegang peranan penting bagi perkembangan fisik kota yaitu drainase. Di Kota Cimahi media tampungan air permukaan baik yang bersumber dari hulu sungai, mata air, hujan, dan buangan air domestik berupa jaringan dan beberapa aliran sungai. Namun demikian, jaringan drainase dan sungai yang ada

tersebut belum mampu menampung dan berfungsi secara optimal. Adanya limpasan air hujan ditambah dengan adanya tumpukan sampah dan bangunan liar di atas saluran darinase menyebabkan terjadinya genangan air dan bahkan banjir di beberapa titik kawasan. Sepanjang tahun 2011, pembangunan dan pemeliharaan gorong-gorong/drainase dilaksanakan dengan target pengurangan luas genangan eksisting 53,07 Ha sehingga menjadi 50,57 Ha.

Dalam aspek infrastruktur sumber daya air, pembangunan embung sebagai salah satu infrastruktur sumber daya air alternatif untuk menampung air limpasan dan cadangan air baku. Sampai tahun 2011 telah dilaksanakan pembangunan embung di 6 (enam) lokasi yaitu di Kelurahan Citeureup, Setiamanah, Leuwigajah, Melong dan Cibabat. Selain itu juga untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih telah dibangun 2 (dua) sumur artesis dan penyempurnaan 2 (dua) sumur artesis yang sudah ada serta dibangunnya 30 unit sumur pompa.

Pelayanan air minum di Kota Cimahi dipenuhi melalui sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan berasal dari PDAM Tirta Raharja yang dimiliki Kabupaten Bandung sedangkan sistem non perpipaan berupa pembangunan sumur artesis yang dilengkapi dengan sambungan-sambungan rumah. Sumber air PDAM yang digunakan untuk wilayah pelayanan Kota Cimahi adalah mata air Cikudapati, mata air Cisintok, Deep Well 11 dan 12 dan IPA Cipageran.

Kualitas air dari PDAM secara umum telah memenuhi standar kualitas air minum seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.907/Menkes/SK/VII/2002 tentang standar air minum pada IPA yang dimiliki. Untuk lebih jelaskan tentang kualitas air dari PDAM dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.29
Kualitas Air Bersih dari PDAM di Kota Cimahi

Parameter	Satuan	Standar Air Minum	Hasil
Bau		Negatif	Negatif
Zat Padat Terlarut	Mg/l	1000	12
Kekeruhan	NTU	5	0,06
Rasa		Normal	Normal
Suhu	C	SU + 3C	21
Warna	TCU	15	1
Alumunium	Mg/l	0,2	-
Besi Total	Mg/l	0,3	TT
Kesadahan Total	Mg/l	500	48
Klorida (Cl)	Mg/l	250	32,9
Mangan (Mn)	Mg/l	0,1	TT
Nitrit (NO2)	Mg/l	1,0	-
PH		6,5-8,5	6,7
Tembaga (Cu)	Mg/l	1,0	-
Zat Organik (KMnO4)	Mg/l	10,0	8,2
CO2 bebas	Mg/l		3,1

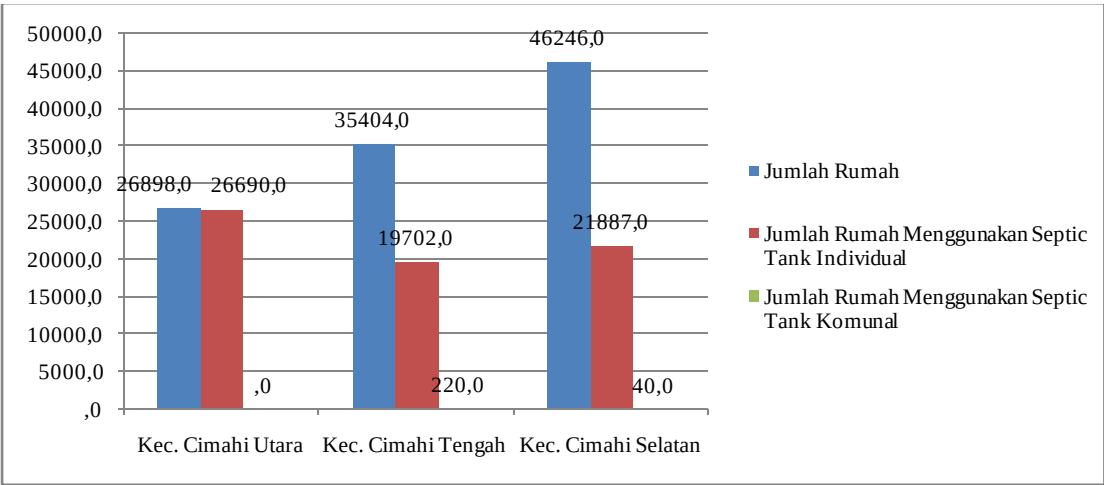
Parameter	Satuan	Standar Air Minum	Hasil
Alkalinitas Total	Mg/l		36
Amonium (NH4)	Mg/l		TT
Daya Hantar Listrik	Mg/l		61,2
Sisa Khlor			0,15

Sumber: Master Plan Air Bersih Kota Cimahi, Tahun 2007

Kondisi kualitas air non perpipaan di Kota Cimahi berdasarkan hasil studi kondisi air tanah dan permukaan didapatkan data bahwa Kota Cimahi memiliki potensi air tanah dengan nilai run off sebesar 614,04 mm/tahun, infiltrasi sebesar 239,47 mm/tahun dan volume air yang tersimpan sebesar 5.948.788,93 m3/tahun (Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Cimahi, 2010).

Sementara itu, kondisi pelayanan air limbah di Kota Cimahi berdasarkan data sekunder penggunaan septic tank individual dan komunal yang didapatkan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan, di Kecamatan Cimahi Utara jumlah rumah yang menggunakan septic tank individual sebesar 99,23% dan yang menggunakan septic tank komunal 0%, sedangkan untuk kecamatan Cimahi Tengah sebesar 55,65% dan 0,62% serta untuk kecamatan Cimahi selatan sebesar 47,33% dan 0,09%.

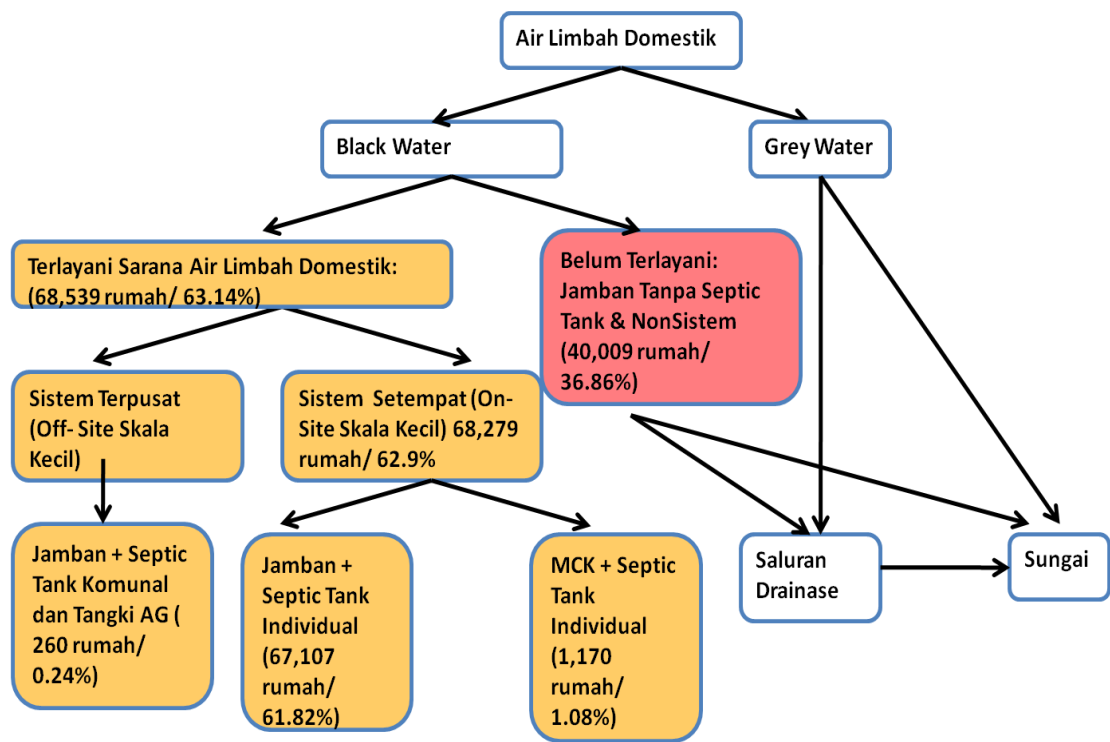
Gambar 2.8
Jenis Rumah yang Menggunakan Septictank Individual dan Komunal



Sumber :Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan Profil Kota Cimahi, 2010

Gambar berikut merupakan gambaran pengelolaan air limbah domestik yang ada di Kota Cimahi:

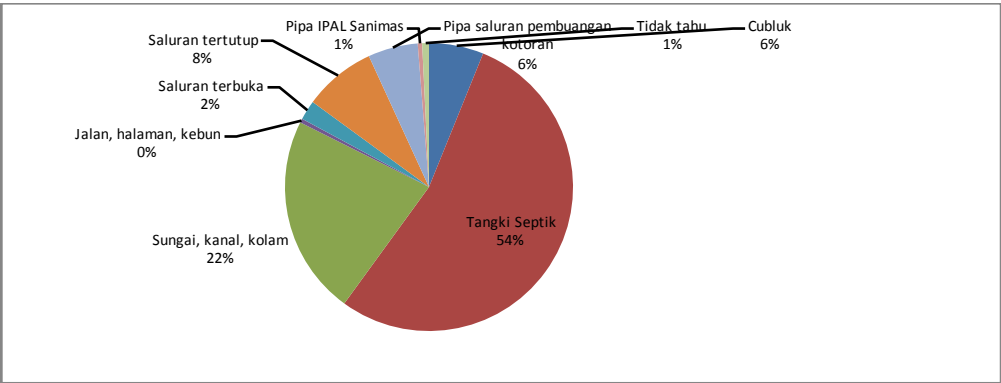
Gambar 2.9
Pengelolaan Air Limbah Domestik (*Black Water & Grey Water*) di Kota Cimahi



Sumber :Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Tahun 2010

Berdasarkan hasil studi Environment Health Risk Assessment (EHRA) 2011 menunjukkan bahwa saluran pembuangan dari WC/jamban ke tangki septik sebesar 54%. Sementara responden yang membuang ke sungai/kanal/kolam sebesar 22% dan responden yang membuang ke cubluk sebesar 6%. Sedangkan masyarakat yang membuang ke saluran terbuka sebesar 2%. Seperti terlihat pada Gambar berikut ini:

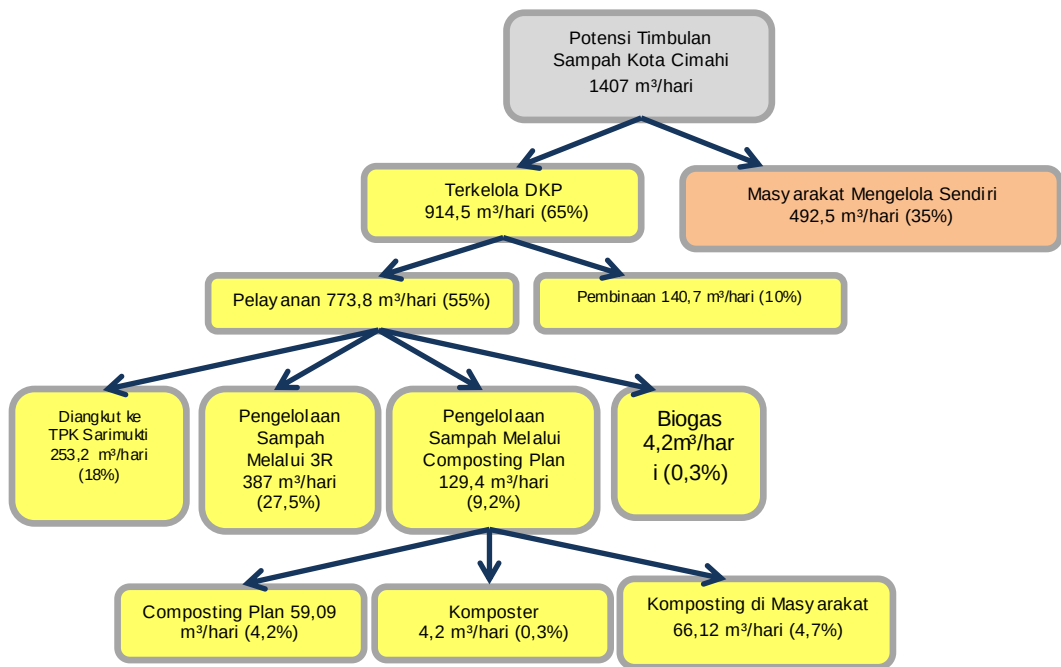
Gambar 2.10
Saluran Pembuangan dari WC/jamban Disalurkan/Terhubungkan



Sumber: Hasil Study EHRA (pengamatan), Tahun 2011

Pengelolaan sampah di Kota Cimahi secara umum sudah dikategorikan baik, karena sistem pengelolaan yang dilakukan tidak hanya mengandalkan pembuangan ke TPA, namun pengelolaan sampah melalui 3R, komposting dan pembuatan bio gas. Secara diagram proses pengelolaan sampah di Kota Cimahi dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.11
Alur Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi



Sumber:DKP Bidang Persampahan, Tahun 2010

Dari informasi diagram diatas, terlihat bahwa 65% jumlah timbunan sampah harian di Kota Cimahi sudah bisa dilayani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah. Sementara itu 35% lainnya masih dikelola oleh masyarakat dengan berbagai cara, antara lain dengan cara dibakar, dikubur ataupun dibuang ke tempat non TPS.

4. Perumahan

Pada aspek perumahan, kondisi perumahan yang ada di Kota Cimahi terdiri dari perumahan teratur dan perumahan yang tidak teratur. Secara umum perumahan yang tidak teratur identik dengan kepadatan dan/atau kekumuhan, sehingga sering dijumpai rumah atau lingkungan / kawasan permukiman yang tidak layak huni. Menurut data tahun jumlah rumah yang tidak layak huni di Kota Cimahi sebanyak 1.568 unit. Sedangkan jumlah pemukiman kumuh ada sebanyak 36 titik yang tersebar di 7 kelurahan. Jumlah rumah tangga yang mendiami rumah tidak layak huni paling besar berada di Kecamatan Cimahi Tengah, sedangkan jumlah pemukiman kumuh paling

banyak terdapat di kecamatan Cimahi Selatan. Dalam rangka pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat, telah dilakukan kegiatan pembangunan rumah layak huni pada tahun 2010-2012 sebanyak 782 rumah. Melalui peningkatan pemberdayaan komunitas perumahan sampai tahun 2012 telah dibangun jalan setapak pemukiman sepanjang 29.950 m.

Dengan pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yang cukup tinggi yaitu 2,26% (BPS 2011) dan tingkat kepadatan penduduk 13.377 jiwa/km² mempunyai konsekuensi langsung terhadap peningkatan kebutuhan akan perumahan sementara lahan yang ada terbatas. Sehingga mengakibatkan terbentuknya kawasan yang padat dan tidak teratur, yang berkesan kumuh. Program pemerintah dalam menyediakan perumahan rakyat secara vertikal (Rusunawa dan Rusunami) menjadi fokus utama untuk menghadapi masalah ini. Dengan tujuan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, peningkatan efisiensi penggunaan tanah sesuai peruntukan dan tata ruang, serta dapat meningkatkan daya tampung lingkungan, mobilitas, produktivitas dan daya saing kota.

5. Penataan Ruang

Kinerja penataan ruang di Kota Cimahi belum optimal, dimana masih terdapat beberapa ketidaksesuaian baik dalam aspek struktur maupun pola ruang. Hal ini terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi masyarakat Kota Cimahi yang cepat dan sangat dinamis.

Pengembangan struktur dan ruang kota dengan membuka jaringan prasarana baru terkendala oleh beberapa hambatan teknis dan geografis, yaitu:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, menyatakan bahwa sebagian besar luas Kota Cimahi, yaitu 1446,59 Ha ($\pm 36\%$ dari luas Kota Cimahi) termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara. Pemanfaatan ruang pada daerah yang termasuk dalam KBU ini sangat terbatas dengan tujuan mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang di KBU untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan serta untuk mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan fauna.
- 2) Berdasarkan hasil Kegiatan Inventarisasi dan Evaluasi Geologi Lingkungan Metropolitan Bandung yang dilaksanakan oleh Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Kota Cimahi termasuk ke dalam kawasan rawan bencana gunung api I, yaitu apabila terjadi letusan besar Gunung Tangkubanperahu. Selain itu, di Kota Cimahi juga termasuk pada jalur patahan Lembang yang bersiko terjadi bencana gempa tektonik.

- 3) Berdasarkan data matriks luasan kawasan lindung yang tercantum dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat, diterangkan bahwa Kota Cimahi memiliki kawasan yang berfungsi lindung seluas 367,9 Ha, atau sekitar 8,82% dari luas Kota Cimahi. Kawasan itu terdiri dari:
 - a. Kawasan resapan air : 57,6 Ha
 - b. Kawasan rawan letusan gunung api : 98,0 Ha
 - c. Kawasan rawan gerakan tanah : 212,3 Ha
- 4) Keputusan Menteri Perhubungan No. 49/2000 menetapkan sebagian wilayah Kota Cimahi (20% luas) termasuk ke dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Lapangan Udara Husen Sastranegara. Hal ini mengakibatkan terbatasnya pembangunan vertikal di beberapa kawasan di Kota Cimahi.
- 5) Hambatan lain yang berupa hambatan fisik dan geografis dalam pengembangan Kota Cimahi adalah terdapatnya lembah-lembah sungai di kawasan Cimahi bagian Utara, jalan tol dan jalan kereta api mengakibatkan kota Cimahi terpecah menjadi beberapa kawasan yang sulit berinteraksi.

Keterbatasan-keterbatasan dalam pengembangan struktur dan ruang kota disikapi dengan upaya penyusunan instrumen-instrumen perencanaan dan pengendalian ruang. Alih fungsi lahan produktif yang tinggi karena pengaruh kegiatan ekonomi, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya umumnya mengabaikan rencana tata ruang. Respon penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang seringkali lebih lambat dari pada perkembangan kondisi yang terjadi. Melalui perubahan regulasi dalam bidang penataan ruang, yaitu dengan di undangkannya Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 diharapkan dapat memberikan acuan yang lebih tegas dengan penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelaku penyimpangan tata ruang.

Disamping itu, untuk wilayah Kota Cimahi yang termasuk kedalam Kawasan Bandung Utara (KBU), kegiatan pembangunan di kawasan tersebut diatur sesuai dengan ketentuan yang menunjang fungsi lindung kawasan tersebut sebagai salah satu upaya pengendalian pembangunan.

6. Perencanaan Pembangunan

Urusan perencanaan secara umum dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berbagai program dan kegiatan perencanaan telah dikembangkan dalam kurun waktu 2008-2011, baik itu yang telah selesai dilaksanakan dan menghasilkan produk-produk perencanaan komprehensif maupun yang masih dalam tahap pengembangan. Perencanaan pembangunan yang telah dilakukan terdiri dari perencanaan Jangka panjang (RPJP, RTRW), Perencanaan Jangka menengah

(RPJPMD dan Masterplan), serta perencanaan pembangunan tahunan seperti RKPD ataupun perencanaan sektoral.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan tersebut telah dilaksanakan berbagai kegiatan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam kaitan meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam Program Perencanaan Pembangunan Daerah, serta penyediaan berbagai data Informasi pembangunan seperti IPM, indikator makro Ekonomi, KCDA, Suseda. Berikut ini beberapa dokumen perencanaan yang telah disusun oleh Bappeda Kota Cimahi.

Tabel 2.30
Dokumen Perencanaan Pembangunan 2008-2012

Jenis Dokumen Perencanaan	2008	2009	2010	2011	2012
Jangka Panjang	Dokumen Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi yang Disempurnakan	Laporan akhir RTRW Kota Cimahi yang disempurnakan	dokuemn Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi	RPJpd Kota Cimahi 2005-2025	
Jangka Menengah	RPJMD Kota Cimahi 2007-2012	Revisi RPJMD Kota Cimahi 2007-2012			Dokumen Master Plan Pendidikan Dokumen Master Plan Kesehatan Rancangan RPJMD 2012-2017
Perencanaan Sektoral / tahunan	RKPD	RKPD	RKPD	RKPD	RKPD
	Dokumen perencanaan Pendukung APBD	Dokumen perencanaan Pendukung APBD	Dokumen perencanaan Pendukung APBD	Dokumen perencanaan Pendukung APBD	Dokumen perencanaan Pendukung APBD
	perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	peta rawan bencana Kota Cimahi	Dokumen Perencanaan Bidang Transportasi	analisis indikatif penganggaran, untuk sektor: Pelayanan Umum, Ketertiban dan Ketentraman, Kesehatan, Pariwisata dan Budaya, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial	
	perencanaan penanganan permasalahan transportasi perkotaan	perencanaan penataan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan kaidah pembangunan berwawasan lingkungan	Perencanaan Bidang Cipta Karya/Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	Kajian Kawasan Strategis Akses Tol Baros dan Sekitarnya	Dokumen Rencana Pembangunan Bidang Fisik
	perencanaan penanganan perumahan tahun 2009	Laporan akhir koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan			perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
		rencana penanganan permasalahan sarana dan prasarana dasar perumahan			perencanaan penanganan perumahan
	PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi	PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi	PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi	PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi	PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi
		perencanaan pembangunan bidang pariwisata dan potensi ekonomi bidang UMKM di Kota Cimahi		perencanaan bidang Industri, Perdagangan, Pariwisata, Penanaman Modal, Sistem Inovasi Daerah, Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran	PerencanaanPengembangan Ekonomi masyarakat
	Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Perencanaan Bidang Sosial Budaya
	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
	Penyediaan data dan pembangunan	Penyediaan data pembangunan	Penyediaan data pembangunan	Penyediaan data pembangunan	Penyediaan data pembangunan

Sumber: Bappeda Kota Cimahi

Sebagai upaya pengendalian berbagai program dan kegiatan pembangunan maka dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap semua pelaksanaan kegiatan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil evaluasi tersebut juga dijadikan sebagai acuan/pedoman dalam perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.

7. Perhubungan

Infrastruktur perhubungan di Kota Cimahi hanya melayani perhubungan darat. Pada infrastruktur perhubungan darat, terminal yang ada merupakan terminal tipe C yang melayani 24 trayek, yang terdiri dari trayek internal dalam Kota Cimahi yaitu sebanyak 3 (tiga) trayek yang beroperasi, dan selebihnya adalah trayek yang melintas serta trayek yang hanya asal dan tujuannya di Kota Cimahi. Di Kota Cimahi terdapat 4 terminal yaitu sub terminal pasar antri baru, sub terminal pasar atas, sub terminal sangkuriang Cipageran dan sub terminal Cimindi

Dari hasil evaluasi dan analisis (2010), diketahui bahwa pada trayek Pasar Antri – Cimindi terdapat kelebihan jumlah armada sebesar 115%. Pada trayek Cimahi – Cibeber via baros terdapat kelebihan armada sebesar 102% dan pada trayek Cimahi – Cibeber via Contong terdapat kelebihan armada sebesar 143%. Dalam rangka mengurangi berbagai permasalahan transportasi di Kota Cimahi, pada tahun 2007 telah dibangun marka jalan sepanjang 400 m², Rambu 75 buah. Pada tahun 2011 sudah terbangun marka jalan sepanjang 7345 m² dan rambu 272 buah. Dalam kurun waktu 4 tahun telah terjadi peningkatan kuantitas lebih daripada 200%. Selain itu pada sampai tahun 2011 telah dibangun 1 buah shellter.

Dari aspek keselamatan penumpang telah dilakukan uji kelayakan, laik jalan dan laik operasi terhadap 8.148 kendaraan dari 8.400 kendaraan yang ditargetkan. Sosialisasi kebijakan dalam bidang perhubungan terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang disiplin berlalu lintas. Sampai Tahun 2010, Pemerintah Kota Cimahi masih menjalin kerjasama antar daerah Bidang Perhubungan antara lain adanya MoU antara Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Dinas Perhubungan Kota Cimahi menyangkut Trayek Perbatasan.

Pelayanan kereta api menjadi salah satu moda andalan perjalanan penduduk di BMA. Kota Cimahi sejauh ini selalu mendukung pengembangan jalur komuter KRD Padalarang-Cicalengka, termasuk adanya rencana Provinsi Jawa Barat untuk menerapkan elektrifikasi kereta api, pembangunan *double track* lanjutan sampai dengan Cicalengka, serta pembangunan *viaduct* dan *flyover* pada perlintasan sebidang.

8. Lingkungan Hidup

Sumber daya alam memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Akan tetapi dengan

adanya aktivitas manusia yang cukup tinggi dalam pembangunan, terjadinya pencemaran lingkungan tidak dapat dihindari.

Pencemaran lingkungan di Kota Cimahi terjadi pada lingkungan air dan udara. Pencemaran air ditunjukkan dengan menurunnya kualitas lingkungan air yang terjadi di Sungai Cisangkan, Sungai Cimahi, Sungai Cibaligo, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cibabat. Secara umum kualitas air di lima sungai menunjukkan besarnya pengaruh kegiatan manusia, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan industri dan rumah tangga. Pencemaran udara berasal dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak.

Pada aspek persampahan, sistem yang digunakan adalah pengelolaan sampah dari sumber sampah, ditampung di TPS, dan selanjutnya diangkut oleh petugas ke TPA dengan sistem pembuangan *controlled landfill*. Sampai saat ini, tempat pembuangan akhir sampah dari Kota Cimahi masih memanfaatkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bersama Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Volume sampah di Kota Cimahi diperkirakan sekitar 1.407 m³/hari, sedangkan kapasitas angkut hanya 200 m³/hari atau sekitar 14,21% (2010).

Sistem pengelolaan air limbah yang digunakan di wilayah Kota Cimahi masih menggunakan sistem setempat. Limbah rumah tangga berupa kotoran manusia (*faecal*) menggunakan sistem pembuangan dengan sistem cubluk dan *septic tank* pada masing-masing rumah atau bangunan. Persentase rumah tangga yang menggunakan *septic tank individual* sebesar 61,82% atau sekitar 67.107 rumah tangga. Sedangkan jumlah rumah tangga yang belum menggunakan *septic tank* sebanyak 40.009 rumah tangga. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Cimahi telah membangun beberapa *septic tank komunal* (tangki AG dan *Biofilter*) sebanyak 7 buah yaitu di Kelurahan Cimahi, Karangmekar, Padasuka, Cigugur Tengah, Baros, Cibeureum dan Utama. Namun kondisi tangki AG pada saat ini kurang terpelihara, sehingga pelayanan air limbah tidak berjalan secara optimal.

Dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan, sepanjang tahun 2011 telah dilakukan penataan dan pemeliharaan taman dalam kota yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sampai saat ini RTH di Kota Cimahi ada seluas 730.335 ha (laporan fakta dan analisa RTRW Kota Cimahi Tahun 2010). Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Kota Cimahi diarahkan pada pencapaian target pemenuhan luasan ruang terbuka hijau 30% dari luas wilayah kota dimana target pencapaian RPJM tahun 2012 – 2017 seluas 18,4%.

9. Pertanian

Tanah yang merupakan aset barang milik daerah Kota Cimahi yang dipergunakan untuk kepentingan umum berupa fasilitas – fasilitas publik. Sejak Kota Cimahi berdiri tahun 2001 aset yang semula dari kabupaten induk (kabupaten Bandung) diserahkan ke Pemerintah Kota Cimahi dan dari di tambah dari hasil pembelian tanah berjumlah 259 bidang yang tersebar di 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Dari 259 bidang tanah semuanya telah dinilai dan yang baru tersertifikasi mencapai 137 bidang tanah dan sisanya yang berjumlah 122 bidang tanah belum tersertifikasi.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum direncanakan akan dilaksanakan pembelian tanah untuk kepentingan umum dalam lima tahun ke depan.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Penduduk merupakan target sekaligus pelaku pembangunan. Hasil pembangunan muaranya adalah meningkatnya kesejahteraan penduduk dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan lebih memacu pergerakan roda pembangunan. Beberapa indikator kependudukan Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.31
Indikator Kependudukan Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011

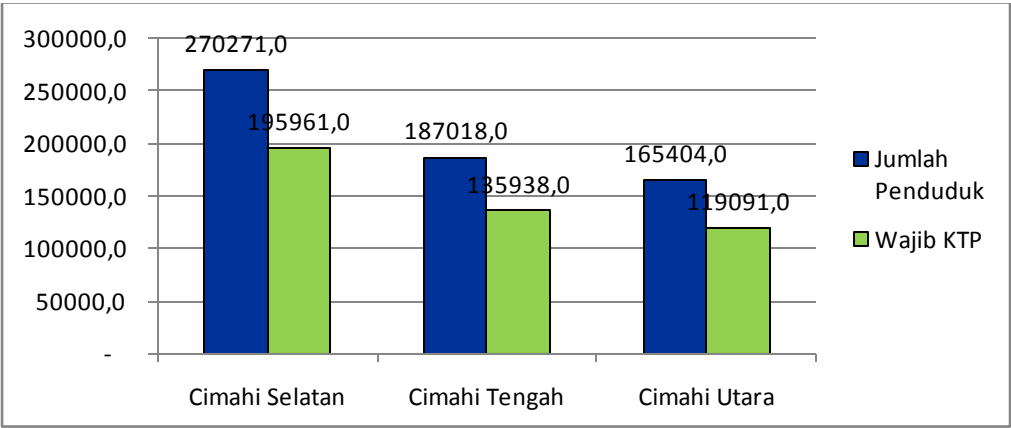
NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Penduduk :	536.743	551.217	566.22	541.177	553,592
	Laki-laki	277.845	285.611	293.668	274.124	279,966
	Perempuan	258.898	265.606	272.552	267.053	273,626
2	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)	13.335	13.695	14.068	13.444	13,771
3	Sex ratio	107,32	107,53	102,11	102,49	102.32
4	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,68	2,70	2,72	2,06	2.29
5	Jumlah Rumah Tangga	162.4	139.725	170.02	139.725	150,386
6	Jumlah Penduduk berdasarkan komposisi umur:					
	0 – 14 tahun	150.747	156.62	161.856	145.493	148,795
	15 – 64 tahun	363.97	371.78	380.71	376.132	384,675
	65 tahun ke atas	22.026	22.816	23.654	19.552	20,122
7	Angka beban ketergantungan	47,47%	48,26%	48,73%	43,88%	43.91%

Sumber : BPS Kota Cimahi

Dengan melihat tabel diatas, pemerintah harus mampu mengelola ketertiban administrasi kependudukan agar masalah kependudukan lebih terkendali. Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kependudukan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan tersebut, terutama dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pemerintah Kota Cimahi telah mengoperasikan SIAK secara terpadu, baik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun di 15 kelurahan di Kota Cimahi. Sampai

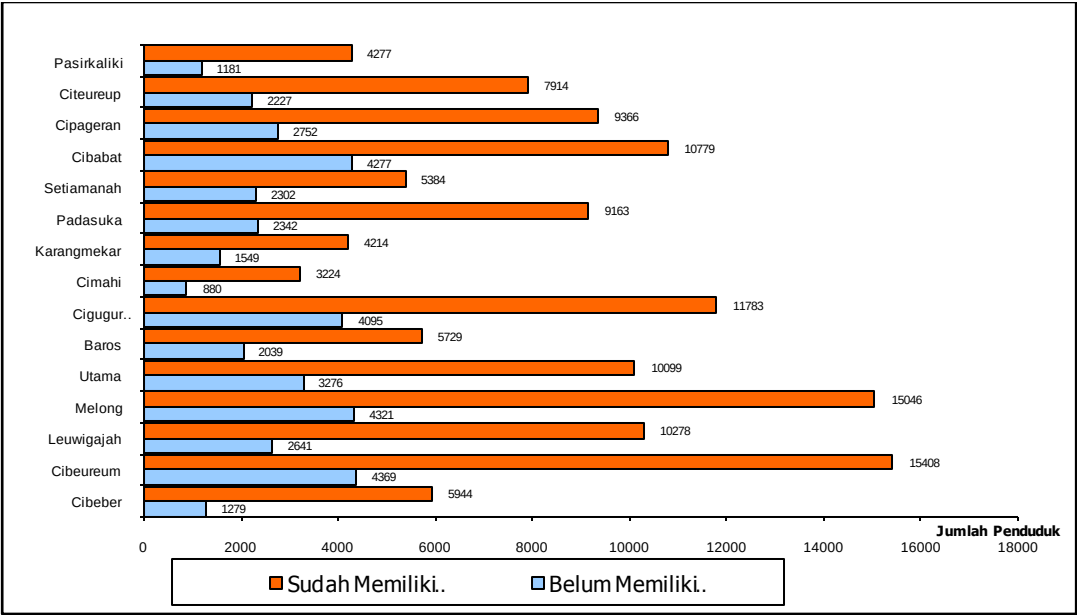
bulan Desember tahun 2011 penduduk wajib KTP ada sebesar 72,43% dari jumlah penduduk Kota Cimahi, dan kepala keluarga yang telah memiliki KK SIAK ada 78,51% dari jumlah seluruh kepala keluarga yang ada di Kota Cimahi, meningkat 2,66% dari tahun 2010.

Gambar 2.12
Jumlah Penduduk dan Jumlah Wajib KTP Kota Cimahi Tahun 2011



Sumber: Disdukcasip

Gambar 2.13
Kepala Keluarga di Kota Cimahi yang Belum dan Sudah Memiliki Kartu Keluarga Siak Tahun 2011



Sumber: Disdukcasip

Pada tahun 2011 Kota Cimahi juga melaksanakan pembuatan KTP elektronik (e-KTP) yang memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan KTP biasa. Pada e-KTP dapat direkam berbagai data pemilik KTP secara digital yang diharapkan dapat membantu proses pelayanan yang dibutuhkan oleh pemegang KTP. Berbagai kelebihan inilah yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peranan perempuan dalam pembangunan di Kota Cimahi sangat besar, baik perorangan maupun melalui organisasi-organisasi perempuan. Sampai dengan tahun 2010 pelatihan Manajemen Berusaha diberikan kepada 1.920 orang peserta perempuan dari 36 organisasi perempuan dalam rangka peningkatan kemampuan organisasi perempuan dan peningkatan pendapatan perempuan. Pembinaan Posyandu dan Pokjanal dilakukan melalui pelatihan-pelatihan bagi kader posyandu dan penyelenggaraan lomba posyandu.

Dalam bidang perlindungan anak, sejak tahun 2010 Kota Cimahi telah melakukan perintisan Kota Cimahi menjadi Kota Layak Anak. Adapun dalam rangka peningkatan perlindungan terhadap perempuan terutama yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemerintah Kota Cimahi melakukan sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cimahi.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kinerja pemerintah dalam bidang Keluarga Berencana (KB) cukup baik. Dari jumlah 92.392 Pasangan usia subur (PUS) di Kota Cimahi sebanyak 71.342 atau 77,21% telah mengikuti program KB baik melalui jalur pemerintah maupun jalur swasta. Jumlah ini meningkat 2,09% dari tahun sebelumnya.

Sedangkan di bidang keluarga sejahtera, terjadi penurunan jumlah keluarga pra sejahtera (pra KS) sebesar 3,04% dari 6.165 pra KS menjadi 5.455 pra KS 3,95% dari jumlah keluarga di Kota Cimahi. Jumlah pra KS tertinggi terdapat di Kecamatan Cimahi Selatan sebanyak 3.400 keluarga. Penurunan jumlah pra KS ini diikuti dengan meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera tahap I (KS 1) sebesar 2,90% dan Keluarga Sejahtera tahap II (KS 2) sebesar 0,52%. Sedangkan jumlah Keluarga Sejahtera tahap III (KS 3) menurun sebesar 2,70%.

13. Sosial

Dalam bidang sosial, Pemerintah Kota Cimahi berupaya keras dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Cimahi sangat beragam mulai dari Balita dan Anak terlantar, korban kekerasan, kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, sampai korban perubahan lingkungan (secara mendadak) yang tidak mendukung, seperti terjadinya bencana. Jumlah PMKS di wilayah Kota Cimahi secara keseluruhan kurang lebih berjumlah 19.240 PMKS.

Sepanjang tahun 2010 telah dilakukan beberapa program yang terkait dengan pelayanan dan perlindungan sosial, diantaranya adalah pemberian alat bantu bagi penyandang cacat, bantuan UEP bagi penyandang cacat dan keluarga miskin, pelatihan bagi penyandang cacat dan keluarga miskin serta gelandangan, bantuan permakanan panti bagi anak dan lansia terlantar, penyandang cacat, serta korban napza. Untuk anak-anak jalanan, eks korban napza dan anak-anak putus sekolah Pemerintah Kota Cimahi memberikan pelatihan keterampilan dan rumah singgah. Dalam menangani masalah PMKS ini, Pemerintah Kota Cimahi tidak bekerja sendiri tetapi mendapat bantuan dari masyarakat. Adapun Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kota Cimahi terdiri dari unsur Tagana, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Organisasi Sosial (Orsos), dan Forum Napza Mandiri. Data PSKS Kota Cimahi sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32
Data PSKS Kota Cimahi

NO	UNSUR PSKS	JUMLAH
1	Tagana	46 orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	116 orang
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	3 orang
4	Organisasi Sosial	40 orsos
5	Forum Napza Mandiri	30 orang

Sumber: Disnakertransos Kota Cimahi

14. Ketenagakerjaan

Dari data struktur penduduk Kota Cimahi, sebagian besar penduduk Kota Cimahi berada pada usia produktif atau usia kerja (15 - 64 tahun). Pada tahun 2011, dari total penduduk usia kerja, sekitar dua pertiga penduduk Kota Cimahi termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Tahun 2011 adalah 62,19% dengan TPAK laki-laki mencapai 81,76% sedangkan TPAK perempuan sebesar 42,41%. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2011 (BPS) tercatat sebesar 10,32%.

Tabel 2.33
Statistik Ketenagakerjaan Kota Cimahi Tahun 2007 – 2011

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah usia kerja	427.294	444.221	462.752	392.726	404.797
2	Angkatan kerja	255.924	255.887	274.978	247.612	251.743
	- Penduduk bekerja	207.784	219.634	233.255	213.970	233.581
	-Pengangguran	48.176	36.253	41.723	33.642	18.162
3	Bukan Angkatan kerja	171.370	188.334	187.774	145.114	153.054
	-Sekolah	39.980	48.735	49.751	42.007	43.499
	-Mengurus RT	106.456	111.572	111.685	85.192	96.041
	-Lainnya	25.943	28.027	22.338	17.915	13.514
4	TPAK (%)	59,86	57,6	59,42	63,05	62,19
	-Laki-laki	82,58	76,36	81,33	80,81	81,76
	-Perempuan	37,42	38,9	37,61	45,21	42,41
5	Tingkat Pengangguran (%)	18,82	14,17	15,17	13,59	10,32
6	UMR (Rp/bln)	715.000	910.894	1.019.000	1.107.304	1.172.485

Sumber : BPS Kota Cimahi; Data Basis IPM Jawa Barat 2011

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Berdasarkan data tahun 2010, jumlah koperasi yang aktif berjumlah 202 unit, dan yang tidak aktif berjumlah 121 unit. Dengan masih banyaknya koperasi tidak aktif, perlu menjadi perhatian khusus karena koperasi hendaknya menjadi pendukung keberlangsungan usaha UMKM.

UMKM merupakan bagian terbesar dari kegiatan sosial ekonomi penduduk Kota Cimahi dan mampu menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, pengembangan KUKM merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan data tahun 2011, jumlah usaha UMKM sebanyak 4.691 UMKM dengan total omset keseluruhan sebesar Rp. 193.369.824.262,-. Pengembangan rantai nilai dan kerjasama usaha antar pelaku UMKM di Kota Cimahi dengan industri besar dan kecil hendaknya mampu mendorong pertukaran informasi dan penyebaran inovasi. Keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal dan produk-produknya sangat diperlukan dalam pengembangan UMKM di Kota Cimahi. Pembinaan UMKM yang selama ini telah dijalankan menjadi bahan evaluasi bagi perencanaan pembinaan UMKM dan IKM selanjutnya.

Tabel 2.34
Rekapitulasi Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Per Mei 2011

	JUMLAH USAHA MIKRO	TOTAL OMSET	TOTAL TENAGA KERJA
USAHA MIKRO	4.545	146.261.524.250	12.907
USAHA KECIL	58	34.758.300.012	363
USAHA MENENGAH	2	11.150.000.000	80
USAHA TERFASILITAS 2010	86	1.200.000.000	24
TOTAL	4.691	193.369.824.262	13.374

Sumber: Diskopindagtan, 2011

16. Penanaman Modal

Berdasarkan data BKPPMD Provinsi Jawa Barat, realisasi nilai investasi (izin usaha tetap) perusahaan PMA dan PMDN di Kota Cimahi tahun 2009 sebesar Rp 692.818.172.569,- , dengan rincian PMA sebesar Rp 16.873.425.000,- dan PMDN sebesar Rp 645.944.747.569) dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.477 orang. Tahun 2010 realisasi investasi PMA dan PMDN meningkat 90% dari tahun 2009 yaitu menjadi Rp 1.316.945.986.233,- , dengan rincian PMA sebesar Rp 510.661.694.520,- dan PMDN sebesar Rp 806.284.231.713,- , serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.831 orang.

Dalam upaya meningkatkan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, pada tahun 2010 realisasi pelayanan perizinan yang terbit adalah sebanyak 3.101 izin, dengan penerimaan retribusi sebesar Rp. 2.345.368.382,- atau 81,83 % dari target Rp. 2.866.282.500,-. Sebagai upaya untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan pemohon izin telah dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai sebesar 76,24) (termasuk kategori baik). Sejak diresmikannya Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi tahun 2007, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi menjadi *Best Practice* Kabupaten atau Kota lain seluruh Indonesia sebagai bahan studi banding, dengan jumlah kunjungan pada tahun 2010 sebanyak 106 kunjungan dengan jumlah peserta mencapai 1478 orang.

Untuk mengetahui kebutuhan investasi dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan yang hendak dicapai dapat digunakan konsep analisa *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR).

Dari hasil penghitungan diketahui bahwa nilai ICOR Kota Cimahi pada tahun 2009 adalah 4.61 yang berarti investasi sebesar Rp. 4.61 dibutuhkan untuk meningkatkan produksi sebesar Rp. 1,- maka jika Kota Cimahi ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 5% maka besarnya investasi yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 1.486.932.876.205,79

17. Kebudayaan

Dalam bidang kebudayaan, pemerintah Kota Cimahi melaksanakan program pengelolaan kekayaan budaya dan program pengelolaan keragaman budaya. Pengelolaan kekayaan budaya daerah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sejarah, perlindungan dan pemanfaatan peninggalan sejarah dan nilai tradisional, serta terjaganya fisik dan kandungan naskah kuno dan bahan pustaka. Dalam rangka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya, pemerintah Kota Cimahi memfasilitasinya dengan melaksanakan kegiatan Pagelaran Kesenian tradisi dan Kebudayaan se-Kota Cimahi, pergelaran seni modern dan lomba seni tradisi dan modern.

Kesenian merupakan bagian dari kebudayaan. Kesenian yang berkembang di Kota Cimahi sangat beragam. Hal ini ditandai dengan banyaknya grup-grup kesenian mulai dari seni wayang golek, seni calung, singa Depok, seni degung dan jaipong sampai grup dangdut dan grup band. Dalam rangka pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, pemerintah Kota Cimahi mengirimkan duta seni ke TMII, Binojakrama padalangan purwa, kemilau nusantara dan pergelaran seni canghegar di objek wisata Cireundeu.

Di Kota Cimahi terdapat satu komunitas adat yang memiliki budaya dan kearifan lokal, dimana cara hidup mereka yang memegang teguh budaya leluhur seperti pola konsumsi pangan yang non beras (singkong) dan mengedepankan pelestarian lingkungan.

Dalam keterkaitan dengan pengembangan budaya lokal Cimahi, BPPT pada tahun 2010 telah mengadakan penelitian tentang budaya inovasi di Cireundeu antara lain sikap terbuka, mau belajar, melakukan penelitian, prinsip adaptasi terhadap lingkungan yang dapat ditularkan dan dikembangkan untuk masyarakat Cimahi khususnya dan Jawa Barat pada umumnya. Selain itu terdapat pelestarian pembuatan gamelan khas sunda.

18. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan bidang kepemudaan sepanjang tahun 2011 adalah terlaksananya lomba karya tulis ilmiah dan lomba kreatifitas lukis mural di kalangan pemuda, terpilihnya pemuda pelopor tingkat kota Cimahi dalam berbagai bidang yaitu bidang teknologi, pendidikan, kewirausahaan seni dan budaya, dan pendataan organisasi kepemudaan.

Dalam bidang olahraga, dalam rangka pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat, sampai dengan tahun 2011 pembinaan dan pelatihan atlit berbakat berjumlah 176 atlit dari 6 cabang olahraga dan mengirimkan kontingen ke POPDA sebanyak 3 kali dengan jumlah atlit dan pelatih 403 orang di 9 cabang olahraga. Berikut ini tabel jumlah organisasi pemuda dan olahraga :

Tabel 2.35
Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga
Kota Cimahi

No.	Kecamatan	Jumlah Organisasi Pemuda	Jumlah Organisasi Olahraga	Jumlah kegiatan kepemudaan	Jumlah Kegiatan Keolahragaan	Jumlah Group Keolahragaan
1	Cimahi Utara	17	13	3	2	17
2	Cimahi Tengah	16	7	4	1	17
3	Cimahi Selatan	11	4	1	1	-
	Kota Cimahi	44	24	8	4	34

Sumber: BPS Kota Cimahi (Profil Pemerintahan Kota Cimahi)

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pada saat ini kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam program Pembangunan Pemerintah semakin meningkat. Kondisi dapat terlihat dari telah tumbuh dengan cepat berbagai LSM dan organisasi sosial. Di Kota Cimahi sampai dengan tahun 2012 jumlah yayasan/forum/ perhimpunan/persatuan/ormas 107 organisasi dan LSM 27 organisasi yang bergerak pada bidang kegiatan sosial, ekonomi, keswadayaan masyarakat, pendidikan, kepemudaan, olahraga, keagamaan, lingkungan, profesi, seni budaya, pemberdayaan sumberdaya manusia, kesehatan, dan anak jalanan.

Partisipasi politik masyarakat Kota Cimahi cukup tinggi yang ditandai dengan keikutsertaan hak politik masyarakat pada Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung pada tahun 2007 sebesar 73,60 %, pemilu DPR/DPRD pada tahun 2009 sebesar 71 % dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden pada tahun 2009 sebesar 86 % serta pemilu kepala daerah pada tahun 2012 sebesar 70.00%. Keikutsertaan masyarakat dalam pemilu tersebut memberi andil yang besar, tidak saja terhadap suksesnya Pemilu melainkan juga dalam memperkuat legitimasi figur-figur terpilih untuk mengemban amanat rakyat. Fenomena politik ini mencerminkan bahwa proses pendidikan dan pembelajaran politik telah mendorong dalam menumbuhkembangkan partisipasi politik warga.

20. Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Upaya untuk merealisasikan pembangunan harus diawali dengan penataan internal pemerintahan Kota Cimahi baik dalam konteks penataan organisasi pemerintahan maupun dalam hal akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Cimahi. Penataan tersebut termasuk di dalamnya upaya pembinaan hukum, pengembangan sumber daya manusia aparatur (PNS), penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Dilihat dari aspek Sumber daya aparatur (PNS), Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah di Kota Cimahi pada tahun 2011 adalah sebanyak 6021 orang. Jumlah ini bertambah sebanyak 198 orang di bandingkan dengan tahun sebelumnya (6219 orang). Jumlah tersebut terdiri atas Golongan I sebanyak 131 orang, golongan II sebanyak 1.619 orang, golongan III sebanyak 2.081 orang dan golongan IV sebanyak 2.498 orang. Jumlah tersebut tersebar di 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Cimahi dan juga di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk lebih jelasnya jumlah PNS Daerah di Kota Cimahi berdasarkan golongan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36
Jumlah PNS Daerah Kota Cimahi Berdasarkan Golongan
Tahun 2007-2011

Tahun	Golongan			
	I	II	III	IV
2007	151	1256	2394	2062
2008	148	1208	2207	2146
2009	181	1354	2120	2301
2010	157	1550	2072	2440
2011	131	1619	2081	2498

Pada unsur legislatif terdapat 45 orang anggota DPRD yang menjabat selama periode 2009-2014 yang terbagi ke dalam 6 fraksi dan 4 komisi. Keenam fraksi yang ada di DPRD adalah Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Gerindra dan Hanura, dan Fraksi Amanat Pembangunan Reformasi. DPRD juga terdiri dari 4 Komisi yaitu Komisi A di Bidang Pemerintah, Komisi B di Bidang Perekonomian dan Keuangan, Komisi C di Bidang Pembangunan, dan Komisi D di Bidang Kesejahteraan. Untuk lebih jelasnya jumlah anggota DPRD menurut fraksi dan komisi dapat dilihat pada Tabel 2.37 dan Tabel 2.38 berikut ini.

Tabel 2.37
Fraksi DPRD Kota Cimahi Periode 2009-2014

Nama Fraksi	Jumlah Anggota
Fraksi Partai Golongan Karya	7
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	7
Fraksi PDI Perjuangan	7
Fraksi Partai Demokrat	12
Fraksi Gerindra dan Hanura	6
Fraksi Amanat Pembangunan Reformasi	6
Jumlah	45

Tabel 2.38
Jumlah Anggota DPRD Menurut Bidang Kerja dan Komisi-Komisi DPRD Kota Cimahi Periode 2009-2014

Komisi	Bidang Kerja	Jumlah Anggota
A	Bidang Pemerintah	10
B	Bidang Perekonomian dan Keuangan	10
C	Bidang Pembangunan	11
D	Bidang Kesejahteraan	10
Ketua dan Wakil Ketua DPRD		4
Jumlah		45

Pada bidang pembinaan hukum, dalam upaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, atas persetujuan bersama dengan DPRD sampai dengan tahun tahun 2011 telah ditetapkan 52 perda, 49 perwal. Aturan pelaksanaan teknis telah ditetapkan peraturan walikota 412 buah dan MOU 640 buah. Guna meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan terhadap produk hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan telah dilaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan, pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum (SJDI). Dalam rangka peningkatan koordinasi dengan lembaga penegak hukum telah dilaksanakan forum pengadilan, sedangkan pelayanan bantuan hukum diberikan untuk membantu penyelesaian 7 kasus. Pada umumnya, pembangunan bidang penyelenggaraan pemerintahan tetap melanjutkan berbagai penyempurnaan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

21. Ketahanan Pangan

Menjamin ketersediaan bahan pangan menjadi perhatian yang sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan produksi kebutuhan pangan dalam jangka panjang melalui pengembangan sektor pertanian walaupun kontribusi dan produktifitas

sektor ini di dalam PDRB masih rendah. Kegiatan pertanian yang dilakukan hendaknya mampu menjamin ketahanan pangan penduduk Kota Cimahi. Pada jangka pendek usaha untuk mendukung ketahanan pangan dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan pangan melalui peningkatan distribusi dan ketersediaan barang pangan di pasar. Cara lain adalah dengan menggalakan konsumsi aneka ragam bahan pangan terutama konsumsi protein, optimalisasi lahan pekarangan dan lahan kering, serta substitusi tepung terigu menjadi beras singkong (rasi).

Pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan melalui Program Dewi Tapa (Desa Wisata Ketahanan Pangan) yang dilakukan di Desa Cireundeu kelurahan Lewigajah. ini telah menjadi bagian dari usaha ketahanan pangan. Inti dari program ini adalah membangun rantai nilai, menghubungkan kegiatan dari hulu hingga ke hilir, dari sektor pertanian/perkebunan dengan kegiatan pariwisata. Kedepan budaya lokal ini hendaknya menyebar luas tidak hanya pada kawasan tertentu di Kelurahan Leuwigajah saja tetapi menjadi budaya lokal dan kebiasaan lokal untuk memakan Rasi pada level kota. Pengembangan desa wisata inipun sudah sejalan dengan pengembangan ekonomi lokal terutama klaster industry makanan dan minuman yang terintegrasi dengan sektor pariwisata.

Berkaitan dengan ketahanan pangan untuk masyarakat miskin, setiap tahunnya Pemerintah Kota Cimahi telah mendistribusikan beras untuk warga miskin sebanyak 20.870 RTS pada tahun 2012. Meskipun ini telah membantu dalam peningkatan ketahanan pangan, namun peningkatan kualitas dari beras miskin ini perlu diperhatikan.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peningkatan keberdayaan masyarakat dilakukan melalui optimalisasi institusi / organisasi masyarakat ditingkat kelurahan seperti LPM, PKK, Posyandu , serta melalui sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, pengelolaan kebersihan lingkungan dan kegiatan EKPM serta lomba-lomba. Setiap kelurahan di Kota Cimahi memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Jumlah kader LPM di Kota Cimahi sampai tahun 2010 ada 274 orang. Berikut ini gambaran tentang keberdayaan masyarakat kota cimahi:

Tabel 2.39

Jumlah Lembaga dan Kader Pembangunan di Kota Cimahi

Indikator	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
LPM	19	19	19	19	19
PKK	19	19	19	19	19
Posyandu	380	382	382	385	386
Kader Pembangunan				150	150
Swadaya masyarakat dalam pembangunan	Ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Bappeda Kota Cimahi

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan melalui keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

23. Statistik

Dalam urusan statistik, Bappeda Kota Cimahi bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi dalam penyediaan dan penyusunan data dan indikator pembangunan , seperti dalam bentuk Kota Cimahi Dalam Angka (KCDA), Profil Pemerintahan Kota Cimahi, dan penyusunan Indikator Ekonomi Daerah dalam bentuk dokumen PDRB Kota Cimahi, survey dan analisis IPM dan dokumen lainnya. Selain penyusunan dokumen data statistik daerah, pelaksanaan urusan statistik dilakukan pula oleh beberapa SKPD yang melakukan pengambilan data lapangan seperti pengambilan data KB oleh BPMPPKB dan pencatatan data kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.

24. Kearsipan

Pembangunan pengelolaan pengelolaan arsip di setiap organisasi perangkat daerah akan menjadi sumber informasi bagi para pengambil kebijakan. Untuk mewujudkan pendayagunaan arsip secara efektif dan efisien, diantaranya adalah pengadaan sarana dan prasarana, penyusunan pedoman kearsipan berupa jadwal retensi arsip di setiap SKPD sebagai pedoman untuk melakukan penyusutan arsip sehingga perkembangan fisik dan informasi arsip yang dihasilkan dapat dikendalikan, peningkatan pemahaman dan pengetahuan tata kearsipan termasuk tentang penyusunan jadwal retensi arsip.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tata kearsipan terdapat beberapa kendala antara lain keterbatasan sumber daya manusia di bidang kearsipan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif, masih terbatasnya tenaga profesional di bidang kearsipan; Secara kualitatif, arsiparis yang ada belum memiliki standar profesi yang ideal.

25. Komunikasi dan Informatika

Pembangunan komunikasi dan informasi yang telah dan sedang dilaksanakan di Kota Cimahi nampak dari berbagai kegiatan yang ada di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hal ini nampak dari penerapan jaringan dan Sistem Informasi pada beberapa SKPD, yaitu pembangunan jaringan komunikasi informasi berbasis internet, pembangunan SIAK untuk pelayanan kependudukan, pembangunan jaringan SIK di Dinas Kesehatan dan Puskesmas, serta pembangunan *Baros Information Technology Creative (BITC)* sebagai sentral pengembangan pengelolaan kawasan klaster industri telematika.

Pembangunan sistem informasi ditingkatkan dan diperluas, serta diarahkan pada pengembangan dan penyempurnaan penyelenggaraan sistem informasi berbasis IT, diantaranya melalui kegiatan pengembangan dan operasi *website* www.cimahikota.go.id, pesan penduduk (pesduk), siaran radio, televisi, jumpa pers, release berita, serta pameran potensi daerah.

Dalam bidang komunikasi dan informasi masih terdapat kendala dalam membangun sistem komunikasi dan informasi, antara lain : terbatasnya sarana prasarana komunikasi dan informasi untuk proses transaksi dan penyaluran informasi antar instansi/lembaga; Pembangunannya masih bersifat parsial sehingga sulit dalam mengintegrasikan data dan informasi; Masih perlu ditingkatkannya kuantitas dan kualitas SDM di bidang teknologi informasi; Unit organisasi pendukung yang mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pengelolaan, penyediaan dan pengolahan transaksi informasi belum berperan secara optimal; Belum membudayanya pemanfaatan teknologi informasi di beberapa kalangan birokrat. Melihat kondisi dan permasalahan tersebut maka pembangunan di bidang komunikasi dan informasi masih perlu terus diupayakan.

26. Perpustakaan

Perpustakaan Daerah Kota Cimahi sebagai pembina perpustakaan yang ada di Cimahi, baik perpustakaan umum maupun perpustakaan khusus. Perpustakaan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sangat strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui transformasi informasi, penelitian, pelestarian budaya

bangsa dan rekreasi ilmiah, serta memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan. Hingga saat ini pemerintah kota cimahi terus mengupayakan peningkatan minat baca dan pelayanan perpustakaan melalui mobil perpustakaan keliling 2 unit, 1 perpustakaan umum daerah dan sudut baca tersebar di kelurahan.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemberian pelayanan terdapat beberapa kendala antara lain : keterbatasan sumber daya manusia dibidang perpustakaan, sarana prasarana yang memadai sehingga perpustakaan, baik yang berupa bahan bacaan maupun ruang layanan masih jauh dari standar yang ada.

2.3.2 Urusan Layanan Pilihan

1. Pertanian

Merujuk pada data rata-rata laju pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun 2000 hingga 2010 maka dapat diketahui bahwa sektor pertanian telah mengalami pertumbuhan sebesar 2.15%. Laju pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan laju rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi selama 10 tahun terakhir yaitu sebesar 4.47%. Jika dilihat dari kontribusi per sektor terhadap PDRB riil kota maka sektor ini hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil sebesar 0.18% dan mengalami penurunan pertumbuhan kontribusi rata-rata sebesar 9.48%. Rendahnya kontribusi sektor pertanian ini terjadi secara berlanjut dari tahun 2000 hingga tahun 2007 dengan kisaran tingkat pertumbuhan 0.16 – 0.18%.

Dilihat lebih lanjut, pertumbuhan pada sektor ini mengalami kecenderungan yang menurun bahkan mencapai pertumbuhan negative pada tahun 2005-2006 sebesar -3.36%. Penurunan ini dapat terjadi dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Berkurangnya produksi ikan, unggas dan sapi pada sektor peternakan.
- b. Berkurangnya produktifitas lahan dan tenaga kerja sektor pertanian.
- c. Berkurangnya lahan pertanian di Kota Cimahi sebagai akibat dari konversi lahan.
- d. Kendala pemasaran produk pertanian.
- e. Sistem pertanian yang bercorak sub sistem.

Berdasarkan rata-rata data tahun 2002 dan 2009 lokasi sektor pertanian secara umum lebih terkonsentrasi di Kecamatan Cimahi Utara dengan kontribusi sebesar 1.8% dengan tingkat pertumbuhan 146.9%. Sementara itu pada tingkat kelurahan maka kelurahan yang memberikan kontribusi terbesar secara berturut-turut adalah Kelurahan Cipageran (5.78%), kelurahan Citeureup (2.79%) dan Kelurahan Padasuka (2.03%).

2. Pariwisata

Kota Cimahi belum memiliki sumber daya alam yang dapat dijadikan tempat wisata alam yang representatif. Di Kota Cimahi terdapat 3 (tiga) unit hotel melati dan sebuah *guesthouse*. Selama tahun 2009 jumlah tamu sebanyak 24.142 orang, dengan jumlah rata-rata per bulan mencapai 2.000 orang. Pertumbuhan jumlah tamu relatif belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tamu hotel belum ada yang berasal dari mancanegara, seluruh tamu 100% WNI. Selain belum adanya obyek wisata yang dapat menjadi daya tarik wisatawan, fasilitas hotel pun relatif masih terbatas. Untuk itu harus dicari inovasi dan kreatifitas lokal yang dapat dikembangkan menjadi wisata budaya.

Sub sektor restoran menunjukkan perkembangan yang relatif baik. Jumlah rumah makan mengalami peningkatan. Pola konsumsi masyarakat Kota Cimahi menunjukkan adanya trend yang meningkat untuk mengkonsumsi makanan jadi. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa usaha kuliner menjadi prospek yang menjanjikan dalam pengembangan klaster industri makanan dan minuman (mamin) dan terus dikembangkan menjadi wisata kuliner.

3. Kelautan dan Perikanan

Kota Cimahi tidak memiliki potensi kelautan, namun potensi perikanan masih dapat dikembangkan meskipun tidak memberikan kontribusi sebesar sektor peternakan unggas maupun sapi. Areal pemeliharaan ikan di Kota Cimahi dibedakan atas kolam dan sawah. Sawah merupakan tempat pemeliharaan ikan terluas yaitu sebesar 80 persen dari seluruh luas areal tempat pemeliharaan ikan. Selain tempat pemeliharaan ikan, di Kota Cimahi terdapat 16 Unit Pembenihan Rakyat yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan.

Pada tahun 2010, Kota Cimahi telah melaksanakan program pengembangan budidaya perikanan dengan kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Program dan kegiatan sektor pertanian yg penting antara lain:

- 1) 1 (satu) unit bangunan penunjang yaitu Balai benih Ikan Air dan Tawar serta Pasar Benih Ikan untuk optimalisasi kegiatan tersebut melalui kontruksi pengadaan gedung kantor dan kontruksi pengadaan pintu air dan tempat pembibitan.
- 2) Kelompok Tani Ternak Ikan Hias melalui DKP.
- 3) Bibit ikan hias dan indukan ikan.
- 4) Bahan pakan ikan

Ke depan sektor ini diarahkan untuk dapat mendukung pengembangan klaster industri makanan dan minuman.

4. Perdagangan

Sektor ini telah tumbuh dengan kisaran rata-rata sebesar 6.45% melebihi angka rata-rata pertumbuhan PRDB kota sebesar 4.59%. Adapun kontribusi sektor ini menempati posisi ke dua tertinggi terhadap perekonomian Kota Cimahi yaitu sebesar 18.9% pertahun. Berdasarkan data tahun 2009-2010 terjadi pertumbuhan yang cukup besar pada sektor ini hingga mencapai angka 12.35%. Adapun nilai kontribusi berdasarkan sub sektor maka sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran memberikan rata-rata kontribusi terbesar yaitu 16.36%. Pertumbuhan secara signifikan dari sektor ini terlihat dengan berdirinya pusat-pusat perdagangan dan restoran di sepanjang Jalan Nasional atau dikenal sebagai Kawasan koridor Perdagangan dan Jasa.

Berdasarkan RTRW Kota Cimahi tahun 2003 dan 2007-2027 letak CBD (*central business district*) berada di Kecamatan Cimahi Tengah khususnya pada Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Setiamanah dan Kelurahan Cimahi serta Kawasan Baros. Perkembangan sektor perdagangan ini memang telah tumbuh di Kecamatan Cimahi Tengah.

Dengan membandingkan data tahun PDRB Kelurahan tahun 2002 dan 2009 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran tertinggi berada di Kelurahan Setiamanah (335.77%) diikuti oleh Kelurahan Cimahi (166.56%).

Secara jumlah, prasarana perdagangan telah lebih banyak terkonsentrasi di Kelurahan Setiamanah dan Cimahi. Akan tetapi melihat angka PDRB riil, jika dianggap sebagai nilai transaksi sektor perdagangan, hotel dan restoran maka dapat diperkirakan bahwa pusat-pusat perdagangan dengan jumlah pertokoan yang cukup banyak, yang berada di CBD pada wilayah Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Setiamanah khususnya pada sekitar Jl. Ganda Wijaya, masih memiliki omset yang relatif lebih rendah dibandingkan pusat-pusat perdagangan yang ada di Cibabat dan Cigugur Tengah atau di Kawasan Koridor Jasa dan Perdagangan.

5. Perindustrian

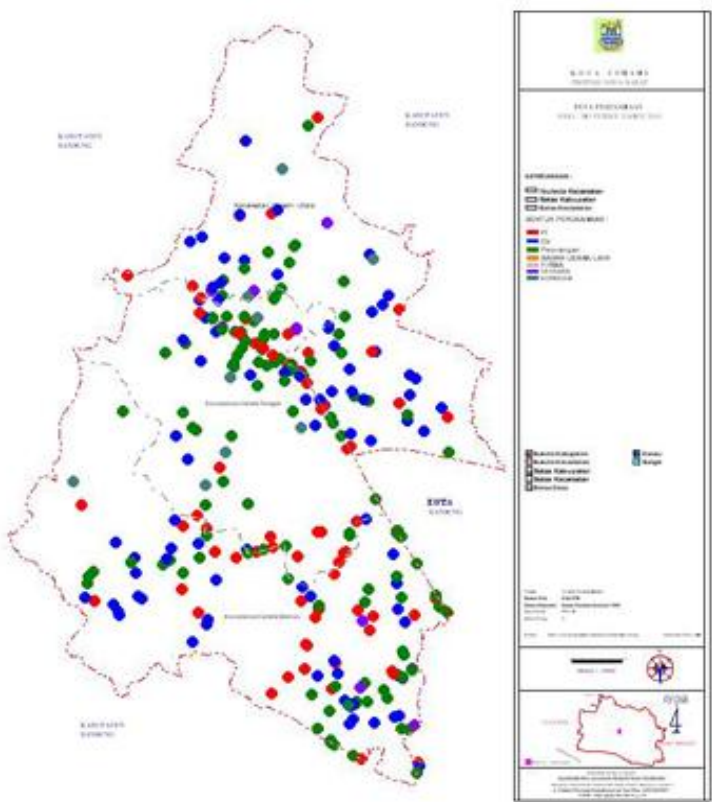
Dengan menggunakan data PDRB riil Kota Cimahi selama 10 tahun, diketahui bahwa besarnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB riil Kota Cimahi adalah sebesar 61.8%. Sangat besarnya kontribusi sektor manufaktur menunjukkan bahwa perekonomian Kota Cimahi masih bertumpu pada sektor industri khususnya industri tekstil dan produk tekstil lainnya. Akan tetapi tingginya kontribusi ini ternyata

tidak diikuti oleh tingginya laju pertumbuhan sektor tersebut. Secara rata-rata sektor manufaktur di Kota Cimahi dari tahun 2000 hingga tahun 2010 telah tumbuh sebesar 3.91% namun dengan tingkat pelambatan pertumbuhan sebesar 6.08%.

Jika dilihat dari data PDRB rill per sub sektoral maka dapat diketahui bahwa sub sektor dengan kontribusi terbesar adalah sub sektor Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 53.09% dengan laju pertumbuhan sebesar 5.54%. Namun, nilai rata-rata pertumbuhan sub sektor ini terus mengalami penurunan sebesar 17% terutama pada tiga tahun terakhir ini.

Sub sektor industri manufaktur yang memberikan kontribusi terbesar kedua adalah Makanan, Minuman dan Tembakau dengan rata-rata kontribusi sebesar 3.79%. Akan tetapi, sub sektor ini mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5.85% hal ini disebabkan pada tahun 2004-2005 sub sektor tersebut mengalami pertumbuhan negative yang sangat tinggi sebesar 86.1%. Walaupun sub sektor Logam Dasar dan Baja mengalami pertumbuhan yang cukup besar 186.11% namun kontribusi sub sektor ini terhadap PDRB rill kota masing sangat kecil yaitu 0.37%. Terdapat konsentrasi lokasi usaha industri di Kota Cimahi sebagaimana terlihat pada peta hasil pengolahan Sistim Informasi Geografis (SIG) KPPT berikut:

Gambar 2.14
PLOT PERIZINAN PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN GISTAHUN 2010



Sumber: GIS Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), 2011

Adanya konsentrasi perusahaan-perusahaan (industri) secara geografis atau yang dikenal sebagai klaster industrinyata dapat memberikan pengaruh terhadap lebih cepatnya pertumbuhan sektor industri dan pada tahap yang lebih besar lagi melalui kekuatan agglomerasi aktifitas ekonomi yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian. Akan tetapi, keberadaan konsentrasi baru berupa keuntungan lokasional saja yaitu keuntungan karena berada pada lokasi yang sama secara bersama-sama.

Melihat adanya kecenderungan perlambatan pertumbuhan sektor industri dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu menurunnya tingkat konsentrasi industri sebagai akibat dari turunnya aktifitas ekonomi sektor lainnya di wilayah tersebut dan terjadinya proses de industrialisasi.

Sektor manufaktur di Kota Cimahi mengalami penurunan. Penurunan ini dapat disebabkan telah terjadi penurunan aktifitas ekonomi pada sub sektor lainnya sehingga mengakibatkan pasokan bahan baku dan jaringan kerja antara perusahaan-perusahaan maupun interaksi bisnis di antara daerah menurun. Secara empiris, hal ini ditunjukkan oleh semakin menurunnya jumlah perusahaan yang bergerak di kegiatan sub sektor-sub sektor non TPT dari 80 perusahaan pada tahun 2007 menjadi 73 perusahaan pada tahun 2008. Menurunnya kegiatan industri lainnya (non tekstil) akan menyebabkan berkurangnya ketersediaan tenaga kerja dan industri-industri pendukung yang membentuk jaringan keterkaitan industri manufaktur sebagai modal bagi terbentuknya agglomerasi ekonomi.

Menurunnya pertumbuhan dan kontribusi sektor manufaktur mengindikasikan bahwa sektor industri di Kota Cimahi telah terjadinya proses de-industrialisasi. Kecenderungan deindustrialisasi di Kota Cimahi tampaknya lebih menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan produksi. Deindustrialisasi dapat disebabkan oleh karena faktor-faktor domestik (pendapatan per kapita dan pertumbuhan produktivitas) serta globalisasi ekonomi (keterbukaan ekonomi dan penanaman modal asing), Penurunan produktifitas juga dapat dilihat dari data kewilayahan dengan melihat PDRB riil per kecamatan dan kelurahan. Sektor manufaktur telah memberikan kontribusi tertinggi di Kecamatan Cimahi Selatan secara rata-rata antara tahun 2002 dan 2009 sebesar 44.8%, diikuti oleh Kecamatan Cimahi Tengah sebesar 15.9% dan terendah di Kecamatan Cimahi Utara sebesar 3.7%. Sementara itu pada tingkat kelurahan, maka kontribusi tiga terbesar berada di Kelurahan Utama (15.77%), Kelurahan Melong (8.36%) dan Kelurahan Leuwigajah (3.34%). Akan tetapi bila melihat besarnya pertumbuhan kontribusi maka Kelurahan Leuwigajah cenderung mengalami penurunan sebesar 87.46% dalam tujuh tahun atau 12.49% per tahun.

Berkurangnya pertambahan pertumbuhan dan kontribusi kegiatan industri pengolahan di Kota Cimahi nampaknya menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ini telah mencapai titik optimumnya dan menunjukkan terjadinya hukum pertambahan nilai yang menurun.

Oleh karenanya maka pengembangan sektor ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan klaster industri sehingga keterkaitan antar industri (perusahaan) akan semakin meningkat. Pendekatan klaster industri ini dapat dipadukan dengan usaha penggunaan teknologi produksi yang lebih baik lagi untuk akan dapat mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Selain itu pengembangan sektor industri manufaktur di Kota Cimahi dapat dilakukan melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang berbasis kepada potensi lokal terutama yang memberikan daya dukung usaha ke arah pengembangan industri kreatif.

Perbaikan infrastruktur terutama infrastruktur perdagangan luar negeri serta peningkatan ketrampilan tenaga kerja melalui *link and match* antara pelaku industri dan dunia pendidikan, serta keterbukaan ekonomi (*openness*) dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan meningkatkan ekspor yang mampu bersaing di pasar global.

6. Ketrasmigrasian

Realisasi pelaksanaan program transmigrasi Tahun 2011 yaitu ditematkannya 10 KK transmigran asal Kota Cimahi ke lokasi penempatan transmigrasi Desa Sei Besar, Kecamatan Matanilir, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Selain mendapat bekal pelatihan dan peralatan kerja, peserta transmigran asal Kota Cimahi mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Kota Cimahi.

Ditematkannya transmigran asal Kota Cimahi di unit pemukiman transmigrasi Desa Sei Besar merupakan hasil kerjasama antar daerah, antara Pemerintah Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Cimahi. Implementasi dari perjanjian kerjasama tersebut yaitu adanya kuota sebanyak 10 KK untuk Kota Cimahi.

Tahun 2012 selain adanya perjanjian dengan Kabupaten Ketapang, dalam Bidang Ketrasmigrasian dilakukan juga kegiatan pembinaan kepada transmigran asal Kota Cimahi di lokasi penempatan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Kota Cimahi tidak memiliki sumber daya alam, namun Kota Cimahi memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat diberdayakan untuk menjadi *entrepreneur* dan insan-insan yang kreatif yang merupakan keunggulan dari Kota Cimahi. Penguatan daya saing perekonomian kota akan dilakukan dengan mengembangkan potensi lokal berbasis klaster industri.

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah, pada tahun 2011 Pemerintah Kota Cimahi telah bekerjasama dengan beberapa pihak untuk menggali potensi lokal yang ada di Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi telah bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) telah menyusun Strategi Inovasi Daerah (SID). Dokumen SID yang telah disusun tersebut baru merupakan strategi pengembangan klaster industri animasi dan film di Kota Cimahi. Dokumen SID yang ada baru merupakan SID per sektor dan belum mencakup strategi pengembangan klaster industri lainnya diantaranya Klaster Industri Makanan dan Minuman, Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil, dan Klaster Industri Kerajinan (kraft) sebagaimana melalui kegiatan USDRP tahun 2011 telah melakukan identifikasi potensi lokal menunjukkan 4 klaster industri yang menjadi potensi ekonomi Kota Cimahi.

Dengan lahan yang tidak terlalu luas, daya jangkauan pusat pemerintahan Kota Cimahi ke kecamatan-kecamatan relatif singkat, rata-rata berjarak 1 – 2 km. Kota Cimahi berada pada lokasi strategis dan terletak di persimpangan jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti Bandung Raya yang berdampingan dengan ibu kota provinsi dimana jarak ke ibu kota provinsi hanya sejauh 10 km, Kota Cimahi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra kegiatan pelayanan jasa yang berbasis pada sumber daya manusia, khususnya di sektor industri, perdagangan dan jasa-jasa (terutama pendidikan).

Faktor jarak secara geografis menjadi salah satu faktor pendukung pengembangan klaster industri karena biasanya pelaku usaha akan melakukan pertukaran, perdagangan dan transaksi dengan pelaku usaha yang berdekatan. Semakin dekat jarak, semakin kuat jalinan usaha diantara mereka sehingga akan mendukung terjadinya inovasi. ***Untuk itu, maka perlu mensinergikan klaster-klaster industri terpilih dalam sebuah rencana tindak lanjut yang disebut sebagai Sistem Inovasi Daerah Kota Cimahi (SID).***

Gedung BITC (*Baros Information Technology Creative*) diharapkan dapat memicu bangkitnya aktifitas ekonomi kota khususnya klaster industri telematika dan animasi. Strategi pengembangan klaster industri telematika dan animasi berorientasi kepada lahirnya pelaku usaha-pelaku usaha baru (*start up firms*). serta komunitas-komunitas wanita, anak muda dan pengguna internet (*women, youth, netizen*). Selain

itu, pengembangan kawasan BITC diharapkan dapat menjadi *brand image* bagi identitas lokal kota. Lahirnya pelaku usaha – pelaku usaha baru ini akan menjadi cermin dari daya tarik investasi di Kota Cimahi. Khusus untuk klaster industri telematika dan animasi, sejak tahun 2011 pembinaan start up-start up firms dilakukan melalui kegiatan inkubasi industri dan pemberian kemudahan perizinan berusaha.

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Sebagaimana wilayah perkotaan, perekonomian Kota Cimahi menampilkan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri dan perdagangan. Pada periode 2008-2010 struktur ekonomi Kota Cimahi tampak mengalami pergeseran, meskipun relatif sangat kecil. Pada tahun 2010 kontribusi sektor sekunder terus mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir dari 71.31persen menjadi 70.22 persen. Namun secara keseluruhan sektor ini masih mendominasi perekonomian Kota Cimahi. Penurunan kontribusi kelompok sektor sekunder ini disebabkan adanya penurunan kontribusi sektor industri yang terjadi selama tiga tahun terakhir dari sebesar 61.41persen (2008), 60.89 persen (2009) dan tahun 2010 menjadi sebesar 60.33 persen dari total pembentukan PDRB.

Tabel 2.40
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Cimahi
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2008 – 2010 (Persen)

NO	SEKTOR	2008		2009 ^{*)}		2010 ^{**)}	
		adhb	adhk	adhb	adhk	adhb	adhk
I	Primer	0.15	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16
1	Pertanian	0.15	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16
2	Pertambangan & Penggalian	-	-	-	-	-	-
II	Sekunder	71.28	71.31	70.25	70.69	70.06	70.22
3	Industri Pengolahan	60.54	61.41	59.78	60.89	59.47	60.33
4	Listrik, Gas & Air Bersih	3.55	3.72	3.34	3.62	3.27	3.65
5	Konstruksi	7.19	6.18	7.13	6.18	7.32	6.24
III	Tersier	28.57	28.53	29.60	29.15	29.78	29.62
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	18.50	19.21	19.11	19.71	19.28	20.12
7	Pengangkutan & Komunikasi	1.74	1.54	1.77	1.54	1.76	1.55
8	Keuangan, sewa & Js. Perusahaan	2.14	1.92	2.21	2.02	2.29	2.08
9	Jasa-jasa	6.19	5.86	6.51	5.88	6.45	5.87
	PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Cimahi Tahun 2011

*) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

Kontribusi kelompok sektor tersier mengalami kenaikan sebesar 1,09 poin dari 28.53 persen pada tahun 2008 menjadi menjadi 29.62persen pada tahun 2010 dengan

andil terbesar adalah sektor perdagangan/hotel/restoran (PHR) sebesar 20,12 persen. Sektor primer merupakan sektor dengan andil terkecil yaitu hanya sebesar 0,16 persen yang disumbangkan oleh sektor pertanian. Selain dari nilai PDRB, kemampuan ekonomi daerah dapat diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita.

Tabel 2.41
Angka Konsumsi RT Kota Cimahi Tahun 2007 – 2010

URAIAN	2007	2008	2009	2010
Rata-rata perkapita per bulan (Rp)				
Makanan	206,238.00	293,688.00	280,672.00	339,120.00
Non Makanan	272,301.00	337,424.00	296,461.00	346,153.00
Jumlah Pengeluaran	478,539.00	631,112.00	577,133.00	685,273.00
Persentase Pengeluaran				
Makanan	43.10	46.54	48.63	49.49
Non Makanan	56.90	53.46	51.37	50.51

Sumber : BPS Kota Cimahi

Berdasarkan data BPS di atas terlihat bahwa total pengeluaran perkapita rumah tangga di Kota Cimahi secara nominal mengalami peningkatan kecuali untuk tahun 2009. Kemungkinan penurunan pengeluaran rumah tangga ini disebabkan karena imbas krisis pada tahun tahun 2008. Berdasarkan kelompok pengeluaran terlihat bahwa pengeluaran untuk makanan cenderung mengalami peningkatan yang cukup besar.

Dari aspek kemampuan ekonomi daerah yang dimiliki oleh Kota Cimahi, posisi daya saing Kota Cimahi dibandingkan dengan lingkup *Bandung Metropolitan Area* (BMA), lingkup Provinsi Jawa Barat maupun lingkup Nasional diindikasikan oleh beberapa indikator di bawah ini:

Pertama, rata – rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi selama periode tahun 2007 – 2011 masih di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi BMA, provinsi maupun nasional.

Kedua, rata – rata pangsa PDRB Kota Cimahi terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2007 – 2011 masih di bawah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

Ketiga, rendahnya kontribusi laju pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat.

Keempat, laju pertumbuhan rata – rata PDRB per kapita riil penduduk Kota Cimahi lebih lambat daripada laju pertumbuhan rata – rata PDRB per kapita riil penduduk BMA,

Provinsi Jawa Barat maupun Nasional, meskipun secara nominal PDRB per kapita riil Kota Cimahi lebih tinggi dibandingkan rata PDRB per kapita riil penduduk BMA, Provinsi Jawa Barat maupun Nasional.

Kelima, sepanjang rentang masa 2007–2011, pangsa nilai tambah bruto sektor industri pengolahan nonmigas di dalam struktur perekonomian Kota Cimahi relatif masih tinggi, hanya sedikit di bawah pangsa sektor serupa di dalam struktur perekonomian Kabupaten Bandung dan jauh lebih tinggi dibandingkan pangsa sektor industri pengolahan nonmigas dalam perekonomian BMA, Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

2.4.2 Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

Fasilitas wilayah/Infrastruktur Kota Cimahi terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, sarana dan prasarana permukiman, serta sarana dan prasarana pelayanan publik.

Infrastruktur transportasi terdiri dari jalan dan perhubungan. Panjang jalan di Kota Cimahi pada akhir tahun 2011 adalah 141.136 meter, terdiri dari jalan nasional sebesar 3,25 persen, jalan provinsi sebesar 7,05 persen, dan sisanya adalah jalan kota. Dari seluruh panjang jalan di Kota Cimahi, jalan yang di aspal mendekati 70 – 75 persen, sedangkan sisanya adalah jalan yang diperkeras, dan jalan tanah. Tingkat kemantapan jalan sampai akhir tahun 2011 adalah sebesar 88,09%. Pola jaringan jalan di Kota Cimahi membentuk pola tulang ikan (*fish bone*), karena memiliki jaringan jalan yang memusat ke Jalan Raya Cimahi / Nasional Kota Cimahi sebagai jalan utama. Jalan ini harus menampung muara pergerakan internal / lokal dan juga pergerakan menerus. Hal tersebut mengakibatkan penumpukkan beban penggunaan jalan di jalan protokol tersebut terutama pada jam puncak.

Infrastruktur perhubungan di Kota Cimahi hanya melayani perhubungan darat. Peranan perhubungan darat sangat dominan terutama untuk menyalurkan produk-produk industri ke berbagai daerah. Selain itu, perhubungan darat sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama dalam menggerakkan roda perekonomian. Untuk menunjang perhubungan darat ini keberadaan terminal sangat penting. Terminal yang ada di Kota Cimahi merupakan terminal tipe C yang sedikitnya melayani 24 trayek, yang terdiri dari trayek internal dalam Kota Cimahi yaitu sebanyak 3 (tiga) trayek yang beroperasi, dan selebihnya adalah trayek yang melintas serta trayek yang hanya asal dan tujuannya di Kota Cimahi. Sedangkan kondisi perparkiran di Kota Cimahi masih didominasi dengan parkir di badan jalan (*on street*) dengan pengelolaan yang dikerjasamakan dengan institusi non pemerintah.

Pada aspek telekomunikasi, penggunaan telepon oleh masyarakat telah bergeser dari penggunaan telepon kabel menjadi telepon seluler. Hal ini dapat dilihat

dari kapasitas telepon terpasang dan fasilitas telepon yang dapat digunakan oleh masyarakat umum yang semakin kecil. Jumlah rumah tangga yang telah memiliki telepon di Kota Cimahi sebanyak 41.988 rumahtangga, sedangkan fasilitas telepon lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat terdiri dari 520 wartel/warnet dan telepon umum kartu/koin sebanyak 30 buah (Kota Cimahi Dalam Angka, 2010).

Pada infrastruktur prasarana dan sarana permukiman, penyediaan air bersih bagi masyarakat masih menjadi perhatian pemerintah Kota Cimahi. Sebagian besar kebutuhan air bersih masyarakat Kota Cimahi didapat dari PDAM. Berdasarkan data dari PDAM tahun 2009, setiap bulan kebutuhan air bersih rata-rata mencapai 850.000 m³. Volume air yang disalurkan selama 2009 sebesar 10.630.708 m³, dan konsumen terbesar berada pada rumah tangga sebesar 8.509.265 m³ atau 80%. Penduduk dan kalangan industri yang belum bisa mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM, memanfaatkan pompa/sumur bor/artesis untuk pengadaan air bersih.

Pada aspek persampahan, sistem yang digunakan adalah pengelolaan sampah dari sumber sampah, ditampung di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan selanjutnya diangkut oleh petugas ke TPA dengan sistem pembuangan *open dumping*. Sistem pengelolaan air limbah yang digunakan di wilayah Kota Cimahi masih menggunakan sistem setempat. Limbah rumah tangga berupa kotoran manusia (faekal) menggunakan sistem pembuangan dengan sistem cubluk dan septik tank pada masing-masing rumah atau bangunan. Persentase rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebesar 89,35%. Jumlah tangki septik yang ada di Kota Cimahi 48.675 unit dan jumlah cubluk adalah 11.087 unit. Sedangkan jumlah rumah tangga yang belum menggunakan tangki septik sebanyak 17.301 rumah tangga.

Untuk sarana dan prasarana pelayanan publik pada saat ini cukup memadai, namun masih diperlukan peningkatan. Untuk sarana perdagangan, pada tahun 2010 telah dilaksanakan penyempurnaan pembangunan Pasar Atas Baru, penataan dan pembangunan pasar-pasar tradisional. Sementara itu, gedung *Baros Information Technology Creative* (BITC) telah siap untuk dipergunakan untuk menampung kegiatan-kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan pengembangan IT dan industri kreatif dalam rangka perwujudan Cimahi Cyber Creative City.

Dari aspek geografis (fisik alami), spasial dan infrastruktur wilayah yang telah dikemukakan di atas, dikemukakan beberapa indikator yang memperlihatkan posisi daya saing Kota Cimahi sebagai berikut:

Pertama, secara geoekonomi/geostrategis, Kota Cimahi terletak di persimpangan jalur kegiatan ekonomi regional Bandung Metropolitan Area yang sangat dinamis, namun secara geografis Kota Cimahi merupakan wilayah berbentuk lembah cekungan yang melandai ke arah selatan, dengan ketinggian di bagian utara ± 1.040 meter dpl

(merupakan lereng Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu) serta ketinggian di bagian selatan sekitar $\pm$ 685 meter. Kondisi seperti ini tentu saja membuat pemanfaatan ruang untuk aktivitas perekonomian, sosial dan lain-lain menjadi terbatas, sehingga pada gilirannya upaya memanfaatkan posisi geostrategis tadi demi menciptakan daya saing dan kohesi sosial juga terbatas.

Kedua, selama jangka waktu 2008-2010, panjang jalan di Kota Cimahi telah bertambah dari 99,475 km menjadi 118,956 km. Jalan sepanjang 118,956 km pada tahun 2010 terdiri dari jalan negara 3,25% (3,866 km), jalan provinsi 7,05% (8,386 km) dan sisanya 89,70% (106,704 km) merupakan jalan kota. Dari seluruh panjang jalan di Kota Cimahi, jalan yang diaspal mendekati 70-75 persen, sedangkan sisanya jalan yang diperkeras dan jalan tanah. Dari seluruh jalan yang dikelola Kota Cimahi, hanya 83,219 km (69,99%) dalam kondisi baik, sepanjang 21,299 km (17,90%) dalam kondisi sedang dan 14,438 km (11,91%) dalam kondisi rusak. Selain angkutan jalan raya, di Kota Cimahi juga terdapat prasarana dan sarana transportasi kereta api. Namun, Kota Cimahi tidak mempunyai prasarana dan sarana transportasi laut, transportasi sungai, danau dan penyeberangan serta transportasi udara. Dengan kondisi seperti ini, maka transportasi di Kota Cimahi hanya bertumpu pada transportasi darat.

2.4.3 Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan komponen yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi sebagai kegiatan penanaman modal dalam berbagai kegiatan ekonomi dilakukan dengan harapan memperoleh nilai tambah di masa mendatang. Secara kuantitas data investasi yang riil ditanamkan belum dapat disajikan, ilustrasi terhadap investasi yang disajikan dapat dilihat dari sisi penggunaan kredit yang disalurkan dari perbankan (sumber Bank Indonesia Bandung). Dapat terlihat bahwa investasi di Kota Cimahi tahun 2010 sebagian didorong oleh investasi dalam bentuk modal kerja lainnya terutama oleh pelaku usaha di sektor industri, perdagangan dan jasa-jasa.

Tabel 2.42
Posisi Kredit Menurut Jenis Penggunaan di Kota Cimahi
Tahun 2008 – 2010 (Juta Rp)

Jenis Penggunaan	2008	2009	2010
[1]	[2]	[3]	[4]
Modal Kerja	1.423.773	1.438.478	1.596.554
Investasi	255.805	237.354	245.112
Konsumsi	1.127.656	1.189.251	1.381.708
Jumlah	2.807.234	2.865.082	3.223.374

Sumber : Bank Indonesia Bandung

Kemampuan pemerintah yang relatif terbatas mensyaratkan dukungan pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan investasi, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun kegiatan ekonomi lainnya. Dukungan perbankan dalam hal investasi memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi. Selama periode 2008 – 2010 dukungan perbankan dalam pengucuran kredit untuk modal kerja cenderung meningkat. Pada tahun 2010 posisi kredit untuk modal kerja mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 10,99 persen dan sedangkan untuk investasi meningkat 3,27 persen.

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif terus diupayakan oleh pemerintah. Selain peningkatan penyediaan infrastruktur, transparansi dan penyederhanaan prosedur dalam pengurusan izin investasi juga turut dibenahi. Sebagai bukti nyata dan Kota Cimahi telah mendapat penghargaan Investment Award Terbaik Nasional ke-II di tahun 2009. Selain itu stabilitas keamanan dan peraturan tentang perburuhan (ketenagakerjaan) yang kondusif bagi investor juga merupakan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya terutama dalam mendukung investasi pada klaster industri berbasis potensi lokal di Kota Cimahi.

Selama periode 2007-2011 investasi asing di Kota Cimahi telah meningkat dari US\$32,3 juta menjadi US\$58.350,5 juta, sementara investasi dalam negeri naik dari Rp46,3 miliar menjadi Rp368,2 miliar. Peningkatan penanaman modal yang signifikan ini sangat didukung oleh keberadaan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang sudah berfungsi dengan baik. Bahkan, Kota Cimahi menjadi juara pertama untuk kategori kota dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang Penanaman Modal tahun 2010 sedangkan Kota Bandung hanya masuk 10 besar untuk kategori yang sama. Meskipun prestasi dalam pengembangan investasi sangat baik, namun pangsa

Kota Cimahi dalam total investasi Provinsi Jawa Barat selama periode 2007-2009 dan 2011 baru rata-rata sekitar 0,76% dan 6,12% per tahun, masih jauh di bawah pangsa Kota Bandung.

Tabel 2.43
Perkembangan Investasi di Kota Cimahi dan
Beberapa Wilayah Pembedingnya
Tahun 2006-2011

Wilayah	2006	2007	2008	2009	2011	Pangsa Rata2 (%)
PMA (US\$ juta)						
Kota Cimahi	-	32,3	5,9	46,9	58.350,5	0,76
Kota Bandung	14,3	36,8	162,7	152,8	9.016.289,0	7,92
Kab. Bandung	14,8	31,5	37,5	162,8	215.010,6	1,30
Kab. Bandung Barat	-	-	-	11,5	75.712,8	0,06
Kab. Sumedang	-	-	153,4	-	6.400,9	1,51
BMA	29,0	100,5	359,6	373,9	9.371.763,8	11,56
Provinsi Jawa Barat	1.482,0	1.326,9	2.552,7	19.135,4	41.445.630,5	100,00
PMDN (Rp miliar)						
Kota Cimahi	-	46,3	58,8	495,2	368,2	6,12
Kota Bandung	-	11,1	1.064,7	252,4	515,1	10,56
Kab. Bandung	9,2	48,1	399,5	80,5	329,2	4,40
Kab. Bandung Barat	-	-	-	5,0	469,2	1,65
Kab. Sumedang	-	77,1	-	-	-	0,17
BMA	9,2	182,6	1.523,0	833,1	1.681,7	22,89
Provinsi Jawa Barat	500,3	11.347,9	4.075,2	2.817,3	7.305,5	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, *Jawa Barat Dalam Angka*, beberapa seri.

Dari aspek keuangan daerah dan iklim berinvestasi, posisi daya saing Kota Cimahi dibandingkan lingkup *Bandung Metropolitan Area* (BMA), Provinsi Jawa Barat dan nasional adalah sebagai berikut:

Kesatu, kemampuan Kota Cimahi dalam menggali pendapat asli daerah (PAD) relatif lebih baik dibandingkan beberapa daerah otonom lain di BMA.

Kedua, secara keseluruhan rata-rata rasio ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Cimahi terhadap dana perimbangan (transfer dari pemerintah pusat) menurun cukup signifikan, tetapi masih sedikit di atas rata-rata BMA.

Ketiga, pangsa belanja pegawai terhadap total belanja dalam APBD Kota Cimahi dalam lima tahun terakhir cenderung membesar, sementara tiga kabupaten/kota lainnya di BMA memperlihatkan tren menurun .Peningkatan persentase belanja pegawai ini harus dikendalikan karena berpotensi mengurangi porsi belanja untuk pembangunan infrastruktur wilayah, yang pada gilirannya bisa menurunkan daya tarik investasi.

Keempat, sepanjang jangka waktu 2008 – 2011 , kapasitas fiskal Kota Cimahi pada awalnya bergerak naik dari kategori rendah, tetapi tahun 2011 kembali merosot menjadi kategori rendah. Walaupun sama-sama berkategori rendah pada tahun 2011, angka

indeks kapasitas fiskal Kota Cimahi lebih baik daripada indeks kapasitas fiskal kabupaten/kota di lingkup BMA dan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan.

Kelima, kapasitas penduduk Kota Cimahi dalam menabung relatif lebih rendah dibandingkan BMA maupun Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi laju pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di BMA kecuali Kota Bandung, dan Provinsi Jawa Barat.

Keenam, meskipun prestasi dalam pengembangan investasi sangat baik, namun pangsa Kota Cimahi dalam total investasi Provinsi Jawa Barat selama periode 2007-2009 dan 2011 masih jauh di bawah pangsa Kota Bandung.

2.4.4 Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kota Cimahi merupakan salah satu dari keunggulan komparatif yang dimiliki Kota Cimahi sebagai sumber daya manusia baik sebagai tenaga kerja maupun potensi konsumen terhadap produk-produk industri kreatif. Dari struktur kependudukan, sebagian besar penduduk Kota Cimahi berada pada usia kerja dan sekitar dua pertiganya termasuk dalam angkatan kerja.

Tabel 2.44
Perkembangan, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Cimahi dan Beberapa Wilayah Pembedingnya, 2007-2011

Wilayah	2007	2008	2009	2010	2011	LPP Rata ² (%)
Jumlah Penduduk (jiwa)						
Kota Cimahi	518.985	532.114	547.862	541.177	553.592	1,72
KotaBandung	2.364.312	2.390.120	2.414.704	2.394.873	2.437.874	0,82
Kab. Bandung	3.021.339	3.116.056	3.148.951	3.178.543	3.235.615	1,38
Kab. Bandung Barat	1.377.789	1.531.072	1.548.434	1.510.284	1.537.402	2,28
Kab. Sumedang	1.112.336	1.134.288	1.143.992	1.093.602	1.113.238	0,46
BMA	8.526.896	8.703.650	8.803.943	8.718.479	8.875.023	1,27
Provinsi Jawa Barat	41.483.729	42.194.869	42.693.951	43.053.732	43.826.775	1,47
Indonesia	225.641.547	228.523.300	231.369.500	237.641.326	241.037.755	1,59
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)						
Kota Cimahi	12.597	12.915	13.298	13.135	13.371	
KotaBandung	14.054	14.207	14.354	14.236	14.491	
Kab. Bandung	1.729	1.774	1.793	1.809	1.842	
Kab. Bandung Barat	1.118	1.146	1.159	1.131	1.151	
Kab. Sumedang	713	727	733	701	713	
BMA	1.754	1.790	1.811	1.793	1.825	
Provinsi Jawa Barat	1.118	1.137	1.150	1.160	1.181	
Indonesia	118	120	121	124	126	

Sumber :BPS, Statistik Indonesia 2012; BPS,Sensus Penduduk 2010; BPS Provinsi Jawa Barat, Jawa Barat Dalam Angka 2012.

Tabel 2.45
Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Cimahi dan Beberapa Wilayah Pembedingnya, Tahun 2010-2011

Wilayah	0-14		15-64		65+		Rasio Ketergantungan	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Kota Cimahi	145.493	147.714	376.132	379.746	19.552	23.434	43,88	45,07
Kota Bandung	599.861	623.650	1.691.902	1.700.937	103.110	113.287	41,55	43,33
Kab. Bandung	988.066	992.866	2.063.061	2.109.333	127.416	133.416	54,07	53,40
Kab. Bandung Barat	467.603	475.433	967.564	991.272	75.117	70.697	56,09	55,09
Kab. Sumedang	289.224	302.297	720.588	734.767	83.790	76.174	51,77	51,51
BMA	2.490.247	2.541.960	5.819.247	5.916.055	408.985	417.008	49,82	50,02
Provinsi Jawa Barat	12.594.648	12.982.872	28.454.203	28.922.673	2.004.88	1.921.230	51,31	51,53
Indonesia	68.596.720		156.982.218		12.062.388		51,38	

Sumber : BPS,Sensus Penduduk 2010; BPS Provinsi Jawa Barat, Jawa Barat Dalam Angka 2012.

Dari aspek sumber daya manusia, posisi daya saing Kota Cimahi dibandingkan lingkup *Bandung Metropolitan Area* (BMA), Provinsi Jawa Barat dan nasional adalah sebagai berikut:

Pertama, laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi selama rentang waktu 2007 – 2011 relatif cukup tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk BMA, Provinsi Jawa Barat, maupun Nasional. Relatif tingginya laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi bisa menghasilkan sumber daya manusia yang mencukupi untuk kebutuhan pembangunan, namun dapat pula menyebabkan meningkatnya tingkat ketergantungan penduduk (*dependency ratio*), sehingga kohesi sosial menurun.

Kedua, seiring dengan pertambahan penduduk, sementara luas wilayah tetap, tingkat kepadatan penduduk di Kota Cimahi cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Ketiga, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang dimiliki Kota Cimahi lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan nasional. Akan tetapi, memasuki tahun 2011, persentase penduduk usia produktif mengalami penurunan. Penurunan persentase penduduk usia produktif ini mengakibatkan tingkat ketergantungan penduduk Kota Cimahi pun meningkat. Implikasinya, tingkat kohesi sosial di Kota Cimahi mengalami penurunan selama 2010-2011 lalu. Di samping itu, penurunan persentase penduduk usia produktif berpotensi memperlemah daya saing Kota Cimahi apabila produktivitas penduduk dalam menciptakan nilai tambah juga menurun. Kecenderungan serupa juga dialami oleh Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa di lingkup BMA telah terjadi peningkatan rasio ketergantungan penduduk (penurunan kohesi sosial) di wilayah kota dan penurunan rasio ketergantungan penduduk (peningkatan kohesi sosial) di wilayah kabupaten.

Keempat, perkembangan pembangunan manusia di Kota Cimahi lebih lambat dibandingkan Provinsi Jawa Barat maupun Indonesiasecara keseluruhan. Akan tetapi, di lingkup BMA, Kota Cimahi muncul sebagai daerah yang paling cepat perkembangan pembangunan manusianya. Hal ini sangat kondusif bagi peningkatan daya saing dan kohesi sosial Kota Cimahi karena kapabilitas dasar manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi menunjukkan peningkatan.

Kelima, seiring dengan perkembangan IPM, Kota Cimahi juga muncul sebagai daerah yang relatif lebih cepat, kecuali terhadap Kabupaten Sumedang, dalam peningkatan indeks pembangunan gender (IPG) di level BMA, meskipun tetap saja masih berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Secara keseluruhan, posisi daya saing Kota Cimahi belum mantap, baik di lingkup *Bandung Metropolitan Area* (BMA), level Provinsi Jawa Barat maupun di tingkat nasional. Untuk mengatasi relatif belum mantapnya daya saing Kota Cimahi di atas, maka Pemerintah Kota harus menata ulang strategi pembangunannya. Salah satu caranya adalah melalui Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Daerah Periode 2007 – 2012

Perkembangan kinerja keuangan daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam : (1) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari kinerja pencapaian pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah serta struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung). Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah, serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja Pelaksanaan APBD Kota Cimahi sejak tahun 2007 hingga tahun 2012, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap APBD Kota Cimahi. Pendapatan daerah Kota Cimahi Tahun 2012 disusun atas dasar potensi daerah sebagai sumber penerimaan khususnya kapasitas fiskal, yang menunjukkan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran rencana target pendapatan daerah dalam APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2012, menyangkut kemampuan kapasitas fiskal yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan perimbangan bagi hasil pajak baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Barat serta sumber lain – lain yang sah.

Terjadi perkembangan yang terus meningkat untuk total pendapatan daerah Kota Cimahi dalam kurun waktu tahun 2008 - 2012, dengan tingkat pertumbuhan rata – rata per tahun berdasarkan realisasinya sebesar 15,01 %. Sedangkan bila dilihat dari

tingkat capaian realisasi terhadap target, rata-rata setiap tahunnya melampaui target. Secara lengkap perkembangannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kinerja Pencapaian Pendapatan Daerah

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata Pertumbuhan
1	PENDAPATAN	501.736.055.963	592.055.088.602	619.489.083.478	721.746.717.932	872.553.880.911	15,01
1.1	Pendapatan Asli Daerah	64.964.960.822	75.037.372.353	87.321.279.805	116.677.729.308	144.541.919.313	22,34
1.1.1	Pajak Daerah	15.919.330.572	17.088.578.529	19.710.740.857	42.613.533.717	63.753.989.389	47,12
1.1.2	Retribusi Daerah	38.341.248.192	47.616.491.456	7.916.491.814	8.381.624.811	9.229.402.032	(10,80)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.034.634.714	5.447.918.440	7.162.429.009	6.206.035.964	6.351.501.520	13,87
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	6.669.747.344	4.884.383.928	52.531.618.125	59.476.534.816	65.207.026.372	242,90
1.2	Dana Perimbangan	385.339.766.618	439.802.164.598	432.579.734.555	422.164.126.956	541.183.364.963	9,57
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	52.653.846.618	69.055.829.598	71.843.214.555	65.451.266.956	73.406.987.963	9,61
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	305.008.920.000	339.000.335.000	333.439.320.000	354.745.460.000	440.860.307.000	10,04
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	27.677.000.000	31.746.000.000	27.297.200.000	1.967.400.000	26.916.070.000	294,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	51.431.328.523	77.215.551.651	99.588.069.118	182.904.861.668	186.828.596.635	41,23
1.3.1	Hibah						
1.3.2	Dana Darurat						
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	30.422.027.122	31.577.413.452	31.445.750.142	43.969.275.926	49.978.422.754	14,22
1.3.4	Dana Penyesuaian	2.425.576.400	8.616.150.000	35.642.257.600	90.996.071.520	81.110.429.000	178,33
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi	18.469.991.521	35.407.004.600	31.782.294.500	46.607.400.500	54.216.029.168	36,11
	Dana Alokasi Cukai	113.733.480	1.373.482.599	717.766.876	1.332.113.722	1.523.715.713	289,97
	Dana Pengembalian dari pusat		241.501.000				(100,00)

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi, Olahan Bappeda Kota Cimahi

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 22,34%. Untuk komponen Dana Perimbangan mengalami pertumbuhan sebesar 9,57% dan komponen Lain – lain pendapatan daerah yang sah mengalami pertumbuhan 41.23%

Adapun proporsi pendapatan Kota Cimahi masih didominasi oleh Dana Perimbangan sedangkan kenaikan proporsi PAD pada Pajak Daerah lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menyerahkan sebagian objek pajak pusat maupun propinsi untuk dikelola oleh daerah. Sedangkan penyumbang terbesar dari PAD adalah dari komponen lain-lain PAD yang sah, tetapi hal ini harus disikapi karena penyumbang terbesar dari lain-lain PAD yang sah adalah dari BLUD RSUD Cibabat yaitu sebesar 89% terhadap alokasi lain-lain PAD yang sah. Secara rinci, proporsi Pendapatan Daerah Tahun 2010 – 2012 diuraikan dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Proporsi Sumber Pendapatan Daerah

No	Uraian	2010	2011	2012
1	PENDAPATAN	100%	100%	100%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	14,10%	16,17%	16,57%
1.1.1	Pajak Daerah	3,18%	5,90%	7,31%
1.1.2	Retribusi Daerah	1,28%	1,16%	1,06%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,16%	0,86%	0,73%
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	8,48%	8,24%	7,47%
1.2	Dana Perimbangan	69,83%	58,49%	62,02%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	11,60%	9,07%	8,41%
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	53,82%	49,15%	50,53%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	4,41%	0,27%	3,08%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	16,08%	25,34%	21,41%
1.3.1	Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	5,08%	6,09%	5,73%
1.3.4	Dana Penyesuaian	5,75%	12,61%	9,30%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi	5,13%	6,46%	6,21%
	Dana Alokasi Cukai	0,12%	0,18%	0,17%

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi, Olahan Bappeda Kota Cimahi

1) Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab maka kebijakan pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah yaitu peningkatan penerimaan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan prinsip utama yaitu tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 22,34%. Pada kelompok pajak daerah kenaikan yang signifikan lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menjadikan obyek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan menjadi pajak daerah, pada sisi retribusi daerah terjadi penurunan yang cukup besar yang lebih disebabkan peralihan pendapatan dari BLUD RSUD Cibabat yang berasal dari retribusi daerah menjadi Lain-lain PAD yang sah.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari komponen Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jika dilihat trendnya maka ketiga komponen Dana Perimbangan ini cenderung tumbuh dengan trend yang positif. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak tumbuh secara rata-rata sebesar 9,61% per tahun, sementara DAU naik dengan kisaran yang hampir sama yaitu 10,04%. Sedangkan pada komponen DAK terjadi fluktuatif dan cenderung menurun.

Dana Perimbangan meskipun mengalami pertumbuhan sebesar 9,57% , tetapi hal ini lebih disebabkan oleh tingginya kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai komponen dengan jumlah terbesar dalam Dana Perimbangan. Sedangkan dari Dana Bagi Hasil Pajak diperkirakan pada tahun-tahun mendatang penerimaan dari sektor ini akan semakin berkurang sehubungan dengan kebijakan pemerintah menjadikan obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah.

3) Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah telah tumbuh dengan cepat. Akan tetapi, pertumbuhan komponen ini lebih disebabkan karena adanya tunjangan profesi guru yang tersertifikasi baik PNS ataupun Guru Swasta. Sementara itu, dari komponen Dana Penyesuaian, Dana Alokasi Cukai dan Bantuan Keuangan dari Propinsi kenaikan pendapatan lebih ditekankan oleh kegiatan-kegiatan yang sudah diarahkan (*Earmark*). Pada komponen bagi hasil pajak dari provinsi, kenaikan lebih disebabkan oleh Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor serta Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini disebabkan oleh tingginya minat masyarakat untuk mempunyai kendaraan pribadi dan pengaruh dari kebijakan provinsi yang mengatur pajak progresif kendaraan bermotor.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kedua jenis belanja ini digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai belanja yang diarahkan (*Earmark*), belanja yang bersifat mengikat/wajib, belanja yang ditentukan persentasenya sesuai amanat perundang-undangan, belanja pemenuhan urusan sesuai dengan SPM dan belanja lainnya. Realisasi belanja daerah Kota Cimahi dari Tahun 2010 – 2012 telah tumbuh sebesar 20,7% per tahun dengan rincian realisasi seperti pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel. 3.3
Realisasi Belanja Daerah

No	Uraian	2010		2011		2012	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi(*)
A	Belanja Tidak Langsung	417,603,717,822	360,648,425,261	425,983,880,881	399,370,555,525	507,043,952,144	500,396,642,033
1	Belanja Pegawai	365,311,222,150	319,629,193,005	379,886,848,224	361,338,348,781	462,940,112,933	462,940,112,933
2	Belanja Bunga	1,300,000,000	1,281,377,825	1,316,448,500	1,316,448,454	1,231,684,760	1,113,034,255
3	Belanja Subsidi						
4	Belanja Hibah	36,862,576,600	30,703,961,100	30,369,900,000	27,881,233,534	38,956,455,751	34,975,700,439
5	Belanja Bantuan Sosial	9,608,250,000	7,343,176,031	9,100,000,000	7,361,083,656	332,300,000	25,000,000
6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	781,833,700	781,833,656
8	Belanja Tidak Terduga	4,521,669,072	1,690,717,300	5,310,684,157	1,473,441,100	2,801,565,000	560,960,750
B	Belanja Langsung	322,154,202,998	275,552,719,651	374,953,438,949	338,933,075,803	425,146,293,290	425,146,293,290
1	Belanja Pegawai	34,674,999,288	31,020,714,020	64,426,815,512	61,722,664,280	77,120,986,850	77,120,986,850
2	Belanja Barang & Jasa	165,483,181,976	153,396,354,446	184,119,506,945	174,339,492,681	214,733,587,582	214,733,587,582
3	Belanja Modal	121,996,021,734	91135651185	126,407,116,492	102,870,918,842	133,291,718,858	133,291,718,858

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi, Olahan Bappeda Kota Cimahi

Tabel 3.4.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah

No	Uraian	2010	2011	2012	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Belanja Daerah	636,201,144,912	738,303,631,328	925,542,935,323	20.70
	Belanja Tidak Langsung	360,648,425,261	399,370,555,525	500,396,642,033	18.02
1	Belanja Pegawai	319,629,193,005	361,338,348,781	462,940,112,933	20.58
2	Belanja Bunga	1,281,377,825	1,316,448,454	1,113,034,255	(6.36)
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	30,703,961,100	27,881,233,534	34,975,700,439	8.13
5	Belanja Bantuan Sosial	7,343,176,031	7,361,083,656	25,000,000	(49.71)
6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	781,833,656	100.00
8	Belanja Tidak Terduga	1,690,717,300	1,473,441,100	560,960,750	(37.39)
	Belanja Langsung	275,552,719,651	338,933,075,803	425,146,293,290	24.22
1	Belanja Pegawai	31,020,714,020	61,722,664,280	77,120,986,850	61.96
2	Belanja Barang & Jasa	153,396,354,446	174,339,492,681	214,733,587,582	18.41
3	Belanja Modal	91135651185	102,870,918,842	133,291,718,858	21.22

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi, Olahan Bappeda Kota Cimahi

Tabel 3.5 menguraikan proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja. Secara umum Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Cimahi menempati proporsi terbesar yaitu sebesar 54.66%. Sedangkan Belanja Langsung memiliki rata – rata proporsi lebih kecil yaitu 45.34%. Namun dengan rata – rata proporsi yang lebih kecil, realisasi Belanja Langsung memiliki pertumbuhan yang lebih besar yaitu 24,22% dibandingkan dengan pertumbuhan Belanja Tidak Langsung sebesar 18,02%.

Tabel. 3.5 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran

No	Uraian	2010	2011	2012	Rata-rata Proporsi
A	Belanja Tidak Langsung	56,69%	53,19%	54,09%	54.66%
1	Belanja Pegawai	50,24%	47,43%	48,94%	48.87%
2	Belanja Bunga	0,20%	0,16%	0,18%	0.18%
3	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%
4	Belanja Hibah	4,83%	3,79%	3,78%	4.13%
5	Belanja Bantuan Sosial	1,15%	1,14%	1,00%	1.10%
6	Belanja Bagi Hasil	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%
7	Belanja Bantuan Keuangan	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%
8	Belanja Tidak Terduga	0,27%	0,66%	0,20%	0.38%
B	Belanja Langsung	43,31%	46,81%	45,91%	45.34%
1	Belanja Pegawai	4,88%	8,04%	8,36%	7.09%
2	Belanja Barang & Jasa	24,11%	22,99%	23,61%	23.57%
3	Belanja Modal	14,32%	15,78%	13,93%	14.68%

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi, Olahan Bappeda Kota Cimahi

1) Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan Tabel 3.4. terlihat bahwa Belanja Pegawai pada Belanja Tidak langsung naik cukup signifikan selama tiga tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,58%, lebih besar dibandingkan rata-rata kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), hal ini lebih disebabkan karena adanya tunjangan profesi guru yang tersertifikasi baik PNS maupun Guru Swasta. Sedangkan rata – rata pertumbuhan total belanja daerah Tahun 2010 – 2012 adalah sebesar 18,02%.

Pada proporsi realisasi Belanja Langsung terhadap anggaran total Belanja Daerah, proporsi terbesar adalah komponen Belanja Pegawai yang mencapai hampir 49% dari anggaran Belanja Daerah. Hal ini lebih disebabkan oleh tingginya jumlah PNSD di Kota Cimahi yaitu sebesar 6.021 orang pada tahun 2012 serta terus bertambahnya guru baik PNS dan Swasta yang mendapatkan sertifikasi yang menyebabkan membengkaknya anggaran pada komponen belanja pegawai.

2) Belanja Langsung

Melihat struktur Belanja Langsung pada Tabel 3.5, terlihat bahwa rata-rata komposisi Belanja Barang dan Jasa menempati bagian terbesar yaitu mencapai 23,57% dari total belanja daerah, disusul berturut-turut oleh Belanja Modal dan Belanja

Pegawai dengan rata-rata proporsi 14,68% dan 7,09% dari total belanja daerah. Walaupun struktur belanja pada Belanja Langsung sudah cukup baik akan tetapi perlu diwaspadai adanya potensi munculnya kecenderungan pertumbuhan yang berbanding terbalik dengan pola umum komponen anggaran. Hal ini lebih disebabkan oleh semakin tingginya kebutuhan di komponen belanja tidak langsung, terutama pada belanja pegawai.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Menurut peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2001, neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Perkembangan neraca daerah Kota Cimahi dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah

NO	U R A I A N	2010	2011	2012	Rata - Rata Pertumbuhan
I	ASET				
1	ASET LANCAR				
	Kas di Kas Daerah	96.024.002.121,61	66.301.281.492,61	103.204.282.516,61	12,35
	Kas di Bendahara Pengeluaran	134.877.719,00	516.026.404,00	-	91,29
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	
	Kas di RSUD	4.139.466.434,00	4.455.050.467,00	4.455.050.467,00	3,81
	Piutang Pajak	2.749.378.660,31	2.203.417.125,97	2.203.417.125,97	(9,93)
	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	34.370.875,00	32.570.875,00	30.170.875,00	(6,30)
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	509.447.075,00	511.802.000,00	434.177.500,00	(7,35)
	Piutang Lainnya	3.665.300.091,00	2.241.942.166,00	1.569.359.516,20	(34,42)
	Persediaan	4.951.317.448,28	7.927.173.111,74	6.345.702.075,95	20,08
	Biaya Dibayar Dimuka	753.150.375,66	1.209.169.753,28	970.600.560,96	20,41
	Jumlah Aset Lancar	112.961.310.799,86	85.398.433.395,60	119.212.760.637,69	7,60
2	INVESTASI JANGKA PANJANG				
	Investasi Nonpermanen				
	Dana Bergulir	1.162.855.646,00	1.094.000.000,00	1.094.000.000,00	(2,96)
	Jumlah Investasi Nonpermanen	1.162.855.646,00	1.094.000.000,00	1.094.000.000,00	(2,96)
	Investasi Permanen				
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	68.778.945.800,98	76.625.475.045,52	76.625.475.045,52	5,70
	Jumlah Investasi Permanen	68.778.945.800,98	76.625.475.045,52	76.625.475.045,52	5,70
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	69.941.801.446,98	77.719.475.045,52	77.719.475.045,52	5,56

NO	U R A I A N	2010	2011	2012	Rata - Rata Pertumbuhan
3	ASET TETAP	-	-	-	
	Tanah	520.206.927.547,00	522.706.927.547,00	539.257.427.547,00	1,82
	Peralatan dan Mesin	141.763.994.031,34	176.086.340.012,07	253.104.775.650,07	33,97
	Gedung dan Bangunan	336.322.744.189,00	328.258.567.184,00	334.293.249.722,00	(0,28)
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	234.971.997.268,00	269.376.263.529,00	335.760.171.239,00	19,64
	Aset Tetap Lainnya	11.049.132.193,00	15.744.200.456,00	21.309.349.734,00	38,92
	Konstruksi dalam Pengerjaan	17.416.749.300,00	10.940.413.300,00	10.940.413.300,00	(18,59)
	Akumulasi Penyusutan	-	-		
	Jumlah Aset Tetap	1.261.731.544.528,34	1.323.112.712.028,07	1.494.665.387.192,07	8,92
4	ASET LAINNYA				
	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	47.741.925,00	-	-	-
	Aset Rusak Berat	309.512.500,00	3.615.756.331,01	3.615.756.331,01	534,11
	Aset Tidak Berwujud	82.817.000,00	82.817.000,00	82.817.000,00	-
	Built, Operate, and Transfer - B O T	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00	-
	Jumlah Aset Lainnya	3.788.416.425,00	7.046.918.331,01	7.046.918.331,01	43,01
	JUMLAH ASET	1.448.423.073.200,18	1.493.277.538.800,20	1.698.644.541.206,29	8,42
II	KEWAJIBAN				
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	3.402.673.340,00	14.045.843,00	14.045.843,00	(49,79)
	Bagian Lancar Utang Pengelolaan Persampahan	78.700.448,16	55.661.042,38	55.661.042,38	(14,64)
	Bagian Lancar Utang Kepada Pemerintah Pusat		855.508.219,86	855.508.219,86	
	Bagian Lancar Utang Bunga Utang Persampahan		8.956.774,31	8.956.774,31	
	Bagian Lancar Utang Bunga Utang Pemerintah Pusat		349.532.141,70	349.532.141,70	

NO	U R A I A N	2010	2011	2012	Rata - Rata Pertumbuhan
2	Utang Lain-lain	9.089.902.082,00	6.917.460.987,00	6.917.460.987,00	(11,95)
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	12.571.275.870,16	8.201.165.008,25	8.201.165.008,25	(17,38)
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
	Utang kepada Pemerintah Pusat	12.832.623.298,00	11.121.606.858,14	11.121.606.858,14	(6,67)
	Utang Jangka Panjang - Utang Persampahan	73.953.164,02	-	-	
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	12.906.576.462,02	11.121.606.858,14	11.121.606.858,14	(6,91)
	JUMLAH KEWAJIBAN	25.477.852.332,18	19.322.771.866,39	19.322.771.866,39	(12,08)
	III EKUITAS DANA				
	1 EKUITAS DANA LANCAR				
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	96.895.646.067,61	71.258.312.520,61	91.257.002.967,11	0,80
2	Pendapatan Yang Ditangguhkan	26.867,00	-	-	
	Cadangan Piutang	6.958.496.701,31	4.989.732.166,97	4.237.125.017,17	(21,69)
	Cadangan Persediaan	4.951.317.448,28	7.927.173.111,74	6.345.702.075,95	20,08
	Cadangan Biaya Dibayar Dimuka	753.150.375,66	1.209.169.753,28	970.600.560,96	20,41
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek	(9.168.602.530,16)	(7.813.742.519,24)	8.201.165.008,25	(109,87)
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	100.390.034.929,70	77.570.645.033,36	111.011.595.629,44	10,19
	2 EKUITAS DANA INVESTASI				
	Dinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	69.941.801.446,98	77.719.475.045,52	77.719.475.045,52	5,56
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.261.731.544.528,34	1.323.112.712.028,07	1.494.665.387.192,07	8,92
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	3.788.416.425,00	7.046.918.331,01	7.046.918.331,01	43,01
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Panjang	(12.906.576.462,02)	(11.494.983.504,15)	(11.121.606.858,14)	(7,09)
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	1.322.555.185.938,30	1.396.384.121.900,45	1.568.310.173.710,46	8,95
	JUMLAH EKUITAS DANA	1.422.945.220.868,00	1.473.954.766.933,81	1.679.321.769.339,90	8,76
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.448.423.073.200,18	1.493.277.538.800,20	1.698.644.541.206,29	8,42

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi, Olahan Bappeda Kota Cimahi

Tabel 3.7
Rasio Keuangan Daerah

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
I	Rasio Likuiditas			
1	Rasio Lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek	898,57%	1041,30%	1454%
2	Rasio Quick = (aktiva lancar - persediaan) : kewajiban jangka pendek	859,18%	944,64%	1376%
II	Rasio Solvabilitas			
1	Rasio total hutang terhadap aset = total hutang : total aset	1,76%	1,29%	1%
2	Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas	1,79%	1,31%	1,15%

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi, Olahan Bappeda Kota Cimahi

Berdasarkan tabel perkembangan neraca daerah Kota Cimahi tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2012 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Terdapat peningkatan jumlah nilai aset daerah sebesar Rp. 250.221.468.006,11 dengan tingkat pertumbuhannya sebesar 8,42% .
- 2) Kenaikan nilai aset daerah terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah aset tetap yang diperoleh.
- 3) Komposisi terbesar untuk aset tetap pemkot Cimahi adalah berasal dari Tanah yaitu sekitar 38,94% dari total aset tetap atau sekitar 34.2% dari total akan tetapi jika dibandingkan dengan nilai kontribusi terhadap total aset maka dapat diketahui peran aset berupa tanah terhadap total aset tidak tetap sebesar -6.43% dan terhadap total aset menurun sebesar -5.92%. Menurunnya kontribusi ataupun peran aset tanah terhadap kekayaan kota sejalan dengan indikasi semakin sulitnya Pemerintah Kota dalam melaksanakan program atau kegiatan jika kemudian kegiatan ataupun program tersebut memerlukan tanah.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Dari tabel di atas terlihat bahwa Rasio Lancar APBD Kota Cimahi sangatlah besar rata-rata 1.131,29% dengan pertumbuhan tingkat rasio sebesar 27.8%.Tetapi hal ini harus menjadi perhatian dikarenakan Rasio Solvabilitas Kota Cimahi masih rendah. Terlalu tingginya tingkat likuiditas, dan sangat rendahnya tingkat solvabilitas menunjukkan bahwa diperlukan upaya untuk mendorong investasi

jangka panjang Kota Cimahi dan peningkatan pengelolaan aset-aset potensial Kota Cimahi.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Periode 2007 – 2012

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada periode Tahun 2007 – 2012 terkait proporsi penggunaan anggaran dapat dilihat dari analisis proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan penggunaan anggaran untuk Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dapat dilihat pada Tabel 3.8 di bawah ini:

Tabel. 3.8
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	2010	2011	2012	Rata-rata Proporsi (%)
A	Belanja Tidak Langsung	319.629.193.005	361.338.348.781	462.940.112.933	85.16
1	Belanja Gaji & Tunjangan	242.520.058.269	269.143.115.398	315.926.690.018	62.04
2	Belanja Tambahan Penghasilan	71.528.164.839	85.619.637.548	137.696.789.151	21.54
3	Belanja Penerimaan Pimpinan & ADPRD serta Operasional KDh/WKDh	2.911.590.000	2.933.500.200	3.030.228.000	0.67
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	2.669.379.897	3.642.095.635	6.286.405.764	0.91
					-
B	Belanja Langsung	55.323.565.047	67.989.921.851	74.925.641.197	14.84
1	Belanja Honorarium PNS	13.668.538.570	21.162.742.910	20.740.562.250	4.14
2	Belanja Uang Lembur	1.663.305.700	1.690.213.500	1.713.617.000	0.39
3	Belanja Beasiswa Pendidikan	165.420.000	336.650.000	711.541.520	0.08
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimtek PNS	5.174.839.725	6.030.472.000	4.558.444.000	1.21
5	Belanja Premi ASKES	906.142.238			0.08
6	Belanja Makanan & Minuman Pegawai	377.788.632	213.387.000	689.736.000	0.09
7	Belanja Pakaian Dinas & Atribut	1.840.417.240	435.591.000	2.780.562.825	0.37
8	Belanja Pakaian Khusus & Hari-hari Tertentu	1.694.537.850	786.283.700	2.363.652.700	0.36
9	Belanja Perjalanan Dinas	20.719.009.973	26.760.386.255	28.375.705.544	5.68
10	Belanja Modal	9.113.565.119	10.574.195.486	12.991.819.358	2.44
	TOTAL	374.952.758.052	429.328.270.632	537.865.754.130	100

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi, Olahan Bappeda Kota Cimahi

Penggunaan anggaran pada belanja tidak langsung didominasi oleh Belanja Gaji & Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan. Belanja Gaji dan Tunjangan selama kurun waktu 2010 – 2012 memiliki rata – rata kontribusi sebesar 62,04% dari total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dengan trend kontribusi yang cenderung menurun, sedangkan untuk Belanja Tambahan penghasilan memiliki rata-rata kontribusi sebesar 21,54% dari Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dengan trend kontribusi yang cenderung semakin naik.

Adapun pada belanja pemenuhan kebutuhan aparatur yang ada di belanja langsung, komponen terbesar adalah Belanja Perjalanan Dinas dengan rata-rata prosentase kontribusi pada tahun 2010-2012 mencapai 5,68% dari total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, disusul oleh Belanja Honorarium PNS dan Belanja Modal dengan rata-rata kontribusi mencapai 4,14% dan 2,44% dari Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur.

Dari analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada Tabel 3.7, meskipun Belanja Perjalanan Dinas secara proporsi terlihat relatif kecil terhadap total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, tetapi bila dibandingkan kepada komponen Belanja Langsung akan terlihat bahwa Belanja Perjalanan Dinas mencapai 38,2% dari total komponen Belanja Langsung yang ada pada Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur. Hal ini tentunya perlu dicermati dan mendapat perhatian lebih lanjut.

Secara umum proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2010 hingga 2012 selalu berada di atas 50% dari total belanja dan pembiayaan pengeluaran dengan prosentase rata-rata mencapai 57%.

Tabel 3.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase (a/b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2010	374.952.758.051,50	641.436.223.222,00	58,46
2	Tahun Anggaran 2011	429.328.270.632,00	747.384.051.478,00	55,36
3	Tahun Anggaran 2012	537.865.754.130,00	937.513.185.395,00	57,37

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi, Olahan Bappeda Kota Cimahi

Kebijakan penggunaan anggaran untuk Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, tergambar pula pada proporsi belanja pendidikan seperti yang diuraikan dalam Tabel 3.10 berikut ini:

Tabel. 3.10
Proporsi Belanja Pendidikan

No	Uraian	2010		2011		2012	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Belanja Tidak Langsung	221.834.654.500	29,99	259.229.090.732	32,33	303.754.514.345	32,58
1	Belanja Gaji & Tunjangan (PNS pada Dinas Pendidikan)	166.262.121.900	22,48	175.083.457.212	21,84	191.847.221.345	20,58
2	Belanja Gaji & Tunjangan (Tenaga Kependidikan)						
3	Belanja Tambahan Penghasilan	55.572.532.600	7,51	66.257.893.520	8,26	107.231.487.500	11,50
4	Belanja Bantuan Keuangan (Pelaksanaan Fungsi Pendidikan)			17.887.740.000	2,23	4.675.805.500	0,50
5	Belanja Bantuan Sosial (Pelaksanaan Fungsi Pendidikan)						
B	Belanja Langsung	27.454.476.600	3,71	64.377.374.294	8,03	46.484.317.688	4,99
1	Belanja Kegiatan (pada Dinas Pendidikan)	27.348.605.000	3,70	64.377.374.294	8,03	46.484.317.688	4,99
2	Belanja Kegiatan (Pelaksanaan fungsi Pendidikan)	105.871.600	0,01	160.449.900			
A+B	Total Belanja Daerah Fungsi Pendidikan	249.289.131.100	33,70	323.606.465.026	40,36	350.238.832.033	37,57
C	Total Belanja Daerah	739.757.920.820		801.719.153.530		932.190.245.434	

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi, Olahan Bappeda Kota Cimahi

Berdasarkan tabel – tabel pengeluaran APBD Kota Cimahi tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara total keseluruhan belanja proporsi realisasi belanja tidak langsung masih merupakan komponen terbesar dari belanja daerah Kota Cimahi tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2012 tetapi pada komponen belanja langsung terus mengalami peningkatan sehingga proporsi antara kedua komponen belanja ini semakin berimbang.
2. Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Cimahi tahun anggaran 2010 sampai dengan 2012 mengalami pertumbuhan khusus untuk belanja pegawai hal ini disebabkan oleh bertambahnya guru yang tersertifikasi baik PNS maupun Swasta. Sedangkan belanja bantuan keuangan kepada parpol adalah tetap sedangkan belanja tidak terduga tidak mengalami pertumbuhan yang berarti.
3. Realisasi belanja untuk kebutuhan aparatur lingkup Kota Cimahi juga mengalami pertumbuhan dengan proporsi yang juga tidak berbeda jauh dari tahun ke tahun.
4. Realisasi Pengeluaran pembiayaan daerah pada dasarnya hanya untuk pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Komponen pembiayaan merupakan salah satu dalam menutupi defisit penganggaran. Secara realisasi pembiayaan daerah selama 2010 – 2012 mengalami pertumbuhan menurun sebesar 22%. Berdasarkan tabel di bawah dapat terlihat bahwa pada tiga tahun terakhir :

Tabel 3.11
Penutup Defisit Riil Anggaran

No	Uraian	2010	2011	2012
1	Realisasi Pendapatan Daerah	619.489.083.478	721.746.717.932	866.254.872.874
	Dikurangi realisasi			
2	Belanja Daerah	636.201.144.912	738.303.631.328	932.190.245.434
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.235.078.310	9.080.420.150	5.322.939.961
A	Defisit Riil	(21.947.139.744)	(25.637.333.546)	(71.258.312.521)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan			
4	SiLPA TA. Sebelumnya	118.842.785.811	96.895.646.068	71.258.312.521
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	-	-
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	118.842.785.811	96.895.646.068	71.258.312.521
A+B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	96.895.646.067	71.258.312.521	-

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi, Olahan Bappeda Kota Cimahi

Tabel 3.12
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil		
		2010	2011	2012
1	SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya	118.842.785.811	96.895.646.068	71.258.312.521
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	118.942.785.811	96.895.646.068	71.258.312.521

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi, Olahan Bappeda Kota Cimahi

Tabel 3.13
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

No	Uraian	2010		2011		2012		Rata-rata Pertumbuhan
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
1	Jumlah SiLPA	118.854.581.450		96.895.646.068		71.258.312.521		(22,56)
2	Pelampauan penerimaan PAD	7.131.274.887	6,00	3.537.109.504	3,65	8.628.044.772	12,11	9,99
3	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	30.902.191.177	26,00	25.236.057.600	26,04	43.368.804.536	60,86	18,51
4	Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.565.637.443	3,00	2.009.726.246	2,07	216.338.419	0,30	(75,15)
5	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	66.558.565.612	56,00	59.584.416.314	61,49	6.680.144.748	9,37	(68,10)
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikn	3.614.277.122	3,04	6.528.336.404	6,74	2.538.292.401	3,56	(16,09)
7	Kegiatan lanjutan	7.082.635.209	5,96	-	-	9.826.687.645	13,79	17,85

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi, Olahan Bappeda Kota Cimahi

Tabel 3.14
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1	Saldo kas neraca daerah	118.854.581.450	96.895.646.068	71.258.312.521	103.204.251.989
	Dikurangi				
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	3.614.277.122	6.528.336.404	2.538.292.401	8.236.592.666
3	Kegiatan lanjutan	7.082.635.209	0	9.826.687.645	12.275.816.761
	Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran	108.157.669.119	90.367.309.664	58.893.332.475	82.691.842.562

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi, Olahan Bappeda Kota Cimahi

Perkembangan realisasi dan komposisi Pembiayaan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dalam tahun anggaran 2010 dan 2012 Pemerintah Kota Cimahi mengalami defisit riil anggaran oleh karena belanja dan pengeluaran pembiayaan melebihi pendapatan. Defisit riil anggaran ini ditutup dengan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya terutama dari pelampauan pendapatan dan sisa penghematan belanja.
- 2) SiLPA tahun anggaran sebelumnya menjadikan komponen ini menjadi yang terbesar dari penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kota Cimahi tahun anggaran 2010 dan 2012.

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat

Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat tergambar pada realisasi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama seperti pada Tabel 3.15 berikut ini:

Tabel 3.15
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

No	Uraian	2010	2011	2012	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	357.979.045.364	423.054.899.342	500.757.546.380	18,27
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	314.048.223.108	354.762.752.946	453.623.479.169	20,42
2	Belanja Penerimaan Pimpinan & ADPRD serta Operasional KDh/WKDh	2.911.590.000	2.933.500.200	3.030.228.000	2,02
3	Belanja Bunga	1.281.377.825	1.316.448.454	1.113.034.255	(6,36)
4	Belanja Subsidi				
	Belanja Hibah	30.703.961.100	27.881.233.534	34.975.700.439	8,13
5	Bantuan sosial	7.343.176.031	7.361.083.656	25.000.000	(49,71)
6	Bantuan keuangan kepada Parpol			781.833.656	
7	Belanja tidak terduga	1.690.717.300	1.473.441.100	560.960.750	(37,39)
B	Belanja Langsung	10.383.025.922	29.919.734.450	33.286.263.025	99,71
1	Belanja Honorarium PNS khusus guru dan tenaga medis	2.666.611.750	20.191.012.000	22.539.273.000	334,40
2	Belanja Beasiswa pendidikan PNS	165.420.000	336.650.000	711.541.520	107,44
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	6.397.290.572	7.596.026.500	7.316.603.505	7,53
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	1.153.703.600	1.796.045.950	2.718.845.000	53,53
5	Dst				
C	Pembiayaan Pengeluaran	5.235.078.310	11.243.430.816	5.322.939.961	31,06
1	Pembentukan Dana Cadangan				
2	Pembayaran Pokok Utang dst	2.435.078.310	7.243.430.816	5.322.939.961	85,47
3	Penyertaan Modal	2.800.000.000	4.000.000.000	0	(28,57)
	TOTAL (A+B+C)	373.597.149.596	464.218.064.608	539.366.749.366	20,22

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi, Olahan Bappeda Kota Cimahi

3.3.2 Proyeksi Keuangan Daerah Periode 2012 – 2017

a. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.16 Proyeksi Pendapatan Daerah

No	Uraian	Data Tahun 2012 (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi Tahun 2013 (Rp)	Proyeksi Tahun 2014 (Rp)	Proyeksi Tahun 2015 (Rp)	Proyeksi Tahun 2016 (Rp)	Proyeksi Tahun 2017 (Rp)
1	PENDAPATAN	872.553.880.911	7,5	932.622.941.176	1.005.523.601.629	1.078.737.694.012	1.159.419.655.928	1.245.254.451.129
1.1	Pendapatan Asli Daerah	144.541.919.313	6,52	155.023.746.400	166.977.154.003	176.618.025.124	187.730.777.032	199.600.359.301
1.1.1	Pajak Daerah	63.753.989.389	7,5	77.291.900.000	82.702.333.000	88.491.496.310	95.570.816.015	103.216.481.296
1.1.2	Retribusi Daerah	9.229.402.032	3	9.608.091.400	9.896.334.142	10.193.224.166	10.499.020.891	10.813.991.518
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.351.501.520	3	7.966.337.700	8.205.327.831	8.451.487.666	8.705.032.296	8.966.183.265
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	65.207.026.372	6,25	60.157.417.300	66.173.159.030	69.481.816.982	72.955.907.831	76.603.703.222
1.2	Dana Perimbangan	541.183.364.963	8,02	578.185.969.470	624.397.593.576	674.421.491.199	728.575.684.293	787.204.865.296
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	73.406.987.963	6,5	63.367.627.470	67.486.523.256	71.873.147.267	76.544.901.840	81.520.320.459
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	440.860.307.000	8,5	489.174.792.000	530.754.649.320	575.868.794.512	624.817.642.046	677.927.141.620
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	26.916.070.000	2	25.643.550.000	26.156.421.000	26.679.549.420	27.213.140.408	27.757.403.217
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	186.828.596.635	6,7	199.413.225.306	214.148.854.051	227.698.177.690	243.113.194.602	258.449.226.532
1.3.1	Hibah							
1.3.2	Dana Darurat							
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	49.978.422.754	6,5	52.217.625.306	55.611.770.951	59.226.536.063	63.076.260.907	67.176.217.866
1.3.4	Dana Penyesuaian	81.110.429.000	6,35	147.070.600.000	156.409.583.100	166.341.591.627	176.904.282.695	188.137.704.646
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi	54.216.029.168	412,32	125.000.000	2.127.500.000	2.130.050.000	3.132.651.000	3.135.304.020
1.3.6	Dana Alokasi Cukai	1.523.715.713		-	-	-	-	-

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi, Dinas Pendapatan serta Olahan Bappeda Kota Cimahi

Dari tabel proyeksi pendapatan daerah di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 6,52% per tahun walaupun rata-rata pertumbuhan PAD berdasarkan realisasi penerimaan tahun 2008-2012 seperti ditunjukkan dalam tabel 3.13 adalah sebesar 22,34% Pajak daerah diproyeksikan akan bertumbuh sebesar 7,5% per tahun walaupun berdasarkan data realisasi tahun 2008-2012 rata-rata pertumbuhan adalah sebesar 47,12%. Hal ini disebabkan oleh adanya objek pajak baru pada tahun 2011 yaitu pajak air tanah dan pajak BPHTB yang diserahkan ke daerah sehingga mengakibatkan kenaikan signifikan pada tahun bersangkutan. Sedangkan untuk tahun 2013 diprediksi naik sebesar 21,23%, dan lebih disebabkan karena Pajak Bumi dan Bangunan mulai dikelola oleh pemerintah daerah.

Jenis Pendapatan Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan juga diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 3% per tahun.

Jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 6,25% walaupun rata-rata pertumbuhan lain-lain PAD yang sah di prediksi naik tetapi penyumbang terbesar dari pendapatan lain-lain PAD yang sah adalah dari BLUD RSUD Cibabat.

2) Kelompok Dana Perimbangan

Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan komponen terbesar dari pendapatan daerah Kota Cimahi. Jenis Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 6,5% per tahun. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa pendapatan bagi hasil pajak akan berkurang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat menjadikan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah.

Jenis pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 8,5% per tahun. Pertumbuhan pendapatan DAU sangat ditentukan oleh bobot daerah dan kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan jenis pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Tetapi peningkatan DAK sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat.

3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Jenis Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 6,5% per tahun. Pertumbuhan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi ditentukan oleh besarnya penerimaan pajak-pajak propinsi seperti Pajak

Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Bawah Tanah.

Jenis Pendapatan Dana Penyesuaian diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 6,35% per tahun walaupun rata-rata pertumbuhan pajak daerah seperti ditunjukkan dalam tabel 3.1 adalah sebesar 178,33%. Pertumbuhan pendapatan dana penyesuaian lebih disebabkan oleh Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi bagi Guru PNSD yang sejak tahun 2009 pembayarannya melalui APBD. Hal ini mengakibatkan pendapatan dana penyesuaian daerah meningkat dibanding tahun anggaran sebelumnya.

Jenis Pendapatan Bantuan Keuangan dari Propinsi diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan yang paling signifikan. Pertumbuhan pendapatan bantuan keuangan dari propinsi ditentukan oleh usulan pemerintah Kota Cimahi dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

b. Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi belanja daerah Kota Cimahi untuk Tahun Anggaran 2012 – 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.17
Proyeksi Belanja Daerah

No.	Uraian	Data Tahun 2012	Rata-rata Pertumbuhan	Uraian				
				2013	2014	2015	2016	2017
A	Belanja Tidak Langsung	507,043,952,144	4,86	573.172.157.116	595.110.037.756	623.809.342.524	653.958.863.918	692.930.500.332
1	Belanja Pegawai	462,940,112,933	5,00	543.799.189.863	570.989.149.356	599.538.606.824	629.515.537.165	660.991.314.023
2	Belanja Bunga	1,231,684,760	-	1.231.684.700	1.231.684.700	1.231.684.700	1.231.684.700	1.231.684.700
3	Belanja Subsidi	-		-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	38,956,455,751	5,02	24.853.000.000	20.101.530.000	20.352.545.300	20.606.070.753	28.166.677.828
5	Belanja Bantuan Sosial	332,300,000	(20,00)	632.300.000	505.840.000	404.672.000	323.737.600	258.990.080
6	Belanja Bagi Hasil	-		-	-	-	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan	781,833,700	-	781.833.700	781.833.700	781.833.700	781.833.700	781.833.700
8	Belanja Tidak Terduga	2,801,565,000	(4,99)	1.874.148.853	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
B	Belanja Langsung	425,146,293,290	8,25	454.418.443.383	506.914.000.000	541.198.000.000	590.064.000.000	623.363.000.000
1	Belanja Pegawai	77,120,986,850	3,00	82.611.306.464	85.090.000.000	87.643.000.000	90.272.000.000	92.980.000.000
2	Belanja Barang & Jasa	214,723,087,582	4,00	214.531.327.055	223.113.000.000	232.038.000.000	241.320.000.000	250.973.000.000
3	Belanja Modal	133,302,218,858	15,65	157.275.809.864	198.711.000.000	221.517.000.000	258.472.000.000	279.410.000.000

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi, Olahan Bappeda Kota Cimahi

Dalam alokasi anggaran belanja daerah khususnya pada belanja langsung, perlu dilakukan dengan mengedepankan prinsip efektifitas dan efisiensi khususnya dalam alokasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan meliputi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3.18 dan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3.19 berikut ini:

Tabel 3.18
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Pendapatan	932.622.941.176	1.005.523.601.629	1.078.737.694.012	1.159.419.655.928	1.245.254.451.129
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	103.204.251.989	101.000.436.127	87.269.648.512	85.603.207.991	72.039.049.203
	Total Penerimaan	1.035.827.193.165	1.106.524.037.756	1.166.007.342.524	1.245.022.863.918	1.317.293.500.332
	Dikurangi					
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	628.785.893.595	653.645.721.756	682.502.331.924	715.677.270.533	750.478.975.990
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	407.041.299.570	452.878.316.000	483.505.010.600	529.345.593.385	566.814.524.342

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi, Olahan Bappeda Kota Cimahi

Tabel 3.19
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
I	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	407.041.299.570	452.878.316.000	483.505.010.600	529.345.593.385	566.814.524.342
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I					
II.a	Belanja Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan	462.655.036.049	511.414.000.000	542.198.000.000	591.064.000.000	624.363.000.000
II.b	Pembentukan Dana Cadangan					
	Dikurangi					
II.c	Belanja Langsung Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	74.736.592.666	76.143.054.000	79.950.206.700	83.148.214.968	86.474.143.567
II.d	Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	8.236.592.666	4.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	379.681.850.717	430.770.946.000	461.247.793.300	506.915.785.032	536.888.856.433
	Sisa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah setelah Menghitung Alokasi Pengeluaran Prioritas I (I-II)	27.359.448.853	22.107.370.000	22.257.217.300	22.429.808.353	29.925.667.908
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II	27.359.448.853	22.107.370.000	22.257.217.300	22.429.808.353	29.925.667.908
III.a	Belanja Tidak Langsung	573.172.157.116	595.110.037.756	623.809.342.524	653.958.863.918	692.930.500.332
	Dikurangi					
III.b	Belanja Tidak Langsung Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	545.812.708.263	573.002.667.756	601.552.125.224	631.529.055.565	663.004.832.423
III	Total Rencana Pengeluaran Prioritas II (III.a-III.b)	27.359.448.853	22.107.370.000	22.257.217.300	22.429.808.353	29.925.667.908
	Surplus Anggaran riil atau berimbang (I-II-III)	-	-	-	-	-

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Cimahi, Olahan Bappeda Kota Cimahi

BAB IV
ANALISIS
ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun periode pemerintahan. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Analisis ini menjelaskan butir-butir penting dari isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 ini meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal, permasalahan pembangunan daerah serta isu - isu strategis.

4.1 ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

4.1.1 Analisis Lingkungan Internal

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada lingkungan internal, terdapat faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas pemerintah daerah untuk mempengaruhinya.

1) Faktor Kekuatan

1. Iklim yang sejuk menjadikan Kota Cimahi nyaman untuk dijadikan tempat tinggal dan aktifitas lainnya.
2. Potensi budaya dan sejarah tradisi yang bercampur dengan budaya nusantara serta mancanegara, memiliki potensi ekonomi lokal untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata.
3. Besarnya jumlah penduduk Kota Cimahi terutama usia produktif yang merupakan potensi yang besar dalam mendukung pembangunan di Kota Cimahi.
4. Indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang cukup tinggi.
5. Kondusifnya suasana hubungan kerja kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam proses dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6. Tingginya semangat kewirausahaan dan kreativitas masyarakat Kota Cimahi pada klaster industri potensial.
7. Tersedinya kemudahan perijinan usaha.
8. Kawasan dan sarana prasarana pendukung pengembangan industri kreatif di Baros.
9. Sektor manufaktur memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.
10. Kota Cimahi menjadi bagian dari kota inti Kawasan Cekungan Bandung yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional.
11. Kondisi cakupan layanan infrastruktur perkotaan secara umum lebih dari 50%.

2) Faktor Kelemahan

1. Terjadinya degradasi kualitas lingkungan.
2. Tidak terbangunnya rantai nilai.
3. Tingkat pengangguran tinggi.
4. *Heterogenitas* penduduk Kota Cimahi dapat merupakan potensi disintegrasi.
5. Rendahnya relevansi dan daya saing serta kualitas pendidikan.
6. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan (PHBS).
7. Indek daya beli rendah.
8. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal.
9. Pelayanan sarana transportasi belum optimal.
10. Kurangnya kualitas dan kuantitas kebutuhan perumahan bagi masyarakat Cimahi.
11. Kurangnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kota Cimahi.
12. Keterbatasan fisik lahan untuk pembangunan dimana terdapat sekitar 30% luas wilayah Kota Cimahi merupakan kawasan militer, kawasan keselamatan operasional penerbangan Lapangan Udara (LANUD) Husein Sastranegara dan kawasan resapan air di bagian utara.
13. Ketersediaan infrastruktur kota masih belum memenuhi standar pelayanan minimal yang ada.
14. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah masih belum sesuai dengan realitas tantangan lingkungan strategis, karena susunannya belum cukup selaras dengan dinamika perubahan lingkungan strategis.
15. Belum Optimalnya pelaksanaan berbagai produk perundang-undangan di Kota Cimahi.

4.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Sama dengan analisis lingkungan internal, maka pada analisis lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor utama, yakni faktor peluang dan faktor ancaman. Karena bersifat eksternal, sebagian besar dari faktor peluang dan ancaman berada diluar jangkauan pemerintah daerah untuk mempengaruhinya, atau paling tidak kemampuan pemerintah daerah untuk mempengaruhi faktor peluang dan ancaman adalah lebih terbatas kalau dihadapi secara terfokus dan bertahap.

1) Faktor Peluang

1. Peluang pasar di regional dan internasional yang tinggi terhadap produk-produk kluster industri berbasis potensi lokal di Kota Cimahi.
2. Perdagangan internasional memungkinkan melakukan pengembangan ekonomi lokal berdasarkan keunggulan komparatif.
3. Trend berkembangnya industri kreatif berbasis klaster industri.
4. Posisi dan letak geografis yang strategis, karena terletak pada jaringan transportasi utama antara kawasan Ibu Kota Negara (Jabodetabek) dan kawasan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, serta berfungsi sebagai bagian dari kota inti Bandung Metropolitan Area (BMA).
5. Kepercayaan yang sudah terjalin dari pemerintah provinsi, pusat dan lembaga donor serta kemitraan dengan masyarakat dan swasta untuk membantu pembangunan di segala sektor.

2) Faktor Ancaman

1. Globalisasi tidak dapat mencakup pengembangan rantai nilai kelompok termarjinalkan.
2. Membanjirnya produk-produk impor.
3. Kemudahan akses teknologi informasi komunikasi menyebabkan berubahnya nilai sosial budaya di Kota Cimahi.
4. Perpindahan penduduk yang tinggi.
5. Ancaman kemungkinan adanya bahaya bencana alam.
6. Masih belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

4.2 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Pada perencanaan pembangunan tahun 2012-2017 dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Cimahi, meliputi permasalahan sosial budaya, ekonomi, infrastruktur kota dan permasalahan pemerintahan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya aksesibilitas serta kualitas pendidikan dan kesehatan

Upaya pembangunan pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun dilaksanakan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Kota Cimahi. Akan tetapi, dilihat dari capaian rata – rata lama sekolah penduduk Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2011 baru mencapai 10,61 tahun atau rata-rata lama sekolah penduduk baru sampai kelas 1 SMA (pendidikan menengah). Kondisi ini belum memadai untuk menghadapi persaingan global dan belum mencukupi sebagai landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Belum optimalnya aksesibilitas dan kesempatan memperoleh pendidikan oleh sebagian masyarakat karena faktor ekonomi dimana hal ini merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah maupun karena harus bekerja. Hal tersebut berdampak pada kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya. Kualitas lulusan pendidikan belum merata dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (dunia kerja). Hal ini dikarenakan fasilitas, sumber dan media pembelajaran khususnya untuk jenjang pendidikan menengah belum tersedia secara merata, juga ketersediaan pendidik yang mengajar pada bidang studi tertentu tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan. Lulusan pendidikan menengah cenderung memilih bekerja dari pada menciptakan pekerjaan. Selain itu, pendidikan non formal yang berfungsi sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat dan diarahkan terutama untuk meningkatkan kecakapan hidup dan kompetensi kejuruan belum optimal diakses secara luas oleh masyarakat.

Sementara itu, untuk permasalahan kesehatan, kondisi di Kota Cimahi belum berada dalam kondisi yang ideal, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas derajat dan pelayanan kesehatan di masyarakat. Masih ada masyarakat yang kurang memperoleh akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas karena adanya keterbatasan dalam hal sumber daya. Kualitas pelayanan yang belum merata juga menjadi persoalan yang akan berdampak pada derajat kesehatan masyarakat yang perlu terus ditingkatkan. Melihat hal-hal tersebut diatas maka pelayanan perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibidang terkait pendidikan dan kesehatan menjadi penting mengingat kerentanan sosial juga dapat muncul sebagai akibat dari minimnya perhatian terhadap kedua hal tersebut.

2. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

Di Kota Cimahi masih terdapat kendala-kendala dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat seperti; hambatan kelembagaan, sikap dan sumber daya. Hambatan kelembagaan dimaksudkan adalah dominasi pendekatan *top-down* yang mekanistik membuat pengembangan partisipatif sulit untuk dilakukan,

meskipun pendekatan dengan konsep yang berpusat pada manusia dan bersifat partisipatif sudah mulai mendapat perhatian. Kendala sikap dimaksudkan masih kuatnya struktur hirarkis Pemerintah dan masih terdapat sikap-sikap pegawai negeri cenderung dilayani ketimbang melayani masyarakat. Keterbatasan sumber daya keuangan di pemerintahan sangat terbatas sementara itu proses pemberdayaan masyarakat membutuhkan input yang cukup besar (manusia dan dana) pada awal prosesnya dalam bentuk pelatihan, pendampingan, lokakarya, pertemuan dan kerja lapangan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga merupakan hambatan besar bagi pelaksanaan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Kuantitas SDM Kota Cimahi merupakan potensi yang besar dalam pembangunan, walaupun laju pertumbuhan penduduk rata-rata cukup tinggi, namun demikian kuantitas SDM yang besar ini tidak dibarengi dengan kualitas SDM, sehingga dapat menjadikan beban dan masalah dalam pembangunan. Kota Cimahi hampir tidak memiliki sumber daya alam, sehingga sumberdaya manusialah yang merupakan modal bagi kemajuan Kota Cimahi, namun demikian kualitas sumberdaya manusia Kota Cimahi sebagian besar belum mampu untuk bersaing secara global dikarenakan kualitas SDM ini rata-rata hanya sampai dengan kelas 1 SMA.

3. Masih tingginya pertumbuhan penduduk

Pada tahun 2011 jumlah penduduk di Kota Cimahi berjumlah 541.117 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2.06%. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut sangat berpengaruh terhadap kepadatan penduduk, terlebih dampak dari jumlah penduduk yang terus berkembang akan dihadapkan pada permasalahan daya dukung wilayah kota serta permasalahan fasilitas umum, sosial ekonomi, dan politik.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini akan mengakibatkan terjadinya permasalahan yang krusial mengingat luas wilayah Kota Cimahi yang sangat terbatas. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sebagian masyarakat sebagai akibat dari keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga akan menyebabkan kepadatan penduduk yang terus meningkat terutama pada kantung-kantung di wilayah tertentu yang menyebabkan meningkatnya kerawanan sosial dan dampak negative pada wajah kota.

4. Masih rendahnya daya beli masyarakat dan tingginya kemiskinan serta pengangguran

Pertumbuhan indeks daya beli Kota Cimahi selama Tahun 2006 - 2009 cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan. Pada tahun 2007 laju pertumbuhan indeks daya beli sebesar 3,17 %, pada Tahun 2008 sebesar 1,61 % dan 1,07 % pada Tahun 2009. Sedangkan pada Tahun 2010, indeks daya beli mengalami laju

pertumbuhan sebesar 1.12 %. Akan tetapi, walaupun angka indeks kemampuan daya beli Kota Cimahi sudah sedikit di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat, namun masih tetap lebih rendah jika dibandingkan dengan kemampuan daya beli Kota Bandung yang sebesar Rp. 634.040,- Bahkan lebih rendah dari pada Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung Barat masing-masing sebesar Rp. 633.750,- dan Rp. 632.850,-. Hal ini perlu menjadi permasalahan pembangunan karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.

Rendahnya daya beli masyarakat tidak bisa terlepas dari masih tingginya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan basis data terpadu dari Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilakukan BPS pada tahun 2011, jumlah Rumah Tangga Sasaran PPLS 2011 Kota Cimahi adalah sebanyak 35.280 RTS dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,16%. Disamping itu, berdasarkan komposisi rumah tangga Kota Cimahi berdasarkan status pekerjaan, masih tingginya rumah tangga yang merupakan pekerja bebas yaitu sebesar 29,4 %, ini menunjukkan tingkat pengangguran yang masih tinggi, untuk itu perlu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas agar tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat menurun. Permasalahan kemiskinan ataupun rendahnya daya beli pada gilirannya akan menimbulkan proses tumbuhnya kerentanan sosial di tengah masyarakat, untuk itulah maka upaya pelayanan perlindungan sosial untuk meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat menjadi penting untuk terus ditingkatkan.

5. Belum optimalnya layanan dan kualitas infrastruktur kota dan sinergitas antar wilayah

Infrastruktur perkotaan, yang diantaranya jalan, air bersih, pelayanan air limbah dan drainase di Kota Cimahi secara kuantitas sudah mencapai layanan lebih dari 50% dari jumlah penduduk ataupun luas wilayah kota. Namun yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut, yaitu sejauh mana kuantitas infrastruktur tersebut dapat melayani masyarakat secara berimbang sehingga bisa meningkatkan daya saing kota. Sebagai gambaran sampai dengan tahun 2012 infrastruktur jalan yang mencapai panjang 118,956 km terdiri dari jalan kota dan jalan lingkungan, jika dilihat fungsi pelayanannya yang berdasarkan standar bisa memenuhi kriteria aman, nyaman dan sesuai dengan kecepatan rencana, namun masih jauh dari target yang ditetapkan standar pelayanan minimal jalan. Demikian pula dengan air bersih, air limbah dan drainase, yang secara kualitas layanan masih belum memenuhi standar pelayanan minimal.

6. Belum optimalnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengendalian pemanfaatan ruang kota

Dalam konteks lingkungan hidup, Kota Cimahi menghadapi beberapa permasalahan yang dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat kota. Sektor lingkungan hidup di Kota Cimahi juga umumnya masih jauh dari capaian

standar pelayanan minimal. Sebagai contoh adalah pelaksanaan pencegahan pencemaran air dan udara, karena keterbatasan sumberdaya baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya anggaran, maka pencapaian *outcomes* yang sesuai standar pelayanan minimal masih jauh dari target.

Hal ini ditegaskan dengan adanya KLHS Kota Cimahi yang menyatakan bahwa belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luasan RTH Kota dikarenakan pembangunan yang tidak terkendali, lebih khusus dengan adanya penetapan sebagian wilayah Kota Cimahi sebagai wilayah KBU (Kawasan Bandung Utara) dengan fakta yang ada bahwa KWT (Koefisien Wilayah Terbangun) yang ada telah melewati KWT maksimum yang ditetapkan oleh Perda KBU. Hal berikutnya juga tentang adanya penetapan zona merah untuk pengambilan air tanah disebagian besar wilayah kota Cimahi sedangkan sebagian besar masyarakat Cimahi masih membutuhkan penggunaan air bersih sehingga program sumur artesis dari Pemkot Cimahi guna memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut menjadi kontradiktif dengan fakta daya dukung lingkungan yang sudah terbatas. Sedangkan dalam konteks pengendalian pemanfaatan ruang kota, Kota Cimahi mempunyai masalah dengan perijinan pemanfaatan ruang (ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin peruntukan penggunaan tanah (IPPT), ijin prinsip), masyarakat kota Cimahi masih belum sadar dengan perijinan ini ditandai dengan banyaknya bangunan yang belum berijin sehingga pembangunan oleh masyarakat ini tidak terkendali dan tidak sesuai dengan rencana kota yang sudah direncanakan sebelumnya.

4.3 ISU STRATEGIS

Dari permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian melalui pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi. Dari hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD dan analisis terhadap berbagai aspek maka isu strategis Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pendidikan;

Peningkatan derajat pendidikan dilakukan melalui pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur dengan peningkatan manajemen pendidikan, mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat disemua jalur, jenjang dan satuan pendidikan. Pembangunan pendidikan diselenggarakan secara integral oleh institusi pendidikan, pengguna dan pemerintah daerah untuk mencapai kualitas sumberdaya manusia Kota Cimahi yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif,

produktif, inovatif, mandiri, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, unggul dalam persaingan serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman serta tuntutan kebutuhan pasar.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkesinambungan dan berkualitas termasuk bagi penduduk miskin melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, dan globalisasi dengan semangat kemitraan, dan kerjasama lintas sektor.

2. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak dan Perempuan

Mewujudkan kehidupan pembangunan yang dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat sehingga dapat mendukung partisipasi aktif masyarakat baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang responsive gender maupun dalam menjaga keamanan pembangunan, dan mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban serta menghapuskan potensi konflik sosial.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, adanya perlindungan anak melalui upaya-upaya penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, serta penguatan kelembagaan jaringan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak bersifat preventif, kuratif dan remediatif yang berbasis masyarakat.

3. Pengendalian Kependudukan

Pertumbuhan penduduk yang seimbang diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB), kesehatan reproduksi yang terjangkau dan bermutu menuju terbentuknya keluarga yang berkualitas serta penertiban administrasi kependudukan dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

4. Kemiskinan, Pengangguran, Ketenagakerjaan dan Peningkatan Daya Saing Kota

Tingginya angka pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan meningkat, untuk itu perlu peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja dan adanya perbaikan dalam penyediaan lapangan kerja serta peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan daya saing kota.

5. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Kota;

Peningkatan kualitas dan pelayanan infrastruktur kota merupakan upaya penting dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan

kualitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur kota dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam rangka optimalisasi peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan untuk mewujudkan pola hidup bersih dan sehat, pelayanan pengelolaan air limbah yang semula banyak menggunakan septitank individual atau komunal yang terbatas, maka pemerintah Kota Cimahi akan melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah IPAL (domestic) yang berskala kawasan.

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang yang Sinergis dan Berkelanjutan;

Isu lingkungan hidup merupakan isu strategis yang berjalan seiring globalisasi dan berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup manusia. Penataan ruang yang sinergis baik dalam konteks sinergi antar wilayah dan antar instansi serta bersifat berkelanjutan akan membawa dampak besar dalam hal pengembangan kota lebih lanjut. Melalui upaya peningkatan konservasi sumber daya alam, serta konsistensi dalam pelaksanaan penataan ruang adalah point strategis yang sangat mendukung bagi kemajuan pengembangan kota Cimahi.

Pengendalian pemanfaatan ruang dalam hal ini adalah dengan penguatan didalam implementasinya baik didalam pengendalian ijin dan juga pengawasan kesesuaian ijin dengan kenyataan dilapangan ini ditandai dengan adanya koordinasi yang diantara instansi terkait. Untuk kebutuhan air bersih akan dikaji dengan teknologi yang tepat guna agar dapat menjaga ketersediaan air bersih dalam tanah tapi tetap dapat dieksploitasi guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Cimahi.

A black and white photograph of a modern building with a traditional tiered roof. The building has large windows and a decorative archway in the foreground. The text "BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN" is overlaid on the image.

BAB V

VISI, MISI,

TUJUAN DAN SASARAN

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DAERAH

5.1 VISI DAN MISI KOTA CIMAHI.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama klausul yang berkenaan dengan RPJPD dan RPJMD, semua Provinsi serta Kabupaten/Kota wajib menyusun RPJPD untuk periode waktu 2005 – 2025. RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD dan RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017, selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025. Adapun visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi adalah :

CIMAHI KOTA “CERDAS”,

yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Creative** yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif;
- b. **Egalitarian** yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita;
- c. **Religious** adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen;
- d. **Developable** diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun,
- e. **Accretive** diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang;
- f. **Sustainable** adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi

Dengan demikian visi CIMAHI KOTA “CERDAS” adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik.

Untuk mencapai visi RPJPD tersebut ditetapkan 5 (lima) misi jangka panjang kota Cimahi, yaitu:

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Kurun waktu tahun 2012 – 2017 merupakan pembangunan tahap ke tiga dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, yang mana dalam kurun waktu tersebut seluruh upaya pembangunan diarahkan pada *pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar*. Oleh karena itu visi dan misi RPJMD Kota Cimahi tahun 2012-2017 pun mengacu pada hal tersebut.

Adapun visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 sebagai cerminan visi dari Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih periode 2012 - 2017 adalah:

Menuju Cimahi “*CERDAS*”

Penjabaran dari makna Visi Kota Cimahi Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

- CREATIVE : Cimahi dengan segala potensi dan karakter lokal dapat berkreasi sesuai dengan kondisi dan tuntutan umum
- EGALITER : Menegakkan kesetaraan dalam pelayanan publik
- RESPONSIF : Cepat tanggap dalam menghadapi segala tantangan dan pelayanan
- DINAMIS : Mampu terus bergerak, berdenyut mengikuti dinamika kehidupan
- AGAMIS : Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam perikehidupan dan mewujudkan kesalehan sosial
- SINAMBUNG : Program-program pembangunan yang berkelanjutan.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi 2012 -2017 tersebut akan dicapai melalui 6 (enam) misi sebagai berikut:

- MISI : 1. Mewujudkan Kreativitas Dalam Segala Bidang
2. Meningkatkan Kesetaraan Dalam Pelayanan Publik
3. Meningkatkan Kemampuan Dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi Masyarakat Secara Cepat
4. Mempertahankan Dinamika Perkehidupan Dalam Pembangunan
5. Mewujudkan Keshalehan Sosial Dalam Masyarakat Yang Berakhlak Mulia
6. Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan

Adapun penjelasan masing-masing misi diatas adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : Mewujudkan Kreativitas dalam segala Bidang

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Cimahi dengan segala potensi dan karakter lokal dapat berkreasi sesuai dengan kondisi dan tuntutan umum. Mengingat adanya keterbatasan dalam sumberdaya alam serta setiap wilayah di Kota Cimahi tidak memiliki potensi yang sama maka pembangunan di Kota Cimahi harus lebih menekankan pada kemampuan dan kreativitas segenap masyarakat Kota Cimahi serta dengan mengembangkan sektor (kegiatan ekonomi) berdasarkan lokasi. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk lebih meningkatkan kreativitas di semua bidang, yang mana dapat dilakukan dengan pembentukan dan pengembangan potensi sosial dan budaya, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan manusia untuk dapat memproses barang dan jasa yg berbeda dan memiliki nilai tambah dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga dapat memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Kreativitas diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam rangka mendukung pengembangan infrastruktur kota yang lebih baik serta pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur kota. Selain hal diatas melalui misi pertama dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Cimahi yang dibangun melalui pendekatan Penguatan Sistem Inovasi.

Misi Kedua : Meningkatkan Kesetaraan dalam Pelayanan Publik

Hal ini berarti untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat serta kesadaran akan kesamaan sebagai anggota masyarakat Cimahi yang *Saluyu Ngawangun Jati Mandiri*, bersama-sama membentuk pengarusutamaan paradigma pemerintah sebagai pelayan publik. Selain itu, misi ini mengandung arti adanya upaya untuk membangkitkan semangat partisipasi pembangunan dengan mengurangi disparitas pembangunan antar kewilayahan dan komunitas agar menciptakan kesetaraan dan pemerataan dalam pelayanan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan swasta.

Misi Ketiga : Meningkatkan Kemampuan dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi Masyarakat secara Cepat

Hal ini berarti menciptakan sosok Kota Cimahi yang memiliki kemampuan dalam menanggapi tantangan, tuntutan dan kondisi secara cepat, yang dilakukan dengan meningkatkan kemampuan pendeteksian dini berbagai fenomena yang berkembang di masyarakat sebagai masukan kebijakan dan siaga dalam kejadian untuk menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Misi ketiga ini juga perlu disikapi bahwa untuk dapat menanggapi tantangan maka kondisi masyarakat harus dipersiapkan. Untuk itu berbagai institusi yang berkaitan dengan hal tersebut seperti pemerintah dan pranata birokrasi harus dapat berperan dan mendukung. Hal ini dilakukan dengan peningkatan manajemen pemerintahan, penataan birokrasi sehingga menjadi struktur otoritas atau organisasi yang didasarkan atas peraturan-peraturan yang jelas dan rasional serta posisi-posisi yang terpisahkan dari orang yang mendudukinya, birokrasi yang dapat mewakili kepentingan rakyat maupun pemerintah dengan fungsi koordinasi, pendisiplinan, dan pengendalian proses pemerintahan dengan kuat.

Misi ini juga mengandung arti kemampuan kota dalam merespon secara cepat dan tepat berbagai permasalahan pembangunan.

Misi Keempat : Mempertahankan Dinamika Perikehidupan dalam Pembangunan

Hal ini berarti, perubahan dan kemajuan yang telah tercipta sejak otonomi Cimahi, harus disesuaikan dengan kondisi eksternal baik dalam lingkup regional, nasional bahkan internasional, agar dapat memenuhi standar global yang dilakukan dengan memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Kota Cimahi yang berdaya saing, yang berguna dalam mempertahankan kesinambungan pembangunan Kota Cimahi. Dinamika diatas dapat diartikan sebagai dinamika yang ada dan dialami oleh masyarakat dalam pembangunan, yang tercermin dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk mempertahankan dinamika tersebut maka masyarakat harus diposisikan dalam penempatan yang sederajat sebagai unsur penggerak pembangunan partisipatif dengan para birokrat pemerintahan. Hal ini akan menciptakan kemandirian dan kedewasaan masyarakat. Masyarakat yang mandiri, dewasa, dan memiliki visi ke depan, merupakan masyarakat yang kuat, yang mau, dan mampu menjadi kontrol sosial untuk mengawasi para penyelenggara pemerintahan. Kontrol sosial dari masyarakat terhadap pemerintahan, berarti mengikuti secara aktif dan kritis terhadap semua proses pengambilan keputusan / kebijakan pemerintah daerah.

Misi Kelima: Mewujudkan Kesalehan Sosial dalam Masyarakat yang Berakhlak Mulia.

Hal ini berarti memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Kota Cimahi untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi disiplin untuk taat aturan dan bermoral, serta memelihara kerukunan dan kehidupan bermasyarakat, yang ditunjang dengan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.

Misi Keenam : Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan

Maksud dalam Misi keenam ini adalah melakukan Pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*), yang berarti pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta pembangunan yang terus berkelanjutan dari rangkaian tahapan proses pembangunan sebelumnya.

Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan dan Keseimbangan adalah pembangunan yang memberikan batasan secara bijak pada pemanfaatan ekosistem sumberdaya melalui penjagaan keseimbangan alami yang ada didalamnya, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu strategi dalam pemanfaatan ekosistem alamiah namun tanpa merusak kapasitas fungsionalnya dalam memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekarang dan masyarakat di kurun waktu masa depan.

Misi ini juga menjawab isu strategis tentang peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur kota; peningkatan kualitas Lingkungan Hidup; dan penataan ruang yang sinergis dan berkelanjutan. Dalam konteks misi ke 6 ini beberapa urusan terlibat antara lain Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Perumahan, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan. Dalam pembangunan berkelanjutan dituntut agar masyarakat dan pemerintah dapat mengendalikan diri untuk tidak merusak lingkungan, yang didukung oleh penerapan sistem peraturan dan perundang-perundangan.

5.2 TUJUAN DAN SASARAN KOTA CIMAHI

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan untuk masing - masing misi adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : Mewujudkan Kreativitas dalam Segala Bidang

Tujuan dari Misi pertama adalah :

1. Meningkatkan perekonomian dan ketahanan pangan melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga yang berdaya saing di tingkat global dengan menggunakan pendekatan sistem inovasi.
2. Menurunkan angka pengangguran dan memberikan fasilitas kesempatan bekerja dan berusaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Cimahi.

Untuk mewujudkan kreativitas dalam segala bidang, maka sasarannya sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya saing daerah, kohesi sosial dan berkembangnya ekosistem inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah-tangga
2. Berkembang dan meningkatnya daya saing industri pangan, industri kreatif, industri rumah tangga dan industri pariwisata
3. Berkembangnya infra dan suprastruktur pengetahuan serta meningkatnya kapasitas inovatif daerah
4. Berkembangnya usaha yang inovatif (khususnya UKM) berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga
5. Berhasilnya aplikasi teknologi dalam mengatasi persoalan daerah
6. Terbangunnya kapasitas SDM dan kelembagaan pada koperasi serta pelaku usaha berbasis komunitas dan industri rumah tangga
7. Terlaksananya pemberdayaan penduduk (keluarga) berpendapatan rendah sebagai pelaku dalam pembangunan
8. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan berkembangnya sektor pertanian mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasiskan kalster industri di Kota Cimahi
9. Pengembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi
10. Berkembangnya sektor pariwisata
11. Meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja
12. Menciptakan transmigran yang berkualitas untuk meningkatkan taraf hidupnya
13. Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja bagi pencari kerja.

Misi Kedua : Meningkatkan Kesetaraan dalam Pelayanan Publik

Tujuan dari Misi kedua adalah :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas didukung sumberdaya manusia yang responsif
2. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dalam pembangunan

Untuk meningkatkan kesetaraan dalam pelayanan pelayanan publik maka sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata dan memiliki daya saing
2. Meningkatnya derajat kesehatan bagi semua lapisan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
4. Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera
5. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan yang responsif
6. Meningkatnya kesetaraan *gender* dan perlindungan anak
7. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan
8. Meningkatnya sumberdaya olahraga
9. Meningkatnya perlindungan masyarakat

Misi Ketiga : Meningkatkan Kemampuan dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi Masyarakat secara Cepat

Tujuan dari Misi ketiga adalah:

Meningkatkan manajemen pemerintahan profesional dan akuntabel.

Untuk meningkatkan kemampuan dalam menanggapi tantangan, tuntutan dan kondisi masyarakat secara cepat, maka sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan kepada semua masyarakat
2. Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pemerintahan
3. Meningkatkan pelayanan manajemen informasi pemerintahan kepada public

Misi Keempat : Mempertahankan Dinamika Perikehidupan dalam Pembangunan

Tujuan dari Misi keempat adalah:

Mewujudkan iklim pemerintahan dan pembangunan yang dinamis (partisipasi)

Agar dapat mempertahankan dinamika perikehidupan dalam pembangunan, maka sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan politis dan demokratis
2. Meningkatnya kinerja pemerintahan kota dalam pembangunan
3. Meningkatnya partisipasi warga kota dalam pembangunan
4. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi

Misi Kelima: Mewujudkan Kesalehan Sosial Dalam Masyarakat Yang Berakhlak Mulia.

Tujuan dari Misi kelima adalah:

Menjadikan masyarakat Kota Cimahi yang disiplin, bermoral dan toleran

Untuk mewujudkan kesalehan sosial dalam masyarakat yang berakhlak mulia, maka sasarannya adalah:

1. Meningkatkan disiplin dan toleransi masyarakat Kota Cimahi
2. Berkembangnya budaya masyarakat Kota Cimahi
3. Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang toleran dan kondusif

Misi Keenam : Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan dari Misi keenam adalah

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas umum serta infrastruktur penunjang perekonomian kota
2. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas sosial
3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan perumahan dan permukiman
4. Mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keberlanjutan pembangunan

Agar dapat melaksanakan pembangunan berkelanjutan, maka sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan infrastruktur transportasi disertai dengan manajemen yang handal dan terintegrasi
2. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum penumpang
3. Meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi bidang perhubungan
4. Mengembangkan infrastruktur air bersih dan sanitasi dasar
5. Mengembangkan sarana prasarana perekonomian
6. Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/ rumah negara
7. Mengembangkan perumahan dan permukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar umum
8. Mewujudkan penataan ruang kota yang berkelanjutan
9. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan

Gambaran keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017

MISI	TUJUAN	SASARAN
VISI MENUJU CIMAH CERDAS		
Misi 1 : Mewujudkan Kreativitas Dalam Segala Bidang	Meningkatkan perekonomian dan ketahanan pangan melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga yang berdaya saing di tingkat global dengan menggunakan pendekatan sistem inovasi	Meningkatnya daya saing daerah, kohesi sosial dan berkembangnya ekosistem inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah-tangga
		Berkembang dan meningkatnya daya saing industri pangan, industri kreatif, industri rumah tangga dan industri pariwisata
		Berkembangnya infra dan suprastruktur pengetahuan serta meningkatnya kapasitas inovatif daerah
		Berkembangnya usaha yang inovatif (khususnya UKM) berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga
		Berhasilnya aplikasi teknologi dalam mengatasi persoalan daerah
		Terbangunnya kapasitas SDM dan kelembagaan pada koperasi serta pelaku usaha berbasis komunitas dan industri rumah tangga
		Terlaksananya pemberdayaan penduduk (keluarga) berpendapatan rendah sebagai pelaku dalam pembangunan
		Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan berkembangnya sektor pertanian mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasiskan kalster industri di Kota Cimahi
		Pengembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi
		Berkembangnya sektor pariwisata
	Menurunkan angka pengangguran dan memberikan fasilitas kesempatan bekerja dan berusaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Cimahi	Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja bagi pencari kerja
		Meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja
		Menciptakan transmigrasi yang berkualitas untuk meningkatkan taraf hidupnya

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 2 : Meningkatkan Kesetaraan Dalam Pelayanan Publik	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas didukung sumberdaya manusia yang responsif	Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata dan memiliki daya saing
		Meningkatnya Derajat kesehatan bagi semua lapisan masyarakat
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
		Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera
		Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan yang responsif
		Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan
		meningkatkan sumberdaya olahraga
	Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya perlindungan masyarakat
Misi 3 : Meningkatkan Kemampuan Dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi Masyarakat Secara Cepat	Meningkatkan manajemen pemerintahan profesional dan akuntabel	Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan kepada semua masyarakat
		Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan kepada semua masyarakat
		Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pemerintahan
		Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pemerintahan
		Meningkatkan pelayanan manajemen informasi pemerintahan kepada publik
Misi 4 : Mempertahankan Dinamika Perikehidupan Dalam Pembangunan	Mewujudkan iklim pemerintahan dan pembangunan yang dinamis (partisipasi)	Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan politis dan demokratis
		Meningkatnya kinerja pemerintahan kota dalam pembangunan
		Meningkatnya partisipasi warga kota dalam pembangunan
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi
Misi 5 : Mewujudkan Kesalehan Sosial dalam Masyarakat yang Berakhlak Mulia	Menjadikan masyarakat Kota Cimahi yang disiplin, bermoral dan toleran	Meningkatnya disiplin dan toleransi masyarakat kota Cimahi
		Berkembangnya budaya masyarakat kota Cimahi
		Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang toleran dan kondusif

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 6 : Melaksanakan pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas umum serta infrastruktur penunjang perekonomian kota	Mengembangkan infrastruktur transportasi disertai dengan manajemen yang handal dan terintegrasi
		Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum penumpang
		Meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi bidang perhubungan
		Mengembangkan infrastruktur air bersih dan sanitasi dasar
		Mengembangkan sarana prasarana perekonomian
	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas sosial	Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/ rumah negara
	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan perumahan dan permukiman	Mengembangkan perumahan dan permukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar umum
	Mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keberlanjutan pembangunan	Merwujudkan penataan ruang kota yang berkelanjutan
		Mewujudkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan

A photograph of a modern building with a traditional tiered roof. The building is white with large windows. In the foreground, there is a decorative fountain with a circular arch and some potted plants. The text "BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN" is overlaid on the image.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan maka perlu disusun strategi dan kebijakan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi selama lima tahun ke depan.

6.1 STRATEGI

Misi Pertama : Mewujudkan Kreativitas dalam Segala Bidang

Pilihan strategi untuk pencapaian misi pertama adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi perkembangan kreativitas-keinovasian berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga untuk mendukung perkuatan sistem inovasi daerah
2. Mengembangkan daya saing industrial melalui pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
3. Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan & inovasi melalui pengembangan jaringan inovasi
4. Mendorong perkembangan usaha-usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya
5. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi atau inovasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di daerah
6. Meningkatkan kualitas koperasi dan pelaku usaha berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga serta teknopreneur (inkubasi) untuk melahirkan pengusaha-pengusaha pemula (*start-up firms*)
7. Mengembangkan ruang-ruang bagi partisipasi publik dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas dan industri rumah tangga
8. Mengurangi Ketimpangan Pendapatan
9. Mengembangkan daya saing industrial sektor pertanian yang terintegrasi dengan pengembangan klaster-klaster industri unggulan di Kota Cimahi
10. Menciptakan perdagangan dalam negeri yang efisien
11. Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya dan produk lokal
12. Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyerapan tenaga kerja baik regional nasional maupun internasional
13. Meningkatkan penyelesaian kasus ketenagakerjaan

14. Meningkatkan perluasan jejaring kerja, perlindungan hukum dan hak-hak bagi pekerja
15. Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan
16. Meningkatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan transmigran yang berkualitas

Misi Kedua : Meningkatkan Kesetaraan dalam Pelayanan Publik

Pilihan strategi untuk pencapaian misi kedua adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat
2. Peningkatan kualitas dan mutu layanan pendidikan
3. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan kesehatan
6. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
7. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
8. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur yang responsif
9. Pengembangan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat
10. Pemberdayaan gender dan perlindungan anak
11. Pemberdayaan peran pemuda dalam pembangunan
12. Pemberdayaan sumberdaya olahraga
13. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Misi Ketiga : Meningkatkan Kemampuan dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi Masyarakat secara Cepat

Strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

1. Peningkatan pelayanan statistik
2. Peningkatan pelayanan kearsipan dan perpustakaan
3. Peningkatan sistem administrasi pertanahan
4. Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik
5. Pengembangan sistem informasi pembangunan daerah

Misi Keempat : Mempertahankan Dinamika Perikehidupan dalam Pembangunan

Strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

1. Peningkatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan politis dan demokratis
2. Peningkatan kapasitas dan peran DPRD dalam pembangunan kehidupan politis dan demokrasi
3. Pengembangan kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang efisien dan efektif
4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

5. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
6. Pemantapan otonomi daerah
7. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
8. Pengembangan kerjasama antar daerah
9. pengembangan sistem dan evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan
10. Fasilitasi pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel
11. Peningkatan kualitas produk perencanaan tahunan dan 5 tahunan serta sektoral
12. Peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan
13. Penyediaan data dasar dan sektoral untuk perencanaan pembangunan yang valid dan *up to date*
14. Pengembangan sistem informasi pembangunan daerah
15. Pengembangan mekanisme pengaduan pembangunan
16. Peningkatan lembaga keswadayaan masyarakat

Misi Kelima: Mewujudkan Kesalehan Sosial dalam Masyarakat yang Berakhlak Mulia

Strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

1. Peningkatan kesadaran warga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
2. Peningkatan kualitas moral dan kehidupan keagamaan
3. Pengembangan budaya lokal
4. Pengembangan pusat-pusat kebudayaan
5. Peningkatan kesadaran dan toleransi antar umat beragama

Misi Keenam : Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan

Strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

1. Mengembangkan jaringan pelayanan angkutan umum dalam kota
2. Mengembangkan jaringan prasarana angkutan umum dalam kota
3. Mengembangkan fasilitas perlengkapan jalan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor
5. Mengembangkan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam bidang perhubungan
6. Menerapkan manajemen lalu lintas yang terintegrasi
7. Menerapkan manajemen perparkiran yang efisien
8. Mengintegrasikan sistem transportasi di wilayah perbatasan dengan Kab/Kota sekitar
9. Mengembangkan sistem informasi dalam bidang perhubungan
10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan
11. Mengembangkan jaringan jalan lingkar luar yang berfungsi untuk memfasilitasi *through traffic*

12. Meningkatkan tingkat kemantapan jalan kota dan jalan lingkungan
13. Meningkatkan kualitas jaringan drainase kota
14. Meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial dan pemerintahan
15. Meningkatkan keamanan, keserasian dan ketahanan bangunan gedung fasilitas sosial dan pemerintahan
16. Meningkatkan ketersediaan dan cakupan rumah layak huni
17. Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat
18. Menciptakan lingkungan permukiman yang siaga dan aman dari bahaya kebakaran
19. Mengembangkan sistem pelayanan perijinan bangunan yang efisien
20. Mengembangkan data dan informasi spasial yang informatif
21. Mengembangkan rencana tata ruang yang komprehensif dan terintegrasi
22. Meningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang
23. Memperkecil penyimpangan pelaksanaan rencana tata ruang
24. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang
25. Mengembangkan Rung Terbuka Hijau (RTH) publik
26. Meningkatkan pencegahan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan pencemaran air, tanah dan udara
27. Melaksanakan standar operasional pelayanan pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
28. Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan lahan
29. Mengembangkan pelayanan informasi status lingkungan kota
30. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih yang aman
31. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang aman
32. Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik skala komunal, kawasan dan kota
33. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan
34. Meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah
35. Mengurangi timbulan akhir sampah melalui pengembangan komposting, 3R dan teknologi lainnya
36. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan TPU
37. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perdagangan
38. Menciptakan kondisi lingkungan perumahan permukiman tertata yang mencerminkan wajah kota

6.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran dari masing-masing misi, sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2012-2017. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah Kebijakan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012-2017 setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

6.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2013)

Tahun pertama dalam RPJMD Kota Cimahi 2012–2017 merupakan tahap **Penyiapan** untuk mencapai kondisi Pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar pada tahun 2017 sesuai dengan amanat RPJPD Kota Cimahi. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada penyiapan berbagai sistem, sarana, sumberdaya dan piranti pendukung kemajuan pembangunan kota yang berkeadilan, unggul, dan kreatif. Selain itu pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya untuk melanjutkan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama ini dan meningkatkan upaya penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak dan belum terselesaikan. Berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang mendapat perhatian dalam tahun pertama adalah *fasilitasi meningkatnya* kegiatan ekonomi dan industri kreatif untuk mendorong daya saing daerah pada tingkat nasional dan internasional, peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat, kualitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur kota, kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang yang berkelanjutan dan berkualitas.

Upaya pengendalian kependudukan, pelayanan dan perlindungan sosial masyarakat serta pemberdayaan masyarakat melalui kesetaraan gender dan perlindungan anak menjadi fokus prioritas yang akan ditangani pada tahun pertama. Pengentasan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan juga didorong untuk lebih ditingkatkan melalui peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelaksanaan reformasi birokrasi terus ditingkatkan melalui peningkatan pelayanan publik prima, penataan sistem administrasi pemerintahan dan pengembangan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan.

Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Cimahi memerlukan upaya penanganan yang dilakukan secara menerus dengan dukungan sumberdaya yang memadai. Mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah terus dilakukan secara optimal. Peningkatan nilai tambah ekonomi kota harus dipastikan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat kota.

6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2014)

Tahun Kedua dalam RPJMD Kota Cimahi 2012 – 2017 merupakan tahap **Penataan** untuk mencapai kondisi Pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar pada tahun 2017 sesuai dengan amanat RPJPD Kota Cimahi. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun kedua difokuskan pada penataan terhadap berbagai sistem, sarana, potensi dan sumberdaya lokal, dan piranti pendukung yang kondusif bagi peningkatan kualitas ekonomi dan daya saing kota serta kemajuan pembangunan kota yang berkeadilan, unggul, dan kreatif .

Pembangunan pada tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017. Penanganan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah seperti pengembangan ekonomi lokal untuk daya saing kota, peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan, kualitas dan pemerataan infrastruktur kota, kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkualitas terus dilaksanakan secara konsisten dan memastikan adanya perubahan kearah yang lebih baik.

Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat terus dilaksanakan dengan melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap mekanisme pelayanan yang diberikan. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional, pelayanan publik dan penataan administrasi pemerintahan yang lebih baik terus dilakukan agar upaya reformasi birokrasi memberikan hasil nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik.

Selain terus melakukan upaya penanganan diatas, pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 diarahkan juga pada peningkatan kesadaran warga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, peningkatan kualitas moral dan kehidupan keagamaan serta pengembangan budaya lokal. Upaya untuk meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan perlu terus ditingkatkan dengan peningkatan pelayanan statistik, kearsipan dan perpustakaan, administrasi kependudukan dan pertanahan. Sistem inovasi daerah akan diterapkan dalam semua aspek pemerintahan daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

6.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2015)

Tahun ketiga dalam RPJMD Kota Cimahi 2012 – 2017 merupakan tahap **Pengembangan** untuk mencapai kondisi pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar pada tahun 2017 sesuai dengan amanat RPJPD Kota Cimahi. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun ketiga difokuskan pada pengembangan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif,

penguatan investasi dan pasar. Pembangunan tahun ketiga dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun pertama dan kedua dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah, pengembangan ekonomi lokal, penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan dan pemantapan penyediaan infrastruktur kota.

Pada tahun ketiga ini, Pemerintah Kota Cimahi menekankan pada penciptaan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis pada sumber daya lokal diharapkan sudah menunjukkan hasil nyata di lapangan terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat dapat diukur secara berdasarkan indikator pendidikan dan kesehatan yang terus membaik. Pengembangan kinerja pembangunan infrastruktur kota menunjukkan hasil yang dapat dirasakan langsung masyarakat dengan adanya penurunan luas daerah genangan dan peningkatan kualitas sanitasi permukiman dan pelayanan air bersih, pengembangan konsep manajemen transportasi. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat mulai dirasakan dengan semakin membaiknya perlindungan sosial dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Fokus utama dalam pembangunan tahun ketiga adalah untuk terus mendorong perwujudan visi menuju Cimahi Cerdas terlihat dari semakin meningkatnya kreativitas ekonomi kota, pelayanan publik yang optimal, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan kota yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara konsisten sehingga terjadi perubahan signifikan dalam pelayanan pemerintah daerah.

6.2.4 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2016)

Tahun Keempat dalam RPJMD Kota Cimahi 2012 – 2017 merupakan tahap **Penguatan** untuk mencapai kondisi pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar pada tahun 2017 sesuai dengan amanat RPJPD Kota Cimahi. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun keempat difokuskan pada Penguatan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar.

Pada tahun keempat adalah upaya untuk menguatkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada

upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector agar terwujud visi pembangunan kota Cimahi Cerdas.

Selain terus melaksanakan upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan infrastruktur kota, arah kebijakan pembangunan kota ditekankan pada penguatan sektor-sektor ekonomi kota yang mengarah pada perluasan lapangan kerja yang berbasis pada kreativitas, inovasi dan sumber daya lokal. Sistem inovasi daerah terus dikembangkan dalam berbagai bidang pembangunan kota. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan terus didorong dalam mewujudkan pembangunan kota yang mensejahterakan masyarakatnya.

6.2.5 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2017)

Tahun Kelima dalam RPJMD Kota Cimahi 2012 – 2017 merupakan tahap **Pemantapan**, yaitu tercapainya kondisi Pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar pada tahun 2017 sesuai dengan amanat RPJPD Kota Cimahi. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada upaya pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar.

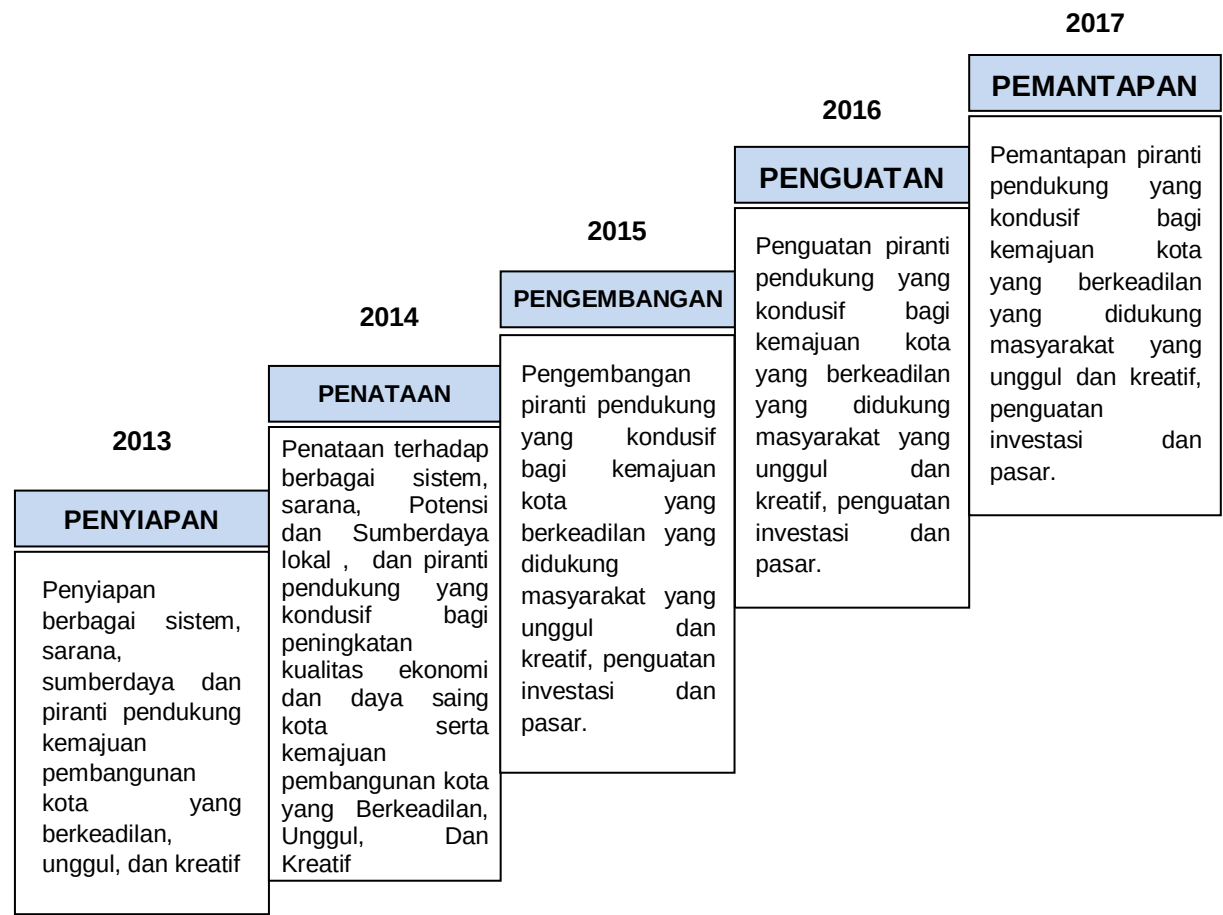
Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 merupakan tahap pemantapan sekaligus konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sector yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 (empat) tahun terakhir. Arah kebijakan pada sektor infrastruktur diarahkan pada pengembangan infrastruktur serta peningkatan cakupan pelayanannya. Pada sektor penataan ruang dan lingkungan hidup, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan serta perencanaan dan pemanfaatan ruang kota yang berkelanjutan. Sedangkan arah kebijakan pada bidang sosial budaya difokuskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatnya *good governance*.

Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar (baseline) untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode keempat pelaksanaan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector dengan

memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian target kinerjanya.

Secara sederhana tahapan pembangunan jangka menengah tersebut selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Bagan 6.1
Tahapan Pencapaian Pembangunan Jangka menengah



Adapun keterkaitan antara tujuan strategi dan arah kebijakan dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel 6.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MENUJU CIMAHI CERDAS			
MISI I : MEWUJUDKAN KREATIVITAS DALAM SEGALA BIDANG			
Meningkatkan perekonomian dan ketahanan pangan melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga yang berdaya saing di tingkat global dengan menggunakan pendekatan sistem inovasi	Meningkatnya daya saing daerah, kohesi sosial dan berkembangnya ekosistem inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah-tangga	Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi perkembangan kreativitas-keinovasian berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga untuk mendukung perkuatan sistem inovasi daerah	Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/ terbaik dan/ atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
	Berkembang dan meningkatnya daya saing industri pangan, industri kreatif, industri rumah tangga dan industri pariwisata	Mengembangkan daya saing industrial melalui pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal	Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/ terbaik dan/ atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
			Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
	Berkembangnya infra dan suprastruktur pengetahuan serta meningkatnya kapasitas inovatif daerah	Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan & inovasi melalui pengembangan jaringan inovasi	Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
			Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM.
			Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/ terbaik dan/ atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
			Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
			Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
			Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
	Berkembangnya usaha yang inovatif (khususnya UKM) berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga	Mendorong perkembangan usaha-usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya	Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
			Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/ terbaik dan/ atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
			Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
			Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
			Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
	Berhasilnya aplikasi teknologi dalam mengatasi persoalan daerah	Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi atau inovasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di daerah	Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
			Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM.
			Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/ terbaik dan/ atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
			Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
	Terbangunnya kapasitas SDM dan kelembagaan pada koperasi serta pelaku usaha berbasis komunitas dan industri rumah tangga	Meningkatkan kualitas koperasi dan pelaku usaha berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga serta teknopreneur (inkubasi) untuk melahirkan	Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
			Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
			Memperkuat kapasitas kelembagaan, produksi dan manajemen/ pengelolaan usaha

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		pengusaha-pengusaha pemula (start-up firms)	
	Terlaksananya pemberdayaan penduduk (keluarga) berpendapatan rendah sebagai pelaku dalam pembangunan	Mengembangkan ruang-ruang bagi partisipasi publik dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas dan industri rumah tangga	Meningkatkan peran strategis kelompok penduduk berpendapatan rendah dalam pembangunan
		Mengurangi Ketimpangan Pendapatan	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok penduduk miskin
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan berkembangnya sektor pertanian mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasiskan klaster industri di Kota Cimahi	Mengembangkan daya saing industrial sektor pertanian yang terintegrasi dengan pengembangan klaster-klaster industri unggulan di Kota Cimahi	Meningkatnya ketahanan pangan daerah
			Pengembangan rantai nilai (value chain development), integrasi vertikal, horizontal sektor pertanian, peternakan dan perikanan dan integrasi diagonal dengan klaster industri unggulan di Kota Cimahi
	Pengembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi	Menciptakan perdagangan dalam negeri yang efisien	Pengembangan hubungan kerja dan perlindungan terhadap konsumen.
			Peningkatan dan penataan sarana dan prasarana aktivitas ekonomi
	Berkembangnya sektor pariwisata	Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya dan produk lokal	Melakukan inventarisasi dan pemetaan daya tarik wisata budaya dan produk lokal
			Memberikan dukungan kepada organisasi dan komunitas yang bergerak dalam wisata budaya dan produk lokal
			Penyusunan strategi pemasaran wisata
Menurunkan angka pengangguran dan memberikan fasilitas kesempatan bekerja dan berusaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Cimahi	Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja bagi pencari kerja	Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyerapan tenaga kerja baik regional nasional maupun internasional	meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja
	Meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja	Meningkatkan penyelesaian kasus ketenagakerjaan	Perlindungan tenaga kerja
		Meningkatkan perluasan jejaring kerja, perlindungan hukum dan hak-hak bagi pekerja	
		Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan	
	Menciptakan transmigran yang berkualitas untuk meningkatkan taraf hidupnya	Meningkatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan transmigran yang berkualitas	Meningkatkan produktivitas dan pengembangan transmigran yang berkualitas
MISI II : MENINGKATKAN KESETARAAN DALAM PELAYANAN PUBLIK			
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas didukung sumberdaya manusia yang responsif	Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata dan memiliki daya saing	Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat	peningkatan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal yang merata dan berkualitas
			meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan menengah universal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			penyelenggaraan pendidikan alternatif bagi anak berkebutuhan khusus
		Peningkatan kualitas dan mutu layanan pendidikan	Peningkatan kualitas dan sebaran tenaga pendidik
			Peningkatan keterkaitan lulusan dengan dunia usaha
	Meningkatnya Derajat kesehatan bagi semua lapisan masyarakat	Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang merata
			penyediaan sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau
			Penyediaan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin
		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	peningkatan layanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat
			Peningkatan status gizi Masyarakat
			Peningkatan dan pengembangan kapasitas pelayanan rumah sakit
		Peningkatan Peran serta masyarakat dalam peningkatan kesehatan	Meningkatkan promosi dan pengembangan budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan RW siaga aktif di masyarakat
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Peningkatan sistem pelayanan kependudukan dan catatan sipil
	Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Penyediaan pelayanan keluarga berencana
			Peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga sejahtera
	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan yang responsif	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah	Peningkatan kompetensi dan keterampilan aparatur pemerintah
		Peningkatan kualitas pelayanan aparatur yang responsif	Peningkatan jenjang karir
	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Pemberdayaan gender dan perlindungan anak	Peningkatan kemampuan pelayanan yang berorientasi kepuasan publik
			Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Pemberdayaan peran pemuda dalam pembangunan	Peningkatan kesetaraan gender dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat
		meningkatnya sumberdaya olahraga	Pemberdayaan sumberdaya olahraga
	Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Pemberdayaan sumberdaya olahraga
		Pengembangan perlindungan sosial bagi masyarakat	Perlindungan sosial bagi masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Pengembangan perlindungan sosial bagi masyarakat	Penanggulangan bencana
MISI III : MENINGKATKAN KEMAMPUAN DALAM MENANGGAPI TANTANGAN, TUNTUTAN DAN KONDISI MASYARAKAT SECARA CEPAT			
Meningkatkan manajemen pemerintahan profesional dan akuntabel	Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan kepada semua masyarakat	Peningkatan pelayanan statistik	Peningkatan manajemen statistik daerah Terbangunnya basis data yang akurat sebagai sumber informasi pelaksanaan pembangunan
Meningkatkan manajemen pemerintahan profesional dan akuntabel	Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan kepada semua masyarakat	Peningkatan pelayanan kearsipan dan perpustakaan	Peningkatan manajemen kearsipan
	Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pemerintahan	Peningkatan sistem administrasi pertanahan	Peningkatan sistem pelayanan administrasi pertanahan
		Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang IT
			Pengembangan sistem informasi pelayanan publik
			Penyediaan sarana dan prasarana infokom
Meningkatkan manajemen pemerintahan profesional dan akuntabel	Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pemerintahan	Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik	Peningkatan Regulasi dan Kebijakan Bidang informasi dan komunikasi
Meningkatkan manajemen pemerintahan profesional dan akuntabel	Meningkatkan pelayanan manajemen informasi pemerintahan kepada publik	Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik	Peningkatan Regulasi dan Kebijakan Bidang informasi dan komunikasi Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah dan pemerintahan
MISI IV : MEMPERTAHANKAN DINAMIKA PERIKEHIDUPAN DALAM PEMBANGUNAN			
Mewujudkan iklim pemerintahan dan pembangunan yang dinamis (partisipasi)	Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan politis dan demokratis	Peningkatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan politis, demokratis, berbangsa dan bernegara	Meningkatkan demokratisasi Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
		Peningkatan kapasitas dan peran DPRD dalam pembangunan kehidupan politis dan demokrasi	Meningkatkan Kualitas Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Yang Bertanggung Jawab
	Meningkatnya kinerja pemerintahan kota dalam pembangunan	Pengembangan kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang efisien dan efektif	Penataan kebutuhan sumberdaya organisasi Penataan kelambagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien
		Peningkatan kesadaran hukum masyarakat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Meningkatkan penegakan hukum dan HAM meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		pengembangan sistem dan evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan	Peningkatan sistem administrasi dan pengendalian kinerja kecamatan dan kelurahan
			Terkendalinya dan terevaluasinya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dialokasikan dalam APBD Kota setiap tahun anggaran dan terkendalinya pelaksanaan pengawasan internal atas kebijakan Kepala Daerah
		Pemantapan otonomi daerah	peningkatan koordinasi otonomi daerah
			Penyediaan pranata dasar pemantapan otonomi daerah
		Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Menerapkan sistem keuangan daerah yang berbasis sistem informasi
			menerapkan sistem keuangan daerah yang berbasis sistem informasi
			menerapkan sistem keuangan daerah yang berbasis sistem informasi
			menerapkan sistem keuangan daerah yang berbasis sistem informasi
		Pengembangan kerjasama antar daerah	melakukan terobosan kerjasama antar daerah
		Pengembangan mekanisme pengaduan pembangunan	menyediakan saluran pengaduan melalui berbagai alat dan media
			menyediakan saluran pengaduan melalui berbagai alat dan media
		Fasilitasi Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Transparan Dan Akuntabel	Meningkatkan Dan Mengembangkan Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Di Kota Cimahi
	Meningkatnya partisipasi warga kota dalam pembangunan	Peningkatan kualitas produk perencanaan tahunan, dan 5 tahunan, dan sektoral	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dan Jangka menengah
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi		Meningkatkan Kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan
			Peningkatan peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan
			Peningkatan Kualitas Perencanaan bidang ekonomi
			Peningkatan Kualitas Perencanaan bidang sosbud
			Peningkatan Kualitas Perencanaan bidang Pemerintahan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan Kualitas Perencanaan bidang Fisik
		Peningkatan Sinergitas perencanaan pembangunan	Meningkatkan kapasitas aparatur dan Kelembagaan perencanaan
		Penyediaan data dasar dan sektoral untuk perencanaan pembangunan yang valid dan up to date	Peningkatan penyediaan dan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan
			Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar SKPD, Provinsi dan pemerintah Pusat
		Pengembangan sistem informasi pembangunan daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring
		Peningkatan lembaga keswadayaan masyarakat	mendukung peningkatan kapasitas lembaga keswadayaan masyarakat
MISI V : MEWUJUDKAN KESALEHAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA			
Menjadikan masyarakat Kota Cimahi yang disiplin, bermoral dan toleran	Meningkatnya disiplin dan toleransi masyarakat kota Cimahi	Peningkatan kesadaran warga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyaratan untuk peningkatan ketertiban dan ketentraman
		Peningkatan kualitas moral dan kehidupan keagamaan	
	Berkembangnya budaya masyarakat kota Cimahi	Pengembangan budaya lokal	pembinaan budaya lokal
		Pengembangan pusat-pusat kebudayaan	pembinaan sanggar seni dan organisasi budaya
Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang toleran dan kondusif	Peningkatan kesadaran dan toleransi antar umat beragama	pembinaan masyarakat dan lembaga keagamaan	
MISI VI : MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN			
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas umum serta infrastruktur penunjang perekonomian kota	Mengembangkan infrastruktur transportasi disertai dengan manajemen yang handal dan terintegrasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan	Pengembangan infrastruktur jalan yang handal dalam mendorong daya saing kota
		Mengembangkan jaringan jalan lingkaran luar yang berfungsi untuk memfasilitasi <i>through traffic</i>	
		Meningkatkan tingkat kemantapan jalan kota dan jalan lingkungan	
	Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum penumpang	Mengembangkan jaringan pelayanan angkutan umum dalam kota	Pengembangan pelayanan angkutan jalan yang terintegrasi
		Mengembangkan jaringan prasarana angkutan umum dalam kota	
		Mengembangkan fasilitas perlengkapan jalan	
		Mengembangkan fasilitas perlengkapan jalan	
		Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Mengembangkan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam bidang perhubungan	Pengembangan manajemen transportasi kota yang efektif dan efisien dan terintegrasi
		Menerapkan manajemen lalu lintas yang terintegrasi	
		Menerapkan manajemen perpajakan yang efisien	
		Mengintegrasikan sistem transportasi di wilayah perbatasan dengan Kab/Kota sekitar	
	Meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi bidang perhubungan	Mengembangkan sistem informasi dalam bidang perhubungan	Pengembangan sistem informasi dalam bidang perhubungan
	Mengembangkan infrastruktur air bersih dan sanitasi dasar	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih yang aman	
		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang aman	Pengembangan sistem pelayanan air limbah domestik yang aman
		Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik skala komunal, kawasan dan kota	
		Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan	
		Meningkatkan Pelayanan Pengangkutan Sampah	Pengembangan sistem pelayanan persampahan yang terintegrasi
		Mengurangi timbulan akhir sampah melalui pengembangan komposting, 3R dan teknologi lainnya	
		Meningkatkan kualitas jaringan drainase kota	
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas sosial	Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/ rumah negara	Meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial dan pemerintahan	Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan
		Meningkatkan keamanan, keserasian dan ketahanan bangunan gedung fasilitas sosial dan pemerintahan	
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan perumahan dan permukiman	Mengembangkan perumahan dan permukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar umum	Meningkatkan ketersediaan dan cakupan rumah layak huni	Peningkatan kualitas perumahan permukiman dengan prasarana sarana dasar umum
		Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat	
		Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat	
		Menciptakan lingkungan permukiman yang siaga dan aman dari bahaya kebakaran	
		Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan TPU	
		Menciptakan kondisi lingkungan perumahan permukiman tertata yang mencerminkan wajah kota	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keberlanjutan pembangunan	Mewujudkan penataan ruang kota yang berkelanjutan	Mengembangkan sistem pelayanan perijinan bangunan yang efisien	Pelaksanaan perencanaan ruang kota yang berkelanjutan
		Mengembangkan data dan informasi spasial yang informatif	
		Mengembangkan rencana tata ruang yang komprehensif dan terintegrasi	
		Meningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang	Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang
		Memperkecil penyimpangan pelaksanaan rencana tata ruang	
	Mewujudkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang	Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
		Mengembangkan RTH publik	Pengembangan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan
		Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran air, tanah dan udara	Pengembangan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan
		Melaksanakan standar operasional pelayanan pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan lahan	Peningkatan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan lahan
		Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan lahan	Peningkatan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan lahan
		Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan lahan	Pengembangan pelayanan informasi status lingkungan
		Mengembangkan pelayanan informasi status lingkungan kota	

6.3 KEBIJAKAN KEWILAYAHAN

Pada dasarnya pembangunan yang dilaksanakan di Kota Cimahi selama lebih dari satu dekade setelah otonomi, telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan kualitas wilayah yang ada di Kota Cimahi. Diharapkan setiap wilayah dapat berkembang sesuai potensi dan kondisi yang ada serta dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di masing-masing wilayah. Mengingat setiap wilayah memiliki potensi dan

permasalahan tersendiri maka perlu dipertimbangkan adanya fokus pembangunan berdasarkan wilayah. Pengembangan kewilayahan ditandai dengan adanya penetapan pusat-pusat pelayanan baru, yang diharapkan dapat menjadi titik tumbuh perekonomian dan jasa lainnya, yang melayani sub-sub wilayah kota sesuai dengan pembagian dalam RTRW Kota Cimahi.

Fokus pembangunan daerah Kota Cimahi tahun 2012-2017 diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, baik dalam konteks dalam wilayah Kota Cimahi, maupun dengan kota/kabupaten yang berbatasan, guna mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Kota Cimahi. Pembangunan infrastruktur ini juga dimaksudkan agar dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal berdasarkan pembagian klasternya, sehingga proses produksi dan distribusi bisa lebih efisien.

Penetapan kebijakan pengembangan kewilayahan Kota Cimahi juga tidak terlepas dari kebijakan kewilayahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam kebijakan pengembangan kewilayahan Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi termasuk ke dalam WPP Priangan yang difungsikan sebagai bagian dari wilayah inti pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung serta merupakan simpul pelayanan jasa perkotaan bagi PKN Metropolitan Bandung. Hal ini secara hierarki perencanaan sudah diadopsi dalam RTRW Kota Cimahi yang juga menjadi salah satu rujukan penyusunan RPJM Daerah Kota Cimahi.

Secara umum kebijakan pembangunan kewilayahan pada RPJM Daerah disesuaikan dengan kebijakan pengembangan struktur dan pengembangan kawasan pada RTRW Kota Cimahi. Kebijakan pengembangan struktur ruang Kota Cimahi, terdiri atas:

1. Pengembangan wilayah melalui pembagian 5 (lima) Sub Wilayah Kota (SWK) sehingga lebih efisien;
2. Mendorong pengembangan kawasan-kawasan strategis kota;
3. Peningkatkan peran pusat-pusat pelayanan kota sesuai fungsi yang telah ditetapkan, yaitu Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Lingkungan (PL);
4. Peningkatan fungsi Kota Cimahi dalam pengembangan KK Cekungan Bandung Raya sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif; dan
5. Penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan sarana dan prasarana wilayah yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota.

Sementara itu, kebijakan pengembangan kawasan strategis kota dilaksanakan melalui penetapan kawasan strategis lingkungan, daerah rawan bencana alam dan RTH, kawasan strategis sosial budaya di Kampung Cireundeu Kelurahan Leuwigajah, serta kawasan strategis ekonomi di sepanjang koridor Jalan Nasional, Alun-alun dan

Baros. Selanjutnya dalam rangka mengefisiensikan pengembangan dan pembangunan di Kota Cimahi, pembagian wilayah ke dalam 5 (lima) sub wilayah kota (SWK) merupakan salah satu cara yang ditetapkan dalam RTRW. Masing-masing SWK didelineasi berdasarkan kesamaan fungsi dan keterpaduan pelayanan. Pembagian wilayah SWK di Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

- a. **SWK A**, mencakup Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cimahi dan sebagian Kelurahan Padasuka, dengan pengembangan wilayah terutama untuk perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa serta pengembangan kawasan pariwisata;
- b. **SWK B**, mencakup Kelurahan Cibabat dan Kelurahan Pasirkaliki, dengan pengembangan wilayah terutama untuk perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa serta pendidikan tinggi;
- c. **SWK C**, mencakup Kelurahan Karang Mekar, Kelurahan Cigugur Tengah dan Kelurahan Cibeureum dan sebagian Kelurahan Baros, dengan pengembangan wilayah terutama untuk perumahan, perkantoran, militer, perdagangan dan jasa, industri serta industri kreatif berbasis telematika;
- d. **SWK D**, mencakup Kelurahan Melong, Kelurahan Utama, dan sebagian Kelurahan Leuwigajah, dengan pengembangan wilayah terutama untuk perumahan, perdagangan dan jasa serta industri; dan
- e. **SWK E**, mencakup Kelurahan Cibeber, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Setiamanah, sebagian Kelurahan Leuwigajah dan sebagian Kelurahan Baros, dengan pengembangan wilayah terutama untuk perumahan, industri, perdagangan dan jasa, militer, pendidikan tinggi, dan pariwisata.

Selanjutnya, sebagai penjabaran detail dari kebijakan-kebijakan yang menyangkut kewilayahan maka disusunlah beberapa strategi dari masing-masing kebijakan tersebut, yang dikelompokkan berdasarkan pembagian wilayah Kecamatan seperti yang diuraikan di bawah ini:

A. Kecamatan Cimahi Utara;

Secara topografis Kecamatan Cimahi Utara terdiri dari dataran yang memiliki tingkat kelandaian yang curam. Wilayah ini juga secara fungsional termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara yang umumnya memiliki fungsi lindung sebagai kawasan resapan air. Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian Kawasan Bandung Utara (KBU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadikan wilayah Kecamatan Cimahi Utara mempunyai batasan dalam hal pengembangan fisik terutama yang bersifat ekstensif. Oleh karena itu sebagai penjelasan turunan dari kebijakan kewilayahan Kota Cimahi, berikut ini diuraikan strategi-strategi yang ditetapkan untuk wilayah Kecamatan Cimahi Utara:

- a. mengembangkan RTH kota;

- b. mengendalikan perkembangan kegiatan perumahan sesuai dengan Peraturan perundangan yang mengatur pengendalian pemanfaatan ruang di KBU;
- c. mengembangkan kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- d. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan Peraturan perundangan yang mengatur pengendalian pemanfaatan ruang di KBU; dan
- e. mempertahankan dan melindungi kawasan resapan air.
- f. mengendalikan perkembangan perumahan sesuai dengan Peraturan perundangan yang mengatur pengendalian pemanfaatan ruang di KBU;
- g. mengembangkan kawasan pendidikan tinggi; dan

B. Kecamatan Cimahi Tengah;

Kecamatan Cimahi Tengah merupakan wilayah yang penggunaan lahan saat ini didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa, perumahan dan pusat pemerintahan (Kantor DPRD). Dalam perkembangannya, wilayah Kecamatan Cimahi Utara ini juga masih dipertahankan sebagai kawasan dengan fungsi utama yang sama. Satu yang menjadi fokus baru adalah pengembangan pusat pelayanan kota yang baru di Baros. Pengembangan ini diharapkan bisa menjadi pusat baru yang mempunyai tingkat aksesibilitas tinggi karena berada di sekitar jalan akses menuju gerbang Tol Baros. Disamping itu Kota Cimahi juga telah memiliki Gedung Baros Informasi Teknologi Creative (BITC) yang menjadi pusat pengembangan telematika sebagai salah satu klaster industri kreatif yang menjadi unggulan Kota Cimahi.

Strategi-strategi yang direncanakan akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang;
- b. menata kawasan militer menjadi kawasan *heritage* kota; dan
- c. mengembangkan kegiatan jasa dan perdagangan yang menunjang perkembangan kegiatan di PPK Baros; dan
- d. mengembangkan RTH kota.

C. Kecamatan Cimahi Selatan;

Melihat fungsi kawasan yang berada di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan saat ini yang masih ditandai adanya kawasan industri, perumahan serta perdagangan dan jasa. Isu peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian dalam perencanaan wilayah di Kecamatan Cimahi Selatan, terutama berkaitan dengan keberadaan industri-industri yang masih bersifat polutif dan konsumtif terhadap air. Dengan latar belakang kondisi tersebut maka disusun strategi pengembangan wilayah untuk Kecamatan Cimahi Selatan sebagai berikut:

- a. mempertahankan dan melindungi kawasan resapan air
- b. mengembangkan kegiatan pendukung perkembangan industri kreatif berbasis telematika di PPK Baros;
- c. mengembangkan RTH.
- d. mengendalikan perkembangan perumahan sesuai dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang;
- e. menata kawasan pariwisata berbasis lingkungan; dan
- f. menata kawasan militer menjadi kawasan *heritage* kota;

Disamping penjabaran strategi dari kebijakan kewilayahan pengembangan SWK, ada pula kebijakan pengembangan kawasan strategis kota. Penetapan kawasan strategis Kota Cimahi didasarkan pada kebijakan pengembangan kawasan strategis Nasional yaitu KSN Cekungan Bandung dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis Provinsi Jawa Barat yaitu KSP Bandung Utara dengan sudut kepentingan lingkungan hidup. Berdasarkan kedua tinjauan tersebut, maka ditetapkanlah Kawasan strategis Kota (KSK) Cimahi yang terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu KSK yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan:

- 1) ekonomi;
- 2) sosial dan budaya; dan
- 3) fungsi dan daya dukung lingkungan.

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

1. Kawasan Perdagangan dan Jasa yang meliputi kawasan perdagangan dan jasa pusat kota dan kawasan perdagangan dan jasa pusat kota baru, yaitu:
 - a. kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Kota terletak di Alun-Alun Kota Cimahi meliputi Kelurahan Cimahi, Kelurahan Setiamanah dan Kelurahan Karang Mekar;
 - b. kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Kota Baru terletak di Baros meliputi Kelurahan Baros, Kelurahan Utama dan Kelurahan Cigugur Tengah;
2. Kawasan Industri di Kota Cimahi meliputi Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Utama, dan Kelurahan Melong.

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi :

1. Kampung Cireundeu sebagai wisata budaya lokal di Kelurahan Leuwigajah;
2. Situ Ciseupan sebagai objek wisata air di Kelurahan Cibeber;
3. Warung Contong sebagai objek ekowisata dan olahraga di Kelurahan Setiamanah;
4. Padasuka sebagai fasilitas olahraga (*veledrome*) di Kelurahan Padasuka;
5. Jalan Kolmas Citeureup sebagai wisata kampung seni di Kelurahan Citeureup.

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagai kawasan lindung meliputi :

1. dibagian selatan dari Pasir Kuntul di Kelurahan Cibeber sampai Cireunde di Kelurahan Leuwigajah; dan
2. dibagian utara dari Cileuweung di Kelurahan Cipageran sampai Kamarung di Kelurahan Citeureup.

Penetapan KSK ini diharapkan dapat menjadi arahan pengembangan kawasan khusus yang dinilai mempunyai daya dorong dan daya ungkit untuk masing-masing fungsi khususnya. Oleh karena itu maka kebijakan dalam RPJM juga diarahkan untuk dapat menjadi tahapan yang bernilai bagi terlaksananya rencana pemanfaatan dan pengendalian ruang yang tercantum dalam RTRW Kota Cimahi.

6.4 ARAH KEBIJAKAN SISTEM INOVASI KOTA CIMAHI

Peningkatan kegiatan perekonomian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan penduduk secara lebih merata dan mampu memperbaiki distribusi pendapatan penduduk. Usaha untuk lebih meningkatkan pendapatan secara lebih luas dapat dilakukan dengan menggerakkan kegiatan ekonomi yang mampu melibatkan lebih banyak sumber daya lokal berupa tenaga kerja lokal, bahan baku, dan kreatifitas yang berasal dari pengetahuan dan budaya (kearifan) lokal daerah itu sendiri (*local wisdom*). Dalam kerangka berfikir ini, Kota Cimahi mencoba memadukan pendekatan sektoral dan lokasi. Pendekatan untuk mengembangkan perekonomian dengan melihat jenis dan lokasi usaha disebut klaster industri. Hal ini dimaksudkan untuk menggerakkan perekonomian dengan menjalankan sebuah proses di mana Pemerintah, masyarakat (publik) dan sektor non-pemerintah bekerjasama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Untuk mengembangkan klaster-klaster industri perlu dilakukan sinergitas diantara klaster tersebut. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan rantai nilai. Untuk melakukan pensinergian di antara klaster-klaster industri terpilih perlu integrasi Sistem Inovasi Daerah Kota Cimahi dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Kunci keberhasilan implementasi penguatan sistem inovasi adalah **koherensi kebijakan inovasi**. Koherensi kebijakan inovasi menyangkut keterpaduan dan harmonisasi, sinergi (saling mengisi dan memperkuat) terutama antar pola kebijakan ekonomi, industri dan pengetahuan/ teknologi, baik "di daerah" maupun "antara pusat dan daerah" serta "antardaerah", sehingga tidak saling bertolak belakang.

Penguatan sistem inovasi di daerah dijalankan melalui 5 pilar inisiatif strategis yaitu :

1. Penguatan Sistem Inovasi Daerah
2. Penguatan Klaster industri
3. Penguatan Jaringan Inovasi
4. Penguatan Teknoprener
5. Penguatan Tematik Daerah

Arah kebijakan untuk melandasi implementasi setiap strategi penguatan sistem inovasi tersebut meliputi 6 (enam) Kerangka Kebijakan Inovasi sebagai berikut :

1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis.
2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/ litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM.
3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang.
4. Mendorong budaya inovasi.
5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah.
6. Penyelarasan dengan perkembangan global.

Dalam upaya memadukan kerangka kebijakan inovasi dengan kebijakan pembangunan di daerah, Kota Cimahi telah menyusun kerangka sistem inovasi daerah yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 6.2 Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Cimahi

AGENDA KEBIJAKAN INOVASI	INISIATIF STRATEGIS				
	Penguatan SID	Penguatan Klaster Tekno-Industri	Penguatan Jaringan Inovasi	Pengembangan Tematik	Pengembangan Teknoprener
Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	1. Peningkatan iklim investasi dan bisnis melalui pengembang Sistem dan Prosedur Perizinan	1. Pengembangan klaster industri unggulan daerah	1. Pengembangan Technopark Kreatif di daerah (misi 6)	1. Pengembangan Green Innovation Development (energi, air bersih, pengolahan limbah, transportasi dan TIK)	1. Pengembangan Kerangka Legal Pusat Inovasi
	2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah		2. Pengembangan <i>E-Development</i> Daerah (<i>E-Society</i>) (misi 3)		2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pusat Inovasi
	3. Pengembangan Insentif untuk Inovasi dan Bisnis				4. Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi

AGENDA KEBIJAKAN INOVASI	INISIATIF STRATEGIS				
	Penguatan SID	Penguatan Kluster Tekno-Industri	Penguatan Jaringan Inovasi	Pengembangan Tematik	Pengembangan Teknopreneur
Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM.	4. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan	2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan kluster industri	3. Penerapan Metode Tingkat Kesiapan Teknologi (<i>Technology Readiness Level/TRL</i>)	2. Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi Profesi Audit Teknologi	5. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan <i>Bussines Development Service Provider/BDSP</i>)
			4. Pengembangan Manajemen Pengetahuan		6. Penyediaan dan penguatan SDM Pengelola Pusat Inovasi
					7. Peningkatan kemampuan kapasitas absorpsi UMKM
Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang.	5. Pengembangan Ruang publik kreatif (<i>creative-cultural centres</i>)	3. Pengembangan Forum kerjasama kluster industri unggulan daerah	5. Pengembangan jaringan inovasi dan telecenter	3. Membangun forum komunikasi <i>Green Innovation</i>	8. Pengembangan Teknopreneur terutama kepada para pemuda
	6. Pengembangan Kerjasama antar lembaga untuk menumbuhkan program yang strategis dan inovatif		6. Perekrutan, pelatihan dan pelibatan Relawan Indonesia Berinovasi		
Mendorong budaya inovasi.	7. Apresiasi Inovasi	4. Alih pengetahuan (Iptek) kreativitas keinovasian dan kewirausahaan pada stakeholders kluster industri	7. Inventarisasi dan pemanfaatan inovasi (teknologi masyarakat) di daerah	4. Alih pengetahuan tentang audit teknologi	9. Pengembangan Kurikulum Teknopreneur dan kewirausahaan di Lembaga Pendidikan
	8. Perkuatan Sekolah Kejuruan berkualitas setara dengan standar internasional (minimal ASEAN)				
Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan kluster industri nasional dan daerah.	9. Pengembangan kerjasama antar daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bersama	5. Forum kemitraan kluster industri, kemitraan antar daerah, dan kemitraan daerah-pusat	8. Pengembangan dan penerapan Metode Koordinasi Terbuka/MKT (<i>Open Method of Coordination/OMC</i>) di daerah	5. Peningkatan pelaksanaan audit teknologi berbasis green innovation	10. Pengembangan Kerjasama Program Teknoprenership dalam lingkup nasional
		6. Penguatan rantai nilai kluster industri			
Penyelarasan dengan perkembangan global.	10. Pengkajian 'sister region atau city dengan luar negeri	7. Promosi internasional kluster industri unggulan daerah, sosialisasi HKI dan SNI	9. Forum kerjasama internasional jaringan inovasi	6. Membangun standar dan norma audit teknologi untuk green innovation	11. Fasilitasi HKI bagi UMKM
					12. Pengembangan Kerjasama internasional Program Teknoprenership

BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 Kebijakan Umum Pembangunan Daerah

Kebijakan umum pembangunan merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Pemerintah Daerah. Kebijakan umum ini digunakan sebagai arah dan pedoman bagi SKPD dan lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Adapun kebijakan umum Pemerintah Kota Cimahi diarahkan pada:

Misi I : Mewujudkan Kreativitas Dalam Segala Bidang

1. Urusan Pendidikan

- a. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
- b. Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal

2. Perencanaan Pembangunan

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan dan/atau inovasi dan bisnis berdasarkan potensi lokal
- b. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM
- c. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
- d. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal

3. Lingkungan Hidup

- a. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal

- b. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan dan/atau inovasi dan bisnis berdasarkan potensi lokal

4. Urusan Ketahanan Pangan

- Meningkatkan ketahanan pangan daerah

5. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok penduduk miskin

6. Komunikasi dan Informatika

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan dan/atau inovasi dan bisnis berdasarkan potensi lokal
- b. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal

7. Urusan Ketenagakerjaan

- a. Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja
- b. Perlindungan tenaga kerja

8. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan dan/atau inovasi dan bisnis berdasarkan potensi lokal
- b. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM
- c. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
- d. Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
- e. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
- f. Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal

- g. Meningkatkan peran strategis kelompok penduduk berpendapatan rendah dalam pembangunan
- h. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok penduduk miskin

9. Urusan Penanaman Modal

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan dan/atau inovasi dan bisnis berdasarkan potensi lokal
- b. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM
- c. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
- d. Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
- e. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
- f. Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal

10. Kebudayaan

- a. Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal

11. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
- b. Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal

12. Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan dan/atau inovasi dan bisnis berdasarkan potensi lokal

- b. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal

14. Urusan Pertanian

- a. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
- b. Pengembangan rantai nilai (value chain development), integrasi vertikal, horizontal sektor pertanian, peternakan dan perikanan dan integrasi diagonal dengan klaster industri lainnya

15. Urusan Pariwisata

- a. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
- b. Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
- c. Melakukan inventarisasi dan pemetaan daya tarik wisata budaya dan produk lokal
- d. Memberikan dukungan kepada organisasi dan komunitas yang bergerak dalam wisata budaya dan produk lokal
- e. Penyusunan strategi pemasaran wisata

16. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Pengembangan rantai nilai (value chain development), integrasi vertikal, horizontal sektor pertanian, peternakan dan perikanan dan integrasi diagonal dengan klaster industri lainnya

17. Urusan Perdagangan

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan dan/atau inovasi dan bisnis berdasarkan potensi lokal
- b. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM

- c. Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
- d. Pengembangan rantai nilai (value chain development), integrasi vertikal, horizontal sektor pertanian, peternakan dan perikanan dan integrasi diagonal dengan klaster industri lainnya
- e. Pengembangan hubungan kerja dan perlindungan terhadap konsumen
- f. Peningkatan dan penataan sarana dan prasarana aktivitas ekonomi

18. Urusan Perindustrian

- a. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM
- b. Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
- c. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal
- d. Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal

19. Urusan Transmigrasi

- Meningkatkan produktivitas dan pengembangan transmigran yang berkualitas

MISI II : Meningkatkan Kesetaraan Dalam Pelayanan Publik

1. Urusan Pendidikan

- a. Peningkatan pendidikan formal dan non formal yang merata dan berkualitas
- b. Penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun (pendidikan menengah universal)
- c. Penyelenggaraan pendidikan alternatif bagi anak berkebutuhan khusus
- d. Peningkatan kualitas dan sebaran tenaga pendidik
- e. Peningkatan keterkaitan lulusan dengan dunia usaha

2. Urusan Kesehatan

- a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang merata
- b. Penyediaan sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau
- c. Penyediaan sistem jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat

- d. Peningkatan layanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat
- e. Peningkatan status gizi masyarakat
- f. Peningkatan dan pengembangan kapasitas pelayanan rumah sakit
- g. Meningkatkan promosi dan pengembangan budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan RW siaga aktif di masyarakat
- 3. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**
 - a. Penyediaan pelayanan keluarga berencana
 - b. Peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga sejahtera
- 4. Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**
 - a. Peningkatan kompetensi dan keterampilan aparatur pemerintah
 - b. Peningkatan jenjang karir
 - c. Peningkatan kemampuan pelayanan yang berorientasi konsumen
- 5. Urusan Sosial**
 - a. Perlindungan sosial bagi masyarakat
 - b. Penanggulangan bencana
- 6. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
 - a. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak
 - b. Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan
- 7. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**
 - a. Pemberdayaan pemuda dalam proses pembangunan
 - b. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
- 8. Urusan Kependudukan**
 - a. Peningkatan sistem pelayanan kependudukan dan catatan sipil

MISI III : Meningkatkan Kemampuan Dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi Masyarakat Secara Cepat

- 1. Urusan Statistik**
 - a. Peningkatan manajemen statistik daerah
 - b. Terbangunnya basis data yang akurat sebagai sumber informasi bagi perencanaan pembangunan ekonomi Kota
- 2. Urusan Kearsipan**
 - Peningkatan manajemen kearsipan
- 3. Urusan Perpustakaan**

- Peningkatan manajemen perpustakaan

4. Urusan Pertanahan

- Peningkatan sistem pelayanan administrasi pertanahan

5. Urusan Komunikasi Dan Informatika

- a. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang IT
- b. Pengembangan sistem informasi pelayanan publik
- c. Penyediaan sarana dan prasarana infokom
- d. Peningkatan regulasi dan kebijakan bidang informasi dan komunikasi

MISI IV : Mempertahankan Dinamika Perikehidupan Dalam Pembangunan

1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

2. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

- a. Meningkatkan kualitas kinerja lembaga perwakilan rakyat yang bertanggung jawab
- b. Penataan kebutuhan sumberdaya organisasi
- c. Penataan kelambagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien
- d. Meningkatkan penegakan hukum dan HAM
- e. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan
- f. Peningkatan koordinasi otonomi daerah
- g. Penyediaan pranata dasar pementapan otonomi daerah
- h. Menerapkan sistem keuangan daerah yang berbasis sistem informasi
- i. Melakukan terobosan kerjasama antar daerah
- j. Menyediakan saluran pengaduan melalui berbagai alat dan media

3. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Peningkatan peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan di Kota Cimahi
- c. Meningkatkan dan Mengembangkan Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa di Kota Cimahi
- d. Peningkatan peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan

- e. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan
- f. Terkendalinya dan terevaluasinya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dialokasikan dalam APBD Kota setiap tahun anggaran dan terkendalinya pelaksanaan pengawasan internal atas kebijakan Kepala Daerah
- g. Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dan Jangka menengah
- h. Peningkatan kualitas perencanaan bidang ekonomi
- i. Peningkatan kualitas perencanaan bidang sosbud
- j. Peningkatan kualitas perencanaan bidang Pemerintahan
- k. Peningkatan kualitas perencanaan bidang Fisik
- l. Meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan perencanaan
- m. Peningkatan penyediaan dan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan
- n. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar SKPD, Provinsi dan Pemerintah Pusat
- o. Meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi dan monitoring
- p. Berperan aktif dalam keanggotaan APEKSI

4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Mendukung peningkatan kapasitas lembaga keswadayaan masyarakat

MISI V : Mewujudkan Kesalehan Sosial Dalam Masyarakat Yang Berakhlak Mulia

1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- Pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan ketertiban dan ketentraman

2. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

- Pembinaan kehidupan keagamaan

3. Urusan Kebudayaan

- a. Pembinaan budaya lokal
- b. Pembinaan sanggar seni dan organisasi budaya

4. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- Pembinaan masyarakat dan lembaga keagamaan

MISI VI : Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan

1. Urusan Perhubungan

- a. Pengembangan pelayanan angkutan jalan yang terintegrasi
- b. Pengembangan manajemen transportasi kota yang efektif dan efisien dan terintegrasi

2. Urusan Komunikasi Dan Informatika

- Pengembangan sistem informasi dalam bidang perhubungan

3. Urusan pekerjaan Umum

- a. Pengembangan infrastruktur jalan yang handal dalam mendorong daya saing kota
- b. Pengembangan sistem drainase jalan kota yang handal
- c. Pengembangan sistem drainase perkotaan yang handal dan terintegrasi

4. Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

- Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan

5. Urusan Perumahan

- Peningkatan kualitas perumahan permukiman dengan prasarana sarana dasar umum

6. Urusan Penataan Ruang

- a. Pelaksanaan perencanaan ruang kota yang berkelanjutan
- b. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang
- c. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
- d. Pengembangan pasar dan distribusi barang

7. Urusan lingkungan Hidup

- a. Pengembangan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan
- b. Peningkatan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- c. Peningkatan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan lahan
- d. Pengembangan pelayanan informasi status lingkungan

8. Urusan Perumahan

- Pengembangan sistem pelayanan air limbah domestik yang aman

9. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Pengembangan sistem pelayanan persampahan yang terintegrasi
- b. Pengembangan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan

7.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program – program pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan beserta Indikasi kinerja yang diharapkan dapat tercapai selama periode RPJMD 2012 – 2017.

Adapun secara lengkap program – program pembangunan daerah Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 dapat dilihat pada Tabel 7.1 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Program Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
MISI I : MEWUJUDKAN KREATIVITAS DALAM SEGALA BIDANG						
Meningkatnya daya saing daerah, kohesi sosial dan berkembangnya ekosistem inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah-tangga	Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi perkembangan kreativitas-keinovasian berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga untuk mendukung perkuatan sistem inovasi daerah	Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan dan/atau inovasi dan bisnis berdasarkan potensi lokal	1. Peningkatan iklim investasi dan bisnis melalui pengembang Sistem dan Prosedur Perizinan 2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 3. Pengembangan Insentif untuk Inovasi dan Bisnis 4. Pengembangan klaster industri unggulan daerah 5. Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal	KPPT
			1. Peningkatan iklim investasi dan bisnis melalui pengembang Sistem dan Prosedur Perizinan 2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 3. Pengembangan Insentif untuk Inovasi dan Bisnis 4. Pengembangan klaster industri unggulan daerah 5. Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	SETDA

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			1. Peningkatan iklim investasi dan bisnis melalui pengembang Sistem dan Prosedur Perizinan 2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 3. Pengembangan Insentif untuk Inovasi dan Bisnis 4. Pengembangan klaster industri unggulan daerah 5. Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
			1. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 2. Pengembangan klaster industri unggulan daerah 3. Pengembangan Kerangka Legal Pusat Inovasi 4. Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			1. Pengembangan Insentif untuk Inovasi dan Bisnis 2. Pengembangan klaster industri unggulan daerah 3. Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
			Pengembangan E-Development Daerah (E-Society)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa	Komunikasi dan Informatika	KAPPDE

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			1. Pengembangan Creative Technopark di daerah	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	DKP
			2. Pengembangan Ruang public kreatif (<i>creative cultural centers</i>)			
			Pengembangan Green Innovation Development (energi, air bersih, pengolahan limbah, transportasi dan TIK)	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Pusat Inovasi	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Dinas PU
		Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM	1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Pengembangan Manajemen Pengetahuan 4. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP) 5. Peningkatan kemampuan kapasitas absorpsi UMKM	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Ippek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Penerapan Metode Tingkat Kesiapan Teknologi (<i>Technology Readiness Level/ TRL</i>) 4. Pengembangan Manajemen Pengetahuan 5. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP) 6. Peningkatan kemampuan kapasitas absorpsi UMKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Ippek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Pengembangan Manajemen Pengetahuan 4. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Development Service Provider/ BDSP)			
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Penerapan Metode Tingkat Kesiapan Teknologi (<i>Technology Readiness Level/ TRL</i>) 3. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP)	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			Pengembangan Manajemen Pengetahuan	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Pengembangan Manajemen Pengetahuan	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Penerapan Metode Tingkat Kesiapan Teknologi (<i>Technology Readiness Level/ TRL</i>) 4. Pengembangan Manajemen Pengetahuan 5. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP) 6. Penyediaan dan penguatan SDM Pengelola Pusat Inovasi 7. Peningkatan kemampuan kapasitas absorpsi UMKM			
			1. Penerapan Metode Tingkat Kesiapan Teknologi (<i>Technology Readiness Level/ TRL</i>) 2. Pengembangan Manajemen Pengetahuan 3. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP) 4. Peningkatan kemampuan kapasitas absorpsi UMKM	Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal	1. Pengembangan Kerjasama antar lembaga untuk menumbuhkan program yang strategis dan inovatif 2. Pengembangan Forum kerjasama klaster industri unggulan daerah	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			1. Pengembangan Kerjasama antar lembaga untuk menumbuhkan program yang strategis dan inovatif 2. Pengembangan Forum kerjasama klaster industri unggulan daerah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	SETDA
			1. Pengembangan Forum kerjasama klaster industri unggulan daerah 2. Pengembangan jaringan inovasi dan telecenter	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			1. Pengembangan Kerjasama antar lembaga untuk menumbuhkan program yang strategis dan inovatif 2. Pengembangan Forum kerjasama klaster industri unggulan daerah	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
			Pengembangan jaringan inovasi dan telecenter	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	KPPDE
			Perekrutan, pelatihan dan pelibatan Relawan Indonesia Berinovasi	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DISDIKPORA
			Pengembangan Teknopreneur terutama kepada para pemuda	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Pemuda dan Olah Raga	DISDIKPORA

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal	Membangun forum komunikasi Green Innovation	Program Peningkatan Edukasi dan Partisipasi Masyarakat dalam bidang Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	KLH
			1. Alih pengetahuan (Iptek) kreativitas keinovasian dan kewirausahaan pada stakeholders klaster industri 2. Alih pengetahuan tentang audit teknologi	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
			Alih pengetahuan (Iptek) kreativitas keinovasian dan kewirausahaan pada stakeholders klaster industri	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			Inventarisasi dan pemanfaatan inovasi (teknologi masyarakat) di daerah	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	DISKOPINDAGTAN
			1. Apresiasi Inovasi 2. Alih pengetahuan (Iptek) kreativitas keinovasian dan kewirausahaan pada stakeholders klaster industri	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
			1. Apresiasi Inovasi 2. Alih pengetahuan (Iptek) kreativitas keinovasian dan kewirausahaan pada stakeholders klaster industri	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			Apresiasi Inovasi	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga	DISDIKPORA
			1. Pengembangan Kurikulum Teknopreneur dan kewirausahaan di Lembaga Pendidikan 2. Perkuatan Sekolah Kejuruan berkualitas	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DISDIKPORA

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal	setara dengan standar internasional (minimal ASEAN)			
			Inventarisasi dan pemanfaatan inovasi (teknologi masyarakat) di daerah	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPKKB
			Pengembangan Kerjasama Program Teknoprenership dalam lingkup nasional	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			1. Forum kemitraan klaster industri, kemitraan antar daerah, dan kemitraan daerah-pusat	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
			2. Penguatan rantai nilai klaster industri			
			Penguatan rantai nilai klaster industri	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			1. Forum kemitraan klaster industri, kemitraan antar daerah, dan kemitraan daerah-pusat	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
				Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	DISKOPINDAGTAN
			2. Penguatan rantai nilai klaster industri	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN
			Penguatan rantai nilai klaster industri	Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	DISKOPINDAGTAN
			Pengembangan kerjasama antar daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bersama	Program kerjasama antar daerah	Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	SETDA BAGIAN PEMERINTAHAN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal	Promosi internasional klaster industri unggulan daerah, sosialisasi HKI dan SNI	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
			Pengembangan Kerjasama internasional Program Teknoprenership	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	KANTOR PENMO
			1. Promosi internasional klaster industri unggulan daerah, sosialisasi HKI dan SNI 2. Fasilitas HKI bagi UMKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
Berkembang dan meningkatnya daya saing industri pangan, industri kreatif, industri rumah tangga dan industri pariwisata	Mengembangkan daya saing industrial melalui pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal	Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan dan/atau inovasi dan bisnis berdasarkan potensi lokal	1. Peningkatan iklim investasi dan bisnis melalui pengembang Sistem dan Prosedur Perizinan 2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 3. Pengembangan Insentif untuk Inovasi dan Bisnis 4. Pengembangan klaster industri unggulan daerah 5. Pengembangan skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal	KPPT
			1. Peningkatan iklim investasi dan bisnis melalui pengembang Sistem dan Prosedur Perizinan 2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 3. Pengembangan Insentif untuk Inovasi dan Bisnis 4. Pengembangan klaster industri unggulan daerah 5. Pengembangan skema insentif bagi	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	SETDA

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi			
			1. Peningkatan iklim investasi dan bisnis melalui pengembang Sistem dan Prosedur Perizinan 2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 3. Pengembangan Insentif untuk Inovasi dan Bisnis 4. Pengembangan klaster industri unggulan daerah 5. Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
			1. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 2. Pengembangan klaster industri unggulan daerah 3. Pengembangan Kerangka Legal Pusat Inovasi 4. Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			1. Pengembangan Insentif untuk Inovasi dan Bisnis 2. Pengembangan klaster industri unggulan daerah 3. Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM.	1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Pengembangan Manajemen Pengetahuan 4. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP) 5. Peningkatan kemampuan kapasitas absorpsi UMKM	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Penerapan Metode Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level/ TRL) 4. Pengembangan Manajemen Pengetahuan 5. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Development Service Provider/ BDSP) 6. Peningkatan kemampuan kapasitas absorpsi UMKM			
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Pengembangan Manajemen Pengetahuan 4. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP)	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Penerapan Metode Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level/ TRL) 3. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP)	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	perencanaan Pembangunan	BAPPEDA

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Pengembangan Manajemen Pengetahuan	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Pengembangan Manajemen Pengetahuan	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Penerapan Metode Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level/ TRL) 4. Pengembangan Manajemen Pengetahuan 5. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP) 6. Penyediaan dan	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			penguatan SDM Pengelola Pusat Inovasi 7. Peningkatan kemampuan kapasitas absorpsi UMKM			
			1. Penerapan Metode Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level/ TRL) 2. Pengembangan Manajemen Pengetahuan 3. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP) 4. Peningkatan kemampuan kapasitas absorpsi UMKM	Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN
		Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal	1. Pengembangan Kerjasama antar lembaga untuk menumbuhkan program yang strategis dan inovatif 2. Pengembangan Forum kerjasama klaster industri unggulan daerah	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			1. Pengembangan Kerjasama antar lembaga untuk menumbuhkan program yang strategis dan inovatif 2. Pengembangan Forum kerjasama klaster industri unggulan daerah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	SETDA
			1. Pengembangan Forum kerjasama klaster industri unggulan daerah 2. Pengembangan jaringan inovasi dan telecenter	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal	1. Pengembangan Kerjasama antar lembaga untuk menumbuhkan program yang strategis dan inovatif 2. Pengembangan Forum kerjasama klaster industri unggulan daerah	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
			1. Alih pengetahuan (Iptek) kreativitas keinovasian dan kewirausahaan pada stakeholders klaster industri 2. Alih pengetahuan tentang audit teknologi	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perindustrian Perdagangan	DISKOPINDAGTAN DISKOPINDAGTAN
			Alih pengetahuan (Iptek) kreativitas keinovasian dan kewirausahaan pada stakeholders klaster industri	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			Inventarisasi dan pemanfaatan inovasi (teknologi masyarakat) di daerah	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	DISKOPINDAGTAN
			1. Apresiasi Inovasi 2. Alih pengetahuan (Iptek) kreativitas keinovasian dan kewirausahaan pada stakeholders klaster industri	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
			1. Apresiasi Inovasi 2. Alih pengetahuan (Iptek) kreativitas keinovasian dan kewirausahaan pada stakeholders klaster industri	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal	Pengembangan Kerjasama Program Teknopreneurship dalam lingkup nasional	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			1. Forum kemitraan klaster industri, kemitraan antar daerah, dan kemitraan daerah-pusat	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
			2. Penguatan rantai nilai klaster industri			
			Penguatan rantai nilai klaster industri	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			1. Forum kemitraan klaster industri, kemitraan antar daerah, dan kemitraan daerah-pusat	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			2. Penguatan rantai nilai klaster industri	Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	DISKOPINDAGTAN
				Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN
			Penguatan rantai nilai klaster industri	Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	DISKOPINDAGTAN
		Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal	Promosi internasional klaster industri unggulan daerah, sosialisasi HKI dan SNI	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
			Pengembangan Kerjasama internasional Program Teknopreneurship	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	KANTOR PENMO

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			- Promosi internasional klaster industri unggulan daerah, sosialisasi HKI dan SNI - Fasilitasi HKI bagi UMKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
Berkembangnya infra dan suprastruktur pengetahuan serta meningkatnya kapasitas inovatif daerah	Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan & inovasi melalui pengembangan jaringan inovasi	Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan dan/atau inovasi dan bisnis berdasarkan potensi lokal	- Peningkatan iklim investasi dan bisnis melalui pengembang Sistem dan Prosedur Perizinan - Penguatan Sistem Inovasi Daerah - Pengembangan Insentif untuk Inovasi dan Bisnis - Pengembangan klaster industri unggulan daerah - Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal	KPPT
			- Peningkatan iklim investasi dan bisnis melalui pengembang Sistem dan Prosedur Perizinan - Penguatan Sistem Inovasi Daerah - Pengembangan Insentif untuk Inovasi dan Bisnis - Pengembangan klaster industri unggulan daerah - Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	SETDA

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			1. Peningkatan iklim investasi dan bisnis melalui pengembang Sistem dan Prosedur Perizinan 2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 3. Pengembangan Insentif untuk Inovasi dan Bisnis 4. Pengembangan klaster industri unggulan daerah 5. Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
			1. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 2. Pengembangan klaster industri unggulan daerah 3. Pengembangan Kerangka Legal Pusat Inovasi 4. Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			1. Pengembangan Insentif untuk Inovasi dan Bisnis 2. Pengembangan klaster industri unggulan daerah 3. Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM.	1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Pengembangan Manajemen Pengetahuan 4. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP) 5. Peningkatan kemampuan kapasitas absorpsi UMKM	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Penerapan Metode Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level/ TRL) 4. Pengembangan Manajemen Pengetahuan	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			5. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP) 6. Peningkatan kemampuan kapasitas absorpsi UMKM			
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Pengembangan Manajemen Pengetahuan 4. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP)	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Penerapan Metode Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level/ TRL) 3. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP)	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	perencanaan Pembangunan	BAPPEDA

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Pengembangan Manajemen Pengetahuan	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Pengembangan Manajemen Pengetahuan	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Penerapan Metode Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level/ TRL) 4. Pengembangan Manajemen Pengetahuan 5. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP)	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			6. Penyediaan dan penguatan SDM Pengelola Pusat Inovasi			
			7. Peningkatan kemampuan kapasitas absorpsi UMKM			
		Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal	1. Penerapan Metode Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level/ TRL)	Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN
			2. Pengembangan Manajemen Pengetahuan			
			3. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP)			
			4. Peningkatan kemampuan kapasitas absorpsi UMKM			
			1. Pengembangan Kerjasama antar lembaga untuk menumbuhkan program yang strategis dan inovatif	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			2. Pengembangan Forum kerjasama klaster industri unggulan daerah			
			1. Pengembangan Kerjasama antar lembaga untuk menumbuhkan program yang strategis dan inovatif	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	SETDA
			2. Pengembangan Forum kerjasama klaster industri unggulan daerah			
			1. Pengembangan Forum kerjasama klaster industri unggulan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			2. Pengembangan jaringan inovasi dan telecenter			

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal	1. Pengembangan Kerjasama antar lembaga untuk menumbuhkan program yang strategis dan inovatif 2. Pengembangan Forum kerjasama klaster industri unggulan daerah	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
			1. Alih pengetahuan (Iptek) kreativitas keinovasian dan kewirausahaan pada stakeholders klaster industri 2. Alih pengetahuan tentang audit teknologi	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perindustrian Perdagangan	DISKOPINDAGTAN DISKOPINDAGTAN
			Alih pengetahuan (Iptek) kreativitas keinovasian dan kewirausahaan pada stakeholders klaster industri	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			Inventarisasi dan pemanfaatan inovasi (teknologi masyarakat) di daerah	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	DISKOPINDAGTAN
			1. Apresiasi Inovasi 2. Alih pengetahuan (Iptek) kreativitas keinovasian dan kewirausahaan pada stakeholders klaster industri	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
			1. Apresiasi Inovasi 2. Alih pengetahuan (Iptek) kreativitas keinovasian dan kewirausahaan pada stakeholders klaster industri	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan	Pengembangan Kerjasama Program Teknopenrenship dalam lingkup nasional	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal KANTOR PENMO

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal	1. Forum kemitraan klaster industri, kemitraan antar daerah, dan kemitraan daerah-pusat	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
			2. Penguatan rantai nilai klaster industri			
			Penguatan rantai nilai klaster industri	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			1. Forum kemitraan klaster industri, kemitraan antar daerah, dan kemitraan daerah-pusat	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			2. Penguatan rantai nilai klaster industri	Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	DISKOPINDAGTAN
				Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN
			Penguatan rantai nilai klaster industri	Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	DISKOPINDAGTAN
		Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal	Promosi internasional klaster industri unggulan daerah, sosialisasi HKI dan SNI	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
			Pengembangan Kerjasama internasional Program Teknopreneurship	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	KANTOR PENMO
			1. Promosi internasional klaster industri unggulan daerah, sosialisasi HKI dan SNI	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2. Fasilitasi HKI bagi UMKM	Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	DISKOPINDAGTAN
				Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN
			Penguatan rantai nilai klaster industri	Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	DISKOPINDAGTAN
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	DISKOPINDAGTAN
Berkembangnya usaha yang inovatif (hususnya UKM) berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga	Mendorong perkembangan usaha-usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya	Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan dan/atau inovasi dan bisnis berdasarkan potensi lokal	1. Peningkatan iklim investasi dan bisnis melalui pengembang Sistem dan Prosedur Perizinan 2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 3. Pengembangan Insentif untuk Inovasi dan Bisnis 4. Pengembangan klaster industri unggulan daerah 5. Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal	KPPT
			1. Peningkatan iklim investasi dan bisnis melalui pengembang Sistem dan Prosedur Perizinan 2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 3. Pengembangan Insentif untuk Inovasi dan Bisnis 4. Pengembangan klaster industri unggulan daerah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	SETDA

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			5. Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi			
			1. Peningkatan iklim investasi dan bisnis melalui pengembang Sistem dan Prosedur Perizinan 2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 3. Pengembangan Insentif untuk Inovasi dan Bisnis 4. Pengembangan klaster industri unggulan daerah 5. Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
			1. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 2. Pengembangan klaster industri unggulan daerah 3. Pengembangan Kerangka Legal Pusat Inovasi 4. Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			1. Pengembangan Insentif untuk Inovasi dan Bisnis 2. Pengembangan klaster industri unggulan daerah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			3. Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi			
		Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM.	1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Pengembangan Manajemen Pengetahuan 4. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP) 5. Peningkatan kemampuan kapasitas absorpsi UMKM	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Penerapan Metode Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level/ TRL)	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			4. Pengembangan Manajemen Pengetahuan 5. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP) 6. Peningkatan kemampuan kapasitas absorpsi UMKM			
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Pengembangan Manajemen Pengetahuan 4. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP)	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Penerapan Metode Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level/ TRL) 3. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP)	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	perencanaan Pembangunan	BAPPEDA

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Pengembangan Manajemen Pengetahuan	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Pengembangan Manajemen Pengetahuan	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Penerapan Metode Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level/ TRL) 4. Pengembangan Manajemen Pengetahuan 5. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP)	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			6. Penyediaan dan penguatan SDM Pengelola Pusat Inovasi			
			7. Peningkatan kemampuan kapasitas absorpsi UMKM			
		Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal	1. Penerapan Metode Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level/ TRL)	Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN
			2. Pengembangan Manajemen Pengetahuan			
			3. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP)			
			4. Peningkatan kemampuan kapasitas absorpsi UMKM			
			1. Pengembangan Kerjasama antar lembaga untuk menumbuhkan program yang strategis dan inovatif	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			2. Pengembangan Forum kerjasama klaster industri unggulan daerah			
			1. Pengembangan Kerjasama antar lembaga untuk menumbuhkan program yang strategis dan inovatif	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	SETDA
			2. Pengembangan Forum kerjasama klaster industri unggulan daerah			
			1. Pengembangan Forum kerjasama klaster industri unggulan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			2. Pengembangan jaringan inovasi dan telecenter			

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			1. Pengembangan Kerjasama antar lembaga untuk menumbuhkan program yang strategis dan inovatif 2. Pengembangan Forum kerjasama klaster industri unggulan daerah	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
			1. Pengembangan Kerjasama antar lembaga untuk menumbuhkan program yang strategis dan inovatif 2. Pengembangan Forum kerjasama klaster industri unggulan daerah 3. Pengembangan jaringan inovasi dan telecenter	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	SETDA BAGIAN HUMAS PROTOKOL / Sekretariat DPRD
		Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal	1. Alih pengetahuan (Iptek) kreativitas keinovasian dan kewirausahaan pada stakeholders klaster industri	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN
			2. Alih pengetahuan tentang audit teknologi	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
			Alih pengetahuan (Iptek) kreativitas keinovasian dan kewirausahaan pada stakeholders klaster industri	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			Inventarisasi dan pemanfaatan inovasi (teknologi masyarakat) di daerah	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	DISKOPINDAGTAN
			1. Apresiasi Inovasi 2. Alih pengetahuan (Iptek) kreativitas keinovasian dan kewirausahaan pada stakeholders klaster industri	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal	Pengembangan Kerjasama Program Teknopreneurship dalam lingkup nasional	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			1. Forum kemitraan klaster industri, kemitraan antar daerah, dan kemitraan daerah-pusat	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
			2. Penguatan rantai nilai klaster industri			
			Penguatan rantai nilai klaster industri	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			1. Forum kemitraan klaster industri, kemitraan antar daerah, dan kemitraan daerah-pusat	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			2. Penguatan rantai nilai klaster industri	Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	DISKOPINDAGTAN
				Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN
			Penguatan rantai nilai klaster industri	Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	DISKOPINDAGTAN
		Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal	Promosi internasional klaster industri unggulan daerah, sosialisasi HKI dan SNI	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
			Pengembangan Kerjasama internasional Program Teknopreneurship	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	KANTOR PENMO

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			1. Promosi internasional klaster industri unggulan daerah, sosialisasi HKI dan SNI	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
			2. Fasilitasi HKI bagi UMKM	Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	DISKOPINDAGTAN
				Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN
			Penguatan rantai nilai klaster industri	Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	DISKOPINDAGTAN
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	DISKOPINDAGTAN
Berhasilnya aplikasi teknologi dalam mengatasi persoalan daerah	Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi atau inovasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha	Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan klaster industri unggulan dan/atau inovasi dan bisnis berdasarkan potensi lokal	1. Peningkatan iklim investasi dan bisnis melalui pengembang Sistem dan Prosedur Perizinan	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal	KPPT
			2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah			
			3. Pengembangan Insentif untuk Inovasi dan Bisnis			
			4. Pengembangan klaster industri unggulan daerah			
			5. Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi			
			1. Peningkatan iklim investasi dan bisnis melalui pengembang Sistem dan Prosedur Perizinan	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	SETDA
			2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah			

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			3. Pengembangan Insentif untuk Inovasi dan Bisnis 4. Pengembangan klaster industri unggulan daerah 5. Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi			
			1. Peningkatan iklim investasi dan bisnis melalui pengembang Sistem dan Prosedur Perizinan 2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 3. Pengembangan Insentif untuk Inovasi dan Bisnis 4. Pengembangan klaster industri unggulan daerah 5. Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
			1. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 2. Pengembangan klaster industri unggulan daerah 3. Pengembangan Kerangka Legal Pusat Inovasi 4. Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			1. Pengembangan Insentif untuk Inovasi dan Bisnis 2. Pengembangan klaster industri unggulan daerah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			3. Pengembangan skema-skema insentif bagi usaha-usaha inovatif dan usaha-usaha pemula berbasis teknologi			
		Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM.	1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Pengembangan Manajemen Pengetahuan 4. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP) 5. Peningkatan kemampuan kapasitas absorpsi UMKM	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Penerapan Metode Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level/ TRL)	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			4. Pengembangan Manajemen Pengetahuan 5. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP) 6. Peningkatan kemampuan kapasitas absorpsi UMKM			
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Pengembangan Manajemen Pengetahuan 4. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP)	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Penerapan Metode Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level/ TRL) 3. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP)	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	perencanaan Pembangunan	BAPPEDA

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Pengembangan Manajemen Pengetahuan	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Pengembangan Manajemen Pengetahuan	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			1. Peningkatan alih pengetahuan tentang Penguatan sistem inovasi daerah kepada pemangku kepentingan 2. Alih pengetahuan (Iptek) kepada pemangku kepentingan untuk pengembangan klaster industri 3. Penerapan Metode Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level/ TRL) 4. Pengembangan Manajemen Pengetahuan 5. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP) 6. Penyediaan dan penguatan SDM Pengelola Pusat Inovasi	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			7. Peningkatan kemampuan kapasitas absorpsi UMKM			
			1. Penerapan Metode Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level/ TRL) 2. Pengembangan Manajemen Pengetahuan 3. Pembentukan dan penguatan Pusat-Pusat Inovasi (Inkubator dan Bussines Development Service Provider/ BDSP) 4. Peningkatan kemampuan kapasitas absorpsi UMKM	Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN
		Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal	1. Pengembangan Kerjasama antar lembaga untuk menumbuhkan program yang strategis dan inovatif 2. Pengembangan Forum kerjasama klaster industri unggulan daerah	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			1. Pengembangan Kerjasama antar lembaga untuk menumbuhkan program yang strategis dan inovatif 2. Pengembangan Forum kerjasama klaster industri unggulan daerah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	SETDA
			1. Pengembangan Forum kerjasama klaster industri unggulan daerah 2. Pengembangan jaringan inovasi dan telecenter	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Mendorong budaya inovasi untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal	1. Pengembangan Kerjasama antar lembaga untuk menumbuhkan program yang strategis dan inovatif 2. Pengembangan Forum kerjasama klaster industri unggulan daerah	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
			1. Alih pengetahuan (Iptek) kreativitas keinovasian dan kewirausahaan pada stakeholders klaster industri 2. Alih pengetahuan tentang audit teknologi	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perindustrian Perdagangan	DISKOPINDAGTAN DISKOPINDAGTAN
			Alih pengetahuan (Iptek) kreativitas keinovasian dan kewirausahaan pada stakeholders klaster industri	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			Inventarisasi dan pemanfaatan inovasi (teknologi masyarakat) di daerah	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	DISKOPINDAGTAN
			1. Apresiasi Inovasi 2. Alih pengetahuan (Iptek) kreativitas keinovasian dan kewirausahaan pada stakeholders klaster industri	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
			1. Apresiasi Inovasi 2. Alih pengetahuan (Iptek) kreativitas keinovasian dan kewirausahaan pada stakeholders klaster industri	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal	Pengembangan Kerjasama Program Teknoprenership dalam lingkup nasional	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			1. Forum kemitraan klaster industri, kemitraan antar daerah, dan kemitraan daerah-pusat 2. Penguatan rantai nilai klaster industri 3. Penguatan rantai nilai klaster industri	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	KANTOR PENMO
			1. Forum kemitraan klaster industri, kemitraan antar daerah, dan kemitraan daerah-pusat 2. Penguatan rantai nilai klaster industri	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
				Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	DISKOPINDAGTAN
				Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN
			Penguatan rantai nilai klaster industri	Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	DISKOPINDAGTAN
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	DISKOPINDAGTAN
		Penyelarasan dengan perkembangan global untuk pengembangan klaster industri unggulan berdasarkan potensi lokal	Promosi internasional klaster industri unggulan daerah, sosialisasi HKI dan SNI	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
			Pengembangan Kerjasama internasional Program Teknoprenership	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Daerah	KANTOR PENMO

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			1. Promosi internasional klaster industri unggulan daerah, sosialisasi HKI dan SNI 2. Fasilitasi HKI bagi UMKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
Terlaksananya pemberdayaan penduduk (keluarga) berpendapatan rendah sebagai pelaku dalam pembangunan	Mengembangkan ruang-ruang bagi partisipasi publik dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas dan industri rumah tangga	Meningkatkan peran strategis kelompok penduduk berpendapatan rendah dalam pembangunan		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
	Mengurangi Ketimpangan Pendapatan	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok penduduk miskin		Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPMPPKB
				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPINDAGTAN
Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan berkembangnya sektor pertanian mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster industri di Kota Cimahi	Sektor pertanian yang mendukung ketersediaan pangan dan pengembangan sektor pertanian yang terintegrasi dengan pengembangan klaster-klaster industri unggulan di Kota Cimahi	Meningkatnya ketahanan pangan daerah		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Ketahanan Pangan	DISKOPINDAGTAN
				Program Pengendalian Kebijakan Perberasan	Ketahanan Pangan	SETDA
				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	DISKOPINDAGTAN
		Pengembangan rantai nilai (value chain development), integrasi vertikal, horizontal sektor pertanian, peternakan dan perikanan dan integrasi diagonal dengan klaster industri lainnya		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pertanian	DISKOPINDAGTAN
				Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pertanian	DISKOPINDAGTAN
				Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	DISKOPINDAGTAN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	DISKOPINDAGTAN
				Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Pertanian	DISKOPINDAGTAN
				Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pertanian	DISKOPINDAGTAN
				Program pengembangan budidaya perikanan	Kelautan dan perikanan	DISKOPINDAGTAN
Pengembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi	Menciptakan perdagangan dalam negeri yang efisien	Pengembangan hubungan kerja dan perlindungan terhadap konsumen.		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
		Peningkatan dan penataan sarana dan prasarana aktivitas ekonomi		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
				Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Perdagangan	DISKOPINDAGTAN
Berkembangnya sektor pariwisata	Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya dan produk lokal	Melakukan inventarisasi dan pemetaan daya tarik wisata budaya dan produk lokal		Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	DISKOPINDAGTAN
		Memberikan dukungan kepada organisasi dan komunitas yang bergerak dalam wisata budaya dan produk lokal		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	DISKOPINDAGTAN
		Penyusunan strategi pemasaran wisata		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	DISKOPINDAGTAN
Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja bagi pencari kerja	Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyerapan tenaga kerja baik regional nasional maupun internasional	Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	DISNAKERTRANSOS

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja	Meningkatkan penyelesaian kasus ketenagakerjaan	Perlindungan tenaga kerja		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	DISNAKERTRANSOS
	Meningkatkan perluasan jejaring kerja, perlindungan hukum dan hak-hak bagi pekerja					
	Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan					
Menciptakan transmigran yang berkualitas untuk meningkatkan taraf hidupnya	Meningkatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan transmigran yang berkualitas	Meningkatkan produktivitas dan pengembangan transmigran yang berkualitas		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Ketransmigrasian	DISNAKERTRANSOS
MISI II : MENINGKATKAN KESETARAAN DALAM PELAYANAN PUBLIK						
Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata dan memiliki daya saing	Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal yang merata dan berkualitas		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	DISDIKPORA
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DISDIKPORA
				program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	DISDIKPORA
		Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan menengah universal		Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DISDIKPORA
		Penyelenggaraan pendidikan alternatif bagi anak berkebutuhan khusus		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	DISDIKPORA
	Peningkatan kualitas dan mutu layanan pendidikan	Peningkatan kualitas dan sebaran tenaga pendidik		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan	DISDIKPORA
				Program manajemen pelayanan pendidikan	Pendidikan	DISDIKPORA
		Peningkatan keterkaitan lulusan dengan dunia usaha		Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DISDIKPORA
Meningkatnya Derajat kesehatan bagi semua lapisan masyarakat	Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang merata		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau				
		Penyediaan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan layanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam peningkatan kesehatan	Peningkatan status gizi masyarakat		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Peningkatan dan pengembangan kapasitas pelayanan rumah sakit		Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Kesehatan	RSUD Cibabat
		Meningkatkan promosi dan pengembangan budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan RW siaga aktif di masyarakat		Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Peningkatan sistem pelayanan kependudukan dan catatan sipil		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan	DISDUKCAPIL/ Kelurahan
Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Penyediaan pelayanan keluarga berencana		Program Keluarga Berencana	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPMPPKB
				Program pelayanan kontrasepsi	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPMPPKB
		Peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga sejahtera		Program kesehatan reproduksi remaja	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPMPPKB
				Program keluarga berencana	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPMPPKB

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan yang responsif	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah	Peningkatan kompetensi dan keterampilan aparatur pemerintah		Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	BKD / KORPRI
		Peningkatan jenjang karir		Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	BKD
	Peningkatan kualitas pelayanan aparatur yang responsif	Peningkatan kemampuan pelayanan yang berorientasi kepuasan publik		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	BKD/ KORPRI
				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS		BKD
Meningkatnya perlindungan masyarakat	Pengembangan perlindungan sosial bagi masyarakat	Perlindungan sosial bagi masyarakat		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	DISNAKERTRANSOS
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		DISNAKERTRANSOS
				Program Pembinaan Anak Terlantar		DISNAKERTRANSOS
				Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma		DISNAKERTRANSOS
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		DISNAKERTRANSOS
				Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo		DISNAKERTRANSOS
	Pengembangan perlindungan sosial bagi masyarakat	Penanggulangan bencana		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Sosial	SETDA (KESRA)

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Pemberdayaan gender dan perlindungan anak	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak		Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPMPPKB
		Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPMPPKB
				Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPMPPKB
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Pemberdayaan peran pemuda dalam pembangunan	Pemberdayaan pemuda dalam proses pembangunan		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Kepemudaan dan Olah Raga	DISDIKPORA, KESBANG
				Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Kepemudaan dan Olah Raga	DISDIKPORA
				Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Kepemudaan dan Olah Raga	DISDIKPORA
Meningkatnya sumberdaya olahraga	Pemberdayaan sumberdaya olahraga	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga edukatif, rekreasi, dan prestasi		Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	PU
				Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	DISDIKPORA/ SETDA (KESRA)/ KORPRI
				Program pengembangan manajemen olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	DISDIKPORA
MISI III : MENINGKATKAN KEMAMPUAN DALAM MENANGGAPI TANTANGAN, TUNTUTAN DAN KONDISI MASYARAKAT SECARA CEPAT						
Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan kepada semua masyarakat	Peningkatan pelayanan statistik	Peningkatan manajemen statistik daerah		Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Statistik	Bappeda
		Terbangunnya basis data yang akurat sebagai sumber informasi pelaksanaan pembangunan		Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah		Bappeda
Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan kepada semua masyarakat	Peningkatan pelayanan kearsipan dan perpustakaan	Peningkatan manajemen kearsipan		Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Kearsipan	KAPDE
				Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah	Kearsipan	KAPDE
				Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Kearsipan	KAPDE

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Peningkatan kualitas pelayanan kearsipan	Kearsipan	KAPDE
		Peningkatan manajemen perpustakaan		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan perpustakaan	Perpustakaan	KAPDE dan Disdikpora
		Peningkatan sistem administrasi pertanahan	Peningkatan sistem pelayanan administrasi pertanahan	Program pengadaan, penataan dan pengendalian administrasi pertanahan	Pertanahan	Setda bagian Pemerintahan
Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pemerintahan	Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang IT	Pengembangan E-Development Daerah (E-Society) (misi 3)	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	KAPDE
		Pengembangan sistem informasi pelayanan publik			Komunikasi dan Informatika	KAPDE
		Penyediaan sarana dan prasarana infokom			Komunikasi dan Informatika	KAPDE
		Peningkatan Regulasi dan Kebijakan Bidang informasi dan komunikasi		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	KAPDE
Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pemerintahan	Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik	Peningkatan Regulasi dan Kebijakan Bidang informasi dan komunikasi		Program Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi	Komunikasi dan Informatika	SETDA BAGIAN HUMAS PROTOKOL
		Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah dan pemerintahan		Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	SETDA BAGIAN HUMAS PROTOKOL
Meningkatkan pelayanan manajemen informasi pemerintahan kepada publik	Pengembangan sistem informasi pembangunan daerah	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah dan pemerintahan		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Komunikasi dan Informatika	Sekretariat DPRD
MISI IV : MEMPERTAHAKAN DINAMIKA PERKEHIDUPAN DALAM PEMBANGUNAN						
Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan politis dan demokratis	Peningkatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan politis, demokratis, berbangsa dan bernegara	Meningkatkan demokratisasi		Program Pendidikan politik masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	KESBANG
				Peningkatan keamanan dan kenyamanan sosial		KESBANG
		Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara		Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	KESBANG
				Program wawasan kebangsaan		KECAMATAN/ KELURAHAN
				Peningkatan keamanan dan kenyamanan sosial		KECAMATAN/ KELURAHAN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Peningkatan kapasitas dan peran DPRD dalam pembangunan kehidupan politis dan demokrasi	Meningkatkan Kualitas Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Yang Bertanggung Jawab		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	SETWAN
Meningkatnya kinerja pemerintahan kota dalam pembangunan	Pengembangan kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang efisien dan efektif	Penataan kebutuhan sumberdaya organisasi		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	SETDA (ORGANISASI)
		Penataan kelambagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		SETDA (ORGANISASI)
	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan penegakan hukum dan HAM		Program penataan peraturan perundang-undangan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	SETDA BAGIAN HUKUM
				Program penguatan Hak Asasi Manusia		SETDA BAGIAN HUKUM
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		SETDA (BAGIAN HUKUM) / KORPRI
	meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan		Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	INSPEKTORAT
	pengembangan sistem dan evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan	Peningkatan sistem administrasi dan pengendalian kinerja kecamatan dan kelurahan		Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	SETDA (PEMERINTAHAN)
				Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	INSPEKTORAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Program Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	SETDA (KESRA)
				Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	SETDA (KESRA)
		Terkendalnya dan terevaluasinya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dialokasikan dalam APBD Kota setiap tahun anggaran dan terkendalnya pelaksanaan pengawasan internal atas kebijakan Kepala Daerah		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	SETDA (ORGANISASI) SETDA (PEMERINTAHAN)
	Pemantapan otonomi daerah	peningkatan koordinasi otonomi daerah		Program otonomi daerah Baru	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	SETDA (PEMERINTAHAN)
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	SETDA (HUMAS PROTOKOL)
		Penyediaan pranata dasar pemantapan otonomi daerah		Program pelayanan administrasi perkantoran	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	SEMUA SKPD
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		SEMUA SKPD
				Program pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		SEMUA SKPD
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		SEMUA SKPD

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Menerapkan sistem keuangan daerah yang berbasis sistem informasi		Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		SEMUA SKPD
				Program peningkatan disiplin aparatur		SEMUA SKPD
				Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	DISPENDA
				Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	SETDA (PERLENGKAPAN)
				Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	SETDA (KEUANGAN)
				Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		SETDA (ADBANG)
						SETDA (KEUANGAN)
				Program kerjasama antar daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	SETDA (PEMERINTAHAN)
				Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	KAPDE
		menyediakan saluran pengaduan melalui berbagai alat dan media		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	SETDA (HUMAS PROTOKOL)

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Fasilitasi Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Transparan Dan Akuntabel	Meningkatkan Dan Mengembangkan Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Di Kota Cimahi		Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	SETDA (ADBANG)
Meningkatnya partisipasi warga kota dalam pembangunan	Peningkatan kualitas produk perencanaan tahunan, dan 5 tahunan, dan sektoral	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dan Jangka menengah		Program Pengembangan Data/Informasi	Perencanaan Pembangunan Daerah	SETDA (ADBANG) /BAPPEDA
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi		Meningkatkan Kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan		Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	SETDA (ADBANG)
		Peningkatan peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan		Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
				Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	KECAMATAN/ KELURAHAN
		Peningkatan Kualitas Perencanaan bidang ekonomi		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
		Peningkatan Kualitas Perencanaan bidang sosbud		Program perencanaan sosial budaya	Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
		Peningkatan Kualitas Perencanaan bidang Pemerintahan		Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
		Peningkatan Kualitas Perencanaan bidang Fisik		Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
				Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
				Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
	Peningkatan Sinergitas perencanaan pembangunan	Meningkatkan kapasitas aparatur dan Kelembagaan perencana		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Penyediaan data dasar dan sektoral untuk perencanaan pembangunan yang valid dan up to date	Peningkatan penyediaan dan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan		Program Pengembangan data/informasi	Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA/ SETDA (ADBANG)
		Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar SKPD, Provinsi dan pemerintah Pusat		Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
	Pengembangan sistem informasi pembangunan daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring		Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
	Peningkatan lembaga keswadayaan masyarakat	Mendukung peningkatan kapasitas lembaga keswadayaan masyarakat		Program peningkatan keberdayaan masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPPKB / KECAMATAN/ KELURAHAN
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPPKB /KECAMATAN/ KELURAHAN
				Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	KELURAHAN
MISI V : MEWUJUDKAN KESALEHAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA						
Meningkatnya disiplin dan toleransi masyarakat kota Cimahi	Peningkatan kesadaran warga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyaratan untuk peningkatan ketertiban dan ketentraman		Program Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	SATPOL PP
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		SATPOL PP
				Program Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		SATPOL PP
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		KECAMATAN/ KELURAHAN
	Peningkatan kualitas moral dan kehidupan keagamaan	pembinaan kehidupan keagamaan		Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	SETDA (KESRA)

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Berkembangnya budaya masyarakat kota Cimahi	Pengembangan budaya lokal	pembinaan budaya lokal		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	DISKOPINDAGTAN
	Pengembangan pusat-pusat kebudayaan	pembinaan sanggar seni dan organisasi budaya				
Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang toleran dan kondusif	Peningkatan kesadaran dan toleransi antar umat beragama	pembinaan masyarakat dan lembaga keagamaan		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	KESBANG
MISI VI : MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN						
Mengembangkan infrastruktur transportasi disertai dengan manajemen yang handal dan terintegrasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan	Pengembangan infrastruktur jalan yang handal dalam mendorong daya saing kota		Pembangunan jalan dan jembatan	Pekerjaan umum	DINAS PU
	Mengembangkan jaringan jalan lingkaran luar yang berfungsi untuk memfasilitasi <i>through traffic</i>					
	Meningkatkan tingkat kemantapan jalan kota dan jalan lingkungan			Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan	Pekerjaan umum	DINAS PU
	Mengembangkan fasilitas perlengkapan jalan			Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Pekerjaan umum	DINAS PU
				Pengendalian dan Pengembangan Lalu Lintas	Perhubungan	DISHUB
			Pemanfaatan Ruang	Penataan ruang	DKP	
Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum penumpang	Mengembangkan jaringan pelayanan angkutan umum dalam kota	Pengembangan pelayanan angkutan jalan yang terintegrasi		Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perhubungan	DISHUB
	Mengembangkan jaringan prasarana angkutan umum dalam kota			Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Perhubungan	DISHUB
	Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor			Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	DISHUB
	Mengembangkan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam bidang perhubungan			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	DISHUB
				Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	DISHUB

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Menerapkan manajemen lalu lintas yang terintegrasi	Pengembangan manajemen transportasi kota yang efektif dan efisien dan terintegrasi		Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Perhubungan	DISHUB
	Menerapkan manajemen parkir yang efisien			Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Perhubungan	DISHUB
	Mengintegrasikan sistem transportasi di wilayah perbatasan dengan Kab/Kota sekitar			Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perhubungan	DISHUB
Meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi bidang perhubungan	Mengembangkan sistem informasi dalam bidang perhubungan	Pengembangan sistem informasi dalam bidang perhubungan		Pengembangan komunikasi informasi dan media massa	Komunikasi Dan Informatika	DISHUB
Mengembangkan infrastruktur air bersih dan sanitasi dasar	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih yang aman			Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pekerjaan Umum	DKP
	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang aman	Pengembangan sistem pelayanan air limbah domestik yang aman		Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan	DKP
	Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik skala komunal, kawasan dan kota			Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	Pekerjaan umum	DKP
	Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan	Pengembangan sistem pelayanan persampahan yang terintegrasi		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan hidup	DKP
	Meningkatkan Pelayanan Pengangkutan Sampah			Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan hidup	DKP
	Mengurangi timbulan akhir sampah melalui pengembangan komposting, 3R dan teknologi lainnya			Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan hidup	DKP
				Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan hidup	DKP
	Meningkatkan kualitas jaringan drainase kota	Pengembangan sistem drainase jalan kota yang handal		Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan umum	DINAS PU
		Pengembangan sistem drainase perkotaan yang handal dan terintegrasi		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan Umum

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pekerjaan umum	
				Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya	Pekerjaan umum	
Mengembangkan sarana prasarana perekonomian	Meningkatkan kualitas sarana prasarana perdagangan	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	DPU
Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/ rumah negara	Meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial dan pemerintahan	Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	DINAS PU
	Meningkatkan keamanan, keserasian dan ketahanan bangunan gedung fasilitas sosial dan pemerintahan			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	DINAS PU
Mengembangkan perumahan dan permukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar umum	Meningkatkan ketersediaan dan cakupan rumah layak huni	Peningkatan kualitas perumahan permukiman dengan prasarana sarana dasar umum		Pengembangan Perumahan	Perumahan	DINAS PU
				Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Perumahan	DINAS PU
	Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat			Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan	DINAS PU
	Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat			Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Perumahan	DINAS PU
				Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Perumahan	DINAS PU
				Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pekerjaan umum	DINASPU
	Menciptakan lingkungan permukiman yang siaga dan aman dari bahaya kebakaran			Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Pekerjaan umum	DINAS PU
	Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan TPU			Pengelolaan Areal Pemakaman	Perumahan	DKP

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Menciptakan kondisi lingkungan perumahan permukiman tertata yang mencerminkan wajah kota			Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	DKP
	Menciptakan kondisi lingkungan perumahan permukiman tertata yang mencerminkan wajah kota			Pemanfaatan Ruang	Penataan ruang	DKP
	Mengembangkan sistem pelayanan perijinan bangunan yang efisien			Pengembangan Perumahan	Perumahan	DINAS PU
Mewujudkan penataan ruang kota yang berkelanjutan	Mengembangkan data dan informasi spasial yang informatif	Pelaksanaan perencanaan ruang kota yang berkelanjutan		Perencanaan Tata Ruang	Penataan ruang	DINAS PU, BAPPEDA
	Mengembangkan rencana tata ruang yang komprehensif dan terintegrasi			Perencanaan Tata Ruang	Penataan ruang	BAPPEDA
				Kerjasama Pembangunan	Perencanaan pembangunan	BAPPEDA
				Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Perencanaan pembangunan	BAPPEDA
				Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pekerjaan umum	BAPPEDA
				Perencanaan Pengembangan Kota-Jota Menengah dan Besar	Perencanaan pembangunan	BAPPEDA
				Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Perencanaan pembangunan	BAPPEDA
				Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan pembangunan	BAPPEDA
	Meningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang	Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang		Perencanaan Tata Ruang	Penataan ruang	BAPPEDA
	Memperkecil penyimpangan pelaksanaan rencana tata ruang			Pemanfaatan Ruang		DINAS PU, BAPPEDA
			Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan ruang	DINAS PU	
	Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang	Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait		Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan ruang	DINAS PU

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENGUATAN SISTEM INOVASI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Mewujudkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan	Mengembangkan RTH publik	Pengembangan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan hidup	DKP
	Meningkatkan pencegahan , pemantauan, pengendalian dan pengawasan pencemaran air, tanah dan udara	Pengembangan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan	Membangun standard an norma audit teknologi untuk green innovation	Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup	KLH
	Melaksanakan standar operasional pelayanan pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup	Peningkatan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup	KLH
	Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan lahan	Peningkatan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan lahan		Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan hidup	KLH
Mewujudkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan lahan	Pengembangan pelayanan informasi status lingkungan		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Lingkungan hidup	KLH
	Mengembangkan pelayanan informasi status lingkungan kota			Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup	KLH
				Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Lingkungan hidup	KLH
				Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Lingkungan hidup	KLH
				Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Lingkungan hidup	KLH

7.3 Program Prioritas

Program Prioritas disusun berdasarkan visi misi Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 yaitu:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan

Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan mutu pendidikan dasar dan menengah, serta meningkatkan cakupan layanan pendidikan bagi masyarakat melalui pendidikan gratis bagi tingkat dasar dan pendidikan menengah berbiaya murah serta meningkatkan relevansi pendidikan dan daya saing pendidikan.

2. Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Kesehatan

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Peningkatan kualitas dan pemerataan cakupan layanan kesehatan dasar dan rujukan, dan peningkatan cakupan dan keterjangkauan pembiayaan kesehatan masyarakat.

3. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Iklim Investasi

Meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kemampuan daya beli dilakukan dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang lebih banyak memanfaatkan dan melibatkan sumber daya lokalnya. Kesadaran ini dilakukan dalam kerangka berfikir bahwa pembangunan ekonomi harus mengakar kepada potensi lokal yang ada sehingga keberlanjutan pembangunan ekonomi dapat tercapai. Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal diharapkan percepatan peningkatan kesejahteraan penduduk yang pada akhirnya akan menjadi usaha bagi percepatan pembangunan ekonomi Kota Cimahi.

4. Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Penetapan prioritas pembangunan bidang infrastruktur perkotaan ditekankan pada pengembangan kuantitas, kualitas, dan pemerataan layanan sehingga meningkatkan derajat layak huni (*liveability*) kawasan perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan penetapan system transportasi kota yang efisien. Hal ini didasarkan pada penataan ruang kota yang sinergis dan sinambung dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

5. Pengembangan Sumber Air Baku

Penetapan prioritas pengembangan sumber air baku ditekankan pada upaya penyediaan air bersih untuk semua.

6. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur

Penetapan prioritas peningkatan kualitas kinerja aparatur ditekankan pada upaya peningkatan sumber daya manusia dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan administrasi kependudukan.

7. Perluasan Kesempatan Kerja

Perluasan kesempatan kerja merupakan program prioritas dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran melalui peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja, penyiapan tenaga kerja siap pakai dan optimalisasi padat karya, serta fasilitasi perlindungan tenaga kerja dalam hubungan industrial.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kesejahteraan dan kualitas keluarga melalui pemberdayaan dan peningkatan ekonomi keluarga perempuan kepala keluarga (miskin), peningkatan pelayanan bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus, pencegahan dan penanggungan KDRT dan trafficking, serta pembentukan kota layak anak.

9. Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga

Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga dilakukan melalui peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan, dan pembinaan olahraga berprestasi.

10. Penanganan Bencana dan Masalah Sosial

Peningkatan penanganan bencana, penanganan masalah sosial dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

11. Peningkatan Inovasi dan Teknologi

Peningkatan daya saing daerah bertumpu kepada kemampuan inovasi daerah yang dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi dan kemitraan.

Adapun Indikasi kegiatan Program Prioritas Periode 2012 – 2017 adalah:

Tabel 7.2
Program Prioritas Periode 2012 – 2017

PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA		INDIKASI KEGIATAN
1	Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan	a. Perluasan akses Pendidikan gratis (pendidikan dasar) dan murah (pendidikan menengah)
		b. Peningkatan mutu pendidikan
		c. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru
		d. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
		e. pengembangan model kurikulum “budaya kreatif” dan menjunjung budi pekerti
2	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan	a. <i>Universal Coverage</i> (Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal)
		b. Peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas dan RSUD Cibabat
		c. peningkatan kualitas pelayanan tenaga kesehatan (Pelayanan dengan hati, Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun)
		d. Puskesmas pelayanan prima, Puskesmas santun lansia, Puskesmas sayang ibu, Puskesmas ramah anak, Konseling kesehatan berbasis agama
		e. peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan (DBD, TBC, Kanker, LBS, PHBS)
3	Pengembangan Ekonomi Lokal dan peningkatan Iklim Investasi	a. Pengembangan klaster
		b. Pembangunan sentra-sentra ekonomi lokal
		c. Membangun gerai-gerai sebagai pusat pemasaran
		d. Mengembangkan kemitraan antar pelaku usaha
		e. Aksesibilitas permodalan bagi pelaku ekonomi lemah
		f. Menciptakan wirausaha baru di segala bidang
		g. Pengembangan ekonomi berbasis keluarga (Warung umat/ warung RW)
		h. Pengembangan Online System
		i. Peningkatan pelayanan perijinan, pajak dan retribusi
		j. Penciptaan kondisi sosial yang kondusif
4	Infrastruktur tata ruang dan lingkungan Hidup	a. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur kota
		b. Pengembangan Fasilitas keagamaan
		c. Peningkatan Sarana prasarana transportasi
		d. Pengembangan sarana prasarana pendukung pusat kegiatan ekonomi
		e. Pembangunan Embung dan drainase
		f. pengendalian banjir
		g. Optimalisasi Pengelolaan sampah
		h. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang publik
		i. Pengembangan Water Treatment
		j. Fiqih Lingkungan
		k. Peningkatan daya dukung kawasan pemukiman padat
		l. Pembangunan Septic tank komunal
		m. Peningkatan Jalan lingkungan
		n. Bedah rumah
		o. Pengembangan RW hijau
		p. Peningkatan Pelayanan PJU
		q. Peningkatan tertib lalu lintas dan Rekayasa lalu lintas
		r. Penyediaan dan pemasangan Rambu dan marka jalan
		s. Penataan perparkiran
5	Pengembangan	a. peningkatan pelayanan air bersih untuk masyarakat (Air untuk semua)

PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA		INDIKASI KEGIATAN
	Sumber Air Baku	b. Penataan sumber air baku c. Pembangunan Sumur resapan
6	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	a. Pelayanan KTP Gratis b. Percepatan pelayanan administrasi kependudukan
7	Perluasan Kesempatan Kerja	a. Penyelenggaraan Bursa kerja b. Fasilitasi Pemagangan bagi pencari kerja c. Penyiapan tenaga kerja siap pakai d. Fasilitasi perlindungan tenaga kerja e. Optimalisasi pelaksanaan Padat karya
8	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. Peningkatan kualitas keluarga b. Pembentukan Kota Layak Anak c. Peningkatan pelayanan bagi kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus d. Optimalisasi peran P2TP2A dalam pencegahan dan penanganan KDRT dan <i>Trafficking</i> e. Pemberdayaan keluarga (bina keluarga. PEKKA) dan KB f. Peningkatan ekonomi keluarga (Sekolah Jumat, UP2K)
9	Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga	a. Peningkatan kepemimpinan kepemudaan b. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan c. Pembinaan pemuda unggulan d. Optimalisasi Fasilitas sarana dan prasarana olahraga e. Pembinaan olahraga berprestasi
10	Penanganan Bencana dan Masalah Sosial	a. Pemberian bantuan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial b. Pembinaan anak terlantar dan anak jalanan melalui Rumah Pintar c. Penanggulangan bencana alam (Sibat) d. Penanganan penyakit masyarakat
11	Peningkatan Inovasi dan Teknologi	a. Peningkatan Kemitraan dengan perguruan tinggi dan instansi vertikal dalam bidang IPTEK b. Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna c. Fasilitasi pengembangan industri kreatif (telematika, animasi)

BAB VIII
INDIKASI RENCANA
PROGRAM PRIORITAS DAN
KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, disusun program-program pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintah selama periode lima tahun dengan prioritas program beserta indikator kinerja program. Program prioritas ditetapkan dan disusun berdasarkan bidang pemerintah daerah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran.

Secara lengkap rincian indikasi rencana program prioritas beserta pendanaannya disajikan pada Tabel 8.1 yaitu Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas sebagai berikut:

BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA DAERAH

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian Indikator *Outcome* Program Pembangunan Daerah setiap tahun atau Indikator Capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Skenario dan asumsi Pembangunan Daerah Tahun 2012 – 2017 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 dengan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sampai dengan Tahun 2017. Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolak ukur Pembangunan Daerah yang harus dicapai pada setiap tahapan Pembangunan Jangka Menengah.

Indikator Kinerja Daerah Kota Cimahi untuk RPJMD Tahun 2012 – 2017 ditetapkan dengan melihat pada pencapaian Indikator Makro Pembangunan maupun capaian Indikator Kinerja yang mengacu pada target MDGs. Pencapaian Indikator Makro Pembangunan pada Perencanaan Jangka Menengah periode sebelumnya adalah seperti yang diuraikan dalam Tabel 9.1 berikut :

Tabel 9.1

Pencapaian Indikator Makro Pembangunan

Kota Cimahi Tahun 2007 – 2012

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA	CAPAIAN					2012	
			2007	2008	2009	2010	2011	TARGET	CAPAIAN
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	BPS	74,42	74,79	75,17	75,51	76,01	76,03	76.12 ^{*)}
2	Indeks Pendidikan	BPS	89,22	89,22	89,58	89,77	90,07	89,85	90.38 ^{*)}
	Angka Melek Huruf (%)		99,63	99,63	99,64	99,65	99,74	99,65	99.8 ^{*)}
	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)		10,26	10,26	10,42	10,5	10,61	10,54	10.73 ^{*)}
3	Angka Partisipasi Sekolah								
	Usia 7-12 tahun	BPS	99,33	99,31	100	98,99	98,78	93,49	99.64 ^{*)}
	Usia 13-15 tahun		89,33	90,05	84,08	94,03	92,71	65,26	92.97 ^{*)}
	Usia 16-18 tahun		67,86	68,3	62,42	64,23	68,54	61,03	68.69 ^{*)}
4	Indeks Kesehatan	BPS	73,28	73,4	73,52	73,63	73,75	73,71	73.75 ^{*)}
	Angka Harapan Hidup (tahun)		68,97	69,04	69,11	69,18	69,25	69,23	69.25 ^{*)}
5	Angka Kematian Ibu/ 100.000 KH ***)	DINKES	102,79	79,12	149,06	85,2	84,67	100,8	84,65
6	Angka Kematian bayi/ 1.000 KH	BPS	N/A	30,54	N/A	N/A	29,80 ^{**)}	29,80	29,80 ^{**)}
7	Indeks Daya Beli	BPS	60,77	61,75	62,41	63,14	63,91	64,52	64.24 ^{*)}
	Daya Beli (Rp. Ribu)		562,97	657,2	630,06	633,2	637,86	635 - 640	638 ^{*)}

NO	INDIKATOR	SUMBER DATA	CAPAIAN					2012	
			2007	2008	2009	2010	2011	TARGET	CAPAIAN
8	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	BPS	2,68	2,7	2,72	2,06	2,29	2,02	2.29 ^{*)}
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	BPS	59,86	57,6	59,42	63,05	62,19	63 - 64	63,46 ^{**)}
10	Pengangguran Terbuka (%)	BPS	18,82	14,17	15,17	13,59	10,32	12	10,30 ^{**)}
11	Angka Kemiskinan (%)	BPS	7,33	8,35	7,1	7,4	7,15	6,0-7,0	7.15 ^{*)}
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	BPS	5,03	4,77	4,63	5,3	5,56 ^{*)}	5.5 - 6.0	5,56 ^{**)}
13	PDRB :								
	- Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rp)	BPS	5.638,91	5.908,07	6.181,40	6.509,31	6.871,22 ^{*)}	6,521 - 6,552	7.253.26 ^{**)}
	- Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp)	BPS	9.304,79	10.716,29	11.683,71	12.845,60	14.164,83 ^{*)}	12,326 - 12,385	15.727.21 ^{**)}
14	PDRB Per Kapita								
	- Atas Dasar Harga Konstan (Ribu Rp)	BPS	10.640,05	11.328,82	11.662,39	12.028,07	12.419,36 ^{*)}	12,100 - 12,500	12.822.99 ^{**)}
	- Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rp)	BPS	17.557,21	20.548,66	21.972,71	23.736,42	25.602,16 ^{*)}	27,680 - 29,890	27.614.49 ^{**)}

Keterangan Data Capaian Tahun 2012
*) Angka Sementara BPS
**)Angka Sangat Sementara Olahan Bappeda

Sedangkan pencapaian Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs) seperti yang diuraikan dalam Tabel 9.2 berikut ini:

Tabel 9.2
Pencapaian MDGs Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2012

INDIKATOR		INDONESIA		KOTA CIMAHI			TARGET MDGs SAMPAI 2015	STATUS	
		1990	2010	2010	2011	2012			
TUJUAN 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN									
Target 1: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan Tingkat Pendapatan Kurang dari US\$ 1 perhari									
1	Proporsi Kemiskinan (Nasional)	15.10%	16.60%	7,4	7,41	7,16	7.50%	Melebihi target	
Target 2: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk yang Menderita Kelaparan									
4	Gizi Buruk	6.30%	8.80%	0.92%	0.69%	0,14%	3.30%	Melebihi target	
	Gizi Kurang	35.50%	28%	10.61%	3.80%	N/A	18%	Melebihi target	
TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN UNTUK SEMUA									
Target 3: Menjamin pada 2015 semua anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar									
6	Partisipasi ditingkat SD (APM)	88.70%	94.70%	87%	92,01%	92,01%	100%	Mendekati target	
	Partisipasi ditingkat SMP (APM)	41.90%	66.50%	88%	69,84%	69,84%	100%	Belum mencapai target	
7	Proporsi Murid yang bersekolah hingga kelas 5	75.60%	81%	100%	N/A	N/A	100%	Sudah mencapai target	
	Proporsi Murid yang tamat SD	62%	74.70%	100%	99,92%	99,50%	100%	Mendekati target	
8	Melek Huruf Usia 15-24	96.60%	99.40%	100%	100%	100%	100%	Sudah mencapai target	

INDIKATOR		INDONESIA		KOTA CIMAHI			TARGET MDGs SAMPAI 2015	STATUS
		1990	2010	2010	2011	2012		
TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan tahun 2005, dan disemua jenjang sebelum 2015								
9	Rasio Anak perempuan di Sekolah Dasar	100.60%	100%	94.22%	98,45%	98,45%	100%	Mendekati target
	Rasio Anak perempuan di Sekolah Menengah Pertama	101.30%	99.40%	98.32%	98,01%	98,01%	100%	Mendekati target
	Rasio Anak perempuan di Sekolah Menengah Atas	98%	100%	109.80%	80,57%	80,57%	100%	Mendekati target
	Rasio Anak perempuan di PT	85.10%	102.50%	98.51%	N/A	N/A	100%	Mendekati target
10	Rasio melek huruf Perempuan usia 15-24 Thn	97.90%	99.90%	100%	100,00%	100%	100%	Sudah mencapai target
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		49.50%	42.37%	42,41%	40%		
12	Proporsi Perempuan di DPR	12.50%	11.30%	20%	20%	20%	Meningkat	Sudah Mencapai Target
TUJUAN 4: MENGURANGI KEMATIAN ANAK								
Target 5: Menurunkan Angka Kematian Balita sebesar dua-per-tiganya antara 1990 dan 2015								
13	Tingkat Kematian Anak (1-5 tahun)/ per 1,000	97	40	0	0	0	32	Sudah Mencapai Target
14	Tingkat Kematian Bayi (Per 1.000)	57	32	N/A	29,8	29,8	19	
15	Tingkat Imunisasi Campak - Usia 12 Bulan	44.50%	71.60%	93.03%	100%	100%	Meningkat	Sudah Mencapai Target
TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU								
Target 6: Menurunkan Angka Kematian Ibu sebesar tiga-per-empatnya antara 1990 dan 2015								
16	Tingkat Kematian Ibu (Per 100.000)	390	307	85,2	84,67	84,65	102	Sudah mencapai target
17	Kelahiran yang dibantu tenaga terlatih	40.70%	72.40%	92.36%	89,44%	88,64%	Meningkat	Sudah mencapai target
	Wanita menikah usia 15-49 yang menggunakan Alat KB	50.50%	57.90%	79.82%	80,69%	80,69%	Meningkat	Sudah mencapai target
TUJUAN 6: MEMERANGI HIV/AIDS DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA								
Target 7: Mengendalikan Penyebaran HIV/AIDS dan muali menurunkan kasus baru pada 2015								
18	Prevalensi HIV dan AIDS	N/A	0.10%	N/A	0,03%	0,03%	Menurun	Sudah Mencapai Target
19	Penggunaan Kondom sebagai alat Kontrasepsi	1.30%	0.90%	668 orang	N/A	N/A	Meningkat	
Target 8: Mengendalikan Penyakit Malaria dan muali menurunnya kasus Malria dan Penyakit lainnya tahun 2015								
21	Kasus Malaria (Per 1,000)	8.5		0				Bukan daerah endemis
TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP								
Target 9: Memadukan Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan program nasional serta mengembalikan sumberdaya yang hilang								
25	Kawasan tertutup pohon	60%	49.90%	43,60%	43,41%	43,41%	Meningkat	
Target 10: Menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015								
30	Proporsi Penduduk terhadap Air Bersih	38.20%	52.10%	62,30%	62,40%	62,40%	67%	Mendekati target
	Air Minum Perpipaan Kota	N/A	30.80%	62,46%	62,88%	62,88%	67.70%	Mendekati target
31	Sanitasi yang baik	30.90%	68%	63,14%	64,13%	64,13%	65.50%	Mendekati target
	Rumah Tangga di Perkotaan	N/A	81.80%	63,14%	63,89%	63,89%	78.80%	Mendekati target

		INDONESIA		KOTA CIMAHI			TARGET MDGs SAMPAI 2015	STATUS
		1990	2010	2010	2011	2012		
Target 11: Memperbaiki kehidupan penduduk miskin yang hidup di pemukiman kumuh pada 2020								
32	Proporsi kepastian kepemilikan lahan	87.70%	84%	N/A	4,10%	4,10%	6%	Belum mencapai target
TUJUAN 8: MENGEMBANGKAN KEMITRAAN GLOBAL								
Target 15: Penanggulangan Masalah pinjaman luar negeri melalui upaya nasional maupun internasional dala rangka pengelolaan utang luar negeri yang berkelanjutan dan berjangka panjang								
35	Rasio Pinjaman Luar Negeri terhadap PDB	N/A	44.90%	N/A	N/A	N/A		
36	Rasio Utang terhadap Anggaran Belanja	N/A	26%	0,20%	0,18%	0,17%		
Target 18: Bekerjasama dengan sektor swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi								
38	Rumah tangga yang memiliki telepon	N/A	11.20%	40.051	51.249	51.249		

Selain melihat pada pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan periode sebelumnya, penetapan Indikator Kinerja Daerah dilakukan dengan mengacu kepada:

1. Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013 dan Sasaran Pembangunan Nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2010 – 2014 yang meliputi Indikator Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran, Angka Kematian Bayi, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Angka Pendapatan per Kapita;
2. Target pencapaian IPM berdasarkan proyeksi pencapaian IPM pada RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 yang diselaraskan dengan target pencapaian IPM yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat.

Gambaran target Indikator Kinerja Pembangunan yang mengacu kepada Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013 dan Sasaran Pembangunan Nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel 9.3 dibawah ini.

Tabel 9.3
Indikator Pembangunan Kota Cimahi Berdasarkan
RPJMN 2010 – 2014 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013

NO	INDIKATOR	RPJMN 2010 - 2014 (TARGET 2014)	RPJMD Prov. 2008 - 2013 (TARGET 2013)	TARGET RPJMD KOTA CIMAHI 2012-2017	
				2013	2014
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,2 - 6,8	6 - 6,5	5,50 - 5,75	5,50 - 5,75
2	Kemiskinan (%)	4,15 - 4,12	5,39 - 9,07	7.10 - 5.00	7.10 - 5.00
3	Pengangguran (%)	8,8 - 9,8	10	10.30 - 9.0	10.30 - 9.0
4	Angka Kematian Bayi (/1.000 Kelahiran Hidup)	24	26 - 30	29.70 - 29.30	29.70 - 29.30
5	Angka Harapan Hidup (tahun)	72	70	69.25 - 69.65	69.25 - 69.65
6	Angka Pendapatan Perkapita (Rp. Ribu)	8.650,00	7.106 - 7.500	13.208 - 13.272	13.604 - 13.670

Selanjutnya target Indikator Makro Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 dan target kinerja pembangunan berdasarkan Misi Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 tergambar pada Tabel 9.5 dan Tabel 9.6 berikut ini :

Tabel 9.4
Target Indikator Makro Pembangunan
Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76.12 ^{*)}	76.12 - 76.70	76.12 - 76.70	76.12 - 76.70	76.70 - 77.38	76.70 - 77.38	76.70 - 77.38
2	Indeks Pendidikan	90.38 ^{*)}	90.38 - 90.65	90.38 - 90.65	90.38 - 90.65	90.65 - 90.92	90.65 - 90.92	90.65 - 90.92
	Angka Melek Huruf (%)	99.8 ^{*)}	99.80 - 99.83	99.80 - 99.83	99.80 - 99.83	99.83 - 99.86	99.83 - 99.86	99.83 - 99.86
	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10.73 ^{*)}	10.73 - 11.10	10.73 - 11.10	10.73 - 11.10	11.10 - 11.47	11.10 - 11.47	11.10 - 11.47
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)							
	Usia 7-12 tahun	99.64 ^{*)}	99.64 - 99.8	99.64 - 99.8	99.64 - 99.8	99,8-100	99,8-100	99,8-100
	Usia 13-15 tahun	92.97 ^{*)}	92.97 - 95	92.97 - 95	92.97 - 95	95 - 98	95 - 98	95 - 98
	USia 16-18 tahun	68.69 ^{*)}	68.69 -73	68.69 -73	68.69 -73	73 - 78.31	73 - 78.31	73 - 78.31
4	Indeks Kesehatan	73.75 ^{*)}	73.75 - 74.25	73.75 - 74.25	73.75 - 74.25	74.25 - 74.75	74.25 - 74.75	74.25 - 74.75
	Angka Harapan Hidup (tahun)	69.25 ^{*)}	69.25 - 69.65	69.25 - 69.65	69.25 - 69.65	69.65 - 70.05	69.65 - 70.05	69.65 - 70.05
5	Angka Kematian Ibu/ 100.000 KH	84,65 ^{***)}	84.65 - 84.45	84.65 - 84.45	84.65 - 84.45	84.45 - 84.25	84.45 - 84.25	84.45 - 84.25
6	Angka Kematian bayi/ 1.000 KH	29,80 ^{**)}	29.70 - 29.30	29.70 - 29.30	29.70 - 29.30	29.30 - 29.00	29.30 - 29.00	29.30 - 29.00
7	Indeks Daya Beli	64.24 ^{*)}	64.57 - 65.28	64.57 - 65.28	64.57 - 65.28	65.28 - 66.59	65.28 - 66.59	65.28 - 66.59
	Daya Beli (Rp. Ribu)	638 ^{*)}	641 - 648	641 - 648	641 - 648	648 - 654	648 - 654	648 - 654
8	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2.29 ^{*)}	2.29 - 1.70	2.29 - 1.70	2.29 - 1.70	2.24 - 1.65	2.24 - 1.65	2.24 - 1.65
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	63,46 ^{**)}	63.46 - 66.32	63.46 - 66.32	63.46 - 66.32	66.32 - 68.49	66.32 - 68.49	66.32 - 68.49
10	Pengangguran Terbuka (%)	10,3 ^{**)}	10.30 - 9.00	10.30 - 9.00	10.30 - 9.00	9.0 - 8.0	9.0 - 8.0	9.0 - 8.0
11	Angka Kemiskinan (%)	7.15 ^{*)}	7.10 - 5.00	7.10 - 5.00	7.10 - 5.00	7.00 - 4.90	7.00 - 4.90	7.00 - 4.90
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,56 ^{*)}	5,50 - 5,75	5,50 - 5,75	5,50 - 5,75	5,75 - 6,00	5,75 - 6,00	5,75 - 6,00
13	PDRB :							
	- Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rp)	7.253.26 ^{**)}	7.652 - 7.670	8.073 - 8.092	8.517 - 8.537	9.006 - 9.028	9.524 - 9.547	9.524 - 9.547
	- Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp)	15.727.21 ^{**)}	17. 457 - 17.772	19.377 - 19.727	21.509 - 21.897	24.305 - 24.735	27.465 - 27.951	27.465 - 27.951
14	PDRB Per Kapita							
	- Atas Dasar Harga Konstan (Ribu Rp)	12.822.99 ^{**)}	13.208 - 13.272	13.604 - 13.670	14.012 - 14.080	14.502 - 14.573	15.010 - 15.083	15.010 - 15.083
	- Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rp)	27.614.49 ^{**)}	29.686 - 29.962	31.912 - 32.209	34.305 - 34.625	37.221 - 37.564	40.385 - 40.757	40.385 - 40.757

Keterangan Data Capaian Tahun 2012

*) Angka Sementara BPS

**)Angka Sangat Sementara Olahan Bappeda

***)Data Dinas Kesehatan

Tabel 9.5
Target Indikator Kinerja Pembangunan
Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 Berdasarkan Misi

INDIKATOR	KONDISI AWAL 2012	TARGET 2017
Misi 1 : Mewujudkan Kreativitas Dalam Segala Bidang		
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,3	9.0 - 8.0
Angka Kemiskinan (%)	7.15	7.00 - 4.90
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.56	5,75 - 6,00
Misi 2 : Meningkatkan Kesetaraan Dalam Pelayanan Publik		
AMH (angka Melek Huruf)	99.80%	99.83% - 99.86%
RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	10.73 tahun	11.10 - 11.47 tahun
APS 7 - 12 tahun	99.64%	99.80% -100%
APS 13 - 15 tahun	92.97%	95% - 98%
APS 16 - 18 tahun	68.69%	73% - 78.31%
AHH (Angka Harapan Hidup)	69.25 tahun	69.65 - 70.05 tahun
Angka kematian ibu (AKI)	84,65	84.45 - 84.25
Angka Kematian Bayi (AKB)	29,80	29.30 - 29.00
Misi 3 : Meningkatkan Kemampuan Dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi Masyarakat Secara Cepat		
Kualitas pengelolaan e- government, reformasi birokrasi dan pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik	Tersedianya pengelolaan e- government, reformasi birokrasi dan pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik yang lebih terencana, tertata, efektif dan efisien	Kualitas pengelolaan e- government, reformasi birokrasi dan pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik yang lebih terencana, tertata, efektif dan efisien secara mantap
	1 portal sistem informasi terintegrasi	1 portal sistem informasi terintegrasi
	Tersedianya 1 unit layanan pengadaan secara elektronik	Mantapnya layanan pengadaan secara elektronik
	Persiapan pelaksanaan sistem e- reporting untuk monev	Beroperasinya sistem e-reporting untuk monev
Misi 4 : Mempertahankan Dinamika Perkehidupan Dalam Pembangunan		
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di dalam koridor semangat kemajuan bersama secara mantap
Jumlah Kader Perencanaan Pembangunan	150 orang	312 orang
Keberadaan Forum Komunikasi Kader Perencanaan Pembangunan	0	1 Forum
Misi 5 : Mewujudkan Kesalehan Sosial Dalam Masyarakat Yang Berakhlak Mulia		
Peningkatan kemandirian, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Terpeliharanya kemandirian, ketentraman, dan ketertiban di dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan unsur heterogenitas dan aspek kebaikan bagi bersama	Terpeliharanya kemandirian, ketentraman, dan ketertiban di dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan unsur heterogenitas dan aspek kebaikan bagi bersama secara mantap

INDIKATOR	KONDISI AWAL 2012	TARGET 2017
Misi 6 : Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan		
Tingkat kemantapan jalan dan jembatan	92,77%	95%
Menurunnya area genangan.	100%	24%
cakupan layanan air bersih	62,49%	69,7%
Cakupan layanan kebutuhan pengelolaan air limbah masyarakat	64,65%	65,54%
area permukiman kumuh	4,02%	1,54 %
Penataan ruang yang komprehensif, integratif dan informatif	cukup	Baik
sistem transportasi yang aman, efektif, efisien dan integratif melalui penyelenggaraan manajemen, penyediaan sarana prasarana dan sumberdaya manusia di bidang transportasi yang handal	cukup	Baik
Cakupan layanan persampahan	65%	80%
luasan RTH publik	18,31%	18,4%
Pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup	cukup	Baik
Informasi Lingkungan Hidup	90,4%	94,3%
Upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan lahan	22,3%	34.80%

Penetapan indikator kinerja daerah juga dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Target capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk periode 2012 – 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 9.6
Target Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI AWAL RPJMD 2012-2017	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR RPJMD 2012-2017
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pertumbuhan PDRB	5,56 ^{*)}	5,50 - 5,75	5,50 - 5,75	5,50 - 5,75	5,75 - 6,00	5,75 - 6,00	5,75 - 6,00
1.2.	Laju inflasi	4,02	4,2	5,19	6,42	7,93	7,93	7,93
1.3.	PDRB per kapita (Rp. Ribu)	12.822.99 ^{**)}	13.208 - 13.272	13.604 - 13.670	14.012 - 14.080	14.502 - 14.573	15.010 - 15.083	15.010 - 15.083
1.4.	Indeks Gini	0,341	0,337	0,334	0,33	0,327	0,324	0,324
1.5.	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	0,152	0,152	0,151	0,15	0,15	0,149	0,149

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL RPJMD 2012-2017	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR RPJMD 2012-2017
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.6.	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	38.1818	38.1511	38.1204	38.0898	38.0592	38.0286	38.03
1.7.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	92.85	92.90 - 95	92.90 - 95	92.90 - 95	93 - 95.10	93 - 95.10	93 - 95.10
1.8.	Jumlah kriminalitas yang terjadi	94 kasus	-2%	-5%	-7%	-9%	-13%	-13%
Fokus Kesejahteraan Sosial								
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka melek huruf	99.8 ^{*)}	99.80 - 99.83	99.80 - 99.83	99.80 - 99.83	99.83 - 99.86	99.83 - 99.86	99.83 - 99.86
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	10.73 ^{*)}	10.73 - 11.10	10.73 - 11.10	10.73 - 11.10	11.10 - 11.47	11.10 - 11.47	11.10 - 11.47
1.3.	Angka Partisipasi Kasar (APK)							
1.3.1.	APK SD/MI	101.44%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1.3.2.	APK SMP/MTs	96.76%	88.00%	89.00%	90.00%	91.00%	92.00%	92.00%
1.3.3.	APK SMA/SMK/MA	85.03%	83.00%	85.00%	88.00%	90.00%	90.00%	90.00%
1.4.	Angka Pendidikan yang diTamatkan (APT)							
1.4.1	< SD	8.09	8	7.9	7.8	7.7	7.6	7.6
1.4.2	SD / Sederajat	16.88	16.8	16.78	16.76	16.74	16.72	16.72
1.4.3	SLTP / Sederajat	18.87	19	19.04	19.06	19.1	19.14	19.14
1.4.4	SLTA / Sederajat	26.88	27	27.04	27.08	27.12	27.16	27.16
1.4.5	D1 /D2 / D3	4.18	4.2	4.24	4.28	4.32	4.36	4.36
1.4.6	≥ S1	6.52	6.55	6.58	6.62	6.66	6.7	6.7
1.5.	Angka Partisipasi Murni							
1.5.1.	APM SD/MI	92.47%	93.00%	94.00%	95.00%	96.00%	97.00%	97.00%
1.5.2.	APM SMP/MTs	73.80%	70.00%	71.00%	72.00%	73.00%	74.00%	74.00%
1.5.3.	APM SMA/SMK/MA	56.01%	60.00%	62.00%	65.00%	68.00%	70.00%	70.00%
2.	Kesehatan							
2.1.	Angka Kematian Bayi	29,80 ^{**)}	29.70 - 29.30	29.70 - 29.30	29.70 - 29.30	29.30 - 29.00	29.30 - 29.00	29.30 - 29.00
2.2.	Angka usia harapan hidup	69.25 ^{*)}	69.25 - 69.65	69.25 - 69.65	69.25 - 69.65	69.65 - 70.05	69.65 - 70.05	69.65 - 70.05
2.3.	Persentase balita gizi buruk	0.14%	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %
3.	Pertanahan							
3.1.	Aset tanah yang tersertifikasi	137 bidang	> 137 bdg	> 137 bdg	> 137 bdg	> 137 bdg	259 bidang	259 bidang
3.2.	Aset tanah yang belum tersertifikasi	122 bidang	< 122 bdg	< 122 bdg	< 122 bdg	< 122 bdg	0	0
4.	Ketenagakerjaan							
4.1.	Rasio penduduk yang bekerja	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.5	0.5
Fokus Seni Budaya dan Olahraga								
1.	Kebudayaan							
1.1.	Jumlah grup kesenian	283	283	283	283	283	283	283
1.2.	Jumlah organisasi kesenian	69	69	69	69	69	69	69

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI AWAL RPJMD 2012-2017	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR RPJMD 2012-2017
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fokus Seni Budaya dan Olahraga								
2.	Pemuda dan Olahraga							
2.1.	Jumlah klub olahraga	29	29	29	29	29	29	29
2.2.	Jumlah gedung olahraga	11	11	11	11	11	11	11
2.3.	Jumlah Stadion	4	4	4	4	4	4	4
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus Layanan Urusan Wajib								
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan dasar:							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	95,75%	95.8%- 98%	98%-99%	99%-100%	99%-100%	99%-100%	99%-100%
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382
1.1.3.	Rasio guru : murid SD/MI	01:23	01:23	01:23	01:23	01:23	01:23	01:23
1.1.4.	Rasio guru : murid SMP/MTs	01:15	01:15	01:15	01:15	01:15	01:15	01:15
1.1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	01:30	01:32	01:32	01:32	01:32	01:32	01:32
1.1.5.	Fasilitas Pendidikan Dasar:							
a.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b.	Ruang Kelas SD/MI layak pakai	95,49%	96,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%	100,00%
c.	Rasio Ruang Kelas : Rombel SD/MI	01:02	01:01,8	01:01,7	01:01,5	01:01,5	01:01,5	01:01,5
d.	Sekolah pendidikan SMP/MTs layak pakai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
e.	Ruang Kelas SMP/MTs layak pakai	93,55%	99,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	Rasio Ruang Kelas : Rombel SMP/MTs	01:01,3	01:01,2	01:01,1	01:01	01:01	01:01	01:01
1.2.	Pendidikan menengah:							
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	68.69 ^{*)}	68.69 -73	68.69 -73	68.69 -73	73 - 78.31	73 - 78.31	73 - 78.31
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	0,484	0,546	0,599	0,603	0,603	0,575	0,575
1.2.2.	Rasio guru terhadap murid	01:14	01:15	01:15	01:15	01:15	01:15	01:15
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	01:34	01:34	01:33	01:32	01:32	01:32	01:32
1.2.4.	Fasilitas Pendidikan Menengah:							
a.	Ruang Kelas SMA/SMK/MA layak pakai	99,02%	99,33%	99,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
b.	Rasio Ruang Kelas : Rombel SMA/SMK/MA	1 : 1,13	1 : 1,1	1 : 1,07	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
1.3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,74	99,64-99,74	99,65-99,75	99,66-99,76	99,67-99,77	99,68-99,78	99,68-99,78
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):							
1.4.1.	Angka partisipasi kasar (APK)	57,00%	60,00%	63,00%	66,00%	69,00%	75,00%	75,00%

1	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI AWAL RPJMD 2012-2017	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR RPJMD 2012-2017
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.	Angka Putus Sekolah (APTs)							
1.5.1.	APTs SD/MI	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.5.2.	APTs SMP/MTs	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.5.3.	APTs SMA/SMK/MA	0,91%	0,24%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.6.	Angka Kelulusan (AL):							
1.6.1.	AL SD/MI	99,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.6.2.	AL SMP/MTs	89,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.6.3.	AL SMA/SMK/MA	93,57%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.7.	Angka Melanjutkan (AM)							
1.7.1.	AM dari SD/MI ke SMP/MTs	84%	90%	95%	100%	100%	100%	100,00%
1.7.2.	AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	120%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1.8.	Kualitas Guru							
1.8.1.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV							
a.	SD/MI	76,00%	76,00%	77,00%	78,00%	79,00%	80,00%	80,00%
b.	SMP/MTs	89,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%	95,00%	95,00%
c.	SMA/MA/SMK	95,74%	96,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%	100,00%
2.	Kesehatan							0
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	118	117	117	116	115	115	115
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	01:46,3	01:46,3	01:45,0	01:45,0	01:45,0	01:45,0	01:45,0
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
2.5.	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	81,77%	70%	75%	80%	81%	82%	82%
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	88,64%	88%	89%	90%	90,25%	90,50%	90,50%
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	68,32%	75%	80%	80%	80%	80%	80%
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI AWAL RPJMD 2012-2017	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR RPJMD 2012-2017
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13.	Cakupan kunjungan bayi	84,74%	93,00%	94,00%	95,00%	96,00%	97,00%	97,00%
2.14.	Cakupan puskesmas	86,67%	86,67%	86,67%	86,67%	86,67%	86,67%	86,67%
2.15.	Cakupan pembantu puskesmas	46,67%	46,67%	46,67%	46,67%	46,67%	46,67%	46,67%
3.	Pekerjaan Umum							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	70,24%	74,24%	78,74%	82,74%	86,74%	86,74%	86,74%
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	0.021 km/ha	0.022 km/ha	0.023 km/ha	0.024 km/ha	0.026 km/ha	0.027 km/ha	0.027 km/ha
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1,66	1,66	1,68	1,68	1,7	1,7	1,7
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	64,65%	65,78%	65,85%	65,03%	65,28%	65,54%	65,54%
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 1.000 jumlah penduduk)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	51	55	57	59	61	63	63
3.7.	Rasio rumah layak huni	96,40%	96,60%	96,80%	97,00%	97,10%	97,30%	97,30%
3.8.	Rasio permukiman layak huni	95,98%	96,47%	96,97%	97,47%	97,96%	98,46%	98,46%
3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4 (Jalan Nasional, Provinsi dan kota)	141.136 km	141.156 km	141.156 km	150.156 km	150.156 km	150.156 km	150.156 km
3.10.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	88.621	88.621	88.621	88.621	88.621	88.621	88.621
3.11.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	127.456 km	127.456 km	127.456 km	127.456 km	127.456 km	127.456 km	127.456 km
3.12.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	26.586	26.586	26.586	26.586	26.586	26.586	26.586
3.13.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	8.862	8.862	8.862	8.862	8.862	8.862	8.862
3.15.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	302.076	323.222	345.848	370.057	395.961	423.678	423.678
3.16.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	2.560 m	2.560 m	2.560 m	2.560 m	2.560 m	2.560 m	2.560 m
4.	Perumahan							
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	70.615	72.565	75.415	78.115	81.665	87.215	87.215
4.2.	Rumah tangga pengguna listrik	99,79%	99-100%	99-100%	99-100%	99-100%	99-100%	99-100%
4.3.	Rumah tangga ber- Sanitasi	73.057	75.861	77.509	78.115	80.039	82.003	82.003
4.4.	Lingkungan pemukiman kumuh	142 ha	122 ha	102ha	82ha	62ha	42ha	42ha
4.5.	Rumah layak huni	105.063	105.248	105.433	105.618	105.433	105.248	105.248

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI AWAL RPJMD 2012-2017	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR RPJMD 2012-2017
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Penataan Ruang							
5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	18,31%	18,32%	18,33%	18,35%	18,38%	18,40%	18,40%
5.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	60,93%	61,62%	62,31%	63,02%	63,73%	64,45%	64,45%
6.	Perencanaan Pembangunan							
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Perhubungan							
7.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7.4.	Jumlah Terminal	3	3	3	4	4	4	4
7.5.	Angkutan darat	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2011
7.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8400
7.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan
7.8.	Pemasangan Rambu-rambu	N/A	126	252	378	504	504	504
8.	Lingkungan Hidup							
8.1.	Persentase penanganan sampah	67,00%	70,00%	73,00%	75,00%	78,00%	80,00%	80,00%
8.2.	Persentase Penduduk berakses air minum	63,73%	65,57%	67,77%	69,97%	72,17%	74,37%	74,37%
8.3.	Persentase Luas pemukiman yang tertata	96,47	96,97	97,47	97,96	98,46	98,96	98,96
8.4.	Pencemaran status mutu air	82,91%	82,95%	83,00%	83,50%	84,00%	84,50%	84,50%
8.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	N/A	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8.7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	51	55	57	59	61	63	63
8.8.	Penegakan hukum lingkungan	N/A	-	1	1	1	1	1
9.	Pertanahan							0
9.1.	persentase bidang lahan milik pemerintah yang bersertifikat	52,90%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
9.2.	Jumlah penyelesaian sengketa pertanahan	N/A	10	10	10	10	10	10

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL RPJMD 2012-2017	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR RPJMD 2012-2017
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus Layanan Urusan Wajib								
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil							
10.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	772	780	790	800	810	820	820
10.2.	Rasio balita berakte kelahiran	730	740	750	760	770	780	780
10.3.	Kepemilikan KTP	51.77%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	75.00%
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
11.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	58.89%	58.00%	58.00%	56.00%	56.00%	56.00%	56.00%
11.2.	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
11.3.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	14.19%	14.16%	14.13%	14.10%	14.07%	14.04%	14.04%
11.4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	40.00%	41.00%	41.00%	42.00%	42.00%	43.00%	43.00%
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
12.1.	Cakupan peserta KB aktif	80.69%	81.00%	81.50%	82.00%	82.50%	83.00%	83.00%
12.2.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	44.92%	44.88%	44.84%	44.80%	44.76%	44.72%	44.72%
13.	Sosial							
13.1.	Pemberdayaan PSKS	36 PSKS	36 PSKS	36 PSKS	36 PSKS	36 PSKS	36 PSKS	36 PSKS
13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	60 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
14.	Ketenagakerjaan							
14.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	60.66	60.36	60.06	59.76	59.46	59.16	59.16
14.2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	63,46 ^{**})	63.46 - 66.32	63.46 - 66.32	63.46 - 66.32	66.32 - 68.49	66.32 - 68.49	66.32 - 68.49
14.4.	Tingkat pengangguran terbuka	10,3 ^{***})	10.30 - 9.0	10.30 - 9.0	10.30 - 9.0	9.0 - 8.0	9.0 - 8.0	9.0 - 8.0
14.5.	Cakupan Fasilitas Keselamatan dan perlindungan kerja	70.00%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
15.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
15.1.	Persentase koperasi aktif	44.49%	47.00%	51.00%	57.00%	59.00%	62.00%	62.00%
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	1,350	1,418	1,488	1,563	1,641	1,723	1,723
15.3.	Jumlah BPR/LKM	8	8	9	9	10	11	11
15.4.	Usaha Mikro dan Kecil	4,500	3.00%	3.10%	3.20%	4.00%	4.00%	4.00%
16.	Penanaman Modal							
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	34	33	33	32	31	31	31
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1,657,687	1,823,456	2,005,801	2,206,381	2,427,020	2,669,721	2,669,721
16.3.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	10%	10%	11%	11%	12%	12%	12%

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL RPJMD 2012-2017	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR RPJMD 2012-2017
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus Layanan Urusan Wajib								
17.	Kebudayaan							
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	3	3	4	4	5	5
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1	1	1	1	1	2	2
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	26	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18.	Kepemudaan dan Olahraga							
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	44	44	44	44	44	44	44
18.2.	Jumlah organisasi / klub olahraga	74	74	74	74	74	74	74
18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	8	8	8	9	9	9	9
18.4.	Jumlah kegiatan olahraga	4	4	4	5	5	5	5
18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	49	49	50	50	50	50	50
18.6.	Lapangan olahraga	10	10	10	10	10	10	10
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							0
19.1.	Tingkat partisipasi pemilih	70% (pilkada cimahi)	65% - 70%	70%-75%			70%-75%	70%-75%
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							0
20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	16.21	16.21	16.21	16.21	16.21	16.21	16.21
20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	41	41	41	41	41	41	41
20.4.	Pertumbuhan ekonomi	5,56 ^{*)}	5,50 - 5,75	5,50 - 5,75	5,50 - 5,75	5,75 - 6,00	5,75 - 6,00	5,75 - 6,00
20.5.	Kemiskinan	7.15 ^{*)}	7.10 - 5.00	7.10 - 5.00	7.10 - 5.00	7.00 - 4.90	7.00 - 4.90	7.00 - 4.90
20.10.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Cimahi	865	865	865	865	865	865	865
20.13.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan / kelurahan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
21.	Ketahanan Pangan							0
21.1.	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
21.2.	Ketersediaan pangan utama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
22.1.	Rasio KK Binaan / Kader Binaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22.5.	PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22.6.	Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23.	Statistik							
23.1.	Buku "kota dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.2.	Buku "PDRB Kota"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

1	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI AWAL RPJMD 2012-2017	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR RPJMD 2012-2017
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Kearsipan							
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku	13 SKPD, 10 Bagian Setda dan 1 KPU	23 SKPD, 10 Bagian Setda dan 1 KPU	36 SKPD, 10 bagian Setda dan 1 KPU	40 SKPD, 10 bagian Setda, dan 1 KPU	Manajemen arsip statis	Manajemen arsip statis	Manajemen arsip statis
24.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3 pengelola arsip	23 SKPD,10 Bagian Setda dan 1 KPU memiliki pengelola arsip	36 SKPD,10 Bagian Setda dan 1 KPU memiliki pengelola arsip	40 SKPD,10 Bagian Setda dan 1 KPU memiliki pengelola arsip	SKPD memiliki tenaga fungsional arsiparis	SKPD memiliki tenaga fungsional arsiparis	SKPD memiliki tenaga fungsional arsiparis
25.	Komunikasi dan Informatika							
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi	7 jaringan komunikasi	9 jaringan komunikasi	10 jaringan komunikasi	10 jaringan komunikasi	10 jaringan komunikasi	11 jaringan komunikasi	11 jaringan komunikasi
25.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
25.3.	Web site milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
26.	Perpustakaan							
26.1.	Jumlah perpustakaan	18	23	28	33	38	38	38
26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.500	1.800	2.100	2.400	2.700	2.700	2700
26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	10.674	12.674	14.674	16.674	18.674	18.674	18674
Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1.	Pertanian							
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	6,52	6,85	7,19	7,55	7,93	8,32	8,32
1.2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
1.3.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
1.4.	Cakupan bina kelompok petani	35	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Perdagangan dan Pariwisata							
4.1.	Kunjungan wisata	7589	7968	8446	9038	9761	10639	10.639
4.2.	Kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata terhadap PDRB (%)	1,53	1,57	1,61	1,65	1,69	1,74	1,74
4.3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	2.520	5%	5%	5%	6%	7%	7%
5.	Kelautan dan Perikanan							
5.1.	Produksi perikanan	N/A	0,43%	0,43%	0,42%	0,42%	0,41%	0,41%
5.2.	Konsumsi ikan	2%	2,21%	2,32%	2,43%	2,55%	2,68%	2,68%
5.3.	Cakupan bina kelompok ikan air tawar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Perindustrian							
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	58,43	58,02	57,61	57,2	56,79	56,39	56,39
7.2.	Pertumbuhan Industri.	4,53%	4,43%	3,74%	3,76%	4,15%	3,97%	3,97%
7.3.	Cakupan bina kelompok pengrajin	30%	33%	36,30%	39,93%	43,92%	48,32%	48,32%
8.	Ketransmigrasian							
8.1.	Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI AWAL RPJMD 2012-2017	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR RPJMD 2012-2017
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	659.277,20	689.274,30	727.529,00	775.182,20	829.444,90	895.800,50	895.800,50
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	1.877.631,80	1.963.064,00	2.072.014,10	2.207.731,00	2.374.414,70	2.577.427,20	2.577.427,20
1.3.	Produktivitas total daerah	5,6	5,6	5,7	5,7	5,7	19,1	19,1
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1.	Perhubungan							
1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	70,24%	74,24%	78,74%	82,74%	86,74%	86,74%	86,74%
1.2.	Panjang jalan dilalui Roda 4 (Jalan Nasional, Provinsi dan kota)	141.136 km	141.156 km	141.156 km	150.156 km	150.156 km	150.156 km	150.156 km
2.	Penataan Ruang							
2.3.	Luas wilayah industri	504,25 ha	504,25 ha	504,25 ha	504,25 ha	504,25 ha	504,25 ha	504,25 ha
2.6.	Luas wilayah perkotaan	4.025,75 ha	4.025,75 ha	4.025,75 ha	4.025,75 ha	4.025,75 ha	4.025,75 ha	4.025,75 ha
3.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang	11	12	12	13	13	15	15
3.2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	6	7	7	8	9	10	10
3.4.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	3	3	5	6	7	8	8
4.	Lingkungan Hidup							
4.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	62,49%	62,92%	64,07%	65,03%	66,61%	69,70%	69,70%
5.	Komunikasi dan Informatika							
5.1.	Rasio ketersediaan daya listrik	97,37%	97,5%-98%	97,5%-98%	97,5%-98%	98%-98,5%	98%-98,5%	98%-98,5%
5.2.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	99,79%	99-100%	99-100%	99-100%	99-100%	99-100%	99-100%
5.3.	Cakupan Layanan Telepon	74,55%	75%-80%	80%-90%	80%-90%	80%-90%	80%-90%	80%-90%

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI AWAL RPJMD 2012-2017	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR RPJMD 2012-2017
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fokus Iklim Berinvestasi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Jumlah kriminalitas yang terjadi	94 kasus	-2%	-5%	-7%	-9%	-13%	-13%
1.2.	Jumlah unjuk rasa	93 kali unjuk rasa	40 kali unjuk rasa	40 kali unjuk rasa	40 kali unjuk rasa	40 kali unjuk rasa	40 kali unjuk rasa	40 kali unjuk rasa
1.3.	Lama proses perijinan	3-14 hari	3-14 hari	3-14 hari	3-14 hari	3-14 hari	3-14 hari	3-14 hari
1.4.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	3 retribusi	3 retribusi	3 retribusi	3 retribusi	3 retribusi	3 retribusi	3 retribusi
1.5.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	19 Perda	19 Perda	20 Perda	20 Perda	20 Perda	20 Perda	20 Perda
Fokus Sumber Daya Manusia								
1.	Ketenagakerjaan							
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3	12,49%	13,12%	13,77%	14,46%	15,19%	15,94%	15,94%
1.2.	Rasio ketergantungan	43,91	42,98	42,05	41,12	40,19	39,28	39,28

Keterangan Data Capaian Tahun 2012
*) Angka Sementara BPS
**)Angka Sangat Sementara Olahan Bappeda
***)Data Dinas Kesehatan

BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN
KAIDAH PELAKSANAAN

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025, memuat visi, misi dan arah pembangunan Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025, yang dijabarkan ke dalam visi dan misi Walikota terpilih dan akan dijadikan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam penyusunan RKPD Kota Cimahi.

10.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 dan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Rancangan APBD tahun pertama pada masa kepemimpinan Walikota terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah pada periode berikutnya (Tahun 2017 – 2022). Hal ini dimaksudkan agar terjadi kesinambungan pembangunan dan adanya dasar hukum dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan atau RKPD setelah berakhirnya periode RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017. Selain itu, pedoman masa transisi ini bertujuan untuk menjadi dasar dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum tertangani hingga akhir periode RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 dan untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang akan dihadapi, pada tahun pertama masa pemerintahan baru (2018).

RKPD Tahun 2018 merupakan RKPD transisi dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kota Cimahi 2017 – 2022. Penyusunan RKPD tersebut harus memperhatikan target capaian Tahun 2017 seperti yang tercantum dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 10.1
Pencapaian dan Target Sasaran Pembangunan
Kota Cimahi Tahun 2007 – 2012

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2012	KONDISI AKHIR 2017
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76.12 ^{*)}	76.70 - 77.38
2	Indeks Pendidikan	90.38 ^{*)}	90.65 - 90.92
	Angka Melek Huruf (%)	99.8 ^{*)}	99.83 - 99.86
	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10.73 ^{*)}	11.10 - 11.47
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)		
	Usia 7-12 tahun	99.64 ^{*)}	99,8-100
	Usia 13-15 tahun	92.97 ^{*)}	95 - 98
	USia 16-18 tahun	68.69 ^{*)}	73 - 78.31
4	Indeks Kesehatan	73.75 ^{*)}	74.25 - 74.75
	Angka Harapan Hidup (tahun)	69.25 ^{*)}	69.65 - 70.05
5	Angka Kematian Ibu/ 100.000 KH	84,65 ^{***)}	84.45 - 84.25
6	Angka Kematian bayi/ 1.000 KH	29,80 ^{**)}	29.30 - 29.00
7	Indeks Daya Beli	64.24 ^{*)}	65.28 - 66.59
	Daya Beli (Rp. Ribu)	638 ^{*)}	648 - 654
8	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2.29 ^{*)}	2.24 - 1.65
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	63,46 ^{**)}	66.32 - 68.49
10	Pengangguran Terbuka (%)	10,3 ^{**)}	9.0 - 8.0
11	Angka Kemiskinan (%)	7.15 ^{*)}	7.00 - 4.90
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,56 ^{*)}	5,75 - 6,00
13	PDRB :		
	- Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rp)	7.253.26 ^{**)}	9.524 - 9.547
	- Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp)	15.727.21 ^{**)}	27.465 - 27.951
14	PDRB Per Kapita		
	- Atas Dasar Harga Konstan (Ribu Rp)	12.822.99 ^{**)}	15.010 - 15.083
	- Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rp)	27.614.49 ^{**)}	40.385 - 40.757

Keterangan Data Capaian Tahun 2012
*) Angka Sementara BPS
**)Angka Sangat Sementara Olahan Bappeda
***)Data Dinas Kesehatan

10.2. Prinsip-Prinsip Kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan, yang dimaksudkan untuk memperjelas pelaksanaan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017, sebagai berikut:

- a. Agar terjadi sinergitas dalam penyusunan rencana pembangunan dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Cimahi, maka Renstra SKPD harus mengacu pada RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017, serta sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD mulai Tahun 2012 – 2017.

- b. Pemerintah Kota Cimahi, DPRD, dan para pemangku kepentingan serta masyarakat Kota Cimahi, berkewajiban untuk melaksanakan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017, sehingga berbagai target yang telah ditetapkan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan dapat tercapai.
- c. Walikota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama periode kepemimpinan Tahun 2012 – 2017, berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah yang ada.
- d. Untuk menjaga agar target capaian yang telah ditetapkan dapat tercapai dalam setiap tahunnya, maka diperlukan adanya monitoring / pengendalian dan evaluasi setiap tahunnya terhadap pelaksanaan berbagai program yang ada dalam RPJMD Kota Cimahi 2012 – 2017. Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan sesuai dengan Tahapan dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdapat dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
- e. Berbagai program yang tercantum dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi. Namun demikian, dalam proses pelaksanaan pembangunan Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 tidak tertutup kemungkinan melaksanakan program yang nomenklturnya belum terdapat dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 selama program tersebut sejalan dengan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025, dan secara *esensi* sejalan dengan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017, serta merupakan amanat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dari Pemerintah Pusat.



BAB XI PENUTUP

BAB XI PENUTUP

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 merupakan suatu dokumen yang berisi kerangka kebijakan perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang sekaligus merupakan penjabaran dari visi dan misi serta program dari Walikota dan Wakil Walikota, yang berpedoman kepada RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 dan RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032.

Menurut skalanya, RPJMD merupakan perencanaan tingkat *meso* (menengah) daerah yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama (seluruh *stakeholders* pembangunan daerah) dalam rangka melaksanakan pembangunan. RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Cimahi selama periode Tahun 2012 – 2017, serta menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD yang disusun setiap 5 (lima) tahun, serta pedoman dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD yang disusun setiap tahun untuk mewujudkan Visi Kota Cimahi : *Menuju Cimahi “CERDAS”*. Selanjutnya dokumen RPJMD ini merupakan pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Cimahi.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJMD, sangat tergantung dari seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Kota Cimahi beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Apabila dalam periode pelaksanaan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 terjadi kondisi dan peristiwa yang berada di luar kendali Pemerintah Kota Cimahi, maka konsepsi strategi yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan dengan DPRD Kota Cimahi untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

WALIKOTA CIMAHI

ttd

ATTY SUHARTI